



PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2025 - 2029





BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
4. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat Daerah.
9. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.



Pasal 2

RPJMD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 3

- (1) RPJMD tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
 - c. bab III yang memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV yang program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V yang memuat penutup.
- (2) Uraian RPJMD tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam/nonalam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 

- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan rencana strategis perangkat Daerah.

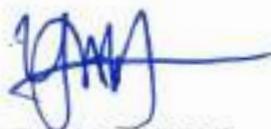
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal **29 Agustus 2025**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



→ YUSRA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak
pada tanggal **29 Agustus 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

→  ABDULLAH MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN **2025**
NOMOR **3**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Bupati terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR ...

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Dasar Hukum.....	1-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen Rancangan Awal RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	1-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	1-10
1.5 Sistematika Dokumen.....	1-10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Demografi.....	II-52
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-64
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-98
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum.....	II-135
2.1.6 Standar Pelayanan Minimal.....	II-157
2.1.7 Kerjasama Daerah.....	II-160
2.1.8 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II-161
2.1.9 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Daerah.....	II-162
2.2 Gambaran Keuangan Daerah.....	II-163
2.2.1 Kinerja Pendapatan Daerah.....	II-167
2.2.2 Kinerja Belanja Daerah.....	II-171
2.2.3 Kinerja Pembiayaan Daerah.....	II-173
2.2.4 Neraca Daerah.....	II-173
2.2.5 Target Proyeksi Keuangan Daerah.....	II-174
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-177
2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis Global.....	II-177
2.3.2 Permasalahan dan Isu Strategis Nasional.....	II-178
2.3.3 Permasalahan dan Isu Strategis Regional Sulawesi.....	II-180
2.3.4 Permasalahan dan Isu Strategis RPJPD Kab. Bolaang Mongondow.....	II-181
2.3.5 Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II-182
2.3.6 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2025-2029.....	II-183

BAB III	VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III -1
	3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III -1
	3.2 Tujuan dan Sasaran	III -4
	3.3 Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah	III -10
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	IV -1
	4.1 Rencana Program Perangkat Daerah	IV -1
	4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	IV -68
	4.3 Indikator Kinerja Daerah	IV -81
	4.4 Indikator Makro	IV -108
BAB V	PENUTUP.....	V -1
	5.1 Pedoman Transisi	V -1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	V -1

DAFTAR TABEL

2.1.	Kecamatan dan Luas Wilayah.....	II – 3
2.2.	Tinggi wilayah dan jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 6
2.3.	Jumlah Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024	II – 8
2.4.	Luas Areal Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024	II – 12
2.5.	Luas Kawasan Hutan Tahun 2019-2024	II – 13
2.6.	Peningkatan Hasil Produksi (Ton)	II – 21
2.7.	Data Konsumsi Ikan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	II – 21
2.8.	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021 – 2024.....	II – 22
2.9.	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Tahun 2021-2024.....	II – 22
2.10.	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air.....	II – 24
2.11.	Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Pangan.....	II – 26
2.12.	Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pangan	II – 28
2.13.	Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Air.....	II – 30
2.14.	Potensi Sumber Air Bersih Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 36
2.15.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.....	II – 37
2.16.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2024.....	II – 38
2.17.	Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2024.....	II – 39
2.18.	Data Mengenai Penggunaan Air Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2024.....	II – 39
2.19.	Luas Lahan Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2024.....	II – 40
2.20.	Capaian Produksi Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2022 – 2024.....	II – 40
2.21.	Rasio Pangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2020 – 2024 .	II – 41
2.22.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2020 – 2024	II – 41
2.23.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020 – 2024	II – 42

2.24.	Desa/Kecamatan Penerima Bantuan Pembangunan dan Pengisian Lumbung Pangan Desa Tahun 2021 – 2024	II – 42
2.25.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	II – 44
2.26.	Kecamatan dan Desa Rawan Pangan Tahun 2024	II – 45
2.27.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow.....	II – 46
2.28.	Persentase Sampah yang Ditangani di TPA.....	II – 46
2.29.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 48
2.30.	Proyeksi kebutuhan fasilitas TPS.....	II – 48
2.31.	Indeks Resiko bencana Kabupaten Bolaang Mongondow	II – 52
2.32.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021-2024	II – 53
2.33.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2020 – 2024	II – 54
2.34.	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024.....	II – 54
2.35.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	II – 55
2.36.	Kepadatan Penduduk Perkecamatan Tahun 2024	II – 56
2.37.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.....	II – 57
2.38.	Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023 – 2024	II – 58
2.39.	Peserta Akseptor KB Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 – 2024	II – 58
2.40.	Peserta KB Aktif Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 59
2.41.	Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun kedepan Kab. Bolmong.....	II – 60
2.42.	Kelompok Seni Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	II – 62
2.43.	Cagar Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow	II – 62
2.44.	Kelompok Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow	II – 63
2.45.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 65
2.46.	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow	II – 70
2.47.	Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2024.....	II – 71

2.48.	Indeks Pembangunan Manusia Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.....	II – 72
2.49.	Indeks Pembangunan Manusia Dengan Beserta Komponen-Komponen Pembentuknya di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 – 2024	II - 72
2.50.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Sulawesi Utara 2021-2024.....	II - 73
2.51.	Usia harapan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024	II – 74
2.52.	Rasio Perbandingan Jumlah Puskesmas Per Penduduk Kab. Bolaang Mongondow.....	II – 75
2.53.	Rasio Perbandingan Rumah Sakit per Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 -2024.....	II – 75
2.54.	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.....	II – 76
2.55.	Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	II – 77
2.56.	Penggunaan Tempat Tidur RSUD Tahun 2020-2024	II – 79
2.57.	Angka Perputaran Tempat Tidur RSUD Tahun 2020-2024	II – 79
2.58.	Rasio Angka Kematian di RSUD Datoe Binangkang Tahun 2020-2024.....	II - 79
2.59.	Jenis dan Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.....	II – 80
2.60.	Distribusi Puskesmas menurut Jenis dan Wilayah Puskesmas di Kab. Bolaang Mongondow.....	II – 81
2.61.	Jumlah Ibu Hamil, melakukankunjungan K1, K4, KEK dan mendapat FE di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2024 ..	II – 81
2.62.	Jumlah Bayi lahir, Bayi Berat Badan Rendah dan Bergizi Buruk Tahun 2019-2024.....	II – 82
2.63.	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2024.....	II – 82
2.64.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2019-2024.....	II – 83
2.65.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2024.....	II - 83
2.66.	Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pendukung	

	Penanganan Stunting Kabupaten Bolaang Mongondow	II - 84
2.67.	Jumlah Anak Stunting dan Prevalensi Stunting Berdasarkan Wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.....	II - 84
2.68.	Indikator dan Target Penanganan Stunting	II - 85
2.69.	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2024.....	II - 88
2.70.	Angka Melek Huruf/Aksara menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 - 2024	II - 89
2.71.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Ijazah/STTB tertinggi yang Dimiliki) 2020-2024.....	II - 89
2.72.	Angka Literasi/Numerasi Menurut kelompok Usia Tertentu Tahun 2020-2024.....	II - 90
2.73.	Angka Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024	II - 92
2.74.	Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu menurut jenis pekerjaan utama di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024	II - 94
2.75.	Jumlah Pencari Kerja terdaftar di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 - 2024	II - 95
2.76.	Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	II - 96
2.77.	Indeks Pembangunan Gender Propinsi Sulut dan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2024	II - 97
2.78.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II - 97
2.79.	Indeks Perlindungan Anak di Kab. Bolaang Mongondow tahun 2020-2024.....	II - 98
2.80.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.....	II - 100
2.81.	Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Bolaang Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2020-2024.....	II - 102
2.82.	Kawasan Unggulan Pariwisata Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow	II - 103
2.83.	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di Kabupaten Bolaang	

	Mongondow	II – 103
2.84.	Kawasan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow	II – 104
2.85.	Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.....	II – 106
2.86.	Angka Kunjungan wisata dan Penggunaan kamar Hotel/Penginapan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.....	II – 106
2.87.	Produktivitas Ekonomi di Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2021-2024.....	II – 107
2.88.	Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024	II – 108
2.89.	Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2020-2024	II – 112
2.90.	Banyaknya Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024	II – 113
2.91.	Banyaknya Usaha menurut Kategori di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024	II – 113
2.92.	Jumlah Koperasi menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2024	II – 114
2.93.	Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2020-2024	II – 115
2.94.	Jumlah UMKM Perkecamatan Tahun 2024	II – 115
2.95.	Indeks Infrastruktur Kab. Bolaang Mongondow.....	II – 116
2.96.	Panjang jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2024.....	II – 117
2.97.	Panjang jalan menurut jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2024.....	II – 118
2.98.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2024	II – 119
2.99.	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi jalan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.....	II – 120
2.100.	Sarana dan Prasarana Terminal	II – 121
2.101.	Data Kendaraan yang di Uji pada bulan Januari-Desember 2024.....	II – 122
2.102.	Data Operasional Pelabuhan Labuan Uki Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Uki Tahun 2024	II – 123
2.103.	Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan)....	II – 124
2.104.	Data Kendaraan darat yang terdaftar di Kabupaten Bolaang	

Mongondow.....	II – 125
2.105. Lokasi Wilayah Kawasan Kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow ..	II – 129
2.106. Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2024.....	II – 131
2.107. Persentase Indeks Desa tahun 2020-2024.....	II – 132
2.108. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow 2021-2024.....	II – 135
2.109. Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Kab. Bolaang mongondow	II – 136
2.110. Data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Kab. Bolaang Mongondow.....	II – 136
2.111. Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bolmong Tahun 2020-2024.....	II – 137
2.112. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2024.....	II – 138
2.113. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2024	II – 138
2.114. Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 139
2.115. Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Bolmong Tahun 2020-2024.....	II – 140
2.116. Jumlah Perda dan Perbub yang diterbitkan Tahun 2019-2024.....	II – 141
2.117. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab Bolmong Tahun 2020-2024	II – 145
2.118. Realisasi APBD Tahun 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow ...	II – 165
2.119. Perkembangan Pajak Daerah dan Komponennya 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 167
2.120. Perkembangan Retribusi Daerah dan Komponennya 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 168
2.121. Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 169
2.122. Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow	II – 170
2.123. Perkembangan Lain-Lain PAD yang Sah Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 170

2.124.	Perkembangan Belanja Pegawai Daerah dan Komponen- Komponennya 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II - 171
2.125.	Neraca Audited Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024 ...	II - 173
2.126.	Neraca Semester I Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow	II - 174
2.127.	Proyeksi/ Target APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.....	II - 175
2.128.	Proyeksi/ Target APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2026-2030.....	II - 176
2.129.	Permasalahan Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II - 182
2.130.	Isu Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow	II - 182
2.131.	Perumusan Isu Strategis Daerah	II - 185
3.1.	Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III - 6
3.2.	Sasaran dan Indikator Strategi S-O	III - 17
3.3.	Sasaran dan Indikator Strategi S-T.....	III - 19
3.4.	Sasaran dan Indikator Strategi W-O	III - 21
3.5.	Sasaran dan Indikator Strategi W-T.....	III - 23
3.6.	Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2026-2030	III - 24
3.7.	Program Prioritas RPJMD	III - 29
3.8.	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.....	III - 66
4.1.	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	IV - 2
4.2.	Indikator Kinerja Utama	IV - 69
4.3.	Penentuan Target Keberhasilan Tujuan dan Sasaran melalui IKU	IV - 74
4.4.	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030	IV - 82
4.5.	Penyelarasan Indikator Makro Provinsi Sulut dan Kabupaten Bolaang Mongondow.....	IV - 109

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Hubungan antar Dokumen Perencanaan.....	I – 7
1.2.	Matriks Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 – 2029 dengan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 – 2034	I – 8
1.3.	Matriks Penyelarasan Visi dan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 – 2029	I – 9
2.1.	Letak Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara.....	II – 1
2.2.	Luas Wilayah per Kecamatan	II – 2
2.3.	Letak Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow.....	II – 4
2.4.	Posisi Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	II – 4
2.5.	Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow	II – 9
2.6.	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air	II – 25
2.7.	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	II – 27
2.8.	Peta Ketersediaan Pangan	II – 29
2.9.	Peta Kebutuhan Pangan	II – 29
2.10.	Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Pangan	II – 30
2.11.	Peta Ketersediaan Air	II – 31
2.12.	Peta Kebutuhan Air.....	II – 32
2.13.	Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air.....	II – 32
2.14.	Lokasi Terminal A dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow	II – 121
2.15.	Skor IDSD tahun 2024.....	II – 144
3.1.	Analisis SWOT.....	III – 12
3.2.	Kuadran Strategi Metode SWOT	III – 15

DAFTAR GRAFIK

2.1.	Luas Areal dan Produksi Tanaman Kelapa Tahun 2020 - 2024.....	II - 15
2.2.	Luas Areal dan Produksi Tanaman Cengkih Tahun 2020 - 2024	II - 16
2.3.	Luas Lahan dan Produksi Kakao di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 - 2024	II - 17
2.4.	Luas Lahan dan Produksi Tanaman Kopi Tahun di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 - 2024	II - 18
2.5.	Luas Lahan dan Produksi Tanaman Pala di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 - 2024	II - 19
2.6.	Luas Lahan dan Produksi Tanaman Kemiri di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 - 2024	II - 20
2.7.	PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 - 2024	II - 65
2.8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Proyeksi LPE Tahun 2025.....	II - 66
2.9.	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.....	II - 67
2.10.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II - 68
2.11.	PDRB Perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020-2024...	II - 69
2.12.	Rasio Gini Kabupaten Bolaang Mongondow 2021-2024	II - 70
2.13.	Jumlah Tempat Tidur di RSUD Datoe Binangkang Kab. Bolaang Mongondow	II - 77
2.14.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.....	II - 87
2.15.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.....	II - 87
2.16.	Jumlah Koperasi Aktif di Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.....	II - 114

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045, RPJMD Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional jangka menengah. RPJMD adalah dokumen yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah, serta tahapan pelaksanaannya selama 5(lima) tahun.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari tahun 2024 telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow terpilih periode tahun 2025 - 2029. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan ditetapkannya Bapak YUSRA ALHABSYI, SE sebagai Bupati Bolaang Mongondow dan Bapak DONY LUMENTA, sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow terpilih yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025 - 2029, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di lantik. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025-2045, RTRW dan KLHS RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029. Mengingat perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan Pembangunan nasional maka diperlukan penyesuaian RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Berikut merupakan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, diselenggarakan sebagai berikut.

1. Persiapan Penyusunan RPJMD
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025-2029
 - b. Orientasi mengenai RPJMD
 - c. Pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Penyusunan rancangan visi dan misi KDH
 - c. Perumusan penjelasan visi dan misi
 - d. Perumusan tujuan dan sasaran
 - e. Perumusan strategi dan arah kebijakan
 - f. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah
 - g. Perumusan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan
 - h. Penetapan indikator kinerja daerah.
 - i. Pembahasan dengan Perangkat Daerah (PD) Pelaksanaan forum konsultasi publik
 - j. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran
3. Penyusunan Rancangan RPJMD
 - a. SKPD menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra PD)
 - b. Penyampaian Rancangan Renstra PD
4. Melaksanakan musrenbang jangka menengah daerah untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD
5. Menyusun rancangan akhir RPJMD dengan memuat hasil kesepakatan dan komitmen musrenbang RPJMD
6. Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Gubernur Sulawesi Utara

7. Pembahasan dan Penandatanganan Persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bupati Bolaang Mongondow tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025-2029.
8. Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Gubernur Sulawesi Utara
9. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan komitmen kuat terhadap pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memastikan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyusunan RPJMD. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai bentuk implementasi regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai prasyarat dan landasan perumusan dokumen RPJMD. Proses KLHS dilakukan sesuai dengan pedoman dan arahan teknis sebagaimana dimuat dalam Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor 600.11.2/2505/Bangda tanggal 5 April 2024 tentang Monitoring Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Melalui pelaksanaan KLHS, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta menjamin keberlanjutan pembangunan lintas generasi.

Hasil KLHS telah diintegrasikan secara sistematis ke dalam struktur dokumen RPJMD, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas daerah. Proses ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, guna menjamin kualitas perencanaan yang inklusif, evidence-based, dan selaras dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan KLHS tidak hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga memperkuat konsistensi kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan, mitigasi risiko lingkungan, serta penguatan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Adapun komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

1. Memastikan keselarasan RPJMD dengan KLHS Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).
2. Memastikan integrasi antara RPJMD dengan KLHS terkait Isu-isu Strategis

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Utara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045.



1.3. Hubungan Antar Dokumen Rancangan Awal RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045 dan Revisi Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034. Selain itu dalam penyusunannya memperhatikan pula dokumen RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029. Selanjutnya untuk menjamin implementasi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025—2029 akan sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung, maka penyusunan RPJMD memperhatikan data dan informasi serta mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029. melalui penyelarasan arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah, serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Diperlukan juga pengintegrasian sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dengan KLHS RPJPD Tahun 2025- 2045.

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang- Undang 32 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang 23 Tahun 1997, amanat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal, diantaranya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selain itu perlu diperhatikan terkait investasi proyek strategis daerah Kawasan Industri Mongondow (KIMONG) di Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga kedepan KIMONG dapat menyediakan aksesibilitas infrastruktur memadai yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

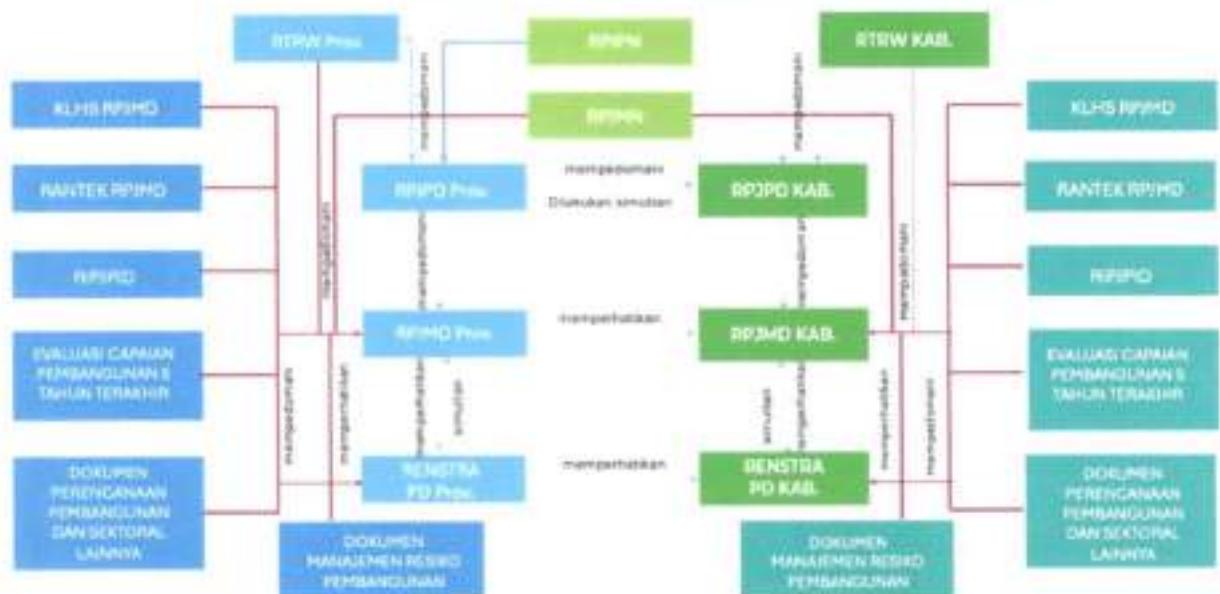
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan tahap pertama pencapaian visi misi pembangunan daerah RPJPD Tahun 2025-2045. RPJMD kemudian dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun. Undang-Undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,



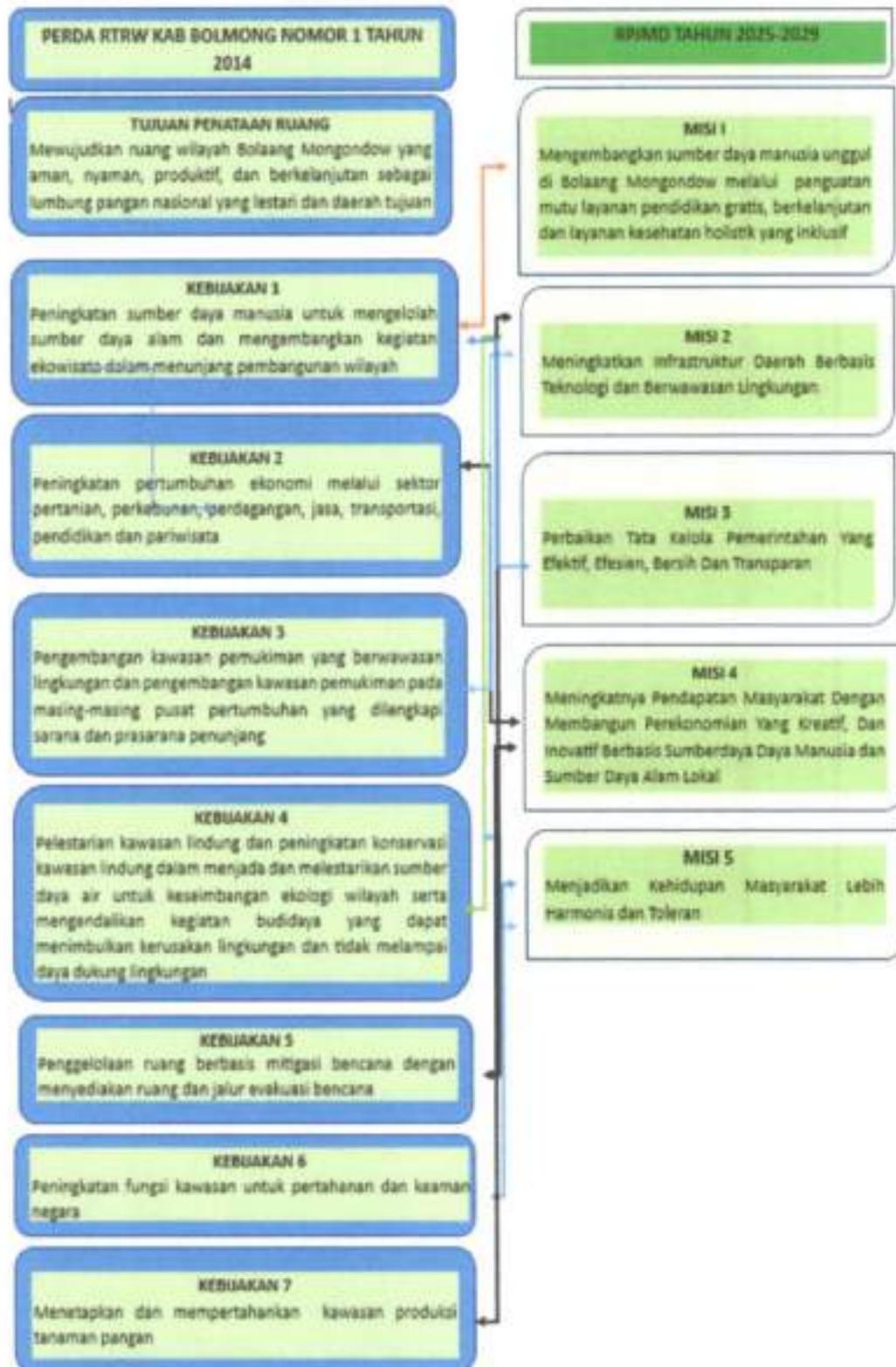
serta rencana kerja dan pendanaan daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dokumen RKPD yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berkenaan. RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029, selanjutnya sebagai dokumen rencana strategis perangkat daerah 5 (lima) tahunan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai penjabaran rencana kerja tahunan bagi perangkat daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan

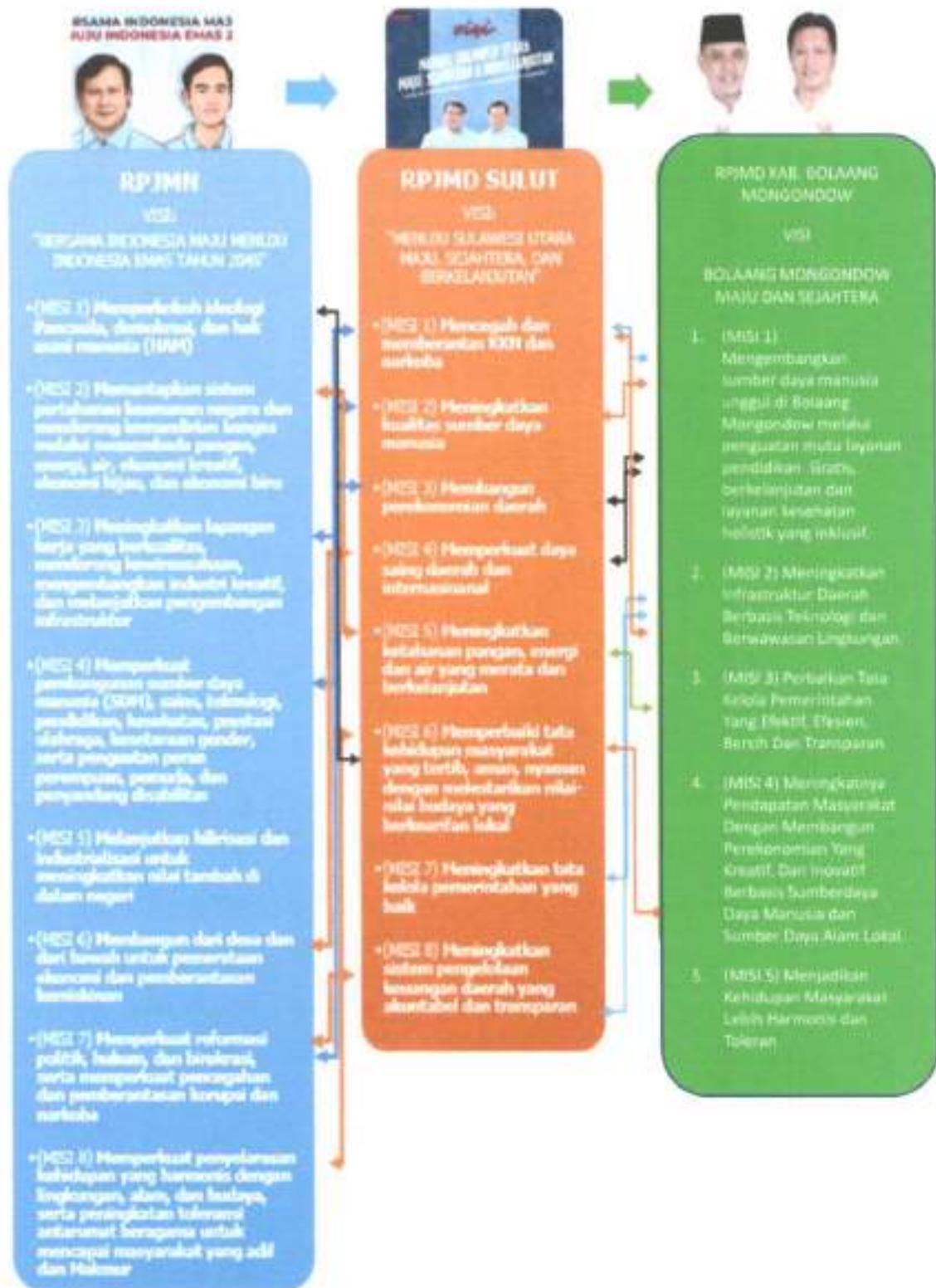
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya



**Gambar 1.2.
Matriks Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2025 - 2029 dengan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2014 - 2034**



Gambar 1.3.
Matriks Penyelarasan Visi dan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan
RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 – 2029





1.4. Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025- 2029 disusun dengan maksud:

1. Memberikan gambaran awal arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bolaang Mongondow periode tahun 2025-2029;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow;

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah ;
2. Memeberikan rekomendasi arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan daerah Kabupaten sekitar lainnya dan Provinsi Sulawesi Utara serta pemerintah pusat;
5. Menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program para calon kepala daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.5. Sistematika Penulisan Dokumen

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi:

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Aspek geografi dan demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Aspek Daya Saing Daerah;





- d. Aspek Pelayanan Umum.
Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:
 - a. Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Kerjasama daerah;
 - c. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
 - d. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.





BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada bab ini mengenai gambaran umum daerah menguraikan tentang gambaran awal dan kondisi daerah serta capaian hasil pembangunan sampai kondisi saat ini. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2025-2029 secara objektif mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

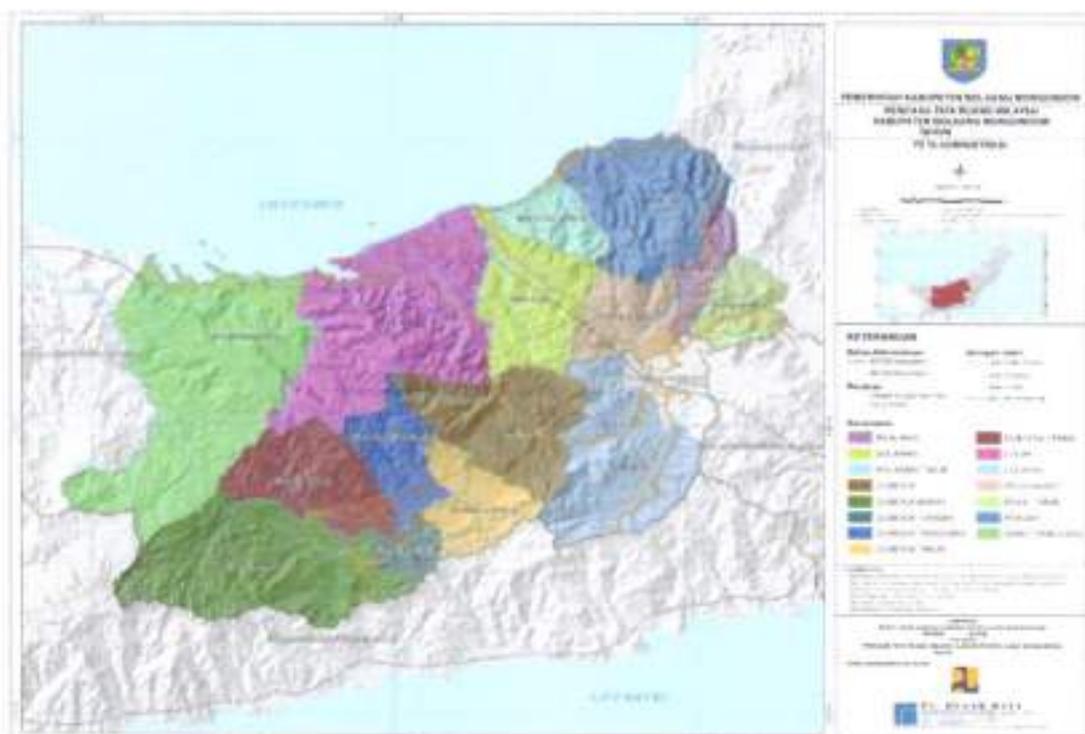
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi ini akan digambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana, gambaran tentang kondisi demografi yang mencakup jumlah penduduk dan struktur umur, laju pertumbuhan, dan komposisi penduduk.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Ibukota Lolak, secara geografis terletak pada posisi 1230 - 1240 BT dan 00 30' - 10 0' LU Peta Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Letak Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara.



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Bolmong Tahun 2025-2045

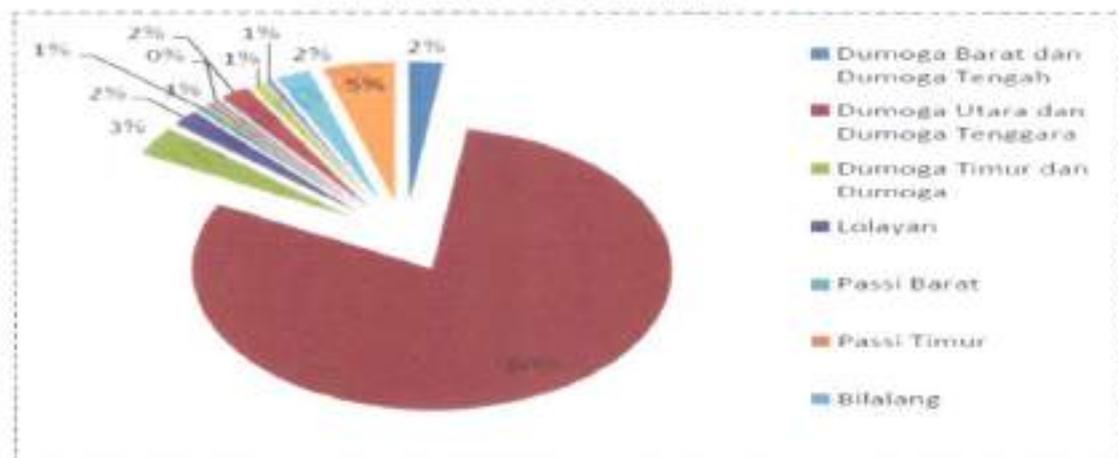


Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow secara geografis berada di wilayah selatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas wilayah 3.268.16 Ha (2.871,65 KM²) serta memiliki total empat Pulau kecil tidak berpenghuni yang masing-masing dua Pulau terletak di Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sangtombolang. Selain itu daerah ini merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Utara (20,67 % dari luas wilayah Sulawesi Utara)

Secara astronomis, Kabupaten Bolaang geografis terletak pada posisi antara 123007'26" - 124041'46" Bujur Timur dan 00015'46" - 00015'38" LU. Adapun berdasarkan posisi geografisnya Bolaang Mongondow terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi;
- Sebelah Timur : Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
- Sebelah Barat : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Gambar 2.2
Luas Wilayah Per Kecamatan



Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2025

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terbagi atas 15 Kecamatan dan 202 Desa/Kelurahan, dengan ibukota kecamatan dan luas kecamatan pada tabel berikut.



Tabel 2.1.
Kecamatan dan Luas Wilayah.

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ² /sq.km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
Dumoga Barat	Doloduo	385,74	12,95
Dumoga Utara	Mopuya Utara	193,09	6,48
Dumoga Timur	Modomang	175,59	5,9
Dumoga Tengah	Ibolian	49,09	1,65
Dumoga Tenggara	Konarom	148,45	4,99
Dumoga	Pusian	162,27	5,45
Lolayan	Tungoi	264,5	8,88
Passi Barat	Passi	119,76	4,02
Passi Timur	Pangian	94,84	3,19
Bilalang	Bilalang IV	66,29	2,23
Poigar	Poigar	254,97	8,56
Bolaang	Kelurahan Inobonto	207,8	6,98
Bolaang Timur	Tadoy	98,25	3,30
Lolak	Lolak	476,03	15,99
Sangtombolang	Maelang	281,02	9,44

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2025

Posisi Kabupaten Bolaang Mongondow terletak di tepian Samudra Pasifik, dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Alur laut dimaksud ialah alur yang dilalui negara asing melaksanakan pelayaran secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauan dan territorial Indonesia yang berdampingan. Jalur ALKI II difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya. ALKI II memiliki nilai strategis karena menghubungkan lalu lintas perairan dan perdagangan internasional dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang serta dari Australia ke Singapura dan Tiongkok serta Jepang, begitu pula sebaliknya. Posisi strategis ini menciptakan keunggulan khusus bagi Kabupaten Bolaang Mongondow karena dekat dengan pasar kawasan Asia Timur dan Pasifik.





Gambar 2.3. Letak Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow



Gambar 2.4. Posisi Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Posisi Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan pintu masuk dan keluar dari wilayah Bolaang Mongondow bersatu menuju ibukota propinsi Sulawesi utara. Ini merupakan posisi yang sangat strategis bagi pelaku bisnis dan investor. Selain berada tepat dijalur darat Koridor Sulawesi yang memiliki potensi dan mobilitas ekonomi yang tinggi, Kabupaten Bolaang mongondow juga mempunyai jalur laut yang sedang berkembang dan akan terus ditingkatkan. Pelabuhan Laut Labuan Uki adalah Jalur laut baru, ini adalah pintu masuk dan keluarnya barang ke wilayah Bolaang Mongondow Bersatu, yang lebih dekat dibandingkan dengan Pelabuhan Laut Bitung.

Kabupaten Bolaang Mongondow berkontribusi terhadap daerah lain melalui berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Secara ekonomi, kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang dapat





dimanfaatkan oleh daerah lain, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Selain itu, Bolaang Mongondow juga berkontribusi dalam hal pariwisata, menarik pengunjung dari berbagai daerah dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah lain yang terkait. Perlu diketahui Kabupaten Bolaang Mongondow berkontribusi ekonomi sebagai pemasok Sumber Daya Alam ke daerah lain, seperti hasil pertanian berupa beras dan jagus serta hasil Perkebunan berupa kelapa, cokelat, pala, cengkeh, serta hasil pertambangan yang saat ini dikelola oleh sejumlah perusahaan. Bolaang Mognondow juga mendorong peningkatan Pendapatan Domestik regional Bruto (PDRB) melalui pajak daerah dan retribusi. Dari segi pariwisata Potensi pariwisata di Bolaang Mongondow menarik pengunjung dari berbagai daerah, yang pada gilirannya memberikan dampak ekonomi bagi daerah lain yang terkait dengan sektor pariwisata. Dimana ada 2 kawasan strategis Pariwisata Provinsi Sulut yang akan dikembangkan di daerah ini.

Secara sosial Keberadaan suku Mongondow dan bahasa ibu Bahasa Mongondow, memberikan warna tersendiri bagi keragaman budaya di Sulawesi Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Pada Kontribusi Lingkungan, dalam Upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Bolaang Mongondow serta adanya Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memberikan kontribusi besar dalam kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu Kabupaten Bolaang Mongondow juga mendapatkan manfaat dari daerah lain melalui berbagai bentuk kerjasama dan interaksi. Saat ini Upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bolaang Mongondow juga berkontribusi pada pembangunan daerah lain melalui berbagai sektor dengan demikian, Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki peran penting dalam konteks regional, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya.

A. Kondisi Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Bolaang Mongondow cukup bervariasi dari daerah yang dataran rendah, bergelombang, berbukit serta bergunung dengan tingkat kemiringan antara 0% - 45% serta mempunyai ketinggian bervariasi pula antara 0 - 650 meter di atas permukaan laut. Sementara yang terendah atau ketinggiannya 0 - 2 meter dari permukaan laut umumnya terdapat pada kecamatan yang terletak disepanjang pesisir pantai utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Jalur gunung membentang daritimur ke barat pada bagian utara yang mengapit Dataran Dumoga dan Dataran Mongondow. Terdapat 5 gunung di Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana yang tertinggi adalah gunung Kabela terletak di Kecamatan Lolak dengan ketinggian 1.732 meter, sedangkan yang terendah adalah gunung Kapaya terletak di Kecamatan Bolaang dengan ketinggian 1.331 meter. Keadaan topografi Kabupaten Bolaang Mongondow cukup bervariasi dari daerah yang dataran rendah, bergelombang, berbukit serta bergunung dengan tingkat kemiringan antara 0% - 45% serta mempunyai ketinggian bervariasi pula antara 0 - 650 meter di atas permukaan laut. Sementara yang terendah atau ketinggiannya 0 - 2 meter dari permukaan laut umumnya terdapat pada kecamatan yang terletak disepanjang pesisir pantai utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Jalur gunung membentang daritimur ke barat pada bagian utara yang mengapit Dataran Dumoga dan Dataran





Mongondow. Terdapat 5 gunung di Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana yang tertinggi adalah gunung Kabelat terletak di Kecamatan Lolak dengan ketinggian 1.732 meter, sedangkan yang terendah adalah gunung Kapaya terletak di Kecamatan Bolaang dengan ketinggian 1.331 meter.

Tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL) antar kecamatan sangat bervariasi. Kecamatan Poigar, Bolaang, Bolaang timur, Lolak dan Sang Tombolang relatif hanya 0-10 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Passi Timur adalah kecamatan yang DPL-nya relatif paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu setinggi 547 meter, diikuti dengan Kecamatan Bilalang dengan tinggi 387 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Lolayan memiliki DPL masing-masing 340 dan 182 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kecamatan Dumoga Tengah dan Kecamatan Dumoga relatif mencapai 125 - 152 meter di atas permukaan laut (Tabel 2.1). Kondisi ini sangat mendukung pencapaian ketahanan pangan khususnya dalam hal membangun usaha pertanian sawah dalam mendukung pencapaian swasembada beras. Ketiga wilayah kecamatan tersebut dikenal sebagai wilayah penghasil beras atau lumbung beras di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Adapun tinggi wilayah dengan menggunakan titik acuan kantor kecamatan dimana wilayah kecamatan secara umum lebih tinggi atau rendah dan jarak ibukota kabupaten menurut kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Tinggi wilayah dan jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Dumoga Barat	152	110
Dumoga Utara	147	87
Dumoga Timur	125	100
Dumoga Tengah	144	88
Dumoga Tenggara	148	89
Dumoga	152	79
Lolayan	182	62
Passi Barat	340	64
Passi Timur	547	67
Bilalang	387	69
Poigar	6	49
Bolaang	5	19
Bolaang Timur	3	21
Lolak	8	3
Sangtombolang	5	34

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2025



B. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Bolaang Mongondow terletak pada lintasan garis Katulistiwa, sehingga hanya mengenal dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan yang selalu basah dan banyak hujan sebagaimana umumnya wilayah tropis. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi per tahun dan suhu bervariasi antara 20oC - 32oC. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi dari pada Bulan Januari mencapai 680 mm dan terendah pada Bulan Juli yaitu 81 mm, dengan kondisi iklim seperti ini maka Kabupaten Bolaang Mongondow sangat diuntungkan khususnya pada sektor pertanian.

Musim kemarau dan musim penghujan waktunya datang secara tidak bersamaan. Kabupaten Bolaang Mongondow pada bagian utara musim hujan pada bulan Oktober, Nopember, Desember, Januari dan Pebruari. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau terjadi pada bulan Maret. Musim kemarau mulai bulan Juli, Agustus dan September. Peralihan musim kemarau ke musim hujan terjadi pada bulan Agustus dan September. Pada bagian tengah Kabupaten Bolaang Mongondow musim hujan sepanjang bulan Nopember, Desember, Januari, Pebruari dan Maret. Peralihan musim hujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April, Mei, Juni dan Juli. Selanjutnya musim kemarau pada bulan September dan Oktober. Berdasarkan Laporan curah hujan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024, total curah hujan 15 kecamatan mencapai 37.065,96 mm selama tahun 2024. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi dari pada Bulan Juni mencapai 5239,9 mm dan terendah pada Bulan september yaitu 1280,06 mm. Berikut tabel Curah Hujan yang terjadi selama tahun 2024 pada 15 kecamatan di kabupaten Bolaang Mongondow.





Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	DUMOGA	41,6	26,8	174,7	46	139,6	296,7	288,5	843,4	68,4	201,7	260,2	94,5	2479,1
2	DUMOGA BARAT	120,7	60,1	152,1	152	136	312	173	180	80	37	137	150	1837,9
3	DUMOGA TIMUR	43,5	0	163,8	30,8	148,3	307,7	273,2	880,3	51,6	176	122,4	142,3	2422,1
4	DUMOGA TINGGAI	307	156,7	146,2	124,2	107,1	386	529,6	540,2	220,5	130,7	270	238,2	2982,4
5	DUMOGA TERGGANA	213,3	109,9	182,8	188,2	72,3	454	228	349	228,0	174	147,6	171,6	2349,2
6	DUMOGA ITAMA	11,9	60	134	144	126	496	254	356	12	48	170	105	2117
7	LOLAYAR	124	60	65,8	130	183	498	201	42,5	79,5	41	296	104	1817,8
8	PASSI BARAT	236,3	79	204	188	254,5	307,7	141,5	214,5	48,5	187,3	282	208,5	2458
9	PASSI TIMUR	289,9	133,2	822,8	262	352,5	174	286,3	22,5	140,9	210,7	376,8	340,9	2938,4
10	BEALANG	212,9	81	288,6	163,9	289,8	466,8	181	95,5	73,8	281,2	282,9	183,4	2459,8
11	POGAR	548,5	152	219	170,5	99	264	161	0	61	146,5	102	469,5	2433
12	BOLAANG	332	481	389	205	185,5	468	188,3	0	26	13,5	174,5	64	2849
13	BOLAANG TIMUR	437	323	228	257	113	197	60,4	353,5	91	168	190	282	2415,9
14	LOLAK	525,5	308	381	164	71	216	217,5	187	65,34	71	193	395	2668,34
15	SANDONBOLANG	444,5	409	253	231	86,5	78	448	2,5	59	394,5	167,5	386,5	3028
	TOTAL	3647,7	2498,8	2573,8	2395,6	2250,1	5239,9	3445,5	4038,1	1288,04	2298,1	3204,9	2191,1	37965,96

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow 2025

C. Kondisi Geologi.

Menurut hasil penelitian Kementerian ESDM (2004), bagian dari kawasan Indonesia Timur termasuk Bolaang Mongondow, secara geologi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan rumit bila dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat. Ini dikarenakan kawasan timur Indonesia merupakan pertemuan dari lempeng- lempeng litosfera : Eurasia yang relatif stabil di bagian barat laut, Lempeng Indo-Australia di bagian barat dan barat daya yang bergerak relatif ke timur laut, Lempeng Pasifik di bagian timur yang bergerak ke barat laut dan Lempeng Filipina Barat di bagian timur laut yang bergerak ke arah barat.





Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow



Sumber: RTRW Kab Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034

Bagian timur laut Sulawesi merupakan akibat perputaran searah jarum jam dari lempeng kecil bagian barat daya Sulawesi dan Kalimantan pada masa lalu yang diikat pada bagian barat daya oleh sistem busur pada sesar-sesar mendatar mengiris, dan penolakan dasar laut Sulawesi di utara oleh adanya penujangan di Parit Sulawesi Utara.

Berdasarkan peta Geologi di atas Formasi Geologi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari:

- Qal : Aluvium dan Endapan Pantai terdiri dari material berupa pasir, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal
- Qav : Batu gamping Terumbu; Batu gamping terumbu terangkat dan batu gamping klastik dengan komponen utama koral, setempat berlapis
- Ql : Batu gamping Terumbu; Batu gamping terumbu terangkat dan batu gamping klastik dengan komponen utama koral, setempat berlapis.
- Qpl : Endapan Danau; satuan ini dikuasai oleh batu lempung kelabu, setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Batu pasir berbutir halus sampai kasar serta kerikil di jumpai di beberapa tempat. Satuan ini termampatkan lemah tebalnya menurut data bor mencapai 94 m.
- TQpv : Batuan Gunung api Pinogu; satuan ini terdiri atas Tuf, tuf lapili, breksi dan lava. Breksi gunungapi di Pegunungan Bone, G. Mongadalia dan Pusian bersusunan andesit piroksin dan dasit. Tuf yang tersingkap di G.Lemimbut dan G. Lolombulan umumnya berbattu apung, kuning muda berbutir sedang sampai kasar, diselingi oleh lava bersusunan menengah sampai basa. Tuf dan Tuf Lapili di sekitar S. Bone bersusunan dasitan, Lava berwarna kelabu muda hingga kelabu tua, umumnya bersusun andesit piroksin. Satuan ini secara umum termampatkan lemah sampai sedang.



- umumnya diduga berumur Pliosen hingga Plistosen.
- QTs** : Molasa Selebes merupakan endapan pasca orogen yang terbentuk di cekungan-cekungan kecil, terdiri atas konglomerat, breksi serta batupasir, umumnya termampatkan lemah. Konglomerat dan breski tersusun oleh beranekan bahan komponen berupa kepingan andesit, basal, granit, granodiorit, batugamping, batupasir maupun kuarsa. Satuan ini menunjukkan kemirinagn landai hingga 300, tebalnya mencapai beberapa puluh meter, dan berumur sekitar Pliosen-Plistosen.
- Tpww** : BREKSI WOBUDU : Breksi gunung api, aglomerat, tuf, tuf lapili, dan lava. Breksi gunung api berwarna kelabu, tersusun oleh kepingan andesit dan basal berukuran kerikil sampai bongkah. Tuf dan tuf lapili berwarna kuning kecoklatan, berbutir halus sampai kerikil, umumnya lunak dan berlapis. Lava berwarna kelabu. Bersusunan andesit sampai basal. Satuan ini menindih tak selaras Formasi Dolokapa yang berumur Miosen Tengah hingga Plistosen Akhir. Tebal satuan sekitar 1000 - 1500 meter.
- Tmts** : Formasi Tapadaka terdiri dari Batupasir, grewake, batupasir terkersikkan dan serpih. Batupasir berwarna kelabu muda hingga tua dan hijau, berbutir halus sampai kasar, mengandung batuan gunungapi hijau dan serpih merah, setempat-setempat gampingan. Batu pasir yang tersingkap di S. Tapadaka mengandung urat kalsit 0,5 - 1 m. Grewake babutir lulus sampai lasar, bersudut sampai membulat tanggung, pejal, tersusun oleh plagioklas, augit, kuarsa, dan sedikit hematit dan magnetit. Batupasir yang tersingkap di sebelah selatan Macia terkersikkan, hijau, kompak, mengandung feldspar scna sedikit pirit dan kalkopirit
- Tmtl** : Batugamping Formasi Tapadaka: Batugamping kelabu terang, pejal, mengandung pecahan batuan gunungapi hijau. Batugamping ini sebagian membentuk lensa-lensa di dalam Formasi Tapadaka dan sebagian terlihat berganti fasies ke arah samping menjadi batupasir. Fosil-fosil yang dikandungnya adalah *Lepidocyclina* (*Eulepidina*) sp. Umur satuan ini diperkirakan Miosen Awal hingga Miosen Akhir
- Tmbl** : Anggota Batugamping Batuan Gunungapi Bilungala Batugamping Tmbl kelabu mengandung fosil *Lepislocyclina sumatransis* (BRADY). Kumpulan fosil tersebut menunjukkan umur Miosen Awal-Miosen Akhir (Kadar. D.C. hubungan tertulis, 1972).
- Tets** : Formasi Tinombo Fasies Sedimen (Ahlburg, 1913): Satuan ini mengandung Serpih dan batupasir dengan sisipan batugamping dan rijang. Serpih kelabu dan merah, getas, sebagian gampingan; rijang mcngandung radiobria. Batupasir berupa greiwake dan batupasir kuarsa, kelabu dan



hijau, pejal, berbutir halus sampai sedang, sebagian mengandung pirit. Sisipan batugamping di S. Mayambak berwarna merah, pejal, berlapis baik. Satuan batuan ini diterobos oleh granit, diorit dan trakit seperti yang terlihat di S. Bayau. Satuan ini mempunyai hubungan menjemari dengan Formasi Tinombo fasies gunung api.

D. Kondisi Hidrologi

Deretan gunung-gunung yang berada di kawasan Bolaang Mongondow membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS). Wilayah Sungai yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Wilayah sungai lintas provinsi Dumoga-Sangkub yang meliputi DAS Dumoga, Sangkub, Buyat, Lomboit, Andagile, Bulawa, dan Tuliawa; dan Wilayah sungai lintas kabupaten berupa rencana pengembangan WS Poigar - Ranoyapo yang meliputi DAS Poigar dan DAS Ranoyapo.

Cekungan Air Tanah(CAT) yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah CAT Lolak dan CAT Dumoga - Kosio yang merupakan CAT dalam 1 kabupaten dan CAT Sidate - Poigar yang merupakan CAT Lintas Propinsi.

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki 6 sungai, dengan sungai terpanjang yaitu sungai Dumoga, mengalir sepanjang 87,2 Km dan yang terpendek adalah sungai Moyosiboi dengan panjang 11,2 Km. Selain sungai, terdapat 3 Danau dimana yang terluas adalah danau HoloI sebesar 52 Ha dan yang terkecil adalah danau Paya-paya sebesar 15 Ha.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat Taman Nasional Nani Wartabone dengan luas lebih dari 150 ribu hektar yang merupakan pusat konservasi alam berskala nasional dan menyimpan berbagai jenis flora dan fauna yang tergolong langka.

Selain hutan Kabupaten ini memiliki lahan perkebunan rakyat yang cukup luas, mencapai 41.540 ribu hektar. Umumnya lahan perkebunan ini ditanami tanaman kelapa, cengkeh, kopi, kakao pala dan kemiri. Dari luas perkebunan tersebut, 75 % diantaranya adalah tanaman kelapa, 15 % tanaman kakao, 7 % tanaman kopi, dan 1,18% tanaman kemiri, sedangkan sisanya ditanami vanili, pala, jambu mete dan cengkih.



Tabel 2.4
Luas Areal Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow
Tahun 2020-2024

No.	Uratan	Perkebunan Rakyat					
		Luas Areal (Ha)					Persen
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Luas Areal Perkebunan	41.519,00	42.514,73	41.918,21	42.708,20	41.540,68	100,00
2	Kelapa	24.232,70	24.327,56	24.246,25	24.546,01	24.189,91	58,23
3	Cengkih	5.718,00	5.748,00	5.718,00	5.726,00	5.747,00	13,83
4	Kopi	4.211,97	4.421,97	4.211,97	4.206,89	4350,47	10,47
5	Pala	1.291,99	1.476,99	1.291,99	1.541,49	1.476,99	3,56
6	Kakao	5.413,34	5.859,21	5.799,00	6.006,81	5.095,31	12,27
7	Kemiri	651,00	681,00	651,00	681,00	681,00	1,64

Sumber: Dinas Perkebunan Tahun 2025

Kawasan Hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi perubahan luas areal di tahun 2023 dan terus bertahan hingga 2024. Jika dilihat sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 terjadi penurunan luasan areal, dan kembali terjadi pengurangan areal hutan hingga tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan akibat dari bertambahnya jumlah penduduk serta kebutuhan ekonomi masyarakat. konvensi lahan banyak digunakan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Penurunan luas areal hutan juga merupakan Deforestasi sebagai bentuk kehilangan lahan hutan yang merupakan ancaman bagi makhluk hidup, luas hutan yang mengalami penurunan bisa menimbulkan dampak serius yaitu menimbulkan pemanasan global. Dilihat dari fungsi kehutanan, Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung, Suaka Alam dan hutan produksi. Jika dilihat dari Luas Kawasan hutan menurut kecamatan dan tata Guna Lahan tahun 2022 sebagaimana disebutkan dalam Buku Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2025 terlihat bahwa kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan lolayan dan Kecamatan passi Timur adalah kecamatan yang memiliki kawasan hutan baik hutan lindung hutan suaka, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.





Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan Tahun 2019-2024

JENIS HUTAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hutan Lindung	8 142,53	8 142,46	8 142,46	8 142,46	8 144,00	8 144,00
Suaka Alam dan Pelestarian Alam	173 446,27	138 327,57	138 327,57	138 327,57	125 808,00	125 808,00
Terbatas	42 979,08	42 345,92	42 345,92	42 345,92	42 841,00	42 841,00
Tetap	19 388,29	17 030,81	17 030,81	17 030,81	19 387,00	19 387,00
Dapat Dikonversi	72,70	-	-	-	73,00	73,00
Jumlah Luas Hutan dan Perairan	244 028,87	205 846,76	205 846,76	205 846,76	196 253,00	196 253,00

Sumber: BPS Sulut Tahun 2025

Posisi Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan pintu masuk dan keluar dari wilayah Bolaang Mongondow bersatu menuju ibukota propinsi Sulawesi Utara. Ini merupakan posisi yang sangat strategis bagi pelaku bisnis dan investor. Selain berada tepat dijalur darat Koridor Sulawesi yang memiliki potensi dan mobilitas ekonomi yang tinggi, Kabupaten Bolaang Mongondow juga mempunyai jalur laut yang sedang berkembang dan akan terus ditingkatkan. Pelabuhan Laut Labuan Uki adalah Jalur Laut baru, ini adalah pintu masuk dan keluarnya barang ke wilayah Bolaang Mongondow Bersatu, yang lebih dekat dibandingkan dengan Pelabuhan Laut Bitung. Demikian juga keberadaan Bandar Udara yang sudah beroperasi tahun 2024 dan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo medi0 april tahun 2024. Dalam mendukung kedua bidang transportasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga membangun Terminal transportasi darat tipe A yang berfungsi mengumpulkan atau mendistribusikan arus transformasi dari dan kedua bidang transportasi tersebut diatas, maupun ke antar Kabupaten dan propinsi lainnya.

Tinggi wilayah diatas permukaan laut (DPL) antar kecamatan sangat bervariasi. Kecamatan Poigar, Bolaang, Bolaang timur, Lolak dan Sang Tombolang rata-rata relatif hanya 0-20 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Passi Timur adalah kecamatan yang DPL- nya relative paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu setinggi 630 meter, diikuti dengan Kecamatan Bilalang dengan tinggi 500 meter diatas permukaan laut. Tinggi wilayah diatas permukaan laut setiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow menurut kecamatan ditunjukkan pada gambar dibawah ini. Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Lolayan memiliki rata-rata dpl masing-masing 450 dan 350 meter diatas permukaan laut. Untuk Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Dumoga Utara rata-rata mencapai 150 meter diatas permukaan laut. Ketiga wilayah kecamatan tersebut dikenal sebagai wilayah penghasil beras atau lumbung beras di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan:

a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas di mana eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih. Kawasan Budidaya yang dikategorikan sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas berada di Kecamatan Lolak, Kecamatan Passi timur, kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Sangtombolang dan Kecamatan Lolayan dengan luas total 42.841,00 Ha pada tahun sejak tahun 2023 hingga tahun 2024.

b. Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap di mana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Kawasan budidaya yang dapat digolongkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap berada di Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Dumoga Timur, kecamatan Passi Timur dan Kecamatan Lolayan, dengan luas total 19.387,81 Ha pada tahun 2024.

c. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah adalah usaha budidaya tanaman pangan lahan basah khususnya Padi Sawah. Berpotensi pada Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Lolayan, Kecamatan Dumoga Timur, Dumoga, Dumoga Tengah, Dumoga Tenggara, Kecamatan Sang Tombolang, Kecamatan Passi Timur, Kecamatan Bilalang, Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, dan Kecamatan Passi.

d. Kawasan Pertanian Lahan Kering dan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian lahan kering yang dimaksud adalah meliputi Komoditas tanaman pangan dan palawija yang dibudidayakan masyarakat. Potensi pengembangan kawasan ini yaitu: Komoditi Padi Ladang: Kecamatan poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, Kecamatan Sang Tombolang. Komoditi Jagung, Ubi kayu, Ubi jalar, Kedelai, Kacang tanah dan Kacang hijau dikembangkan di seluruh kecamatan (15 kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow).

e. Kawasan Hortikultura

Kawasan Hortikultura adalah kawasan dengan komoditas lahan kering berupa tanaman sayur-sayuran, dan buah-buahan. Adapun potensi pengembangannya Komoditi sayur-sayuran: Komoditi sayur-sayuran dataran rendah di kembangkan di semua kecamatan (15 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bolaaang Mongondow). Komoditi sayuran dataran tinggi (seperti Kubis, Kentang, Wortel, dan Bawang daun) dikembangkan di kecamatan yang memiliki agroklimat yang sesuai yaitu di wilayah Kecamatan Passi Timur. Komoditi buah-buahan: Komoditi buah-buahan (Mangga, Pisang, Rambutan, Durian, Matoa) di kembangkan di semua kecamatan (15 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bolaaang Mongondow). Khusus untuk komoditi Nenas (yang dikenal dengan nama Nenas Lobong) di

kembangkan di Kecamatan Passi Barat.

f. Kawasan Perkebunan

Diupayakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Berikut potensi tanaman perkebunan kabupaten Bolaang Mongondow.

1. Komoditi Kelapa.

Total Luas Areal Penanaman Kelapa di kabupaten Bolaang Mongondow hingga tahun 2024 24.520,56 Ha menyusut dibanding tahun 2023 sebesar 24.546,01 Ha. Secara rata-rata setiap kecamatan memiliki areal perkebunan kelapa di atas 1000 Ha dan Kecamatan – Kecamatan Terbesar yang memiliki areal tanaman kelapa adalah Kecamatan Lolak, kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Poigar, Lolayan, dan Kecamatan Sangtombolang yang berada antara 2000 s/d 4000 Ha. Meski terdapat penyusutan lahan dibanding tahun 2023 namun Jumlah Produksi Tahun 2024 mencapai 37.666,26 ton dibanding tahun 2023 yang hanya mencapai 30.219,15 ton. Kecamatan yang menghasilkan produksi hasil kelapa tertinggi adalah Kecamatan Poigar yang produksinya lebih dari 6000 Ton. Sementara kecamatan lolayan, lolak dan sangtombolang masing-masing kurang lebih 4000 ton, angka ini belum merata pada setiap areal perkebunan karena pada beberapa titik wilayah perkebunan kelapa membutuhkan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan kelapa

Grafik 2.1
Luas Areal dan Produksi Tanaman Kelapa Tahun 2020-2024

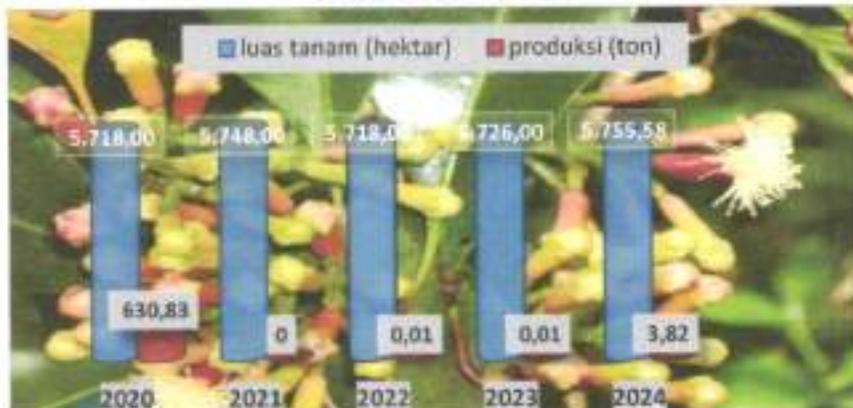


Sumber: Statistik Perkebunan tahun 2025

2. Komoditi Cengkih.

Luas Areal Perkebunan cengkih di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 mencapai kurang lebih 5.755,58 Ha, sedikit meningkat dibanding Tahun 2023 yang mencapai 5.726,00 Ha yang banyak di usahakan di daerah Kecamatan Lolayan, Passi Barat, Bilalang dan Poigar. Target komoditi unggulan tanaman dari provinsi Sulawesi utara berdasarkan Kepmentan Nomor 830 Tahun 2016, Tanaman Cengkeh juga Masuk sebagai komoditi di kawasan kabupaten Bolaang Mongondow walaupun kawasan terbesarnya berada pada kabupaten Minahasa bersatu. Setelah pada Tahun 2018 Produksi Cengkeh meningkat tajam hingga mencapai 3.800 ton, dan Pada Tahun 2021-2023sangat kurang dan agak meningkat di tahun 2024 yang mencapai 3,82. Berikut grafik luas areal tanaman cengkih dan produksi Cengkih di kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020-2024.

Grafik 2.2
Luas Areal dan Produksi Tanaman Cengkih
Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Perkebunan tahun 2025

3. Komoditi Kakao.

Tanaman Kakao di targetkan menjadi komoditi perkebunan unggulan di kabupaten Bolaang Mongondow hal ini sejalan dengan kebijakan kementerian pertanian Nomor 830 Tahun 2016 yang menjadikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai sentra perkebunan Kakao Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini Luas wilayah perkebunan Kakao di kabupaten Bolaang Mogondow tahun 2024 kurang lebih 6.021,01 Ha. Dengan kecamatan yang luas perkebunan kakao terbesarnya berada di kecamatan Lolayan.

Untuk produksi tanaman kakao pada tahun 2024 sebesar 3.870,52 ton. Produksi kakao terbesar di kecamatan lolayan sebesar 898,51 ton dan Kecamatan Dumoga Tenggara dan Dumoga Timur dengan produksi rata-rata kurang lebih 450 ton.

Grafik 2.3
Luas lahan dan Produksi Kakao di Kabupaten Bolaang
Mogondow Tahun 2020- 2024

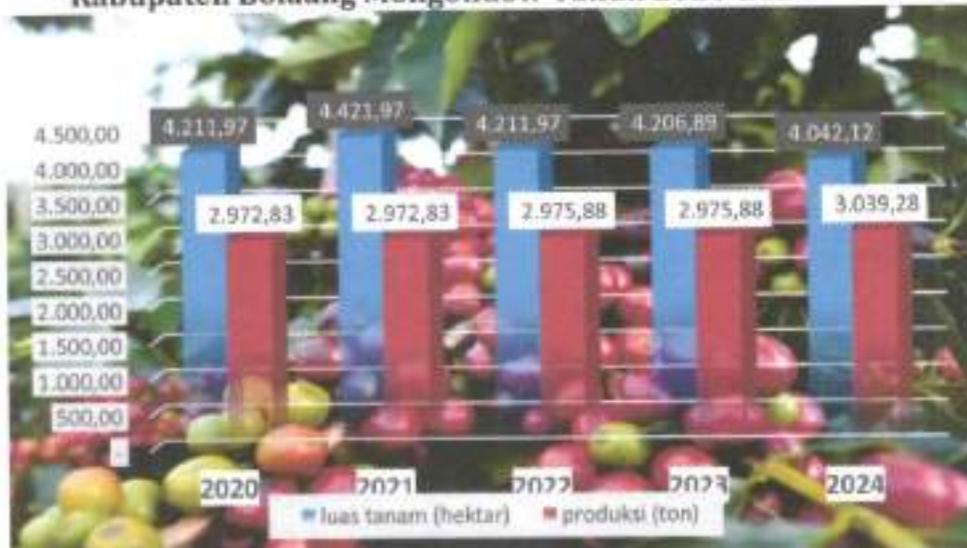


Sumber: Statistik perkebunan tahun 2025

4. Komoditi Kopi

Total luas areal perkebunan kopi di Kabupaten Bolaang Mongondow hingga Tahun 2021 adalah 4.421,97 Ha berkurang ditahun 2022 hingga 2023 menjadi 4.206,89 Ha dan kondisi ini jg berlaku di tahun 2024 yang menyusutpada luasan 4.042, 12 Ha. kecamatan yang memiliki areal terluas untuk perkebunan kopi adalah kecamatan lolayan dengan total luas areal 1.775,05 Ha yang selanjutnya kecamatan Bilalang, passi barat dan Passi Timur. Meski demikian Jumlah produksi tanaman kopi Tahun 2024 mencapai 3.039,28 dibanding Tahun 2023 yang mencapai 2,975.88 ton. Keempat daerah tersebut memiliki produksi perkebunan kopi tertinggi di kabupaten bolaang mongondow yakni diatas 500 Kg/ Ha Tahun. Walaupun tanaman kopi buka menjadi promadona petani perkebunan di kabupaten Bolaang Mongondow namun kualitas hasil olahan Biji kopi dapat bersaing dengan daerah-daerah lain penghasil kopi sehingga pemerintah daerah wajib untuk memberikan perhatian terhadap petani kopi yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow.

Grafik 2.4
Luas Areal dan produksi Tanaman Kopi Tahun di
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Perkebunan tahun 2025

5. Komoditi Pala.

Tanaman pala tidak termasuk komoditi unggulan di kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana yang di tetapkan oleh kementerian Pertanian, namun keinginan petani Bolaang Mongondow dalam mengembangkan usaha perkebunan pada komoditi pala semakin tinggi. Data Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow mencatat bahwa luas wilayah perkebunan pala di kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar 1.610,29 sedikit meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 1.541,49 Ha dengan Jumlah Produksi tahun 2024 mencapai 62,49 ton. Kecamatan yang memiliki areal perkebunan pala terluas di kabupaten Bolaang Mongondow adalah Bilalang yakni 246,25 Ha dan rata-rata berada di daerah pesisir yakni kecamatan lolak, Bolaang, Bolaang Timur, Poigar dan Sangtombolang.



Grafik 2.5
Luas Areal dan produkis Tanaman Pala Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Perkebunan tahun 2025

6. Komoditi Kemiri.

Luas Areal perkebunan untuk jenis komoditi Kemiri pada tahun 2024 adalah sebesar 681,00 Ha dan yang terbesar berada di wilayah kecamatan Dumoga yakni 166,42 ha, komoditas ini jarang dijadikan petani sebagai komoditas utama pada usaha perkebunan petani padahal secara ekonomi tanaman kemiri memiliki nilai jual yang cukup tinggi serta membutuhkan biaya produksi yang tidak begitu besar, tanaman ini juga tidak membutuhkan perawatan yang begitu intensif jika dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya, tanaman ini mampu bertahan pada kondisi tanah dan cuaca yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow. Data produksi menyebutkan bahwa pada data tahun 2024 jumlah produksi tanaman ini mencapai 471,00 ton, sehingga kedepan Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow akan menargetkan Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki daerah- daerah yang menjadi sentra produksi tanaman kemiri, tentunya hal ini dapat terwujud dengan dukungan peralatan pengolahan hasil Buah kemiri seperti mesin pemecah kemiri karena harga pasaran Biji Buah kemiri kering yang belum dipecahkan dan dengan sudah di pecahkan memiliki selisih harga yang cukup tinggi.

Grafik 2.6
Luas Lahan dan Produksi Kemiri di kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020- 2024



Sumber: Statistik Perkebunan 2025

g. Kawasan Perikanan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, maka berpotensi dikembangkan pada :

- a) Kawasan perikanan tangkap: Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang;
- b) Kawasan budidaya air tawar: Kecamatan Lolayan, Kecamatan Passi Barat, Passi Timur, Kecamatan Bilalang, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Barat, dan Kecamatan Dumoga Timur;
- c) Kawasan budidaya laut: Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang;
- d) Kawasan Budidaya Air Tawar: Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang;
- e) Kawasan Budidaya Air Payau (tambak): Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang .

Untuk melihat kondisi perikanan secara utuh maka bisa dilihat pada hal berikut ini :

1. Produksi Perikanan

Indikator ini menggambarkan total hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Bolaang Mongondow selang tahun 2020-2024. Perkembangan produksi hasil perikanan selang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:





Tabel 2.6
Peningkatan Hasil Produksi (Ton)

No	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan Laut	10,847.33	10,931	11,818	11,874.25	11.974
2	Perairan Umum	29.5	-	-	-	-
3	Perikanan budidaya Laut	-	-	-	-	-
4	Tambak	51.60	23.10	42.61	55.32	0,70
5	Kolam	86.25	142.40	164.98	248.18	304,19
6	Jaring Apung	-	-	-	-	-
Jumlah		11,114.68	12,025.59	11,096.50	12,025.59	12,177.75

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow 2025

Dengan mengacu pada hasil produksi perikanan tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk lebih memaksimalkan sosialisasi mengenai Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan memaksimalkan armada tangkap dan teknik penangkapan ikan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan.

2. Peningkatan Konsumsi Ikan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Sedangkan dari segi pendapatan nelayan dari tahun 2020-2024 cenderung terjadi fluktuasi. Peningkatan pendapatan terjadi pada tahun 2022, sementara ditahun 2023 terjadi penurunan NTN dan kembali menurunkan trend positif ditahun 2024 mencapai 103.60. Berikut adalah data Konsumsi Ikan dan NTN di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.7
Data Konsumsi Ikan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

No	Indikator	Jumlah Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Tukar Nelayan	101	102	104	103.30	103.60

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025

Pada sektor pertanian yang turut menyumbang kontribusi PDRB adalah subsektor perikanan, khususnya perikanan tangkap. Untuk jumlah produksi baik perikanan laut maupun perairan umum cenderung mengalami penurunan produksi hal tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.8
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Jumlah Tangkapan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerapu	487.91	103	96.27	100.97	100.00
2	Kakap	298.24	327	301.00	301.00	293.31
3	Layang	1,195.12	2,408.76	2,883.00	2,596.00	1600.00
4	Selar	1,354.35	1,081.24	1,851.30	2,165.00	899.88
5	Kuwe	557.87	1,107	837.41	1,120.70	521.24
6	Julung-julung	379.37	885	120.00	120.00	0.18
7	Teri	1,123.12	360	1,427.18	1,039.00	1309.62
8	Kembung	832.79	379	390.11	400.00	150.00
9	Tuna	875.21	44	11.92	11.92	200.15
10	Cakalang	1,256.32	1,990	1,691.00	1,804.70	2663.44
11	Tongkol	1,354.35	1,157	1,408.50	1,408.50	3114.00
12	Madidihang	1,025.75	718.83	738.00	738.00	1120.68
13	Antoni/Ikan Terbang	78.63	53.17	46.00	52.96	0.25
14	Sardin	458.87	316	15.24	15.00	0.25
15	Marlin	-	1	1.04	0.50	1.00

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025

Pada Perikanan Tangkap, produksi perikanan Budidaya cenderung mengalami kenaikan produksi, kecuali beberapa jenis ikan budidaya yang selain permintaan pasar yang kurang, juga karena proses keberhasilan terhadap budidaya yang rendah, juga minat petani ikan terhadap usaha ini yang semakin kurang. Berikut data produksi perikanan budidaya sampai tahun 2024.

Tabel 2.9
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jumlah Tangkapan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Udang Vaname	8,6	12,8	17,10	0,71	0,74
2	Bandeng	8,4	10,3	25,51	54,61	54,70
3	Ikan Nila	46,5	125	163,46	243,97	245,40
4	Ikan Mas	7,2	17,4	1,46	4,02	4,10
5	Ikan Gabus	0,1	-	0,06	0,19	0,19

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025



2.1.1.3. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Kapasitas daya dukung ekosistem bumi mempunyai batas-batas tertentu. Hal ini mempunyai arti bahwa sampai tingkat tertentu ekosistem bumi dan biosfer masih mampu bertahan terhadap gangguan atau beban tanpa mengalami kerusakan yang membahayakan. Penentuan daya dukung daya tampung sumberdaya tersebut menjadi sangat penting untuk dipahami dan diketahui agar pemanfaatannya tidak terlampaui sehingga dapat menjadi sumberdaya yang terbarukan atau dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan daya dukung lingkungan hidup (DDLH) dan daya tampung lingkungan hidup (DTLH). Pengertian daya dukung lingkungan hidup itu sendiri adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya. Sementara, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pelestarian fungsi lingkungan hidup atau rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) menjadi sangat penting untuk dilakukan agar lingkungan hidup mampu memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa menyebabkan terjadinya degradasi fungsi.

Tantangan utama dalam mengelola lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara upaya pemenuhan kebutuhan manusia akan sumberdaya alam dengan kemampuan lingkungan hidup untuk menyediakan sumberdaya alam agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, upaya mempertahankan keseimbangan tersebut harus dipandang selain untuk pemenuhan jangka pendek juga untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, DDDTLH menjadi penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemeliharaan lingkungan hidup, maupun melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Evolusi pemahaman ini berdasarkan pertimbangan bahwa jasa lingkungan mewakili kemampuan lingkungan hidup secara holistik, termasuk menggambarkan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep ini lebih melihat pada pemanfaatan sumber daya alam secara luas dengan pertimbangan fungsi yang dihasilkan dari interaksi unsur biotik dan abiotik sebagai modal alam. Jasa lingkungan teridentifikasi sebanyak 23 jenis (MEA, 2005) yang kemudian dikelompokkan menjadi jasa penyedia, jasa pengatur, jasa pendukung dan jasa budaya. Meskipun demikian, perhitungan kinerja jasa lingkungan hidup diprioritaskan hanya pada 7 jasa lingkungan.

Tujuh Jasa Lingkungan tersebut beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Jasa Lingkungan Penyedia Air

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air adalah kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan jasa penyediaan air untuk para



pemanfaatnya. Indikator keadaannya adalah jumlah total air (m³/ha), sedangkan indikator kinerjanya adalah jumlah maksimum ekstraksi air secara berkelanjutan (m³/ha/tahun).

Secara umum di Kabupaten Bolaang Mongondow lahan yang mampu menyediakan air bersih dapat dibagi menjadi lahan berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki luasan sebesar 1.135,55 hektar atau sekitar 0,34% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan lahan yang masuk dalam kategori sangat rendah dalam penyediaan air bersih memiliki luasan sebesar 3.063,22 hektar atau sekitar 0,9 %. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut.

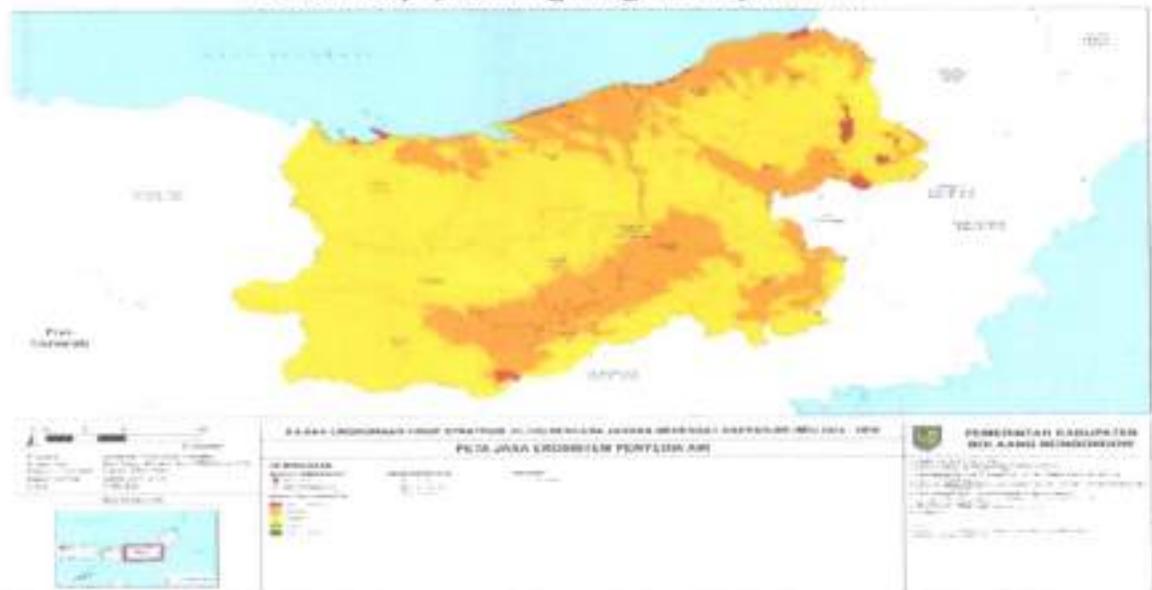
Tabel 2.10
Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air

KECAMATAN	INDEKS JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR (Ha)					TOTAL LUAS (Ha)	TOTAL PERSEN(%)
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI		
Kecamatan Bilalang	547,34	1.338,61	4.477,89	-	15,41	6.379,25	1,94
Kecamatan Bolaang	49,77	3.537,79	16.607,29	22,02	226,04	20.442,92	6,21
Kecamatan Bolaang Timur	199,66	3.782,43	4.121,38	11,89	29,98	8.145,34	2,47
Kecamatan Dumoga		12.395,55	9.754,86	4,56	94,49	22.249,47	6,76
Kecamatan Dumoga Barat	425,08	9.329,99	38.465,33	4,71	116,29	48.341,40	14,69
Kecamatan Dumoga Tengah	-	2.342,07	2.547,16	0,24	24,13	4.913,60	1,49
Kecamatan Dumoga Tenggara	-	4.239,37	9.203,83	0,15	30,92	13.474,27	4,09
Kecamatan Dumoga Timur	-	5.959,35	6.373,46	1,19	52,91	12.386,91	3,76
Kecamatan Dumoga Utara	-	3.894,98	24.466,62	0,08	35,80	28.397,49	8,63
Kecamatan Lolak	282,41	13.814,73	32.591,33	53,60	271,14	47.013,22	14,28
Kecamatan Lolayan	15,24	9.469,66	21.038,02	1,51	49,40	30.573,83	9,29
Kecamatan Passi Barat		5.103,58	6.848,71		39,92	11.992,21	3,64
Kecamatan Passi Timur	862,19	1.188,84	7.448,21	12,41		9.511,65	2,89
Kecamatan Poigar	379,82	10.701,91	15.602,95	8,33	68,11	26.761,11	8,13
Kecamatan Sang Tombolang	301,69	4.287,89	33.891,15	5,14	80,99	38.566,85	11,72
BOLAANG MONGONDOW	3.063,22	91.386,74	233.438,18	125,83	1.135,55	329.149,53	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kab Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029



Gambar 2.6
Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air



Sumber: KLHS RPJMD Kab Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029

2. Analisis Daya Dukung Penyediaan Pangan

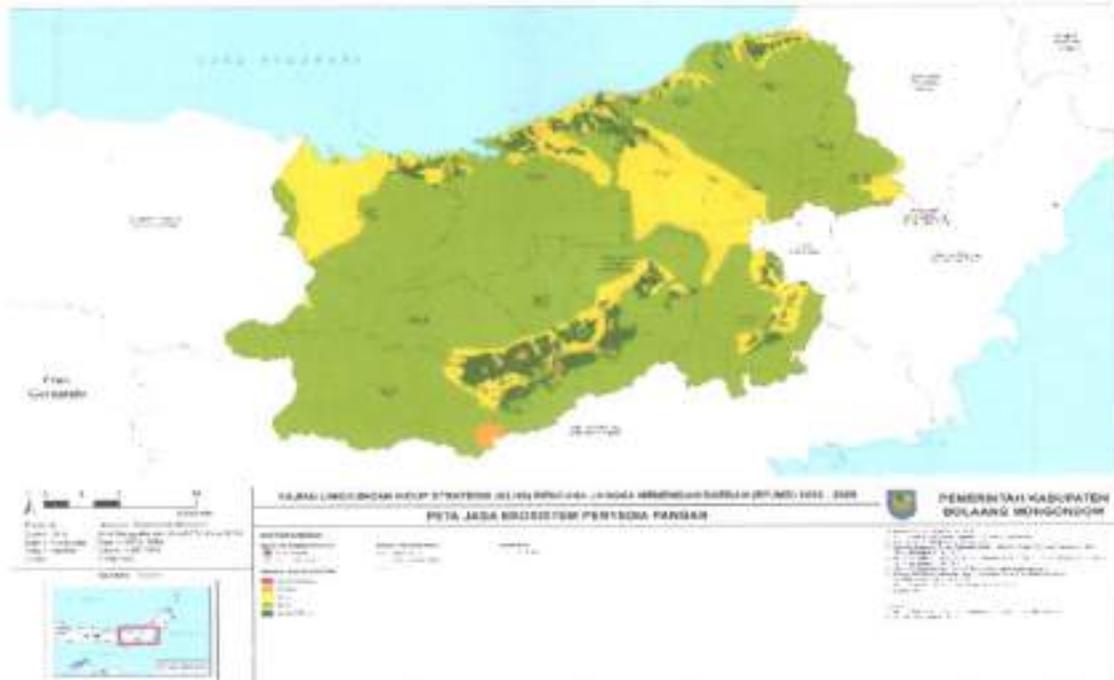
Dari hasil analisa, jasa lingkungan penyedia pangan secara keseluruhan di wilayah ini masih sangat baik. Hanya sebesar 0,07% atau seluas 238,65 ha wilayah sangat rendah dalam menyediakan kebutuhan pangan. Areal dengan kelas sangat rendah ini tersebar di Kecamatan Bolaang, Bolaang Timur, Dumoga Barat, Lolak, Poigar dan Sang Tombolang, hal ini disebabkan karena terdapat wilayah dataran marin berpasir dan pegunungan vulkanik kipas bermaterial batuan beku luar. Daerah dengan kelas rendah hanya sebesar 1,47% dari total luas wilayah, areal dengan kategori ini sebagian besar merupakan areal permukiman dan tempat kegiatan. Kontribusi penyedia pangan dengan kelas sangat tinggi didominasi oleh areal sungai dan persawahan. Luas dan persentase jasa lingkungan penyedia pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.11 dan sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.11.

Tabel 2.11
Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

KECAMATAN	INDEKS JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN (Ha)						PERSEN (%)
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	TOTAL (Ha)	
Kecamatan Bilalang		62,37		6.301,48	15,41	6.379,25	1,94
Kecamatan Bolaang	35,99	215,37	13.570,54	5.835,43	785,58	20.442,92	6,21
Kecamatan Bolaang Timur	72,80	73,78	799,78	6.941,25	257,73	8.145,34	2,47
Kecamatan Dumoga		201,82	3.152,72	17.370,55	1.524,38	22.249,47	6,76
Kecamatan Dumoga Barat	3,44	1.262,92	2.168,22	43.074,38	1.832,45	48.341,40	14,69
Kecamatan Dumoga Tengah		266,91	245,27	3.362,48	1.038,94	4.913,60	1,49
Kecamatan Dumoga Tenggara		170,92	1.057,16	10.627,12	1.619,07	13.474,27	4,09
Kecamatan Dumoga Timur		446,42	1.272,79	7.901,74	2.765,95	12.386,91	3,76
Kecamatan Dumoga Utara		357,30	1.143,39	24.597,51	2.299,28	28.397,49	8,63
Kecamatan Lolak	40,55	691,66	6.115,69	36.137,41	4.027,92	47.013,22	14,28
Kecamatan Lolayan		404,58	6.686,38	21.813,74	1.669,13	30.573,83	9,29
Kecamatan Passi Barat		168,96	5.001,15	6.788,67	33,43	11.992,21	3,64
Kecamatan Passi Timur		146,54	1.427,33	7.937,78		9.511,65	2,89
Kecamatan Poigar	73,24	204,05	1.939,53	23.485,78	1.058,51	26.761,11	8,13
Kecamatan Sang Tomholang	12,63	178,84	16.193,97	21.075,30	1.106,11	38.566,85	11,72
BOLAANG MONGONDOW	238,65	4.852,44	60.773,93	243.250,62	20.033,89	329.149,53	100,00

Sumber: KLHS RPJMD 2025

Gambar 2.7
Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan



Sumber: KLHS RPJMD 2025

Informasi status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai faktor pembatas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Faktor pembatas dalam status ini adalah ambang batas populasi yang dapat dilayani oleh jasa lingkungan penyedia sumber daya (sebagai contoh air dan pangan). Dalam skenario pembangunan berkelanjutan maka pemanfaatan sumberdaya alam di dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sesuai dengan pasal 12 ayat 2 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar memperhatikan 3 hal sebagai berikut:

1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat

Hasil analisis data spasial penentuan status yang disampaikan adalah Pangan dan Air dengan kategori "Melampaui" dan "Belum Melampaui" dapat kita lihat pada Tabel 2.12 dibawah ini.



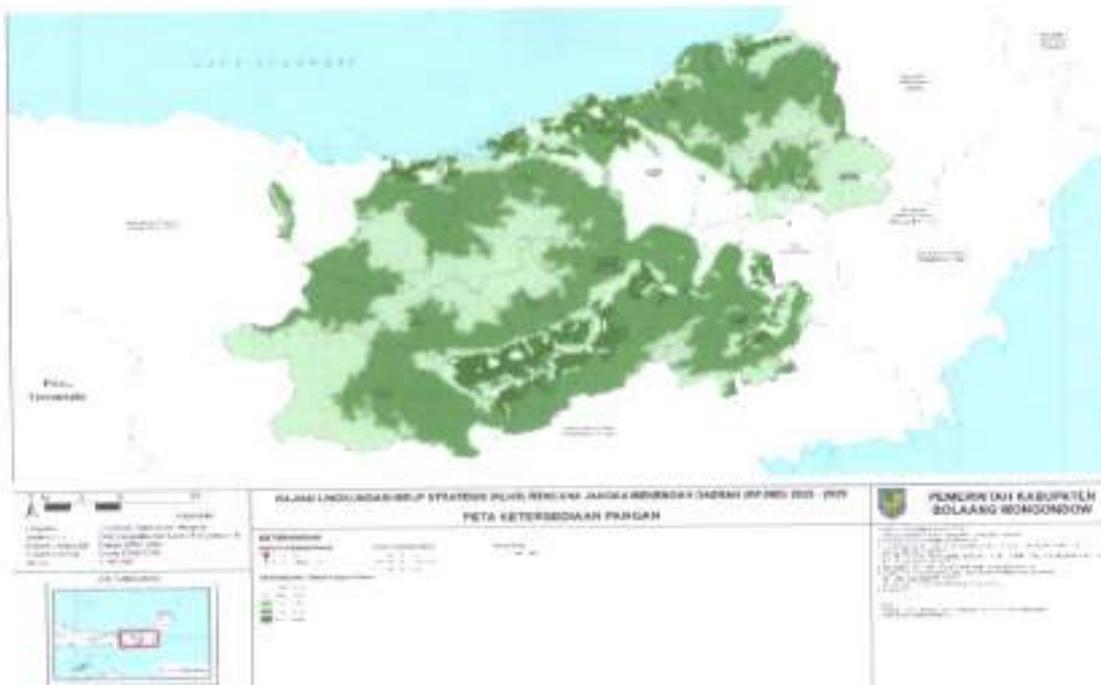
Tabel 2.12
Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pangan

KECAMATAN	Ketersediaan (Kg/Tahun)	Kebutuhan (Kg/Tahun)	Selisih (Kg/Tahun)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Status Daya Dukung	
					Belum Melampaui	Melampaui
Kecamatan Bilalang	2.295.894	2.264.902	30.992	21.083	8.874,60	1.576,67
Kecamatan Bolaang	6.653.568	9.786.190	-3.132.621	61.098	36.547,64	8.846,83
Kecamatan Bolaang Timur	2.902.210	6.188.569	-3.286.359	26.650	13.653,02	5.290,73
Kecamatan Dumoga	7.815.961	5.224.913	2.591.048	71.772	33.088,62	12.356,80
Kecamatan Dumoga Barat	17.444.766	6.611.972	10.832.794	160.191	60.478,97	10.637,79
Kecamatan Dumoga Tengah	1.843.578	4.808.806	-2.965.228	16.929	4.714,53	7.255,91
Kecamatan Dumoga Tenggara	4.754.861	3.084.484	1.670.378	43.663	15.814,14	7.315,04
Kecamatan Dumoga Timur	4.686.388	6.833.693	-2.147.305	43.034	13.743,21	11.529,06
Kecamatan Dumoga Utara	10.078.129	3.657.733	6.420.396	92.545	33.990,52	5.328,29
Kecamatan Lolak	16.722.393	13.879.414	2.842.979	153.557	67.524,42	28.552,58
Kecamatan Lolayan	11.202.493	11.847.122	-644.630	102.870	41.520,06	20.138,98
Kecamatan Passi Barat	3.994.909	5.356.247	-1.361.338	36.684	17.342,93	2.789,01
Kecamatan Passi Timur	3.479.214	4.100.303	-621.089	31.949	12.332,53	5.070,75
Kecamatan Poigar	9.690.241	6.346.146	3.344.094	88.983	41.173,20	11.317,21
Kecamatan Sang Tumbolang	13.395.345	4.700.015	8.695.330	123.006	53.334,51	10.085,46
BOLAANG MONGONDOW	116.959.950	94.690.510	22.269.440	1.074.012	454.132,90	148.091,11

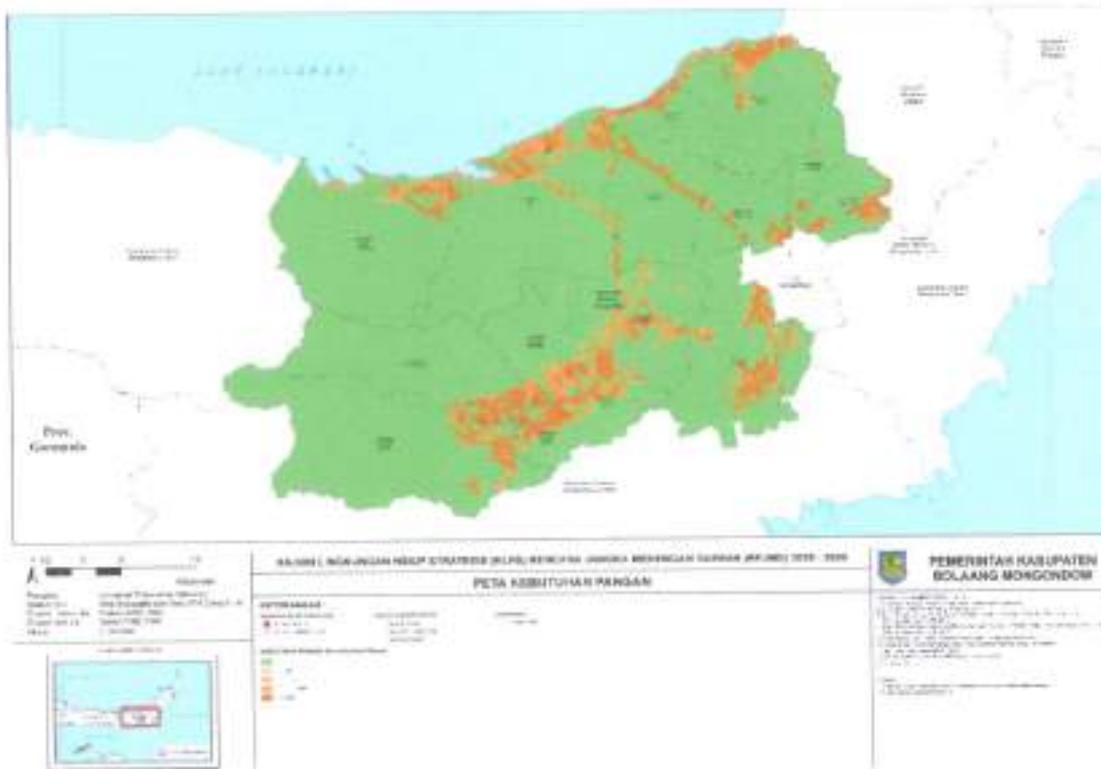
Sumber: KLHS RPJMD 2025

A

Gambar 2.8
Peta Ketersediaan Pangan



Gambar 2.9
Peta Kebutuhan Pangan





Gambar 2.10
Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Pangan

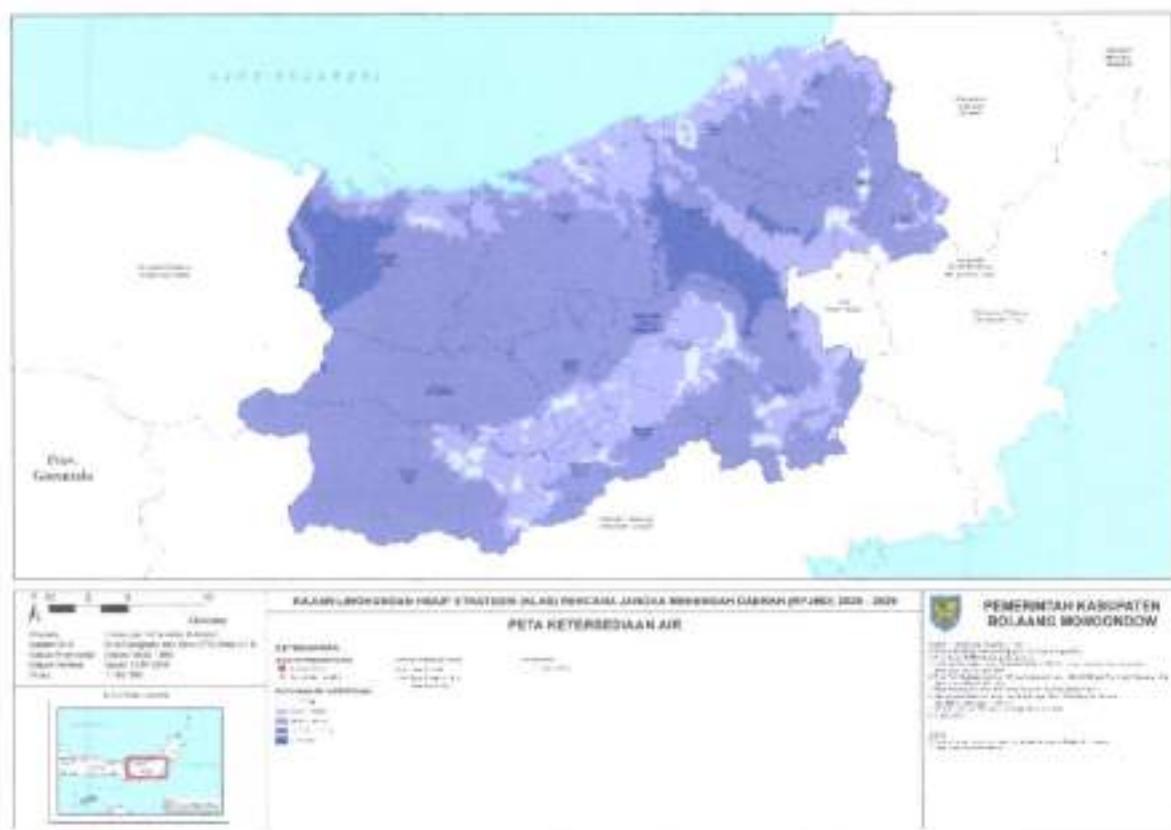


Tabel 2.13
Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Air

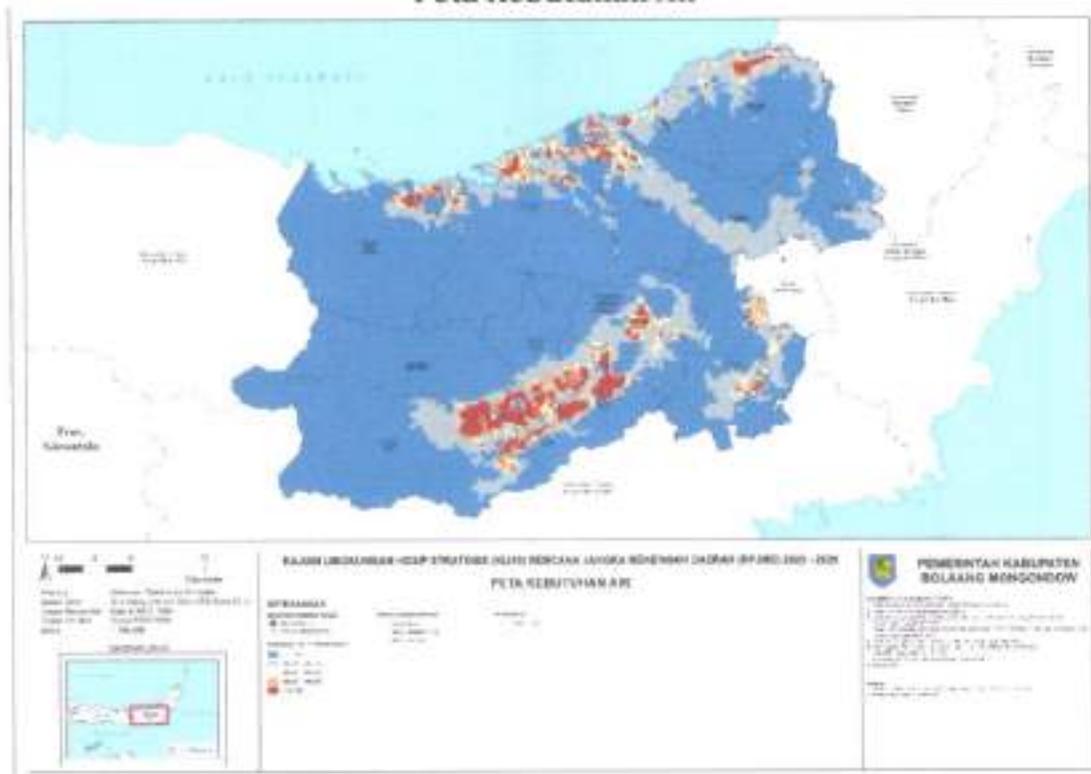
KECAMATAN	Ketersediaan (m3/Tahun)	Kebutuhan (m3/Tahun)	Selisih (m3/Tahun)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Status Daya Dukung	
					Belum Melampaui	Melampaui
Kecamatan Bilalang	31.113.480,38	17.452.795,83	13.660.684,55	165.158	4.476,77	1.902,48
Kecamatan Bolaang	97.304.330,43	67.279.390,51	30.024.939,93	369.302	13.644,46	6.798,46
Kecamatan Bolaang Timur	36.618.199,93	33.496.861,01	3.121.338,92	48.711	4.527,81	3.617,53
Kecamatan Dumoga	96.133.614,86	95.168.909,38	964.705,48	26.304	12.519,73	9.729,74
Kecamatan Dumoga Barat	217.138.053,01	101.199.097,25	115.938.955,76	1.360.094	39.117,73	9.223,67
Kecamatan Dumoga Tengah	23.785.415,00	42.454.461,40	-18.669.046,39	-204.094	2.496,62	2.416,98
Kecamatan Dumoga Tenggara	64.542.607,15	64.569.567,97	-26.960,82	9.840	9.463,21	4.011,06
Kecamatan Dumoga Timur	56.435.091,33	88.828.251,30	-32.393.159,97	-354.023	6.764,33	5.622,58
Kecamatan Dumoga Utara	134.950.602,32	71.708.569,16	63.242.033,15	747.002	24.653,64	3.743,85
Kecamatan Lolak	208.171.186,19	141.351.495,70	66.819.690,49	810.697	33.964,52	13.048,70
Kecamatan	137.737.561,20	89.338.953,69	48.398.607,51	587.656	21.195,50	9.378,33

Lolayan						
Kecamatan Passi Barat	52.406.174,97	43.131.615,85	9.274.559,12	123.921	6.844,72	5.147,49
Kecamatan Passi Timur	41.857.177,00	22.101.278,64	19.755.898,36	242.112	6.415,31	3.096,34
Kecamatan Poigar	115.897.547,79	88.940.094,22	26.957.453,57	332.122	16.927,76	9.833,35
Kecamatan Sang Tombolang	181.214.323,50	46.111.436,86	135.102.886,64	1.574.832	34.479,96	4.086,89
BOLAANG MONGONDOW	1.495.305.365,07	1.013.132.778,77	482.172.586,30	5.839.634	237.492,08	91.657,45

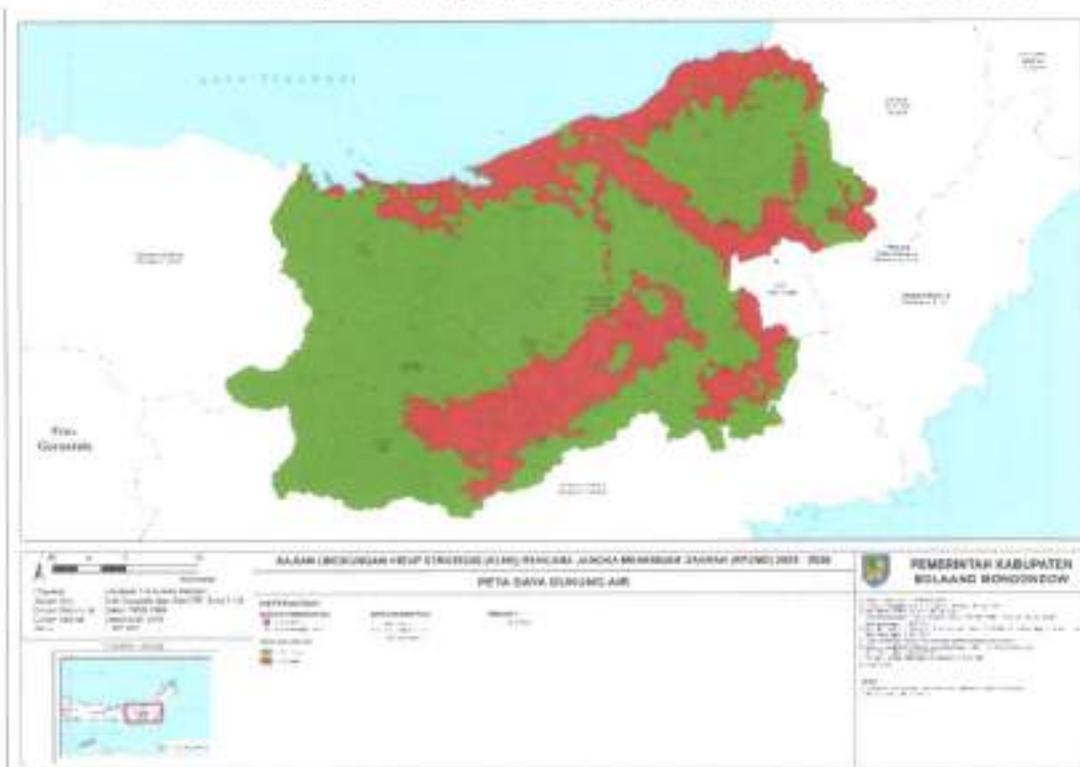
Gambar 2.11
Peta Ketersediaan Air



Gambar 2.12
Peta Kebutuhan Air



Gambar 2.13
Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air





2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan adalah tiga hal krusial yang saling berkaitan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketahanan energi, air, dan pangan akan menjamin keberlangsungan kehidupan, kemandirian, dan keamanan suatu negara. Pangan, energi, dan air memiliki keterkaitan yang kuat, termasuk dampaknya terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Ketahanan energi mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Hal ini dapat dicapai melalui diversifikasi sumber energi, pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan. Ketahanan air adalah kemampuan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang cukup dan berkualitas untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, konservasi air, dan peningkatan efisiensi penggunaan air menjadi kunci dalam mencapai ketahanan air. Kemandirian pangan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, dari produksi dalam negeri, tanpa terlalu bergantung pada impor. Peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, pengembangan industri pangan lokal, pemberdayaan petani, dan peningkatan tata kelola pertanian.

Air merupakan faktor penting dalam produksi pangan, karena setiap tahap pertumbuhan tanaman membutuhkan suplai air yang cukup. Ketahanan pangan suatu negara sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Peran ketahanan sumber daya air dapat meningkatkan produktivitas terkait ketahanan pangan dan juga dapat menghasilkan energi. Pentingnya sinergi antar sektor, termasuk infrastruktur dan lingkungan hidup, dalam mencapai ketahanan energi, air, dan pangan.

Dalam rangka mewujudkan harapan bangsa dalam memenuhi dan menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri, Presiden Prabowo melalui 8 (delapan) misi Asta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah mengakomodasi swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional yakni dalam Prioritas Nasional 2 yang berfokus pada pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Lebih lanjut dalam Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, swasembada pangan dimasukkan sebagai program pertama dalam 17 Program Prioritas Presiden dengan fokus untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang mengakomodasi pengaturan terkait pangan. Bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17

A

Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketahanan energi air dan kemandirian pangan di Bolaang Mongondow merupakan dua hal penting yang saling berkaitan. Keduanya menjadi fokus dalam upaya pembangunan daerah, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah berupaya mewujudkan hal ini melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk pengembangan infrastruktur irigasi, pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan produksi pangan.

A. Ketahanan Energi Air.

1. Pengembangan Infrastruktur.

Pembangunan bendungan, seperti Bendungan Lolak, berperan penting dalam menyediakan air untuk irigasi pertanian dan juga potensi pembangkit listrik tenaga air. Bendungan ini diharapkan mampu menyediakan kapasitas air hingga kurang lebih 12.400.000 M3 dengan pelayanan kurang lebih 2.500 Ha. Selain bendungan lolak juga ada Bendungan Toraut dengan kapasitas 11,70 m3/dtk untuk pelayanan 7.803 ha, Bendung Kosinggolan dengan kapasitas 8,07 m3/dtk untuk pelayanan 5.381 ha, Bendungan Ayong - Maelang untuk pelayanan kurang lebih 2.293 ha, Bendungan Pusian - Molong untuk pelayanan kurang lebih 1.171 ha, Bendungan Lolak - Pinogaluman untuk pelayanan kurang lebih 2.040 ha, Bendungan Katulidan - Sinantakan di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu untuk pelayanan kurang lebih 650 ha dan Bendungan Poigar untuk pelayanan kurang lebih 1.000 ha.

2. Pengelolaan sumber daya air.

Pengaturan tata kelola air yang baik, termasuk sistem irigasi yang efisien, sangat krusial untuk memastikan ketersediaan air bagi pertanian dan kebutuhan lainnya. Daerah irigasi, meliputi DI kewenangan nasional dan DI kewenangan propinsi yang ada di kabupaten, serta DI kewenangan kabupaten.

a. Saluran irigasi nasional, yaitu Saluran Irigasi Primer yang terdiri atas: Saluran Irigasi Primer Torout Kiri sepanjang kurang lebih 29,32 km; Saluran Irigasi Primer Torout Kanan sepanjang kurang lebih 4,56 km; dan Saluran Irigasi Primer Kosinggolan sepanjang kurang lebih 33,22 km.

b. Saluran irigasi propinsi, meliputi:

a. Saluran Irigasi Primer, meliputi: Saluran Irigasi Primer Torout Kanan sepanjang kurang lebih 4,56 km, Saluran Irigasi Primer Ayong - Maelang sepanjang kurang lebih 1,85 km, Saluran Irigasi Primer Pusian sepanjang kurang lebih 1,92 km, Saluran Irigasi Primer Lolak - Pinogaluman sepanjang kurang lebih 5,76 km, Saluran Irigasi Primer Katulidan - Sinantakan di Kotamobagu dan Bolaang Mongondowsepanjang kurang lebih 0,768 km dan Saluran Irigasi Primer Poigar sepanjang kurang lebih 1,35 km; dan

b. Saluran irigasi sekunder, meliputi: Saluran Irigasi Sekunder Ayong





- Maelang sepanjang kurang lebih 15,62 km, Saluran Irigasi Sekunder Pusian-Molong sepanjang kurang lebih 19,55 km, Saluran Irigasi Sekunder Lolak-Pinogaluman sepanjang kurang lebih 6,54 km, Saluran Irigasi Sekunder Katulidan-Sinantakan di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu sepanjang kurang lebih 3,47 km, Saluran Irigasi Sekunder Poigar sepanjang kurang lebih 6,85 km, Saluran Irigasi Sekunder Torout sepanjang kurang lebih 37,405 km dan Saluran Irigasi Sekunder Kosinggolan sepanjang kurang lebih 14,594 km.

c. Saluran irigasi Kabupaten.

Pada infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut.

Sampai dengan tahun 2024, di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 75 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area 9.059 Ha, dimana 54,29% kondisi baik; 10,00% Sedang, 15,71% rusak ringan, dan rusak berat 20,00%.

Informasi bangunan yang ada di Daerah Irigasi Kabupaten Bolaang Mongondow adalah:

- 97 buah bendung yang melayani 75 Daerah Irigasi.
- Panjang saluran yang sudah terbangun 211,354 M
- Jumlah bangunan sadap 177 Bh
- Jumlah bangunan pelengkap 227 Bh

Dibidang cipta karya, pembangunan dilaksanakan terhadap pekerjaan penyediaan air bersih, sanitasi berbasis masyarakat, revitalisasi kawasan kumuh, revitalisasi kawasan pariwisata pembangunan drainase dan gorong-gorong. Hal ini dilakukan karena pemenuhan kebutuhan air bersih di desa-desa masih belum maksimal.

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki 6 sungai, dengan sungai terpanjang yaitu sungai Dumoga, mengalir sepanjang 87,2 Km dan yang terpendek adalah sungai Moyosiboi dengan panjang 11,2 Km. Selain sungai, terdapat 3 Danau dimana yang terluas adalah danau Iloloi sebesar 52 Ha dan yang terkecil adalah danau Paya-paya sebesar 15 Ha.

Rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah mencapai 68,56%. Dimana sumber air bersih yang digunakan yaitu mata air dan sungai. Tabel berikut adalah data sumber air.



Tabel 2.14
Potensi Sumber Air Bersih Kabupaten Bolaang Mongondow

No.	Nama Desa	Nama Sumber Air	Debit (Ltr/Det)	Elevasi (M)
1	Matayangan	Mata Air 1	1	293
2	Matayangan	Mata Air 2	1	282
3	Toraut Utara	Mata Air	1	270
4	Toraut Utara	Air Terjun Sungai London	2	283
5	Toraut Tengah	Sungai	10	284
6	Toraut Tengah	Mata Air Tondait	0,5	194
7	Toraut	Mata Air Tapa Sinomontoyung	0,5	201
8	Mekaru	Mata Air Lembayang	1	177
9	Mopugat Utara 2	Mata Air Werdi Guna	0,5	293
10	Tonom	Potensi Air Bersih	3	262
11	Pinonobatan Barat	Mata Air	2	154
12	Dumoga IV	Mata Air Mobilai	5	310
13	Kosio	Mata Air Moyogang	2	372
14	Werdi Agung Timur	Mata Air Toyo Suci	0,3	155
15	Ikuna	Sungai Dumara	10	216
16	Kanaan	Mata Air Molimongot Kanda Singa	0,5	487
17	Kanaan	Mata Air Molimongot Kanda Singa	0,5	459
18	Siniyung I	Mata Air Siniyung I	0,5	180
19	Ponompiaan	Mata Air	0,75	179
20	Serasi	Mata Air Serasi	0,5	436
21	Pusian Barat	Mata Air Pusian Barat	0,5	222
22	Pusian	Mata Air Pusian	0,5	222
23	Toruakat	Mata Air	0,5	
24	Bombanon	Mata Air Bombanon	3	404
25	Tapaaog	Mata Air Moyantow 2	3	354
26	Tungoi II	Mata Air Gunung	2	368
27	Mengkang	Mata Air Lolipoga	2	465
28	Mengkang	Mata Air Yuyatabon	2	430
29	Inuai	Sungai Inuai	20	126
30	Otam Barat	Mata Air Bersih Otam Barat	2	400
31	Otam	Mata Air Otam	2	350
32	Insil Induk	Mata Air PNPM	2,00	1075
33	Pangian Induk	Mata Air Jalan Roda	0,50	537
34	Poopo Induk	Hulu Dayanan (BAK)	0,50	654
35	Mobuya	Mata Air Mobuya	1,00	941
36	Mariri Baru	Mata Air Nayoan	0,5	81
37	Tanjung Mariri	Mata Air Lalibu	2	37
38	Mariri Satu	Sumber Air Sungai Mariri Satu	2	267
39	Mariri Lama	Sumber Air Bersih	2	507



40	Noanapan II	Lokasi LPA	5	9
41	Nonapan Baru	Sumber Air Bersih Dari Nonapan II	2	9
42	Nonapan I	LPA	5	9
43	Nonapan	LPA	5	9
44	Tiberias	Mata Air Tiberias	2	
45	Mondatong	Sungai Mondatong	20	66
46	Nanasi Timur	Sungai Mondatong	20	66
47	Nanasi Timur	Mata Air Gunung	2	185
48	Diat	Mata Air Kapaya	2	30
49	Kolingangaan	Mata Air Kolingangaan	0,5	498
50	Tuduaog Baru	Mata Air Tuduaog Baru	0,5	485
51	Bilalang Baru	Sumber Air Bilalang Baru	0,5	224
52	Ambang I	Mata Air Agabun	3	368
53	Ambang II	Mata Air Ambang II	3	47
54	Babo	Lokasi Air Bersih yang Belum Dimanfaatkan	0,5	54
55	Pangi Timur	Mata Air Batu Gara	0,5	183
56	Bolangat Timur	Lokasi Potensi Mata Air	0,2	36
57	Domisil Moonow	Lokasi Sumber Air Bersih	1	188
58	Pangi Timur	Lokasi Sumber Air Bersih	1	67

Sumber: Dinas Pu dan Tata Ruang Kab BolMong 2025

Meskipun terdapat banyak sumber air di Kab. Bolaang Mongondow, belum semua Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang Layak dan Berkelanjutan tapi tiap Tahun sudah mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari data Dinas PUPR dari Tahun 2020 di angka 67,98% sampai dengan pada Tahun 2024 sudah mencapai hingga 68,63%, bisa dikatakan mengalami perkembangan di tiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk berakses air minum	40.263,00	41.842,00	42.685,00	43.043,00	43.083,00
Jumlah Rumah Tangga	59.226,00	59.996,00	59.996,00	62.773,00	62.773,00
Persentase Penduduk berakses air minum	67,98%	88,23%	71,14%	68,56%	68,63%

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bolmong 2025

Selain itu persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak dan





berkelanjutan masih terbilang rendah karena pada Tahun 2023 baru mencapai 56,67%, meskipun begitu terlihat pemerintah serius menangani masalah ini dengan peningkatan yang terjadi setiap Tahunnya, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

Data	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk berakses Sanitasi Layak	29.390	30.240	31.326	31.440	31.451
Jumlah Rumah	53.098	53.098	53.098	55.479	55.479
Presentase Penduduk berakses Sanitasi Layak	55,35%	56,95%	58,99%	56,67%	56,69%

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bolmong Tahun 2025

c. Pemanfaatan energi terbarukan.

Pemanfaatan potensi energi air melalui pembangkit listrik tenaga air dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung energi bersih. Saat ini di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow tersedia Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang terletak di Desa Lobong Kecamatan Passi Barat.

Kabupaten bolaang juga memanfaatkan Energi dan Sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat berupa listrik dan Air. Pada tahun 2024 sebanyak 416.642.200 KW listrik terpasang untuk penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun data produksi listrik yang dihasilkan, listrik terjual, digunakan oleh PLN sendiri dan yang mengalami penyusutan tersedia dari PLN cabang Kotamobagu. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024 mencapai 27.318. Berikut Mengenai jumlah daya produksi dan terjual Tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.17
Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2024

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)
2019	113.154.200	2.104.019.962	63.484.440
2020	91.212.700	2.272.836.635	67.850.556
2021	92.706.100	253.006.534.791	68.350.788
2022	55.868.900	188.876.557.070	61.066.716
2023	63.700.300	258.504.121.464	69.616.956
2024	35.337.200	280.833.216.015	78.638.880
Bolaang Mongondow	416.642.200	704.764.069.922	330.369.456

Sumber: Bolmong Dalam Angka 2025

Mengenai jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 mencapai 27.318 dengan total pelanggan mencapai 145.548 pelanggan (Bolmong dalam angka 2025). Sedangkan Untuk kebutuhan air minum selain menggunakan mata air ataupun sumur, juga disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tercatat setidaknya sebanyak 3.138 pelanggan air dari PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow di tahun 2023 dengan total penggunaan senilai 277.869.680 juta rupiah. data yang berkaitan dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam berupa air di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 dapat kita cermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Data Mengenai Penggunaan Air Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PELANGGAN	AIR DISALURKAN	NILAI
1	DUMOGA BARAT	-	-	-
2	DOMUGA UTARA	511	5.501,22	46.748.100
3	DUMOGA TIMUR	760	6.717,22	50.085.200
4	DUMOGA TENGAH	-	-	-
5	DUMOGA TENGGARA	-	-	-
6	DUMOGA	-	-	-
7	LOLAYAN	1.115	15.569,14	108.043.180
8	PASSI BARAT	-	-	-
9	PASSI TIMUR	631	8.247,00	58.120.500
10	BILALANG	-	-	-
11	POIGAR	-	-	-
12	BOLAANG	39	623,03	3.494.700
13	BOLAANG TIMUR	-	-	-
14	LOLAK	-	-	-
15	SANGTOMBOLANG	82	1.551	11.378.000
	BOLAANG MONGONDOW	3.138	38.208,61	277.869.680

Sumber: Bolmong Dalam Angka 2025

B. Kemandirian Pangan.

1. Peningkatan produksi pangan.

Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai potensi yang sangat besar, berikut ini data tentang produk-produk pertanian yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow. Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian.

Tabel 2.19

Luas Lahan Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

No.	Jenis Lahan/Komoditi	Luas Lahan (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi Sawah	21.503,01	21.503,01	21.503,01	21.503,01	21.503,01
2	Padi Ladang	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414
3	Jagung	24.811	24.811	24.811	24.811	24.811
4	Kacang-kacangan dan umbi-umbian	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5	Hortikultura	3.149,61	3.149,61	3.149,61	3.149,61	3.149,61
Total		60.227,62	60.227,62	60.227,62	60.227,62	60.227,62

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow 2025

Luas Panen merupakan luas lahan yang di tanami serta menghasilkan produksi. Capaian luas panen, produktivitas dan produksi untuk 7 (Enam) tanaman pangan utama meliputi : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.20

Capaian Produksi Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2020 - 2024

No.	Komoditi	Produksi (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi sawah	360.636,6	378.654,74	392.080,50	189.527,67	243.311,80
2.	Jagung	426.373,2	359.330,83	417.384	171.638,02	243.852,43
3.	Kedelai	721,2	548,4	0	0	0
4.	Kacang Tanah	483	278,64	351	198,30	235,59
5.	Kacang Hijau	39	75	90,60	62,30	58,57
6.	Ubi Kayu	3.564	340,38	387	249,48	272,66
7.	Ubi Jalar	1.944	1.096,2	1.224	634	657,60
8.	Kentang	9.888	21.056	37.184	15.536,00	16.590,00
9.	Wortel	391	719,44	1.298,12	813,28	633,42
10	Nenas	11.790	129.690	160.308	719,95	21.699,00
Total		815.830	891.789,63	1.101.307,2	379.379	527.311,07

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow 2025





Komoditas hortikultura yang dibudidayakan di Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari sayuran dan buah. Tanaman utama untuk komoditas sayuran adalah kentang, tanaman utama buah adalah nenas. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Untuk ketersediaan pangan dihitung dengan ratio pangan. Rasio Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun tahun 2024 mencapai 1,10 menurun dibanding tahun 2023 sebesar 1,16. Meski demikian hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow masih tahan pangan akan tetapi kurang terjamin. Kondisi tahan pangan apabila Rasio Pangan > 1,2. Berikut Tabel rasio Pangan daerah Kabupaten Bolmong.

Tabel 2.21
Rasio Pangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pangan Daerah	1,09	0,96	1,03	1,16	1,10

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah, baik itu desa, kabupaten, kota, atau provinsi. IKP disusun berdasarkan beberapa indikator yang mencakup ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Dengan kata lain, IKP adalah alat untuk mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan, mengakses, dan memanfaatkan pangan secara berkelanjutan. Jika melihat kondisi ketahanan pangan kabupaten bolaang masih dalam kondisi baik. Berikut tabel indeks ketahanan pangan di kabupaten Bolmong tahun 2020-2024

Tabel 2.22
Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	85,32	84,84	83,26	84,87	84,02

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Bolmong 2025

Sementara untuk prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat ditampilkan pada tabel berikut :



Tabel 2.23
Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	4,64	7,25	6,82	6,38	5,38

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Bolmong 2025

2. Cadangan Pangan

Rasio Pangan dihitung dari ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton per tahun) dibagi Konsumsi total (ton). Konsumsi per tahun penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow 30 ton dibagi dengan Konsumsi yang diharapkan sebesar 31 ton. Oleh karena itu untuk memenuhi ketersediaan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilakukan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat melalui Lumbung Pangan Desa dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 belum ada regulasi terkait pengandaan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Bolaang Mongodow. Setelah tahun 2023 dilakukan penyusunan regulasi dan kemudian dilakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Pada tahun 2023 sebesar 67,860 Ton CPPD dan tahun 2024 sebesar 25,520 Ton CPPD.

Berikut ini data desa dan kecamatan yang mendapat bantuan kegiatan pembangunan dan pengisian lumbung pangan masyarakat melalui dana APBD Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.24
Desa/Kecamatan Penerima Bantuan Pembangunan dan
Pengisian Lumbung Pangan Desa 2021-2024

NO	Desa/Kecamatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Kelompok Mandiri Desa Mondatong Kec. Poigar	Pengisian Lumbung Pangan 5000 Kg			
2.	Kelompok Tapak Binuni Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara	Pengisian Lumbung Pangan 5000 Kg			
3.	Kelompok Kokayang Desa Solimandungan Baru Kec. Bolsang	Pengisian Lumbung Pangan 5000 Kg			
4.	Kelompok Purnama Desa Cempaka Kec. Sang Tambah		Pengisian Lumbung Pangan 5000 Kg		
5.	Kelompok maju Bersama 1 desa Gogaluman Kec. Poigar		Pengisian Lumbung Pangan 5000 Kg		
6.	Kelompok Tirta Sidomulyo 3 Desa Mopugad Kec. Dumoga Utara		Pengisian Lumbung Pangan 5000 Kg		
7.	Gapoktan Gogaluman Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara		Pengisian Lumbung Pangan 5000 Kg		



8.	Gapoktan Maesa Desa Ibolian 1 Kec. Dumoga Tengah		Pembangunan Lumbung Pangan		
9.	Gapoktan Desa Koyayang Desa Solimandungan Baru kec. Bolaang		Pembangunan Lumbung Pangan		
10.	Gapoktan Gogaluman Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara		Pembangunan Lumbung Pangan		
11.	Gapoktan Gotong Royong Desa Lolak Kec. Lolak			Pengisian Lumbung Pangan 3000 Kg	
12.	Gapoktan Karya Tani Muda Desa Mopugad Utara 2 Kec. Dumoga Utara				Pengisian Lumbung Pangan 3000 Kg
13.	Kelompok Peterungan Desa Nonapan 2 Kec. Paigar				Pengisian Lumbung Pangan 3000 Kg
14.	Gapoktan Koyak Desa Solimandungan Baru Kec. Bolaang				Pengisian Lumbung Pangan 7000 Kg
15.	Gapoktan Maesa Desa Ibolian Kec. Dumoga Tengah				Pengisian Lumbung Pangan 7000 Kg
16.	Gapoktan Gogaluman Desa Konarom Kec. Dumoga Tenggara				Pengisian Lumbung Pangan 7000 Kg

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolmong 2025

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa untuk penyediaan cadangan pangan di tingkat masyarakat masih dibawah standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, dimana untuk penyediaan cadangan pangan melalui lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1-2 disetiap kecamatan. Dengan upaya bersama antara pemerintah, petani, dan masyarakat, Bolaang Mongondow dapat mencapai ketahanan energi air dan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan konsumsi pangan perkapita yang disertai penurunan konsumsi beras untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari serta meningkatnya kualitas konsumsi pangan/skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bolmong menunjukkan tren meningkat dari Tahun 2018 pada level 83,1 meningkat 86,5 di



tahun 2019 dan Meningkatkan lagi di tahun hingga 2020 yang mencapai 89,9 hingga menyentuh angka 90,7 dan 90,9 di tahun 2021 dan 2022. Sementara untuk tahun 2023 skor PPH menurun sebesar 82.9 dan kembali menunjukkan trend positif di tahun 2024 sebesar 90,9 sesuai perhitungan oleh Badan Pangan Nasional. Berikut tabel skor pola pangan harapan hingga tahun 2024.

Tabel 2.25
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	83,1	86,5	89.9	90.7	90.9	82.9	90.9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolmong, 2025

Pemerintah Daerah dalam hal Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melakukan kegiatan Pengembangan konsumsi pangan didukung dengan pelaksanaan kegiatan yaitu : 1) Pemanfaatan pekarangan berupa bantuan bibit tanaman pekarangan; 2) Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal; 3) Sosialisasi B2SA; 4) Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dan Propinsi.

3. Kerawanan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), dalam bentuk pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok masyarakat di daerah beresiko rawan pangan sesuai hasil pemetaan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG). Jenis bantuan kepada kelompok masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang didukung dengan potensi sumber daya alam. Indikator kinerja Pelayanan penanganan kerawanan pangan yaitu tertanganinya masyarakat yang mengalami resiko rawan pangan sebanyak 1 desa/kecamatan. Dalam kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan yaitu sebanyak desa yang telah diintervensi.

Kondisi kerawanan pangan dapat disebabkan karena:(a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya.

Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan akan melaksanakan kegiatan bantuan langsung melalui program CPPD. Adapun sasaran kegiatan ini diprioritas bagi Desa



yang rentan rawan pangan antara lain ; Desa Kolingangaan, Desa Toraut Tengah, desa dumoga 3, Desa siniung Desa nanasi dan desa Sauk Dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.26
Kecamatan dan Desa Rawan Pangan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa	Prioritas		
			Sangat Rentan	Rentan	Agak Rentan
1.	Bilatang	Kolingangaan		*	
2.	Dumoga Barat	Toraut Tengah			*
3.	Dumoga Timur	Dumoga 3			*
4.	Dumoga	Siniung			*
5.	Pergar	Nanasi			*
6.	Lotas	Sauk			*

Sumber data: Peta Rawan Pangan Kab. Bol-Mong Thn 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.

Lingkungan hidup yang berkualitas adalah lingkungan yang sehat, bersih, dan mampu mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara optimal. Lingkungan berkualitas ditandai dengan udara bersih, air bersih, pengelolaan sampah yang baik, ketersediaan ruang hijau, dan minimnya pencemaran. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Penghitungan IKLH dilakukan melalui lokasi pemantauan, metode pengambilan data dan perhitungan kualitas lingkungan hidup. Kriteria lokasi pemantauan kualitas air diantaranya adalah mewakili sumber pencemar, pada outlet daerah aliran sungai utama, pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia. Untuk lokasi pemantauan kualitas udara harus memenuhi kriteria diantaranya adalah daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk; dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi. Lokasi pemantauan kualitas Tutupan Lahan meliputi kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Sementara untuk lokasi pemantauan kualitas air laut yaitu muara sungai utama lokasi yang berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan, dan/atau ekosistem penting, berupa mangrove dan terumbu karang.

Tabel 2.27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow

Data	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	50 %	44,55%	46,6%	50 %	55 %
Indeks Kualitas Udara	94,95 %	95,43 %	95,32 %	95,87 %	93,13 %
Indeks Tutupan Lahan	80,7 %	74,9 %	74,9 %	61,04 %	61,04 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Kategori Indeks Kualitas Air dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berada pada kategori "Kurang" dengan angka rentang $25 \leq x < 50$ berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk tahun 2024 berada pada kategori "Sedang" dengan nilai 55. Kategori Indeks Kualitas Udara berada pada kategori "Sangat Baik" dengan angka rentang $90 \leq x \leq 100$.

Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 berada pada kategori "Baik" dengan angka rentang $70 \leq x < 90$ dan untuk dua tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan 2024 berada pada kategori "Sedang" dengan angka rentang $50 \leq x < 70$.

Tabel 2.28
Persentase Sampah yang Ditangani di TPA

Unsur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Produksi Sampah (ton/hari)	123 ton/hari	124 ton/hari	125 ton/hari	126 ton/hari	127 ton/hari
Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	8 ton/hari				
Persentase Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	6,6 %/hari	6,5 %/hari	6,4 %/hari	6,3 %/hari	6,2 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolmong 2025

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Setiap harinya, menghasilkan ratusan ton sampah dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, industri, perkantoran, pasar, sekolah, dan sektor komersial lainnya. Masalah ini tidak hanya menyangkut volume sampah yang terus meningkat, tetapi juga dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pencemaran air dan tanah, peningkatan emisi gas metana dari dekomposisi sampah organik, serta risiko penularan penyakit melalui vektor seperti nyamuk dan tikus menjadi ancaman yang perlu segera diatasi. Di tengah kendala



infrastruktur yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, dan tantangan implementasi kebijakan yang efektif, upaya untuk mencari solusi yang komprehensif terus dilakukan. Dalam konteks ini, pendekatan yang holistik dan kolaboratif menjadi kunci dalam menangani masalah kompleks ini. Langkah-langkah seperti partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan sampah, peningkatan kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah, serta implementasi kebijakan yang berbasis bukti dan efektif menjadi fokus utama.

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan wilayah terbesar di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas $\pm 2.977,69 \text{ km}^2$ (Bolaang Mongondow Dalam Angka 2025) atau lebih dari 20,53 % dari total luas Provinsi Sulawesi Utara $14.500,28 \text{ km}^2$ (Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2025). Jumlah penduduk Bolaang Mongondow \pm tahun 2024 sebanyak 257.378 ribu jiwa (diasumsikan kenaikan rata-rata jumlah penduduk per tahun sebesar 2%) sangat berhubungan dengan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar $\pm 2.920 \text{ ton/tahun}$ atau 6,28 %. Sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak dikelola sekitar 93,7 % (<https://sipsn.kemendh.go.id/sipsn/pemda>). Bagi Rumah Tangga di Kabupaten Bolaang Mongondow, mayoritas aktivitas yang dilakukan untuk mengelola sampah adalah dengan dibakar atau dibuang ke sungai.

Karena keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yaitu hanya ada 2 (dua) unit dump truck pengangkut sampah, sehingga dari 15 kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang terlayani baru sekitar 5 kecamatan, yaitu Lolak sebagai Ibu Kota Kabupaten. Kecamatan Lolak seluas $419,41 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 26 desa. Desa-desa yang terlayani pengangkutan sampah oleh dump truck baru 4 (empat) desa yaitu Lolak (Pasar Lolak), Lalow (Kantor Bupati, RSUD Datoe Binangkang dan Rumah Susun Pemerintah Kabupaten), Armed (Dulangon) serta Motabang atau sekitar 15 % dari total luas wilayah Kecamatan Lolak. Kecamatan Bolaang yang terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan, baru dapat terlayani di 1 kelurahan yaitu kelurahan Inobonto atau 9% dari total luas wilayah Kecamatan Bolaang. Untuk Kecamatan Dumoga Tengah yang terdiri dari 10 desa, baru terlayani di satu pasar yaitu pasar Ibolian di Desa Ibolian atau 10% dari total luas wilayah kecamatan. Kecamatan Dumoga Timur yang terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan, baru dapat terlayani di pasar Imandi atau 7 % dari total luas wilayah kecamatan. Kecamatan Dumoga Utara yang terdiri dari 16 desa, baru dapat terlayani di Pasar Mopuya Selatan atau sekitar 6% dari total luas wilayah kecamatan, sehingga capaian persentase penanganan sampah masih sangat kurang di Kabupaten Bolaang Mongondow.



Tabel 2.29
Rasio Tempat Pembuangan Sampah dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Bolaang Mongondow

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	250,783	251,535	251,535	252.648	257.378
2	Jumlah TPS (Unit)	9	9	9	9	9
3	Rasio	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolmong 2024

Untuk perhitungan kebutuhan TPS diperlukan proyeksi besaran timbulan sampah, lalu besaran timbulan sampah tersebut akan dibagi dengan ukuran volume kapasitas tiap satu unit TPS yang direncanakan, dimana untuk tiap satu unit TPS direncanakan berkapasitas 8 m³ yang diadopsi dari ukuran volume kapasitas kontainer. Dari volume timbulan sampah ini dan kapasitas TPS/Kontainer, maka dapat diproyeksikan kebutuhan fasilitas ini untuk 7 tahun ke depan.

Tabel 2.30
Proyeksi kebutuhan fasilitas TPS

Tahun	Proyeksi Timbulan Sampah ton/hari	Proyeksi Timbulan Sampah m3 /hari	Proyeksi Kebutuhan TPS/Kontainer 8 m3 (unit)
2023	126,33	69,4815	9
2024	128,45	70,6475	9
2025	131,02	72,061	9
2026	133,64	73,502	9
2027	136,31	74,9705	9
2028	139,04	76,472	10
2029	141,82	78,001	10
2030	144,65	79,5575	10

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Iklim.

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim mengacu pada kemampuan suatu sistem, baik itu komunitas, individu, atau lingkungan, untuk menghadapi dan pulih dari dampak negatif bencana alam dan perubahan iklim. Ini melibatkan tindakan preventif, adaptasi, dan pemulihan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dengan memperhatikan factor yang mempengaruhi resiliensi maka dapat Meningkatkan kemandirian Masyarakat dan lingkungan, memastikan Pembangunan dapat terus berjalan meskipun ada tantangan dari bencana dan perubahan iklim serta membantu meminimalkan kerugian akibat





bencana dan perubahan iklim baik dari segi ekonomi sosial maupun lingkungan.

Letak Kabupaten Bolaang Mongondow yang berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, Indo- Australia, Pasifik, dan Philipine, mengakibatkan mekanisme tektonik dan geologi di wilayah ini menjadi lebih rumit. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dikategorikan sebagai wilayah 5 yaitu zona tinggi dengan percepatan puncak batuan dasar mencapai 0.25g. Melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow berpotensi untuk terjadinya gempa bumi cukup tinggi lebih dari 5 Skala Richter. Ini berpotensi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

(1) Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

Kawasan rawan bencana terhadap aliran massa berupa lahar, dan kemungkinan longsoran puing vulkanik serta awan panas, bila terjadi letusan dari Gunung Ambang berpotensi terjadi di kecamatan Passi

(2) Kawasan Patahan aktif

Zona patahan aktif meliputi sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Kawasan yang rentan gerakan tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow terletak di sepanjang jalur trans Sulawesi terutama di Kecamatan Bolaang, dan Kecamatan Passi serta kawasan perbatasan kecamatan antara Kecamatan Passi Barat dengan Kecamatan Bilalang dan Kecamatan Passi timur dengan Kecamatan Poigar.

(3) Kawasan Rawan Tsunami dan Abrasi

Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami. Kawasan rawan abrasi ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan tsunami dan abrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi kecamatan Poigar, Bolaang, Bolaang Timur, Lolak dan Sang Tombolang.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 1 tahun 2013 sudah diidentifikasi besaran/luasannya wilayah rawan bencana sebagai berikut:

- Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan abrasi;
 - c. kawasan rawan banjir;
 - d. kawasan rawan tsunami; dan
 - e. kawasan rawan bencana alam geologi.

- Kawasan rawan tanah longsor, terdapat di Kecamatan Dumoga Barat dengan luas kurang lebih 792,34 ha, Bilalang dengan luas kurang lebih 1.226,17 ha, Kecamatan Bolaang dengan luas kurang



lebih 1.408,41 ha, Lolayan dengan luas kurang lebih 0,02 ha, Passi Barat dengan luas kurang lebih 4.687,16 ha, Passi Timur dengan luas kurang lebih 109,11 ha, dan Poigar dengan luas kurang lebih 1.401,08 ha.

- Kawasan rawan abrasi, terdapat di Kecamatan Lolak dengan luas kurang lebih 449,78 ha, Sang Tombolang dengan luas kurang lebih 40,58 ha, Poigar dengan luas kurang lebih 451,40 ha, Bolaang dan Bolaang Timur dengan luas kurang lebih 487,00 ha.
- Kawasan rawan banjir, tersebar di dataran rendah pada muara sungai yang terdapat di Kecamatan Dumoga Barat dengan luas kurang lebih 1.271,98 ha, Dumoga Timur dengan luas kurang lebih 4.127,01 ha, dan Dumoga Utara dengan luas kurang lebih 2.966,17 ha.
- Kawasan rawan tsunami, meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah dan/ atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di wilayah Bolaang Mongondow.
- Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi:
 - a. kawasan rawan letusan gunung api yaitu Gunung Ambang terdapat di Kecamatan Passi Timur dengan ketinggian kurang lebih 1.689 m dpl;
 - b. kawasan rawan gempa bumi meliputi kawasan yang terletak di zona patahan aktif, yaitu sesar yang termasuk dalam sistem sesar Bolaang Mongondow; dan
 - c. kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kecamatan Dumoga Barat dengan luas kurang lebih 425,87 ha, Passi Timur dengan luas kurang lebih 412,80 ha, dan Sangtombolang dengan luas kurang lebih 971,86 ha.

Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim

1. Pencegahan dan kesiap-siagaan bencana Pelatihan Relawan Desa

Dari 33 desa rawan bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow, ada sebanyak dua desa yang sudah dilakukan pelatihan relawan desa yaitu desa Lolanan dan Desa Bolangat, sehingga masih ada 28 Desa yang belum diadakan pelatihan relawan desa, dan untuk tahun 2018 s/d tahun 2023, Kegiatan Pelatihan Relawan Desa ini akan dilaksanakan setiap tahun sebanyak 140 orang dengan target desa desa yang dianggap rawan bencana, terutama di pesisir pantai utara kabupaten Bolaang Mongondow. Jumlah Relawan Desa di setiap desa, bervariasi, sehingga pelatihan ini hanya menyebutkan jumlah peserta, tanpa menyebutkan jumlah Desa yang sudah terlatih

2. Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pelaksanaan Sosialisasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2011, yang dilaksanakan di tiap kecamatan, dengan peserta adalah kepala Desa, Perangkat Desa dan Siswa/Siswi SMU sederajat, khusus Kepala Desa dan Perangkat desa, pelaksanaan sosialisasi sudah meliputi semua desa desa di kabupaten bolaang mongondow, sehingga untuk 5 tahun kedepan, target sosialisasi BPBD Kab. Bolaang Mongondow adalah Siswa/Siswi SMK se Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum pernah diberikan sosialisasi, dari total jumlah 23 SMA/SMK sederajat yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow, sudah 10 SMK/SMA yang sudah dilaksanakan Sosialisasi sehingga masih ada 13 SMK/SMA yang belum dilaksanakan Sosialisasi, ke 13 sekolah tersebut akan kami laksanakan sosialisasi secara bertahap dalam lima tahun kedepan.

3. Pemasangan papan informasi bencana dan jalur evakuasi

Pemasangan papan informasi bencana sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 yang lalu dan sudah terpasang di daerah yang dianggap rawan bencana, baik itu tanah longsor, banjir dan Gelombang Pasang dan untuk kedepan, BPBD akan memasang Papan Informasi Bencana Khusus Tsunami, serta Jalur Evakuasi Tsunami di 22 Desa di pesisir pantai Utara Kab. Bolaang Mongondow, dan untuk tahun 2024, telah dilakukan pemasangan Papan Informasi Tsunami dan Jalur Evakuasi Tsunami di Dua Desa, yaitu Desa Bolangat dan Desa Lolanan, tahun 2023 juga dilaksanakan pemasangan Papan Informasi di 9 desa yakni desa Domisil Moonow, Batu Merah, Pasir Putih, Sauk, Buntalo, Pindolili, Baturapa, Inobonto dan Muntoi sedangkan jalur evakuasi pemasangan di desa Ambang II sehingga masih tersisa 10 Desa yang belum ada papan informasi dan jalur evakuasi tsunami yang akan kami laksanakan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan.

4. Sistem Informasi Kebencanaan

Sistem Kebencanaan atau PUSDALOPS-PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) merupakan Program yang memiliki Output Informasi Kebencanaan yang Akurat untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui Perangkat Radio maupun Media Sosial lainnya karena bersumber dari Lembaga resmi pemerintah dalam hal ini BMKG, LAPAN dan BPBD itu sendiri. Penyampaian Laporan Informasi Kebencanaan Wilayah saat ini dilaporkan setiap Pagi Pkl. 09.00 Wita dan dan Sore hari Pkl. 16.00 Wita dan di Update sesuai kondisi lapangan melalui Perangkat Radio All Band yang terkoneksi langsung dengan Posko BNPB Jakarta juga melalui Media Sosial (WhatsApp, Twitter dan Instagram) dalam Forum WhatsApp BPBD SE- SULUT dan Forum PUSDALOPS SE INDONESIA.



5. Penanganan Darurat Daerah Bencana

Penanganan Darurat terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak Bencana melalui Respon Cepat dan Kaji Bencana agar pemberian kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan ketersediaan Logistik. Sumber Daya yang dimiliki oleh Personil TRC Organik maupun TRC Non Organik terus ditingkatkan melalui Pelatihan Operasi SAR yang terdiri dari WATER RESCUE, VERTICAL RESCUE dan JUNGLE RESCUE dengan tujuan agar setiap personil mampu menghadapi segala jenis bencana dan siap melaksanakan tugas dalam kondisi dan situasi apapun.

Melihat kondisi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dibutuhkan rencana mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim yang efektif, membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan perubahan iklim seperti sistem drainase yang baik dan bangunan yang kokoh, mengurangi ketergantungan pada satu jenis mata pencaharian untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat serta melakukan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik agar dapat mengurangi resiko bencana.

Tabel 2.31
Indeks Resiko bencana Kabupaten Bolaang Mongondow

	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas resiko 2024
Bolaang Mongondow	149,60	121,75	136,96	136,96	153,00	TINGGI

Selain itu dibutuhkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat dalam melakukan evaluasi dan tindakan pencegahan lainnya, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang resiko bencana dan perubahan iklim serta tindakan yang dibutuhkan melalui kebijakan upaya resiliensi seperti asuransi pertanian dan program pemberdayaan masyarakat.

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan membangun resiliensi yang kuat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

2.1.2. Demografi

A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan rilis data yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, laju perkembangan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mencapai 251.535 ribu jiwa dan tahun 2021 menjadi sebesar 252.011 jiwa. Kondisi tersebut terus meningkat meskipun

tidak terlalu signifikan dimana tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 252.808, meningkat tahun 2023 menjadi 254.945 jiwa dan tahun 2024 mencapai 257.378 ribu jiwa. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow terus melakukan pembersihan data ganda dan data anomaly pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Tabel 2.32
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Persentase Penduduk
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Dumoga Barat	18.514	18.599	18.721	18.207	18.516	7,19
Dumoga Tengah	11.694	15.126	11.820	15.089	11.897	4,62
Dumoga Utara	15.085	21.735	15.192	21.657	15.270	5,93
Dumoga Tenggara	8.834	11.748	8.900	11.866	19.334	3,63
Dumoga Timur	21.622	21.806	21.891	21.657	21.774	8,46
Dumoga	15.219	15.299	15.400	15.639	15.778	6,13
Lolayan	26.243	26.359	26.521	27.295	27.569	10,71
Passi Barat	17.029	17.107	17.211	17.437	17.534	6,81
Passi Timur	12.969	12.732	12.801	13.130	13.293	5,16
Bilalang	6.551	6.548	6.560	6.966	7.042	2,74
Poigar	18.754	18.778	18.831	21.566	19.689	7,65
Bolaang	20.692	20.904	21.150	21.063	21.386	8,31
Bolaang Timur	11.829	11.973	12.140	12.501	12.674	4,92
Lolak	32.342	32.925	33.580	33.753	34.179	13,28
Sangtombolang	11.656	11.787	11.940	11.524	11.443	4,45
BOLAANG MONGONDOW	251.535	250.478	252.658	254.945	257.378	100,000

Sumber: BPS-Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2025

Dari data dalam tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di Tahun 2024 ada di kecamatan Lolak dengan sebanyak 34.179 jiwa. Kecamatan Bilalang adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 7.042 jiwa.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 orang penduduk perempuan. Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow selang beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.33
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
di Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2020 - 2024

TAHUN YEAR	LAKI-LAKI MALE	PEREMPUAN FEMALE	JUMLAH TOTAL	SEX RASIO SEX RATIO
2020	131.097	120.438	251.535	108,85
2021	131.335	120.676	252.011	108,83
2022	131.654	121.154	252.808	108,67
2023	132.717	122.228	254.945	108,58
2024	133.940	123.438	257.378	108,51

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bol-Mong, 2025

Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2020 pertumbuhan penduduk mencapai 1,49 dan Pertumbuhan penduduk selang 2021 turun sebesar 0,93 terus menurun ditahun 2022 sebesar 0,89. Selanjut ditahun 2023 pertumbuhan sedikit naik hingga mencapai 0,92 persen dan kembali menurun di tahun 2024 sebesar 0,90. Secara umum bisa disimpulkan bahwa program terkait dengan pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow terus dioptimalkan. Kondisi ini juga menunjukkan adanya perpindahan penduduk dari wilayah Bolaang Mongondow ke daerah lainnya karena dipengaruhi oleh faktor kelahiran anak, kedatangan penduduk dan pekerjaan.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju Pertumbuhan Penduduk selang 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024

PERIODE	PERTUMBUHAN
2020	1,49
2021	0,93
2022	0,89
2023	0,92
2024	0,90

Sumber: Data Olahan Bappeda 2025

Usia penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang terbagi kedalam kelompok umur. Dapat dijelaskan bahwa Kelompok umur yang mendominasi jumlah penduduk yaitu kelompok umur 20 – 24 tahun yaitu 9,27% diikuti kelompok umur 15 – 19 tahun yang mencapai 8,80 % kemudian disusul kelompok umur 25 – 29 tahun dengan capaian 8,16%. Sementara Kelompok Umur terendah pada usia 70 – 74 tahun yaitu mencapai 2,16%.

Tabel 2.35
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah			Persentase
	L	P	Total	
0 - 4	6.884	6.665	13.549	5,26
05-09	10.181	9.532	19.713	7,66
10-14	10.846	9.910	20.756	8,06
15-19	11.787	10.868	22.655	8,80
20-24	12.518	11.343	23.861	9,27
25-29	10.952	10.041	20.993	8,16
30-34	10.102	8.792	18.894	7,34
35-39	8.146	7.402	15.548	6,04
40-44	9.649	8.794	18.443	7,17
45-49	10.089	9.443	19.532	7,59
50-54	9.365	8.613	17.978	6,99
55-59	7.784	7.039	14.823	5,76
60-64	5.481	5.056	10.537	4,09
65-69	4.335	4.060	8.395	3,26
70-74	2.803	2.749	5.552	2,16
75+	3.018	3.131	6.149	2,39
Total	133.940	123.438	257.378	100

Sumber: BPS-Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2025, Bappeda (olahan) 2025

Berdasarkan data statistik kepadatan penduduk per kilometer di Kabupaten Bolaang Mongondow sampai Tahun 2024 dapat dikatakan kurang merata, dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk 86,44 jiwa per kilometer persegi. Hal ini dapat dilihat pada kepadatan penduduk per kecamatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.36
Kepadatan Penduduk Perkecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2024	Persentase Penduduk 2024	Kepadatan Penduduk
Dumoga Barat	18.516	7,19	48,00
Dumoga Tengah	11.897	4,62	79,08
Dumoga Utara	15.270	5,93	124,00
Dumoga Tenggara	19.334	3,63	242,35
Dumoga Timur	21.774	8,46	62,88
Dumoga	15.778	6,13	97,23
Lolayan	27.569	10,71	104,23
Passi Barat	17.534	6,81	146,41
Passi Timur	13.293	5,16	140,16
Bilalang	7.042	2,74	106,23
Poigar	19.689	7,65	77,22
Bolaang	21.386	8,31	102,92
Bolaang Timur	12.674	4,92	129,00
Lolak	34.179	13,28	71,80
Sangtombolang	11.443	4,45	40,71
BOLAANG MONGONDOW	257.378	100,000	86,44

Sumber : Bolmong Dalam Angka 2025

Secara umum penyebaran penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow sampai tahun 2024 dapat dikatakan kurang merata, dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk 86.44 per kilometer persegi.

B. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Peningkatan jumlah penduduk terus terjadi setiap tahunnya dan berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak ada pada kisaran umur 10 sampai 29 tahun dan jumlah terendah ada pada kisaran umur 55 ke atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin jumlah Laki-laki selalu yang paling banyak di setiap tahunnya. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah		
	L	P	Total
0 - 4	6.884	6.665	13.549
05-09	10.181	9.532	19.713
10-14	10.846	9.910	20.756
15-19	11.787	10.868	22.655
20-24	12.518	11.343	23.861
25-29	10.952	10.041	20.993
30-34	10.102	8.792	18.894
35-39	8.146	7.402	15.548
40-44	9.649	8.794	18.443
45-49	10.089	9.443	19.532
50-54	9.365	8.613	17.978
55-59	7.784	7.039	14.823
60-64	5.481	5.056	10.537
65-69	4.335	4.060	8.395
70-74	2.803	2.749	5.552
75+	3.018	3.131	6.149
Total	133.940	123.438	257.378

Sumber: BPS-Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2025,
Bappeda (olahan) 2025

C. Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow ada di Kecamatan Bolaang sebesar 1,51% untuk tahun 2023-2024. Sementara yang terendah adalah Kecamatan Sang Tombolang dengan laju Pertumbuhan -0,71 %. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Tahun 2021-2022 sebesar 0,95 %. Angka laju pertumbuhan ini masih lebih rendah dari laju Pertumbuhan Penduduk Nasional semester I tahun 2024 sebesar 1,10%.



Tabel 2.38
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan Tahun 2023-2024

NO	KECAMATAN	2023			2024			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (2023-2024)
		PENDUDUK (LK)	PENDUDUK (PR)	PENDUDUK (JML)	PENDUDUK (LK)	PENDUDUK (PR)	PENDUDUK (JML)	
1	SANG TOMBOLANG	6.010	5.514	11.524	5962	5481	11.443	-0,71
2	DUMOGA BARAT	9.481	8.726	18.207	9630	8886	18.516	1,67
3	DUMOGA TIMUR	11.212	10.445	21.657	11290	10484	21.774	0,54
4	DUMOGA UTARA	7.790	7.291	15.089	7888	7382	15.270	1,19
5	LOLAK	17.725	16.028	33.753	17924	16255	34.179	1,25
6	BOLAANG	11.015	10.048	21.063	11174	10212	21.386	1,51
7	LOLAYAN	14.216	13.079	27.295	14344	13225	27.569	0,99
8	PASSI BARAT	9.176	8.261	17.437	9213	8321	17.534	0,55
9	POIGAR	10.101	9.465	19.566	10.165	9.524	19.689	0,62
10	PASSI TIMUR	6.800	6.330	13.130	6.872	6.421	13.293	1,23
11	BOLAANG TIMUR	6.434	6.067	12.501	6.547	6.127	12.674	1,36
12	BILALANG	3.632	3.334	6.966	3.666	3.376	7.042	1,08
13	DUMOGA	8.178	7.461	15.639	8.273	7.505	15.778	0,88
14	DUMOGA TENGGARA	4.831	4.421	9.252	4.875	4.459	9.334	0,88
15	DUMOGA TENGAH	6.108	5.758	11.866	6.117	5.780	11.897	0,26
	TOTAL	132.717	122.228	254.945	133.940	123.438	257.378	0,95

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bappeda (diolah)2025

Dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi peserta akseptor KB aktif bagi Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid/datang bulan yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. Berikut adalah data PUS kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.39
Peserta Akseptor KB Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	46,917	38,577	34,140	34,395	33,585
2	Jumlah Akseptor KB	38,131	29,800	19,842	22,003	21,355
3	Akseptor KB (%)	81,27	77,25	58,12	63,97	63,58

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2025

Selain data tentang Pasangan Usia Subur di Kabupaten Bolaang Mongondow, data tentang Pasangan Usia Subur yang mengikuti program Keluarga berencana merupakan salah satu data yang menggambarkan keberhasilan dalam melaksanakan program keluarga berencana di Kabupaten Bolaang Mongondow. Berikut data PUS yang mengikuti program Keluarga Berencana di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Keluarga yang baru mengikuti Program KB biasanya berasal dari keluarga yang baru, ataupun keluarga lama yang sudah menetapkan untuk mengikuti program KB saat sudah memiliki anak. Adapun pertumbuhan peserta baru untuk tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Data peserta program KB baru dapat terlihat dalam diagram dibawah ini.

Data peserta KB baru secara detail dapat terlihat pada tabel berikut, dimana data ini merupakan data peserta baru dari tingkat kecamatan yang ada di Bolaang Mongondow beserta dengan metode kontrasepsi yang digunakan.

Peserta KB baru merupakan Peserta yang baru mengikuti Program KB. Sedangkan peserta aktif merupakan peserta KB lama dan aktif mengikuti program KB. Berikut data peserta KB aktif di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.40
Peserta KB Aktif Kabupaten Bolaang Mongondow

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	46,917	38,577	34,140	34,395	33.585
2	Jumlah Peserta KB Aktif	38,131	29,800	19,842	22,003	21.355
3	Peserta KB (%)	81.27	77.25	58.12	63.97	63.58

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2025

Proyeksi dan analisis penduduk sangat penting untuk berbagai perencanaan pembangunan. Proyeksi, yang merupakan perkiraan jumlah penduduk di masa depan, membantu dalam perencanaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Analisis penduduk, yang mempelajari karakteristik dan dinamika penduduk, memberikan informasi berharga untuk kebijakan yang tepat sasaran. Berikut proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan jumlah penduduk tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow





Tabel 2.41
Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun kedepan Kab. Bolmong

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Penduduk							
		2024	APP	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dumoga Barat	18.516	0,88	18.679	18.843	19.009	19.176	19.345	19.515
2	Dumoga Tengah	11.897	0,88	12.002	12.107	12.214	12.321	12.430	12.539
3	Dumoga Utara	15.270	0,88	15.404	15.540	15.677	15.815	15.954	16.094
4	Dumoga Tenggara	19.334	0,88	19.504	19.676	19.849	20.024	20.200	20.378
5	Dumoga Timur	21.774	0,88	21.966	22.159	22.354	22.551	22.749	22.949
6	Dumoga	5.778	0,88	5.829	5.880	5.932	5.984	6.037	6.090
7	Lolayan	27.569	0,88	27.812	28.056	28.303	28.552	28.804	29.057
8	Passi Barat	17.534	0,88	17.688	17.844	18.001	18.159	18.319	18.480
9	Passi Timur	13.293	0,88	13.410	13.528	13.647	13.767	13.888	14.010
10	Bilalang	7.042	0,88	7.104	7.166	7.230	7.293	7.357	7.422
11	Poigar	19.689	0,88	19.862	20.037	20.213	20.391	20.571	20.752
12	Bolaang	21.386	0,88	21.574	21.764	21.956	22.149	22.344	22.540
13	Bolaang Timur	12.674	0,88	12.786	12.898	13.012	13.126	13.242	13.358
14	Lolak	34.179	0,88	34.480	34.783	35.089	35.398	35.710	36.024
15	Sangtombolang	11.443	0,88	11.544	11.645	11.748	11.851	11.955	12.061
JUMLAH TOTAL KABUPATEN		257.378	0,88	259.643	261.928	264.233	266.558	268.904	271.270

Sumber : Dinas Kesehatan Bolmong 2025

Proyeksi dan analisis penduduk adalah alat yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dinamika penduduk, pemerintah, lembaga, dan sektor swasta dapat mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan.

D. Masyarakat Adat.

Masyarakat adat adalah kelompok sosial dan budaya yang memiliki ikatan sejarah, budaya, dan wilayah dengan suatu tempat secara turun-temurun. Mereka memiliki sistem nilai, pengetahuan, dan hukum adat yang khas, serta lembaga adat yang mengatur kehidupan mereka. Masyarakat adat memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan wilayah adat mereka, yang diwariskan dari generasi ke generasi, memiliki identitas budaya yang khas, termasuk bahasa, tradisi, adat istiadat, dan sistem pengetahuan tradisional. Selain itu Masyarakat adat juga memiliki sistem hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, seperti hubungan sosial, ekonomi, dan tata kelola wilayah serta memiliki lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur dan



pengurus kehidupan masyarakat, serta menjaga kelestarian budaya dan wilayah adat.

Masyarakat adat seringkali menjadi pelestari lingkungan karena pengetahuan tradisional mereka tentang alam dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Akan tetapi masyarakat adat seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap pembangunan, termasuk kehilangan tanah dan wilayah adat mereka. Sehingga dibutuhkan.

Pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah adat, dan kebebasan untuk menjalankan hukum adat mereka

Masyarakat adat Bolaang Mongondow adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Bolaang Mongondow di provinsi Sulawesi Utara. Bolaang Mongondow memiliki budaya, adat istiadat, dan bahasa yang khas, termasuk tradisi seperti Mogama, Pogogutat, dan Motayog. Masyarakat Bolaang Mongondow juga dikenal dengan sistem kekerabatan yang kuat dan berbagai upacara adat yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan. Beberapa aspek penting dari masyarakat adat Bolaang Mongondow:

- A. Masyarakat Bolaang Mongondow terdiri dari beberapa sub-suku seperti Mongondow, Kaidipang, Bolaang Itang, Bolaang Uki, dan Bintauna.
- B. Asal usul Penduduk asli Bolaang Mongondow dipercaya berasal dari keturunan Gumalangit, Tendeduata, Tumotoibokol, dan Tumotoibokat, yang awalnya tinggal di Gunung Komasaan (Bintauna).
- C. Bahasa ibu masyarakat Bolaang Mongondow adalah Bahasa Mongondow, namun ada juga dialek lain seperti Bahasa Lolak, Bantik, dan lainnya.
- D. **Adat Istiadat :**
 - **Mogama:** Upacara adat yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan menyatukan kedua belah pihak keluarga.
 - **Pogogutat:** Tradisi gotong royong dalam hal makanan pokok dan tenaga kerja untuk membantu meringankan beban masyarakat.
 - **Motayog:** Kegiatan adat yang diperkirakan sudah ada sejak zaman pemerintahan Punu' Tadohe' sekitar tahun 1600, bertujuan untuk mengobati orang sakit.
 - **Pakaian Adat:** Pakaian adat pria adalah "Baniang" yang terdiri dari destar dan pomerus, sedangkan wanita menggunakan "Salu".
 - **Rumah Adat:** Rumah adat Bolaang Mongondow memiliki tiga bagian: bawah, tengah, dan atas atau disebut Komalig.
 - **Makanan Khas:** Sinandoy adalah salah satu makanan khas daerah Bolaang Mongondow yang biasanya disajikan dalam acara besar.



- **Peran Guhanga:** Guhanga (Pemangku Adat) memiliki peran penting dalam melestarikan dan menjalankan adat istiadat Bolaang Mongondow.

Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai Budaya yang bermacam-macam, sesuai dengan banyaknya suku masyarakat yang menetap di Kabupaten Bolaang Mongondow. Umumnya budaya ini selain menjadi warisan dari jaman dahulu di tanah Totabuan ini, beberapa budaya muncul bersamaan dengan masuknya masyarakat pendatang dan menetap di Bolaang Mongondow. Adapun kelompok seni Budaya yang terdaftar di Dinas pariwisata kabupaten Bolaang Mongondow hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42
Kelompok Seni Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow

NO	NAMA/JENIS CAGAR BUDAYA	LOKASI		KET.
		DESA	KEC	
1	Kelompok Seni Mokosambe	Mopait	Lolayan	Asuhan Ambaru
2	Kelompok Seni		Bilalang	Asuhan Hairun
3	Kelompok Seni Mobondu	Langagon	Bolaang	
4	Klompok Seni Hadra Matuari	Ihwan	Dumoga Barat	
5	Kelompok Seni Pinobatan	Kosio	Dumoga Tengah	
6	Kelompok Seni Mobata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Lolak	Lolak	
7	Kelompok Seni Musik Bambu Klarinet	Mariri	Poigar	

Sumber: Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kab. BolMong 2025

Selain kelompok seni budaya, Bolaang Mongondow juga memiliki warisan budaya berupa cagar budaya. Cagar Budaya ini merupakan peninggalan ataupun kuburan raja-raja Bolaang Mongondow pada jaman dahulu, yang oleh pemerintah daerah dipelihara dan dijadikan sebagai cagar budaya. Adapun cagar budaya yang ada di Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43
Cagar Budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Nama/jenis Cagar Budaya	Lokasi	
		Desa	Kec
1	Makam Abo Sainun Mokodompit	Bulud	Passi Barat
2	Makam Najado Mokoginta	Bulud	Passi Barat
3	Makam Raja Abram Panunggelan Sugeha (Raja Kerajaan Bolaang Mongondow Ke XIV Tahun 1880 - 1893)	Bolaang	Bolaang Timur
4	Makam Abo' Sinyo Lansen Cornelis Manoppo	Bolaang	Bolaang Timur
5	Makam Bua' Dadibong Manoppo - Sugeha	Bolaang	Bolaang Timur





6	Makam Angkio Cornelis Manoppo	Bolaang	Bolaang Timur
7	Makam Indajac Manoppo-Sugeha	Bolaang	Bolaang Timur
8	Makam Bua' Eko Manoppo	Bolaang	Bolaang Timur
9	Makam Sultan Yacobus Manuel Manoppo (1833 - 1858 Bolaang Mongondow)	Bolaang	Bolaang Timur
10	Makam Abo' Manuel Manoppo	Bolaang	Bolaang Timur
11	Makam R.M. Manoppo	Bolaang	Bolaang Timur
12	Makam M.R. Manoppo (Abo Lalo)	Bolaang	Bolaang Timur
13	Makam Hi. Bua' L.H. Manoppo	Bolaang	Bolaang Timur
14	Makam HA. Bua' Ginsa R. Manoppo	Bolaang	Bolaang Timur
15	Makam B.M. Manoppo	Bolaang	Bolaang Timur
16	Makam Bua' Siningkoi Sugeha	Langagon	Bolaang
17	Makam Bua' Pogu Sugeha	Langagon	Bolaang
18	Makam Hotininimbang Manoppo-Sugeha	Langagon	Bolaang
19	Makam Bua' Dadibong Sugeha	Langagon	Bolaang
20	Makam Abo' Tanu Sugeha	Langagon	Bolaang
21	Batu Berkamar Binuanga	Toraut Induk	Dumoga Barat
22	Batu Berkamar 2 Tumpah	Toraut Utara	Dumoga Barat
23	Batu Berkamar 3 Tumpah	Toraut Utara	Dumoga Barat
24	Batu Lesung	Toraut Induk	Dumoga Barat
25	Batu Lesung	Tapadaka Utara	Dumoga Tenggara
26	Sumur Peninggalan Pendeta Belanda Pertama di Bolaang Mongondow	Bilalang 3	Bilalang
27	Gereja Tomolotui	Dumoga III	Dumoga Timur
28	Sumur Belanda	Dumoga IV	Dumoga Timur
29	Rumah Adat Pengobatan Motayok	Bilalang Baru	Bilalang
30	Eks Bangunan Istana Raja Komalig	Bolaang	Bolaang Timur
31	Eks Bangunan Mercusuar	Bolaang	Bolaang Timur
32	Eks Bangunan Gereja di Bolaang Mongondow	Bolaang	Bolaang Timur
33	Makam Guru Pertama dan Sebagai Pendeta Pertama di Bolaang Mongondow	Bolaang	Bolaang Timur

Sumber: Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kab. BolMong 2025

Selain seni budaya dan sanggar budaya kabupaten Bolaang Mongondow sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat juga didaerah ini terdapat kelompok seni seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44
Kelompok Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow

Uraian	Jumlah
Cagar Budaya	26
Desa Adat	0
Sanggar Seni	3
Kelompok Seni	7

Sumber: Dinas pariwisata Kab. BolMong 2025



Budaya dan adat istiadat Bolaang Mongondow kaya akan nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dipahami. Regulasi terkait masyarakat adat di Indonesia terutama diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

2.1.3.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (provinsi/kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bolaang Mongondow Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2024 mencapai 11,52 triliun rupiah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 6,68 triliun rupiah. Dari 17 kategori, Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, yaitu mencapai 40,49 persen, diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,56 persen. Sebaliknya, kontribusi Jasa Perusahaan hanya 0,03 persen dan merupakan andil yang paling kecil.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Berikut nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.7.
PDRB ADHB maupun PDRB ADHK
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.



Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2025

Pada distribusi persentase PDRB selama periode 2020-2024 perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow selalu didominasi oleh 5 sektor lapangan usaha yakni Pertanian kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan.

Pada sektor Pertanian kehutanan dan Perikanan nilai distribusi tahun 2024 sebesar 40,49 persen bertambah 0,71 persen dari tahun 2023, selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran ;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2024 mencapai 10,41 persen bertambah 0,2 persen dari tahun 2023, sektor Konstruksi sebesar 10,41 persen tahun 2024 turun 0,21 persen dari tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,86 persen menurun 0,15 dari tahun 2023 dan yang terakhir dari sektor industry pengolahan sebesar 6,95 persen turun 0,64 persen dari tahun 2023.

Gambaran tentang distribusi nilai masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga berlaku
Tahun 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow

Lapangan Usaha/ Industry	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,02	40,15	40,46	39,78	40,49
Pertambangan dan Penggalian	10,21	11,3	10,83	10,01	9,86
Industri Pengolahan	6,78	7,29	7,52	7,59	6,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08
Konstruksi	10,45	10,71	10,48	10,62	10,41
Perdagangan Besar dan Eceran ;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,09	11,3	11,62	12,36	12,56
Transportasi dan Pergudangan	1,82	1,78	1,91	2,24	2,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39
Informasi dan Komunikasi	0,58	0,57	0,55	0,57	0,58
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,09	1,13	1,05	0,97	0,93
Real Estate	4,55	4,38	4,2	4,17	4,11

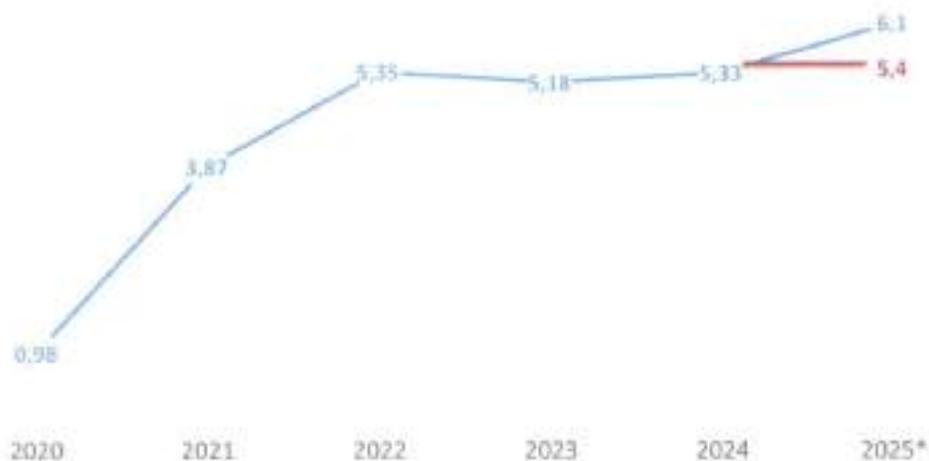
Jasa Perusahaan	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,34	3,25	3,11	3,13	3,13
Jasa Pendidikan	4,79	4,79	4,88	5,00	5,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,24	2,24	2,36	2,37
Jasa Lainnya	0,54	0,54	0,54	0,60	0,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2025

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Secara konsepsi PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan Masyarakat. Olehnya PDRB merupakan Gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan Pembangunan ekonomi.

Grafik 2.8.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Proyeksi LPE Tahun 2025.



Sumber : BPS Kabupaten Bolmong 2025
 *Proyeksi Bappeda Kab. Bolaang Mongondow

Kondisi Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2021 melalui upaya pemulihan ekonomi terlihat dengan pertumbuhan

sebesar 3,87 persen dan terus merangkak naik pada tahun 2022 dengan peningkatan mencapai 5,35 persen. Namun di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami sedikit perlambatan dengan Tingkat pertumbuhan sebesar 5,18 persen dan terus bertumbuh pada tahun 2024 sebesar 5,33 atau bertambah sebesar 0,15 persen.

Pertumbuhan paling tinggi adalah untuk sektor Jasa Lainnya sebesar 14,33 persen, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,97 persen serta sektor Administrasi pemerintahan pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 8,83. Sedangkan sektor terendah pada kategori Industri Pengolahan sebesar -2,55 dan diikuti sektor Pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mencapai -0,18 persen.

Gambaran capaian setiap sektor usaha ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 2.9.
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Bolmong 2025

Perbandingan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional bisa kita lihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.10
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow,
Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Bolmong Dalam Angka 2025

Jika dilihat tabel diatas, kondisi pertumbuhan ekonomi kabupaten Bolaang mongondow menunjukkan trend meningkat dibanding tahun 2023, meski demikian upaya peningkatan investasi serta upaya pemulihan perekonomian melalui sektor usaha lainnya akan terus dilakukan sehingga diharapkan pada tahun 2025 kondisi ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow akan tumbuh optimis lebih baik dari tahun sebelumnya.

C. PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran antara dan merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Salah satu kajian dan literatur yang ditempuh yakni menggunakan pendekatan variabel PDRB Perkapita. PDRB perkapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita) adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Dengan kata lain, PDRB perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata per orang di suatu daerah.

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow selama periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Meski demikian pertumbuhan PDRB perkapita relatif lebih lambat yaitu hanya berkisar 3-4 persen.

Grafik 2.11.
PDRB Perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Utara 2025

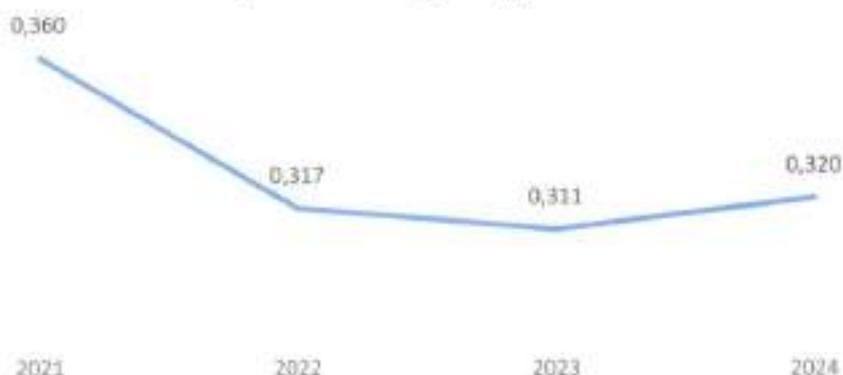
D. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Kabupaten Bolaang Mongondow masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

Menurut Antonio Carrales, seorang profesional ekonomi di *University College London*, *Gini Ratio* menyediakan indeks untuk mengukur ketimpangan tersebut. *Gini Ratio* dimaknai sebagai sebuah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat. *Gini ratio* Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi meski demikian belum adanya kesenjangan sosial ditingkatkan Masyarakat. *Gini ratio* Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi meski demikian belum adanya kesenjangan sosial ditingkatkan Masyarakat. Pada Tahun 2021 *Gini ratio* Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 0.360 dan pada tahun 2022, turun hingga mencapai 0.317 dan terus menurun pada angka 0.311 di tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dan mencapai angka 0,320. Hal ini disebabkan beberapa factor diantaranya adalah presentase jumlah penduduk miskin yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan jumlah pengangguran terbuka usia kerja yang mengalami peningkatan. Sementara itu *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 0.365 dan mengalami kenaikan 0,370 dan Kembali turun pada angka 0,360 pada Tahun 2024. Ketimpangan pendapatan mengacu pada sejauh mana pendapatan di distribusikan secara merata diantara populasi. Ketimpangan pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak kaya.



Grafik 2.12.
Rasio Gini Kabupaten Bolaang Mongondow 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

E. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Terdapat 5 (lima) indikator kemiskinan yang menjadi perhatian dalam melihat angka kemiskinan. Hal tersebut yakni Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan.

Jika dilihat dari angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan trend fluktuatif. Terjadi penurunan angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 7,04 persen atau berkurang hingga mencapai 0,54 poin dibanding tahun 2021 yang mencapai 7,58 persen. Kemudian perlahan Kembali bergerak naik pada tahun 2023 mencapai 7,37 atau naik 0,33 poin. Hal ini dipengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 17,96 ribu jiwa di tahun 2022 dan naik menjadi 19,02 ribu jiwa di tahun 2023. Sementara tahun 2024 angka ini terus naik menjadi 7,74 dengan angka garis kemiskinan meningkat menjadi 415.628 Rb/kapita/bulan dibanding dengan tahun 2022 sebesar 355.639 Rb/kapita/bulan dan tahun 2023 sebesar 394.032 Rb/kapita/bulan. Indikator kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	18.070	19.08	17.96	19.02	20,19
Persentase Penduduk Miskin (P0)	7,27	7.58	7.04	7.37	7,74
Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)	0.87	1.14	1.24	0.55	0,79
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,15	0.27	0.31	0.11	0,15
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	343.302	343.302	355.639	394.032	415.628

Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow 2025



F. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan mempersiapkan usaha tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow berusia di atas 15 tahun pada tahun 2024 tercatat 197.353 jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 134.62 jiwa penduduk termasuk dalam angkatan kerja dan sisanya sebanyak 62.701 jiwa termasuk kategori bukan angkatan kerja. Total penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, pada penduduk dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), sebanyak 91,90 persen memiliki kegiatan utama bekerja. Persentase bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang pendidikan terakhir ini merupakan yang terkecil. Sebaliknya, persentase yang bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang pendidikan terakhir kurang dari Sekolah Dasar (SD) memiliki persentase terbesar yaitu 97,55 persen.

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 terus mengalami penurunan sebesar 4,48 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,61 persen. Meskipun jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja meningkat hingga mencapai 197.353 jiwa dan diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja sebesar 134.652 jiwa akan tetapi persentase Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja	114.330	117.318	112.630	121.669	134.652
Jumlah penduduk angkatan kerja	119.085	121.878	118.506	194.731	197.353
Persentase penduduk yang bekerja	96,01	96,26	95,04	95,39	95,52
Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja	5.727	4.785	5.876	5.874	6.039
Persentase pengangguran terbuka	4,87	4,85	4,96	4,61	4,48

Sumber: Kab. Bolaang Mongondow Dalam Angka 2025 (BPS)

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/ wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standar hidup layak.





Tabel 2.48
Indeks Pembangunan Manusia
Bolaang Mongondow tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	67,89	68,16	69,82	70,48	71,14

Sumber: BPS Sulut 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 mencapai angka 71,14 naik 0,66 poin dibanding tahun 2023 mencapai 70,48. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ini mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Angka IPM Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2020 - 2024 terus mengalami peningkatan. Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-69 kategori sedang. Jika melihat standar United Nations Development Program (UNDP) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Bolaang Mongondow telah memenuhi kategori tinggi. Hal ini dibarengi dengan memaksimalkan capaian kinerja pemerintah daerah dari target indikator yang di tetapkan dalam mendorong peningkatan 3 variabel dimensi yang menjadi tolak ukur indikator perhitungan IPM, meliputi : a) aspek kesehatan Angka Harapan Hidup (tahun) b) Aspek Pendidikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, c) Aspek Pendapatan yaitu standar hidup layak Masyarakat. Berikut Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen-Komponen Pembentuknya di kabupaten bolaang mongondow dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.49
Indeks Pembangunan Manusia Dengan Beserta Komponen-komponen
Pembentuknya di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

IPM dan Komponen Pembentuknya	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,36	69,45	69,78	70,07	70,31
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,52	11,53	11,61	11,63	11,65
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,93	8,03	8,17	8,36	8,38
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah)	990.475,31	1.057.214	1.060.137	1.120.760	1.241.864
Indeks Pembangunan Manusia	67,89	68,16	69,82	70,48	71,14

Sumber : BPS Bolaang Mongondow 2020-2025.





Untuk melihat kondisi IPM di seluruh kabupaten/kota se Sulawesi Utara dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Sulawesi Utara 2021-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia			
	2021	2022	2023	2024
Bolaang Mongondow	69.04	69.82	70.48	71,14
Minahasa	77.29	77.72	78.48	79,26
Kepulauan Sangihe	72.79	73.35	73.94	74,43
Kepulauan Talaud	70.94	71.53	72.22	72.83
Minahasa Selatan	73.94	74.5	75.25	75.79
Minahasa Utara	75.36	75.92	76.50	77,05
Bolaang Mongondow Utara	69.72	70.39	70.97	71,66
Kepulauan Sitaro	69.28	70.18	70.81	71,55
Minahasa Tenggara	72.16	72.56	72.97	73,68
Bolaang Mongondow Selatan	68.20	68.66	69.17	69.92
Bolaang Mongondow Timur	68.70	69.35	70.09	70.68
Kota Manado	80.53	80.96	81.40	81,86
Kota Bitung	75.46	75.94	76.33	76,9
Kota Tomohon	78.09	78.65	79.29	80,06
Kota Kotamobagu	75.09	75.56	76.01	76.86
Sulawesi Utara	74.03	74.52	75.04	75.68

Sumber : BPS Bolaang Mongondow

Jika dilihat pada tabel diatas, IPM Kabupaten Bolaang Mongondow terus menunjukkan trend positif. sejak tahun 2021 angka IPM mencapai 69,04 naik tahun 2022 sebesar 69,82 dan tahun 2023 sebesar 70.48kemudian tahun tahun 2024 mencapai angka 71, 14. Meski demikian capaian nilai IPM tersebut masih berada dibawah angka IPM provinsi sebesar 75.68 pada tahun 2024. Jika dilihat secara peringkat, Nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow menempati urutan ke 3 terbawah pada tahun 2024. Nilai IPM tertinggi diraih kota manado yang mencapai angka 81,86 dan IPM terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan poin 69,92. IPM Bolmong tahun 2023 berada pada posisi ke-13 atau posisi yang sama dengan peringkat IPM tahun 2023 dari 15 kabupaten Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Jika dibandingkan dengan kabupaten / kota se- "Bolaang Mongondow Raya", IPM Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 berada pada posisi ke-3 setelah Kota Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Utara.



2.1.3.2 Kesehatan Untuk Semua.

Kesehatan untuk semua" atau "Health for All" adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya akses kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Ini bukan hanya tentang ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga tentang kondisi kesehatan yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, terus berupaya mewujudkan "Kesehatan untuk Semua" melalui berbagai program dan kebijakan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan transformasi kesehatan.

Pentingnya "Kesehatan untuk Semua" juga sejalan dengan visi "Indonesia Emas 2045", dimana kesehatan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai "Kesehatan untuk Semua", diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan upaya bersama, diharapkan Indonesia dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik dan mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan Sejahtera.

A. Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow dari Tahun 2020 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,19% rata-rata pertahun. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.48 di bawah ini:

Tabel 2.51
Usia harapan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
USIA HARAPAN HIDUP	69,36	69,45	69,78	70,07	70,31

Sumber: BPS Sulut 2025

Hal ini membuktikan bahwa intervensi program kegiatan pemerintah kabupaten bolaang mongondow di bidang Kesehatan telah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

B. Sarana Kesehatan.

Sarana Kesehatan yang diuraikan pada bagian ini meliputi tentang sarana kesehatan di antaranya Puskesmas, Rumah Sakit, sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan, sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), serta institusi pendidikan tenaga kesehatan.

1. Puskesmas

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang berada di wilayah kecamatan yang melaksanakan tugas-



tugas operasional pembangunan kesehatan. Pembangunan puskesmas di tiap kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kesehatan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah rasio puskesmas per 1000 penduduk. Di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2024 memiliki puskesmas sebanyak 18 Unit dengan rasio puskesmas per 1000 penduduk sebesar 0.0687.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, maka beberapa puskesmas telah ditingkatkan fungsinya menjadi puskesmas Perawatan (10 Unit) dan Non Perawatan (8 Unit).

Tabel 2.52
Rasio Perbandingan Jumlah Puskesmas Per Penduduk
Kab. Bolaang Mongondow

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	248.751	250.478	252.658	254.945	257.587
Jumlah Puskesmas	18	18	18	18	18
Rasio Puskesmas/1000 Penduduk	0,0724	0,0719	0,0712	0,0706	0,0687

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2025

2. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif & rehabilitatif dan berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan disamping pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif. Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah rumah sakit dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk. Tabel dibawah ini menunjukkan rasio Rumah sakit per 1000 penduduk.

Tabel 2.53
Rasio Perbandingan Rumah Sakit per Penduduk Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	248.751	250.478	252.658	254.945	257.587
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Rasio Rumah Sakit/1000 Penduduk	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bolmong Tahun 2025

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang paling banyak adalah tenaga keperawatan berjumlah 262 hingga Tahun

2024 dan akan terus bertambah karena adanya penerimaan CPNS & PPPK di tahun 2025. Jumlah terendah yaitu Tenaga Kefarmasian dengan jumlah 12 orang pada Tahun 2024. Rincian mengenai jumlah Tenaga Kesehatan dari Tahun ke Tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter	22	18	34	23	33
Dokter Gigi	3	5	12	3	12
Bidan	162	79	197	146	190
Perawat	232	217	264	239	262
Tenaga Kefarmasian	3	19	28	18	29

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bolmong Tahun 2025

Data tentang tenaga dokter yang terdapat pada Rumah Sakit Datoe Binangkang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

3. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Rumah Dakit Datoe Binangkang setelah mengalami pemindahan dari Kotamobagu ke Lolak mengalami banyak perubahan terutama sarana dan prasarana. Beberapa sarana berupa gedung harus dilakukan pembangunan yang baru. Demikian juga prasarana lainnya. Ada yang baru dan ada pula merupakan bawaan dari kotamobagu yang merupakan asset tetap dari RSUD Datoe Binangkang. Salah satu fasilitas yang sangat vital dari rumah sakit adalah tempat tidur pasien. Berikut adalah data tempat tidur pasien di RSUD Datoe Binangkang.



Grafik 2.13
Jumlah Tempat Tidur di RSUD Datoe Binangkang Kab. Bolaang Mongondow



Sumber, RSUD Datoe Binangkang 2025

Sarana dan prasarana khususnya di rumah sakit merupakan penunjang keberhasilan dalam pelayanan kesehatan publik, karena apabila hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang ada di RSUD Datoe Binangkang sampai Tahun 2024 antara lain seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	1 Unit	Digunakan
2	Gedung Instalasi Gawat Darurat	1 Unit	Digunakan
3	Gedung ICU/ICCU	1 Unit	Digunakan
4	Gedung Radiologi	1 Unit	Digunakan
5	Gedung Laboratorium	1 Unit	Digunakan
6	Gedung Rawat Inap	8 Unit	Digunakan
7	Gedung Rawat Jalan	3 Unit	Digunakan
8	Gedung Farmasi	1 Unit	Digunakan
9	Gedung Instalasi Gizi	1 Unit	Digunakan
10	Gedung Pemulasaran jenazah	1 Unit	Digunakan
11	Gedung Laundry	1 Unit	Digunakan

12	Gedung Bedah Sentral	1 Unit	Digunakan
13	Gedung Rehabilitasi Medik	1 Unit	Digunakan
14	Gedung CSSD	1 Unit	Belum digunakan
15	Gedung CT Scant	1 Unit	Digunakan
16	Gedung IPSRS	1 Unit	Digunakan
17	Gudang	1 Unit	Digunakan
18	Ambulance	2 Unit	Digunakan
19	Mobil Jenazah	1 Unit	Digunakan
20	Mobil Dinas Dokter Spesialis	18 Unit	Digunakan
21	Mobil Dinas Operasional	1 Unit	Digunakan

Sumber : RSUD Datoe Binangking tahun 2025

RSUD Datoe Binangking Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan pelayanan IGD 24 jam, rawat jalan, dan rawat inap. Kapasitas pelayanan rawat inap sebesar 115 tempat tidur.

a. Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar (Gross Death Rate)

Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar di Rumah Sakit Datoe Binangking pada tahun 2024 adalah 9% atau masih normal karena kurang dari 45%.

b. Angka Kesakitan

Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit pada tahun 2024 adalah 13.260 orang.

c. Angka penggunaan tempat tidur dengan Pasien (Bed Occupation Rate)

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%.

Angka penggunaan tempat tidur dengan pasien (BOR) tahun 2020 di Rumah Sakit Datoe Binangking 10% kemudian naik menjadi 8 persen pada Pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada angka 13 ditahun 2022 dan terus meningkat pada tahun 2024 sebesar 33 persen. Pelayanan rawat inap di RSUD Datoe Binangking Kabupaten Bolaang Mongondow Berikut disajikan tabel indikator BOR tahun 2024 (periode 365 hari):



Tabel 2.56
Penggunaan Tempat Tidur RSUD Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka penggunaan tempat tidur dengan pasien (BOR)	10	8	13	22	33

Sumber: RSUD Datoe Binangkang Tahun 2025

d. Angka perputaran tempat tidur (BTO)

Angka perputaran tempat tidur dengan pasien (**Bed TurnOver**) Tahun 2023 di Rumah Sakit Datoe Binangkang 30 kali, dibawah standar nilai ideal menurut Depkes (2005) frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode tertentu, dalam 1 tahun untuk 1 tempat tidur dipakai 40-50 kali. Ini dikarenakan adanya ketambahan sarana prasarana tempat tidur.

Tabel 2.57
Angka Perputaran Tempat Tidur RSUD Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka perputaran tempat tidur dengan pasien (Bed TurnOver)	13	12	16	30	37

Sumber: RSUD Datoe Binangkang 2025

e. Rasio Angka kematian (NDR).

Rasio Angka kematian (Net Death Rate), dirawat untuk menurut Depkes RI (2005) angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar. Indikator yang memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Angka kematian (Net Death Rate) terjadi di RSUD Datoe Binangkang karna pasien dalam keadaan yang sekarat baru dibawa kerumah sakit, contoh pasien dengan penyakit diare, hipertensi. Berikut Tabel Rasio Angka Kematian di rumah sakit datoe binangkang selang tahun 2020-2024.

Tabel 2.58
Rasio Angka Kematian di RSUD Datoe Binangkang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Angka Kematian	8	19	15	9	4

Sumber: RSUD Datoe Binangkang 2025



f. Rata-rata lamanya pasien dirawat (Average Length Of Stay).

AVLOS memberikan gambaran tingkat efisiensi dan gambaran mutu pelayanan, bila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Nilai AVLOS menurut Depkes (2005) = 6 – 9 hari. Angka Rata-rata lamanya pasien dirawat (Average Length Of Stay) pada Tahun 2020 hingga 2024 di Rumah Sakit Datoe Binangkang adalah 2 hingga 3 hari. Ini dikarenakan pasien yang dirawat paksa pulang, dan ada juga pasien dengan perawatan 2 hari sudah dianjurkan untuk pulang.

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan adalah jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, di Kabupaten Bolaang Mongondow, distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi Kabupaten sebanyak 1 Unit dan masing-masing Puskesmas memiliki 1 Unit.

Tabel 2.59
Jenis dan Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Puskesmas Perawatan	18	18	18	18	18
Puskesmas Non Perawatan					11
Puskesmas Pembantu					48
Puskesmas Keliling					18
Pos Kesehatan Desa					32
Polindes	73	73	73	73	48
Posyandu	257	218	218	218	218

Sumber: Dinkes Bolmong Tahun 2025

Dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan di semua wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow dibangunlah Puskesmas. Puskesmas pun dibuat berdasarkan karakteristik wilayah dan jumlah penduduk yang dilayani. Distribusi Puskesmas berdasarkan jenis dan wilayah puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2.60
Distribusi Puskesmas menurut Jenis dan Wilayah Puskesmas di Kab.
Bolaang Mongondow

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	
		PERAWATAN	NON PERAWATAN
1	Bilalang		Bilalang
2	Passi Timur	Pangian	
3	Passi Barat		Passi Barat
4	Lolayan	Tanoyan	Tungoi
5	Dumoga	Pusian	
6	Dumoga Timur	Imandi	
7	Dumoga Utara	Mopuya	
8	Dumoga Tenggara		Konarom
9	Dumoga Barat	Doloduo	
10	Dumoga Tengah		Werdhi Agung
11	Poigar	Poigar	
12	Bolaang Timur		Tadoy
13	Bolaang	Inobonto	Komangaan
14	Lolak	Lolak	Buntalo
15	Sangtombolang	Maelang	

Sumber: Dinas Kesehatan 2025

C. Kesehatan ibu dan bayi

Pelayanan Kesehatan ibu hamil dapat terlihat dari jumlah kunjungan dan bantuan penanganan terhadap kesehatan ibu hamil tiap Tahun tidak menetap ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan seperti yang terlihat pada table di bawah ini. Ibu hamil yang melakukan kunjungan (K1) pada Tahun 2019 4.358 orang dari total Ibu hamil 4.989 orang sedangkan di Tahun 2021 4,215 dari total Ibu hamil 4,215 orang dan di Tahun 2023 berjumlah 4,021 orang dari dari total Ibu hamil 4,126 orang, dan tahun 2024 terdapat 4152 ibu hamil untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.61
Jumlah Ibu Hamil, melakukankunjungan K1, K4, KEK dan mendapat FE
di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Kurang Energi Kronis (KEK)	Mendapat Zat Besi (Fe)
2019	4.989	4.358	3.203	216	3,378
2020	4,077	3,086	2,308	210	3,279
2021	4,215	4,215	3,558	525	3,373
2022	3,990	3,390	3,373	450	3,373
2023	4,126	4,021	2,985	459	3,229
2024	4.152	3,536	2,559	536	4,027



Sumber : Dinas Kesehatan Bolmong 2025

Sementara untuk kesehatan bayi dapat terlihat dalam table dibawah ini, dimana masih terdapat bayi dengan berat badan rendah di tahun 2019 sebanyak 52 dan turun di tahun 2020 menjadi 45 bayi kemudian meningkat kembali di tahun 2022 dan 2023, sementara gizi buruk tidak ada kasus di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, nanti pada tahun 2024 terjadi 1 kasus dengan status gizi buruk.

Tabel 2.62
Jumlah Bayi lahir, Bayi Berat Badan Rendah dan Bergizi Buruk
Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bayi Lahir	3484	3439	4.181	4.196	4.169	3.773
Bayi BBLR	52	45	-	74	99	56
Gizi Buruk	0	0	0	0	0	1

Sumber: Dinas Kesehatan Bolmong 2025

Status gizi masyarakat pada balita di Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi fluktuasi meningkat di tahun 2020 serta terjadi lonjakan di tahun 2021 kemudian menunjukkan kemajuan yang cukup baik ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk di angka 1,08% pada tahun 2022 serta di tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 1,06%. Berikut ini merupakan rekapitulasi angka prevalensi balita gizi buruk tahun 2019 hingga 2024.

Tabel 2.63
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Balita dengan status Gizi Kurang	103	189	292	163	160	416
2.	Balita dengan status Gizi Buruk	0	0	0	0	0	1
3.	Jumlah Balita ditimbang	22697	13480	9815	15076	15073	15618
4.	Prevalensi Gizi Kurang	0,45%	1,40%	2,98%	1,08%	1,06%	2,66%
5.	Prevalensi Gizi Buruk	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bolmong Tahun 2025

D. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup bayi (AKHB) adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada

tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran. Angka kematian bayi dari tahun ke tahun secara absolut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data capaian awal perencanaan tahun 2018 sebanyak 26 bayi, tahun 2019 sebanyak 25 bayi, tahun 2020 sebanyak 19 bayi, tahun 2021 sebanyak 20 bayi, meningkat di tahun 2022 sebanyak 28 bayi, dan menurun di tahun 2023 sebanyak 12 bayi. Sementara tahun 2024 meningkat sebanyak 17 bayi. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.64
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran
Hidup Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kematian Bayi	25	19	20	28	12	17
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	4536	3439	4181	4196	4169	3081
3.	AKB per 1000 KH	5,51	5,52	4,78	6,67	2,88	5,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025

E. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu Melahirkan merupakan Jumlah Kematian ibu melahirkan dibahagi angka kelahiran hidup per 100.000 Kelahiran Hidup. Berdasarkan data yang ada jumlah kematian Ibu Tahun 2019 berjumlah 3 orang dan menurun di Tahun 2020 sebanyak 2 orang sedangkan pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah 4 orang, tahun 2023 turun sebanyak 2 Kematian dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 5. Untuk lebih rincinya bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.65
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kematian Ibu	3	2	4	4	2	5
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	4536	3439	4181	4196	4169	3081
3.	AKI per 100.000 KH	66,14	58,16	95,67	95,33	47,97	162,28

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bolmong 2025

F. Stunting

Indonesia pada Tahun 2022 masih ada sekitar satu juta dari lima balita Indonesia yang mengalami stunting atau mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama dan untuk mencapai target 14 Persen. stunting di tahun 2024 diperlukan upaya ekstra yang menuntut kerja keras, kerja cerdas dan kerja kolaboratif dari semua pihak yang terkait. Dari data kasus stunting yang sampai dengan saat ini masih terjadi menjadi latar belakang mengapa stunting diangkat menjadi isu Nasional dan harus dimasukkan sebagai rencana kerja dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow.





Dalam rangka mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Bolmong Pemerintah menyiapkan berbagai sarana prasarana dan sumber daya manusi yang berkaitan dalam percepatan penurunan stunting yang dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pendukung Penanganan Stunting Kabupaten Bolaang Mongondow

URAIAN	JUMLAH
Jumlah Puskesmas	18 Unit
Jumlah Puskesmas Pembantu	53 Unit
Jumlah Poskesdes	50 Unit
Jumlah Posyandu	21 Unit
Jumlah PAKD	204 Unit
Jumlah Posyandu	210
Jumlah Bidan Desa	264 Orang
Jumlah Nuder	1090 Orang
Jumlah Kader Terlatih	64 Orang
Jumlah Bidan Desa PHDA	37 Orang
Jumlah ANK DGI	43 Orang
Jumlah Dokter Spesialis Kebidanan	2 Orang
Jumlah Dokter Anak	1 Orang
Jumlah PPRBD	202 Orang
Jumlah Sub PPRBDK	1.263 orang
Jumlah TPK	605 Orang
Jumlah Pendamping PKK	26 Orang
Jumlah Susu PAKD	405 Orang

Sumber : Bappeda Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terus memaksimalkan percepatan penurunan Stunting di wilayah Bolaang Mongondow dengan melakukan langkah-langkah strategis baik pengagaran yang bersumber dari APBD dan Dari Dana Desa serta keterlibatan pihak swasta dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kab. Bolaang Mongondow. Adapun untuk data penyebaran Stunting dari hasil pengukuran yang di dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67
Jumlah Anak Stunting dan Prevalensi Stunting Berdasarkan Wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Sasaran Balita 0-59 Bulan	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	Prevalensi Stunting (%)
1	Dumoga Barat	Doloduo	1462	9	0,006%
2	Lolayan	Tanoyan	1215	9	0,007%
3	Lolayan	Tungoi	918	4	0,004%
4	Dumoga Tenggara	Konarom	660	3	0%
5	Dumoga	Pusian	1014	1	0,0009%
6	Dumoga Tengah	Werdhi Agung	767	4	0,005%
7	Lolak	Buntalo	529	3	1,005%
8	Lolak	Lolak	1636	4	0,002%



9	Dumoga Utara	Mopuya	875	7	0,008%
10	Bolaang Timur	Tadoy	760	2	0,002%
11	Passi Timur	Pangian	744	0	0%
12	Dumoga Timur	Imandi	1046	2	0,001%
13	Bilalang	Bilalang	400	0	0%
14	Bolaang	Komangaan	404	0	0%
15	Bolaang	Inobonto	697	0	0%
16	Passi Barat	Passi	839	1	0,001%
17	Poigar	Poigar	1290	4	0,003%
18	Sangtombolang	Maelang	727	2	0,002%
Total			15.532	55	0,0035%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025

Untuk tercapainya penurunan Angka Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah telah menetapkan beberapa indikator dan target sebagai acuan kerja berbagai OPD terkait dalam penanganan Stunting. Rincian indikator dan target tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.68
Indikator dan Target Penanganan Stunting

INDIKATOR	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	24,1	21,1	18,4	16	14
Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita	8,1	7,8	7,5	7,3	7
Jumlah Balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro	90.000	140.000	190.000	240.000	290.000
Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	16	14,5	13	11,5	10
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi	51	70	80	100	100
Persentase Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada balita	10	20	30	45	60
Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	40	45	50	55	60
Persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	60	65	70	75	80

Sumber: Bappeda Kab. Bolmong Tahun 2025



2.1.3.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata adalah pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, dan yang memberikan hasil belajar yang baik untuk semua siswa. Pendidikan berkualitas merata tidak hanya tentang akses, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang relevan, efektif, dan mendukung perkembangan potensi mereka secara penuh.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Berkualitas yang Merata yakni :

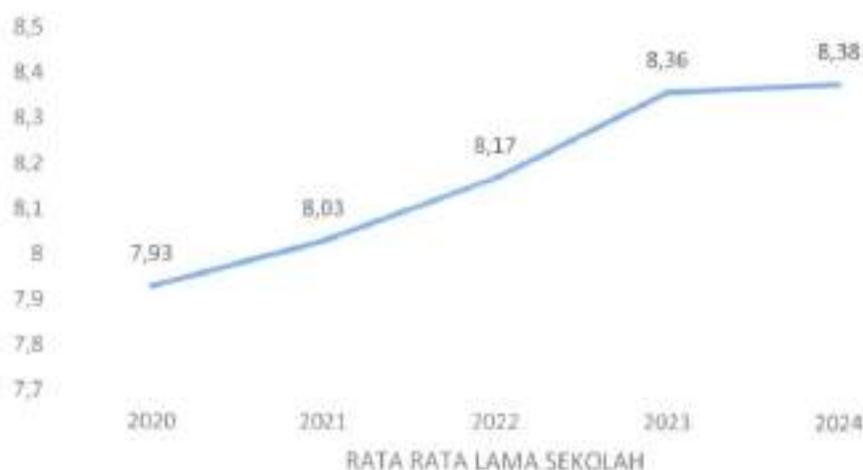
1. **Akses:** Semua anak, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau dari keluarga berpenghasilan rendah, harus memiliki akses ke sekolah yang layak, fasilitas yang memadai, dan sumber belajar yang diperlukan.
2. **Kualitas Guru:** Guru yang berkualitas dan terlatih adalah kunci keberhasilan pendidikan. Guru perlu memiliki kompetensi yang baik, serta mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan.
3. **Kurikulum yang Relevan:** Kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat, serta disesuaikan dengan perkembangan zaman.
4. **Lingkungan Belajar:** Lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan sangat penting untuk mendukung proses belajar siswa.
5. **Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat:** Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung.
6. **Penggunaan Teknologi:** Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan akses ke sumber belajar.

Perkembangan pelayanan pendidikan di Bolaang Mongondow dari tahun ketahun terus terjadi peningkatan. Adapun perkembangan pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat digambarkan sebagai berikut.

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow pada terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Melalui metode terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021 Angka Rata-rata Lama Sekolah mencapai 11,53 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan menjadi 11,91, peningkatan angka rata-rata lama sekolah di barengi oleh peningkatan kualitas pendidikan serta upaya pemerintah dan perbagai pihak dalam mendukung pendidikan. Simak perkembangan nilai rata-rata lama sekolah pada grafik berikut.

Grafik 2.14
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

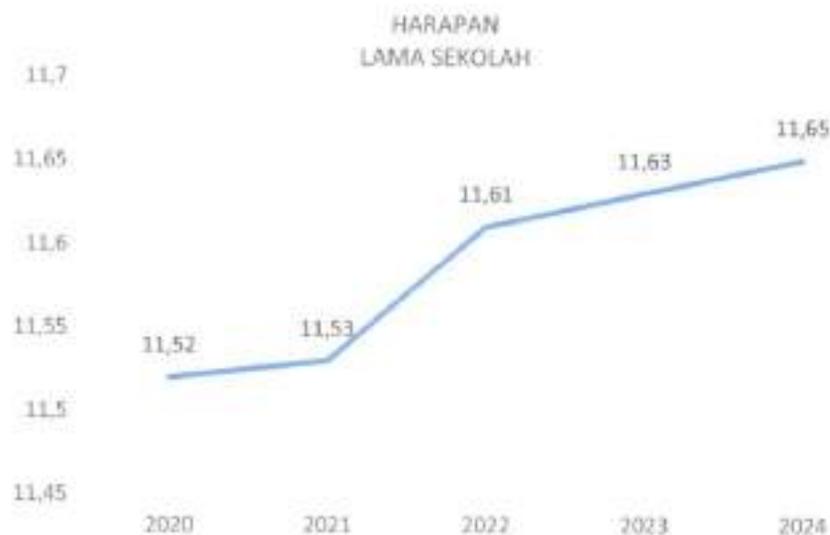


Sumber : BPS Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025

B. Angka Harapan lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai metode baru dalam penghitungan IPM pada Tahun 2021 tercatat 8,03 Tahun dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 8,38 pada tahun 2024. Berikut tabel Harapan lama Sekolah 2020-2024

Grafik 2.15
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025

Handwritten mark

C. Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP

Berdasarkan data dari BPS Bolaang Mongondow Angka partisipasi sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 baik Angka Partisipasi Murni (APM) maupun Angka Partisipasi Kasar (APK) terbilang sangat tinggi, dengan APM 94,56 dan APK 107,21. Nilai APK di atas 100 mengindikasikan bahwa jumlah murid SD yang bersekolah tanpa dilihat ketepatan usia sekolahnya lebih tinggi daripada jumlah penduduk usia jenjang SD. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) nilai angka partisipasi sekolah juga cukup tinggi yaitu APM 76,65 dan APK 89,45 sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki APM 57,84 dan APK 86,12. APM dan APK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah dalam suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2.69
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
menurut jenjang Pendidikan di kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2023-2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2023	2024	2023	2024
SD/MI/Sederajat	96,21	94,56	104,28	107,21
SMP/MTs/Sederajat	75,71	76,65	86,47	89,45
SMA/SMK/MA/Sederajat	62,83	57,84	79,35	86,12

Sumber : BPS Bolaang Dalam Angka 2025

D. Pendidikan Anak Usia Dini

Sampai Tahun 2024 Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan terus meningkatkan partisipasi PAUD walaupun adanya kendala- kendala teknis di mana Partisipasi orang tua murid belum maksimal mendukung program-program Pendidikan Anak Usia dini. Hingga tahun 2024 jumlah peserta didik Anak usia (4-6 tahun) berjumlah 7.495 siswa. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah pada pengembangan akses dan mutu PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah mewujudkan perluasan akses Paud dengan sasaran satu desa memiliki minimal satu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah Pusat mengalokasikan Bantuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang dihibahkan melalui Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dinas Pendidikan, selanjutnya sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Mutu Kelembagaan PAUD. Hingga tahun 2024 telah diterbitkan 174 izin satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) dengan jumlah murid 3.358, 51 Kelompok Bermain (KB) dengan jumlah murid 894, 62 Taman Penitipan Anak (TPA), 16 Pusat Pelayanan Belajar Mengajar (PKBM) dengan jumlah murid mencapai 2.567 murid, dan 57 Satuan PAUD sejenis (SPS).

E. Pendidikan Non Formal

Bagi peserta didik usia 15 tahun keatas yang meliputi pendidikan keaksaraan dan peningkatan budaya baca pendidik kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup. Fokus pendidikan keaksaraan adalah meningkatkan keaksaraan dan keterampilan dalam bekerja atau wirausaha bagi penduduk 15 tahun keatas melalui kursus dan pelatihan kerja. Penuntasan keaksaraan dilakukan dengan menerapkan pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang dikombinasikan dengan pendidikan keterampilan dan peningkatan budaya baca dan kesetaraan paket A, B, dan C.

F. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf atau aksara adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Hingga tahun 2024 melek huruf bagi usia 15 Tahun keatas mencapai 99,73 persen atau masih ada 0,27 persen yang buta aksara di kabupaten sementara pada kelompok umur 60 Tahun keatas ditahun 2024 angka melek huruf mencapai 95,37 atau sekitar 4,43 persen yang buta aksara. Kondisi angka melek huruf di kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Angka Melek Huruf / Aksara menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020- 2024

Kelompok Umur (Jumlah Total)	2020	2021	2022	2023	2024
15-24	100	99,79	100	100	100
15-44/59	99,83	99,92	100	100	100
15+	99,54	99,76	99,78	99,73	99,22
45+/ 60+ (2023-2024)	99,06	99,49	99,46	98,35	95,37

Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2020-2025

Kualitas Sumber Daya Manusia dapat diukur melalui ijazah tertinggi yang didapatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah maka kualitas SDM makin baik. Tingkat pendidikan yang diukur dengan kepemilikan ijazah di Kabupaten Bolaang Mongondow nampak pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Ijazah/STTB tertinggi yang
Dimiliki) 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak/Belum punya Ijazah SD	19,83	15,09	16,32	13,42	13,38
SD/Mi/Paket A/Sederajat	29,22	31,93	27,44	29,03	26,37

A



SLTP/MTs/Paket B/Sederajat	24,24	25,61	25,60	26,85	27,99
SMU/SMK/MA/Paket C/Sederajat	21,86	22,75	24,50	24,36	25,93
Perguruan Tinggi	4,85	4,62	6,14	6,34	6,33
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara Desember Tahun 2024

Berdasar tabel diatas nampak bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow penduduknya ditahun 2024 sebagian besar memiliki SD/MI/Paket A/Sederajat yakni sebesar 26,37 persen, kemudian yang memiliki ijazah SLTP/MTs/Paket B/Sederajat sebesar 27,99 persen, dan memiliki ijazah SMU/SMK/MA/Paket C/Sederajat sebesar 25,93 persen. Kecenderungan yang memiliki ijazah SMU/SMK/MA/Paket C/Sederajat setiap tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 21,86 persen meningkat menjadi 25,93 persen pada tahun 2023. Sementara yang tidak memiliki ijazah makin berkurang.

G. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi adalah persentase penduduk dalam kelompok usia tertentu yang dapat membaca dan menulis. Literasi dapat diukur untuk berbagai kelompok usia, seperti dewasa (15 tahun ke atas), remaja (15-24 tahun), dan lansia (65 tahun ke atas). Literasi mencakup kemampuan memahami informasi sederhana, seperti pernyataan tentang kehidupan sehari-hari, dan kemampuan dasar berhitung. Tingkat literasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan sikap budaya terhadap pendidikan.

Dalam menghitung angka literasi/Numerasi harus memperhatikan angka melek huruf dalam suatu daerah serta total jumlah individu dalam suatu daerah, sehingga bisa diperoleh angka literasi/numerasi pada daerah tersebut. Berikut Angka Literasi /numerasi berbagai kelompok usia di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam tabel berikut:

Tabel 2.72
Angka Literasi/Numerasi Menurut kelompok Usia Tertentu
Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	ANGKA MELEK HURUF (%)	JUMLAH WARGA MELEK HURUF 15+	ANGKA LITERASI
2020	217.479	99,64	215.304	99,00
2021	250.478	99,64	247.973	99,00
2022	252.658	99,78	250.131	99,00
2023	254.945	99,73	252.395	99,00
2024	257.378	99,22	254.804	99,00

Sumber : Bolmong Dalam Angka, Dinas Pendidikan 2025 (Data diolah)

Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan





informasi secara efektif untuk berbagai keperluan. Literasi membantu siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dengan melihat angka literasi yang mencapai 99 persen warga masyarakat mempunyai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.

Numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan konsep bilangan serta simbol matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP). Numerasi bukan hanya tentang berhitung, tetapi juga tentang berpikir logis, sistematis, dan kemampuan mengolah informasi. Selain melihat persentase penduduk dalam kelompok tertentu, Literasi di tingkat SD dan SMP juga di perhatikan pada upaya mengembangkan kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Gerakan literasi sekolah (GLS) bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran, dan menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan.

H. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

IPLM adalah alat untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. IPLM melibatkan berbagai aspek seperti pemerataan layanan perpustakaan, pembinaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), pemerataan koleksi dan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan pemustaka, keterlibatan masyarakat, dan jumlah pemustaka.

Sesuai data tahun 2023 menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) untuk Bolaang Mongondow sebesar 23,5800, dengan unsur penyusunnya, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan sebesar 0,0506 dan Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari sebesar 0,0855 (BPS Provinsi Sulawesi Utara). Data terbaru mengenai angka literasi di Bolaang Mongondow tahun 2024 kemungkinan akan dirilis oleh BPS di kemudian hari.

Perlu diingat bahwa angka literasi ini adalah bagian dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang mencakup berbagai aspek, termasuk ketersediaan dan penggunaan sumber belajar seperti perpustakaan.

Angka literasi Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat yang ideal. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mencapai 73,52, meningkat dari 64,40 pada tahun 2022.

Meskipun ada peningkatan, survei Program for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa banyak siswa Indonesia memiliki kemampuan literasi membaca yang rendah. Angka literasi di Sulawesi Utara pada tahun 2024 cukup bervariasi tergantung pada metrik yang digunakan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat secara keseluruhan untuk Sulawesi Utara adalah 62,54 sedangkan tingkat melek aksara mencapai 99,75%. Namun, Indeks Literasi yang diukur oleh Perpustakaan Nasional hanya mencapai 64,41%.





Tabel 2.73
Angka Pembangunan Literasi Masyarakat
Tahun 2022-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
2022	73,45	0,0031	1,9729	0,000	0,3271	1,9944	0,3784	0,4652
2023	41,63	0,4207	0,2305	0,0099	0,0091	1	0,244	1
2024	23,58	0,4149	0,0506	0,0098	0,0855	1	0,0369	0,0529

Sumber : BPS Sulawesi Utara 2025.

I. Indeks Literasi Digital

Literasi digital sangat penting untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi era digital. Peningkatan literasi digital dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan ekonomi.

Angka literasi digital Sulawesi Utara pada tahun 2024 adalah 62.54, yang merupakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM ini merupakan ukuran tingkat pembangunan literasi masyarakat yang mencakup berbagai aspek, termasuk pembangunan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat

Secara keseluruhan, IPLM Sulawesi Utara yang mencapai 62.54 menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan literasi digital di provinsi ini termasuk di kabupaten Bolaang Mongondow. Peningkatan literasi digital dapat dicapai melalui berbagai upaya, termasuk pengembangan perpustakaan, pendidikan literasi digital, dan peningkatan akses internet yang berkualitas.

2.1.3.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif.

Perlindungan sosial yang adaptif (Adaptive Social Protection/ASP) adalah pendekatan yang dirancang untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan membangun ketahanan terhadap guncangan, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, dengan berinvestasi pada kemampuan mereka untuk bersiap, merespons, dan beradaptasi terhadap perubahan. Intinya, ASP berupaya untuk memastikan bahwa individu dan keluarga tidak semakin terjerumus ke dalam kemiskinan akibat dampak negatif dari berbagai krisis atau perubahan dalam siklus hidup mereka.

Perlindungan sosial adaptif di Bolaang Mongondow berfokus pada perluasan jaminan sosial bagi aparat desa dan pekerja rentan, serta peningkatan akses terhadap jaminan kesehatan. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan mereka terlindungi melalui kepesertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan dan program jaminan sosial lainnya, serta melibatkan regulasi dan anggaran khusus untuk mendukung optimalisasi program. Selain itu, perlindungan sosial adaptif juga mencakup upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Fokus Perlindungan Sosial Adaptif di Bolaang Mongondow antara lain :



1. Perluasan Jaminan Sosial:

Pemerintah daerah berkomitmen memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk aparat desa dan pekerja rentan, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

2. Peningkatan Akses Kesehatan:

Perlindungan sosial juga mencakup peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan:

Program perlindungan sosial adaptif mencakup upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan dan sistem ganda, serta pendidikan tentang pengasuhan anak.

4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

Perlindungan sosial adaptif juga memperhatikan ketahanan sosial budaya dan ekologi, termasuk upaya pencegahan perkawinan dini dan pemanfaatan lahan pekarangan keluarga serta tanah kas desa untuk kegiatan produktif.

5. Penguatan Regulasi dan Anggaran:

Pemerintah daerah akan menyusun regulasi dan mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung optimalisasi program jaminan sosial dan perlindungan sosial adaptif.

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow berusia di atas 15 tahun pada tahun 2024 tercatat 197.353 jiwa. Dari total tersebut sebanyak 134.62 jiwa penduduk termasuk dalam angkatan kerja dan sisanya sebanyak 62.701 jiwa termasuk kategori bukan angkatan kerja. Total penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, pada penduduk dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), sebanyak 91,90 persen memiliki kegiatan utama bekerja. Persentase bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang pendidikan terakhir ini merupakan yang terkecil. Sebaliknya, persentase yang bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang pendidikan terakhir kurang dari Sekolah Dasar (SD) memiliki persentase terbesar yaitu 97,55 persen. Berdasarkan data statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran terbuka sejumlah 6.039 orang, yang bekerja 128.613 orang dengan persentase bekerja terhadap Angkatan kerja mencapai 95,52 persen.

Dalam usaha pencapaian kinerja pelayanan maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2024 melaksanakan 5 Program dan 16 Kegiatan dan dengan mangacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan. Adapun Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan dimaksud meliputi : (1) Pelayanan Pelatihan Kerja, dengan indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, besaran tenaga kerja



yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan; (2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan; (3) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan indikator kinerja besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama; (4) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, dengan indikator kinerja besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek; dan (5) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja besaran pemeriksaan perusahaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan.

Mengacu pada lima Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Kerja
Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan bagi pencari kerja di tahun 2023 sejumlah 11 orang yang dilaksanakan tahun 2023, sementara kegiatan tersebut belum dilaksanakan ditahun 2024.
2. Penempatan Tenaga Kerja
Pencari kerja yang terdaftar untuk tahun 2023 sejumlah 1534 orang. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sejumlah 1208 orang. Sementara untuk tahun 2024 pencari kerja yang terdaftar mencapai 1.358 orang dan pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.217 orang.
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Kasus yang dielesaikan dengan perjanjian bersama untuk tahun 2024 adalah nol (0) kasus.
4. Kepesertaan Jamsostek
Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek aktif dengan jumlah peserta sebanyak 7.446 pekerja/buruh ditahun 2024
5. Pengawasan Ketenagakerjaan, Pemeriksaan perusahaan dan pengujian peralatan di perusahaan di tahun 2024 sudah menjadi kewenangan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara

Masyarakat di kabupaten Bolaang Mongondow yang belum mempunyai pekerjaan tetap, melakukan pekerjaan mingguan, adapun mereka bekerja pada berbagai lapangan pekerjaan, diantaranya sebagai petani, nelayan, buruh dan pelayanan jasa pada berbagai bidang. Berikut data pekerja mingguan di kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.74
Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu menurut jenis pekerjaan utama di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja	114,330	117,318	112,630	193,559	197.353

Sumber: Disnaker Kab. Bolmong 2025

Dalam mendapatkan pekerjaan yang ada beberapa pencari kerja yang terdaftar mempunyai tingkat pendidikan berbeda beda berikut data pencari kerja yang ada yang terdaftar di dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten



Bolaang Mongondow. berikut data jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan.

Tabel 2.75
Jumlah Pencari Kerja terdaftar di Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	518	196	550	1464	1534	1.358
2	Jumlah Pencari Kerja yang berhasil di Tempatkan	248	0	136	135	1208	1.217
3	Persentase Pekerja	47.9	0	24.7	9.22	78.74	89,61

Sumber: Disnaker Kab. Bolmong 2025

2.1.3.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju" adalah konsep yang mengaitkan praktik keagamaan dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya agama dalam memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa, bukan hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Konsep ini menyiratkan bahwa agama dan budaya seharusnya tidak berjalan terpisah, tetapi saling mendukung dan memperkuat dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, sejahtera, dan berkelanjutan. Salah satu penerapan dalam Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan untuk membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan berwawasan luas, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis agama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta mendorong dialog antar umat beragama dan menciptakan ruang-ruang interkasi yang positif untuk mempererat tali silaturahmi. "Beragama maslahat dan berkebudayaan maju" adalah konsep yang relevan dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan mewujudkan masyarakat yang beradab, sejahtera, dan harmonis.

Dalam Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow cukup baik, meskipun terdapat beberapa catatan mengenai intensitas hubungan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan aktif dalam menjaga dan merawat kerukunan, terutama menjelang momen-momen penting. Salah satu ukuran dalam Beragama maslahat yakni dengan melihat indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kabupaten Bolaang Mongondow. Dimana dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend positif. Meskipun memiliki keberagaman agama, mampu menjaga hubungan baik dan harmonis. Indikator utama kerukunan seperti toleransi kesetaraan dan kerjasama menunjukkan hasil yang baik.

Dalam pelaksanaan survei terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama, di Kabupaten/Kota Se Sulut belum dilaksanakan sehingga kondisi KUB sulut diharapkan bisa mencerminkan kondisi kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow. Berikut Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulut tahun 2021 s/d



2024.

Tabel 2.76
Indeks Kerukunan Umat Beragama

No.	Provinsi	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SULAWESI UTARA	77,97	-	79,29	80,95	81,18	81,33

Sumber : LK3P Departemen Agama Sulut 2025

2.1.3.6 Keluarga Berkualitas, Keselarasan gender dan Masyarakat Inklusif.

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif adalah tiga pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kesetaraan gender dalam keluarga, yang ditandai dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang adil, serta inklusi sosial, yang memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama, berkontribusi pada terciptanya keluarga yang harmonis dan masyarakat yang lebih adil.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selain itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sementara sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi atau menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

IPG Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan lebih Tinggi, dibandingkan capaian Propinsi Sulawesi Utara. Dari angka IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG Kabupaten Bolaang Mongondow serta kabupaten kota yang ada di Bolaang Mongondow bersatu dari tahun ke tahun terus meningkat.





Tabel 2.77
Indeks Pembangunan Gender Propinsi Sulut dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2021 - 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil SP2010)			
	2021	2022	2023	2024
Bolaang Mongondow	88.41	88.52	88.55	89, 18
Bolaang Mongondow Utara	87.02	87.35	87.53	88,22
Bolaang Mongondow Selatan	80.09	80.42	80.97	81,72
Bolaang Mongondow Timur	90.98	91.10	91.37	92,06
Kota Kotamobagu	95.38	95.47	95.49	96,51
Sulawesi Utara	94.61	94.89	95.06	95,98

Sumber: BPS Provinsi sulut 2025

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 2.78
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bolaang Mongondow

Dimensi IDG	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Dimensi	
	2023	2024
Keterlibatan di Parlemen	34.48	30
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	60.18	50,94
Sumbangan Pendapatan Perempuan	27.92	28,57
IDG	76.79	77,29

Sumber: BPS Bolmong 2025

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Bolaang Mongondow pada keterlibatan perempuan di parlemen tahun 2024 sudah mewakili keberadaan perempuan sebesar 30 persen, disamping adanya ketentuan pemerintah untuk memberikan hak perempuan sebesar 30 persen dalam proses politik. Sementara jika dilihat dari kondisi perempuan sebagai tenaga profesional yang emncapai 50,94 persen maka tentu keterlibatan perempuan dalam pembangunan sangat penting dan memadai dalam berbagai segi. Meski demikian sumbangan pendapatan perempuan seperti tabel tersebut masih pada angka 28,57.

1. Perlindungan Hak Perempuan

Perlindungan perempuan menurut Kemen PPPA adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam



pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

2. Perlindungan Anak

Pemenuhan hak anak adalah segala kegiatan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Hak anak yang harus dipenuhi mencakup sebanyak 31 hak-hak anak yang sesuai dengan hasil Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child). Sesuai data dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, ada 50 kasus kekerasan kepada anak yang didampingi langsung oleh pemerintah kabupaten bolaang mongondow selang bulan jaunari hingga desember 2023. Jenis kasus bervariasi mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap seksual perempuan, kekerasan seksual anak serta kekerasan fisik terhadap anak. Kondisi ini diharapkan dapat berkurang pada tahun tahun mendatang.

Tabel 2.79

Indeks Perlindungan Anak di Kab. Bolaang Mongondow tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
2020	68,2	70	65,5
2021	70,5	72,1	67,8
2022	72,4	74,5	70,3
2023	75,4	77,2	74,1
2024	78	80	77

Sumber : Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 2025

3. Tumbuh Kembang Anak

Pertumbuhan: suatu proses perubahan fisik (anatomis) yang ditandai dengan bertambahnya ukuran berbagai organ tubuh, karena adanya penambahan dan pembesaran sel-sel. **Perkembangan:** suatu proses bertambahnya kemampuan (skill) dalam stuktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam polayang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Daya saing sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bolaang Mongondow, seperti daerah lain, dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, penting untuk menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas daerah. Daya saing sumber daya manusia (SDM) di Bolaang Mongondow dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama dalam sektor pertanian dan potensi tenaga kerja yang ada. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan daya saing



melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Saing SDM Bolaang Mongondow antara lain potensi sumber daya alam, dimana Bolaang Mongondow mempunyai potensi pertanian yang signifikan dengan sebagian besar penduduk bekerja disektor ini. Untuk meningkatkan daya saing, diperlukan upaya transfer teknologi dan pengetahuan, serta peningkatan kualitas SDM pertanian. Selain itu Bolaang Mongondow mempunyai potensi tenaga kerja.

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow berusia di atas 15 tahun pada tahun 2024 tercatat 197.353 jiwa. Dari total tersebut sebanyak 134.62 jiwa penduduk termasuk dalam angkatan kerja dan sisanya sebanyak 62.701 jiwa termasuk kategori bukan angkatan kerja. Total penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, pada penduduk dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), sebanyak 91,90 persen memiliki kegiatan utama bekerja. Persentase bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang pendidikan terakhir ini merupakan yang terkecil. Sebaliknya, persentase yang bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang pendidikan terakhir kurang dari Sekolah Dasar (SD) memiliki persentase terbesar yaitu 97,55 persen. Berdasarkan data statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran terbuka sejumlah 6.039 orang, yang bekerja 128.613 orang dengan persentase bekerja terhadap Angkatan kerja mencapai 95,52 persen.

Jika melihat Rasio ketergantungan Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan kabupaten Bolaang Mongondow setiap tahunnya terjadi peningkatan artinya rasio ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif semakin besar. Selain faktor kesehatan yang semakin baik dimana angka harapan hidup yang semakin tinggi sehingga prosentase penduduk usia 64 tahun keatas semakin banyak, beberapa faktor seperti keluarnya masyarakat pada usia-usia produktif keluar daerah untuk sekolah dan bekerja semakin meningkat. Tabel dibawah ini menunjukkan perhitungan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bolaang Mongondow.



Tabel 2.80
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2024

NO	BOLAANG MONGONDOW	USIA MUDA	USIA PRODUKTIF	USIA TUA	KK TOTAL
		54018	183264	20096	40,44
1	SANG TOMBOLANG	2501	8062	880	41,94
2	DUMOGA BARAT	4141	13080	1295	41,56
3	DUMOGA TIMUR	4436	15408	1930	41,32
4	DUMOGA UTARA	2796	11240	1234	35,85
5	LOLAK	7907	23812	2460	43,54
6	BOLAANG	4627	15255	1504	40,19
7	LOLAYAN	5950	19862	1757	38,8
8	PASSI BARAT	3490	12506	1538	40,2
9	POIGAR	3895	13890	1904	41,75
10	PASSI TIMUR	2390	9585	1318	38,69
11	BOLAANG TIMUR	2962	8881	831	42,71
12	BILALANG	1414	5196	432	35,53
13	DUMOGA	3172	11258	1348	40,15
14	DUMOGA TENGGARA	2012	6750	572	38,28
15	DUMOGA TENGAH	2325	8479	1093	40,31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Tahun 2025

Sesuai dengan tabel diatas bahwa jumlah penduduk untuk Usia Muda yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Lolak dengan jumlah 7.737 ditahun 2023 meningkat sejumlah 7.907 di tahun 2024. Sedangkan Usia Muda yang paling rendah berada di Kecamatan Bilalang dengan angka 1.414 Jiwa tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023 sebesar 1430. Kemudian Usia Produktif yang paling tinggi tahun 2024 mencapai 23.812 Jiwa terdapat juga di Kecamatan Lolak dan Usia Produktif yang paling rendah ada di Kecamatan Bilalang dengan jumlah 5.196 Jiwa sedangkan Usia Non Produktif tertinggi berada juga di Kecamatan Lolak pada angka 2.460 Jiwa dan Usia Non Produktif yang paling rendah ada di Kecamatan Bilalang dengan jumlah 432 Jiwa.

Tingkat ketergantungan penduduk Bolaang Mongondow pada tahun 2024 sebesar 40,44 meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 39,96. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini berada dalam windows of opportunity dimana penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif.

Selain itu dalam upaya meingkatkan daya saing SDM Pemerintah daerah berupaya mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya. Ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja, serta fokus pada peningkatan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan.





2.1.4.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.

Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi ekonomi. Inovasi berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi, membuka pasar baru, dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan persaingan yang meningkat juga mendorong kebutuhan akan teknologi baru. Keduanya saling berkaitan dan menciptakan simbiosis mutualisme. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu mendukung inovasi teknologi untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilakukan berbagai inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya sektor pertanian. Dimana Bolaang Mongondow mempunyai potensi terbesar di sektor tersebut. Inovasi di Bolaang Mongondow mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian dan teknologi hingga pelayanan publik dan kebudayaan. Beberapa contoh inovasi yang menonjol adalah kain tenun daun nanas, dan berbagai inovasi desa yang memanfaatkan teknologi pertanian dan pengelolaan sampah. Selain itu, terdapat pula inovasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata, serta berbagai aplikasi berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Meski demikian dari penilaian dilakukan oleh BSKDN Kemendagri RI pada inovasi yang dilaporkan dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah berbasis Website dan inovasi yang terlapor ada yang bersifat digital maupun non digital, serta peyanan dasar, pemerintahan dan inovasi lainnya, inovasi yang dilaksanakan belum maksimal atau masih kurang inovatif, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam mengembagkan inovasi khususnya dalam peningkatan produktivitas perekonomian daerah oleh masyarakat secara luas.

Pada sektor pertanian melalui inovasi teknologi pertanian modern untuk produktivitas, pengembangan produk pertanian unggulan seperti padi dan kelapa serta mengolah limbah semisal daun nenas menjadi produk bernilai tambah berupa kain tenun. Jika melihat Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Bolaang Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2020-2024 dari 17 kategori sektor usaha, pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB yang mencapai 40,49 persen, diikuti kategori perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,56 persen. Hal ini juga mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengalami percepatan dari 5,18 menjadi 5,33 persen (BPS Bolmong 2025). Sementara untuk PDRB sektor industri pengolahan masih perlu ditingkatkan karena hanya mencapai -2,55 persen. Untuk mengetahui rasio pada sektor usaha dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2.81
Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Bolaang
Mongondow atas dasar harga berlaku tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,02	40,15	40,45	39,78	40,49
2	Pertambangan dan Penggalian	10,21	11,3	10,83	10,01	9,86
3	Industri Pengolahan	6,78	7,29	7,52	7,59	6,95
4	Pengandaan listrik dan Gas	0,1	0,1	0,1	0,10	0,10
5	Pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	10,45	10,71	10,48	10,62	10,41
7	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,09	11,3	11,63	12,36	12,56
8	Transportasi Pergudangan	1,82	1,78	1,91	2,24	2,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39
10	Informasi dan Komunikasi	0,58	0,57	0,55	0,57	0,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,09	1,13	1,05	0,97	0,93
12	Real estate	4,55	4,38	4,2	4,17	4,11
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,04	0,14	0,04	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	3,34	3,21	3,11	3,13	3,13
15	Jasa Pendidikan	4,79	4,79	4,88	5,00	5,14
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,24	2,24	2,36	2,37
17	Jasa Lainnya	0,54	0,54	0,54	0,60	0,65
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bolmong dalam angka 2025 dan Data Olahan Bappeda 2025.

Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) industri pengolahan adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini memberikan gambaran tentang kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah tersebut. Jika PDRB Atas Dasar harga berlaku Menurut Lapangan usaha pada Industri pengolahan tahun 2023 mencapai 799,73 milyar rupiah dan tahun 2024 naik menjadi 799,86 dengan rasio (distribusi PDRB ADHB) sebesar 6,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah. Sementara untuk penyediaan akomodasi makan dan minum tahun 2023 mencapai 40,20 Milyar Rupiah dan tahun 2024 naik menjadi 45,13 milyar rupiah dengan rasio (distribusi PDRB ADHB) sebesar 0,39%. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum maraknya hotel restoran maupun kafe dan penyedia jasa makanan di wilayah Bolmong. Olehnya dibutuhkan kebijakan pemerintah terkait pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki dua Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi adalah Pemandian Air Panas Bakan di Kec. Lolayan dan Peneluran Maleo di Kec. Dumoga Timur dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi terdapat pengembangan destinasi wisata adalah Pasir Putih



dan Pulau Tiga, Kawasan Kampung Nelayan, Pantai Lolan, Pantai Bungin, Lolak Indah, Pantai Babo, Agrowisata (Hortikultura) dan Air Terjun Mengkang. Pemandian Air Panas Bakan adalah destinasi paling banyak peminat dikarenakan adalah satu- satunya pemandian air panas yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Peneluran Maleo adalah kawasan hutan lindung yang masih terjaga keasliannya. Berikut data data kepariwisataan di kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.82
Kawasan Unggulan Pariwisata Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI/ DESA	KONDISI INFRASTRUKTUR	KET
1	Geo Wisata (Pemandian Air Panas)	Bakan	-Jalan beraspal beton Hotmix (Jalan Provinsi)	

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2022 Ripparda Provinsi Sulut

Selain mempunyai kawasan Unggulan Pariwisata di Bolaang Mongondow yang sudah sangat dikenal masyarakat Bolaang Mongondow dan sekitarnya, terdapat juga kawasan yang baru dikembangkan dan sudah mulai berjalan, yang menjadi kawasan strategis pariwisata propinsi, seperti pada table dibawah ini.

Tabel 2.83
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow

NO	NAMA DESTINASI	KEC	LOKASI/DESA	KET
1	Pulau Tiga	Maelang	Maelang	
2	Penangkaran Burung Maleo	Dumoga Timur	Pinonobatan Induk	
3	Agrowisata Hortikultura	Passi Timur	Insil dan Sinsinggon	

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2022 Ripparda Provinsi Sulut

Beberapa kawasan wisata sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat, dan dikembangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat namun belum terlalu baik dalam penataan, sehingga kedepan akan menjadi kawasan unggulan pariwisata. Beberapa diantaranya sudah akan dikembangkan pada Tahun 2018-2019.



Tabel 2.84
Kawasan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten
Bolaang Mongondow

No	Nama Destinasi	Alamat
1	Desa Wisata Pasir Putih Sallugo Boki	Desa Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang
2	Kawasan Pulau Tiga	Desa Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang
3	Pantai Pasir Putih	Desa Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang
4	Pantai Indah Maelang	Desa Maelang Kec.Sang Tombolang
5	Pulau Tai'/Gogabola Maelang	Desa Maelang Kec.Sang Tombolang
6	Pantai Sumpit Desa Bolangat	Desa Bolangat Sang Tombolang
7	Pantai Fajar Indah Babo	Desa Babo Kec.Sang Tombolang
8	Pantai BBC (Babo Beach) Desa Babo	Desa Babo Kec.Sang Tombolang
9	Pantai Nyiur Hijau Babo	Desa Babo Kec.Sang Tombolang
10	Pantai Hidayah Babo	Desa Babo Kec.Sang Tombolang
11	Pantai Nurmalia Indah Babo	Desa Babo Kec.Sang Tombolang
12	Pantai Babo Moonow	Desa Babo Kec.Sang Tombolang
13	Pantai Ayong	Desa Ayong Kec.Sang Tombolang
14	Lokasi Karapan sapi Sirkuit Lembah Sunyi	Desa Ikhwan Kec.Dumoga Barat
15	Objek Wisata Toraut Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Desa Toraut Utara Kec.Dumoga Barat
16	Gua Batu Berkamar	Desa Toraut Utara Kec.Dumoga Barat
17	Penangkaran Maleo Matayangan	Desa Matayangan Kec.Dumoga Barat
18	Kolam Air Panas Modomang/Kolam Y'hanget	Desa Modomang Kec.Dumoga Timur
19	Sanctuary Maleo Pinonobatuon/Tambun	Desa Tambun Kec.Dumoga Timur
20	Sanctuary Maleo Pusian	Desa Pusian Kec.Dumoga Timur
21	Lokasi Pemandian Galvelindo SwimingPool Desa Dumoga II	Desa Dumoga II Kec.Dumoga Timur
22	Wisata permandian	Desa Dumoga II Kec.Dumoga Timur
23	Wisata Kebun Jati Gelebug Chandra	Mopugad Selatan Kec.Dumoga Utara
24	Waduk Pindol	Desa Pindol Kecamatan Lolak
25	Kawasan Mangrove Baturapa 2	Baturapa 2 Kecamatan Lolak
26	Pantai Bungin	Motabang Kecamatan Lolak
27	Pantai Pulau Molosing	Desa Lolak Kec. Lolak
28	Pantai Pondok Cinta	Desa Lolak Kec. Lolak
29	Pantai Losari	Desa Lolak Kec. Lolak
30	Pantai Lolak	Desa Lolak Kec. Lolak
31	Wisata Pantai Lolak Indah	Desa Lolak Kec. Lolak



32	Pantai Tanjung Ompu	Desa Lalow Kec.Lolak
33	Makam Bua Hotinimbang Manopo Sugeha	Desa Langagon Kec.Bolaang
34	Agrowisata Sawah Padi Bombanon	Bombanon Kec.Lolayan
35	Wisata Pemandian Air Panas Bakan	Desa Bakan Kec.Lolayan
36	Wahana Totabuan Blessing	Tungoi 1 Kecamatan Lolayan
37	Wisata Air Terjun 5 Dimensi Mengkang	Desa Mengkang Kecamatan Lolayan
38	Wisata Religi Kollpot	Desa Mopait Kecamatan Lolayan
39	Rumah Adat Monopi Ds Mengkang	Desa Mengkang Kecamatan Lolayan
40	Agrowisata Buah Durian Desa Tungoi II	Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan
41	Wisata Alam negeri di atas awan Desa Lolayan	Desa Lolayan Kecamatan Lolayan
42	Permandian Inuai PARK	Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat
43	Wisata Air Terjun Muntoi	Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat
44	Wisata Makam Nojodo Mokoginta	Desa Bulud Kecamatan Passi Barat
45	Wisata Makam Sainun Mokodompit	Desa Bulud Kecamatan Passi Barat
46	Wisata Kuburan Bogani Desa passi II	Desa Passi II Kecamatan Passi Barat
47	Wisata Makam Panggulu Passi Lomotu - Mokoginta Desa Passi	Desa Passi Kecamatan Passi Barat
48	Wisata Budaya Tudu In Passi	Desa Passi Kecamatan Passi Barat
49	Agrowisata Kebun Buah Nenas Desa lobong	Desa Lobong Kecamatan Passi Barat
50	Pantai Wisata Nonapan Baru	Desa Nonapan Baru Kecamatan Poigar
51	Agrowisata (Kebun Hortikultura) Desa Insil	Desa Insil Kecamatan Passi Timur
52	Agrowisata (Kebun Hortikultura) Desa Sinsingon	Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur
53	Wisata Swimming pool mobuya	Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur
54	Pantai Lolan	Desa Lolan Kecamatan Bolaang Timur
55	Air terjun Baki Lolan 2	Desa Lolan2 Kecamatan Bolaang Timur
56	Makam Raja Abraham	Desa Bolaang 1 Kecamatan Bolaang Timur
57	Wisata Religi Motayok	Desa Bilalang IV Kec.Bilalang
58	Wisata Gunung Kramat Bumbungon	Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga
59	Wisata Sungai Lembah Indah	Desa Konarom Kec.Dumoga Tenggara

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bol Mong 2024





Dalam rangka mendukung usaha wisata dan kebutuhan lainnya, pelaku usaha wisma dan perhotelan sudah membangun usahanya di Bolaang Mongondow. Berikut hotel dan wisma yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.85
Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2024

NO.	NAMA HOTEL	JUMLAH KAMAR	TERSEDIA	TERJUAL
1	BRENDA	9	3285	500
2	KENDIS NEW	29	10585	580
3	ATLANTIC	26	9490	923
4	TOTABUAN	9	3285	1083
5	HOME STAY JESSY	12	4380	1027
		85	31025	4113

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bol Mong 2024

Untuk jumlah kunjungan wisatawan yang datang, baik wisatawan mancanegara maupun domestik pada tahun 2020 tidak adanya wisatawan mancanegara dikarenakan pandemi covid 19, ditahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 140 dan terjadi lonjakan wisatawan nusantara pasca pandemi, namun ditahun 2022 terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara yaitu hanya 46, kemudian ditahun 2023 kembali terjadi peningkatan wisatawan mancanegara sebanyak 260 orang dan sebanyak 280 di Tahun 2024. Sedangkan wisatawan nusantara setiap Tahun mengalami peningkatan. Data tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.86
Angka Kunjungan wisata dan Penggunaan kamar Hotel/Penginapan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

No.	Dokumen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wisatawan Mancanegara	0	140	46	260	280
2	Wisatawan Nusantara	116.763	235.000	251.119	253.979	268.032
	Total	116.763	235.140	251.165	254.239	268.312

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bol Mong 2025

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow berusia di atas 15 tahun pada tahun 2024 tercatat 197.353 jiwa. Dari total tersebut sebanyak 134.62 jiwa penduduk termasuk dalam angkatan kerja dan sisanya sebanyak 62.701 jiwa termasuk kategori bukan angkatan kerja. Total penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, pada penduduk dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), sebanyak 91,90 persen memiliki kegiatan utama bekerja. Persentase bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang





pendidikan terakhir ini merupakan yang terkecil. Sebaliknya, persentase yang bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang pendidikan terakhir kurang dari Sekolah Dasar (SD) memiliki persentase terbesar yaitu 97,55 persen.

Berdasarkan data statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran terbuka sejumlah 6.039 orang, yang bekerja 128.613 orang dengan persentase bekerja terhadap Angkatan kerja mencapai 95,52 persen. Kondisi ini diharapkan mampu menjadi potensi dalam peningkatan produktivitas perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow melalui berbagai kebijakan pemerintah serta kolaborasi aktif antara Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat yang didukung oleh inovasi teknologi dalam menjawab tantangan saat ini.

Produktivitas merupakan rasio antara hasil kegiatan (output) dan segala pengorbanan (biaya) untuk menghasilkan (input). Produktivitas meningkat ketika lebih banyak output diproduksi dengan jumlah input yang sama atau ketika jumlah output yang sama diproduksi dengan input yang lebih sedikit. Dalam konteks ini produktivitas yang dimaksud adalah ratio antara PDRB dengan jumlah pekerja. Output merupakan PDRB sedangkan input merupakan jumlah penduduk yang bekerja.

Tabel 2.87

Produktivitas Ekonomi di Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2021-2024

Keterangan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
PDRB HB (Triliun Rupiah)	8.970,18	9.776,24	10.539,42	11.515,68
Jumlah Penduduk Yang Bekerja (Orang)	110.625	112.630	121.669	128.613
Produktivitas Ekonomi (Juta Rupiah)	8.108	8.680	8.662	8.953

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka 2025, Bappeda (data diolah)

Produktivitas ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow terus meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada dari tabel diatas nampak bahwa produktivitas ekonomi tahun 2023 mencapai 8.662 juta rupiah naik menjadi 8.953 juta rupiah di tahun 2024. Ini berarti bawa pada tahun 2024 produktivitas ekonomi sebesar 8.953 juta rupiah artinya 1 tenaga kerja menghasilkan output sebesar 8.953 juta rupiah.

Rasio kewirausahaan di Indonesia pada tahun 2024 adalah 3,35% dari total angkatan kerja, atau sekitar 4,9 juta orang, menurut Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,04%. Meskipun ada peningkatan, rasio ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura, yang masing-masing memiliki rasio 4,74% dan 8,76%. Rasio kewirausahaan di Sulawesi Utara pada tahun 2024 adalah 2,99%. Ini menempatkan Sulawesi Utara pada posisi ke-8 dari 38 provinsi di Indonesia untuk rasio wirausaha mapan. Sementara rasio kewirausahaan di Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai data dari Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 mencapai 5,5 %. Kondisi perlu didorong oleh akses permodalan, pelatihan keterampilan, pengembangan ekosistem bisnis yang kondusif, serta dukungan pemerintah dan lembaga terkait.





Rasio Kewirausahaan kabupaten Bolaang Mongondow dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.88
Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kewirausahaan	7,8	8,8	5,2	5,5	5,5

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab Bolmong 2025.

2.1.4.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.

Green Economy (ekonomi hijau) adalah suatu Gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan . Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan , hemat sumber daya alam dan berkeadilan social. Green Economy dapat diukur setia progresnya melalui Indeks Ekonomi Hijau secara bagian dari transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara tangible atau sesuatu yang nyata berwujud dan dapat dilihat secara kasat mata representatif dan akurat. Dalam target capaian kinerja sesuai sasaran visi pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Indeks Ekonomi Hijau daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 (secara baseline) mencapai 36,00 atau masuk dalam kategori sedang Tier I Dan Tahun 2045 target Indeks Ekonomi Hijau Daerah mencapai 70,47 dengan kategori sangat baik.

Kerangka ekonomi Hijau terdiri dari :

1. Pilar Sosial.

Pilar sosial dapat dilakukan perhitungan terhadap Rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka.

2. Pilar Ekonomi.

Untuk pilar ekonomi dapat diukur melalui intensitas emisi, intensitas energi final, pendapatan nasional bruto per kapita produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sektor industri serta produktivitas tenaga kerja sektor jasa.

3. Pilar lingkungan.

Pilar lingkungan dapat dilakukan melalui persentase luas tutupan lahan dari luas daratan indonesia, bauran energi baru terbarukan, persentase sampah terkelola, persentase penurunan emisi kumulatif dan base line serta tutupan lahan gambut.

4. Pilar Tata Kelola.

Hal ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang berfungsi dalam melakukan kegiatan serta penjabaran atas pilar pilar ekonomi hijau kedalam indeks ekonomi hijau daerah.

Dalam penerapan perlu dilakukan berbagai hal antara lain :





- a. Pemetaan dan inventarisasi terhadap lokasi/aktifitas rawan terhadap Green Ekonomi (GE)
- b. Peningkatan kapasitas Birokrat antar aras (terutama Kabupaten-Kecamatan-Desa) dan pelaku usaha serta masyarakat terhadap penerapan GE dan pembangunan berkelanjutan, dibarengi peningkatan Kerjasama (baik internal maupun eksternal).
- c. Percepatan penanggulangan sampah secara menyeluruh berbasis daur ulang, energy dan kompos
- d. Percepatan pertanian berbasis korporasi dengan transformasi perubahan perilaku usaha dari bukan organic ke organic. (inisiasi beberapa pemerintah daerah (provinsi/kabupaten-kota) Belanja bantuan kompos/pupuk organic pada OPD pertanian dan perkebunan)
- e. Wajib Evaluasi berkala terhadap Target PRK dan SDGs
- f. Inovasi pengembangan system konektivitas transportasi public yang nyaman dan pro lingkungan
- g. Percepatan transformasi digital dalam kerangka efisiensi pelayanan public dan kelancaran pelaku usaha
- h. Manajemen penataan wilayah dan Kawasan-kawasan ekonomi berbasis pro lingkungan
- i. Diperlukan kelembagaan terpadu pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat yang berorientasi dan fokus pada evaluasi GE dan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas.
- j. Perlu disusun Blue Print atau semacam Rencana Induk atau Master Plan Pembangunan Berbasis Green Economy mengoptimalisasi Pembangunan Berkelanjutan Daerah, di mana Dokumen ini nantinya disinkronkan dengan dokumen perencanaan sectoral sebagai dokumen dengan inisiasi pemerintah daerah.
- k. Pertumbuhan ekonomi menjadi serius untuk difokuskan kedepan dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah dan panjang kabupaten bolmong dalam kerangka indonesia yang maju dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam penerapan ekonomi Biru di Sulawesi Utara (Sulut) khususnya di Kabupaten Bolaang Mognondow berfokus pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Ini mencakup pengembangan perikanan yang bertanggung jawab, pariwisata bahari berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem laut. Bolaang Mongondow dan sluwesi utara umumnya memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, yang didukung oleh lokasi strategisnya sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik.

Penerapan ekonomi biru harus difokuskan pada :

1. Perikanan Berkelanjutan:

Penguatan rantai dingin terintegrasi, mulai dari penangkapan hingga





- pengolahan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan.
2. Hilirisasi Produk Perikanan:
Peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui pengolahan yang lebih baik dan diversifikasi produk.
 3. Pariwisata Bahari:
Pengembangan pariwisata bahari yang bertanggung jawab, seperti pariwisata bahari di Likupang, yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja dan menarik wisatawan.
 4. Pelindungan Ekosistem Laut:
Perluasan wilayah konservasi laut, pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta pengendalian sampah plastik di laut.
 5. Pengembangan Energi Terbarukan:
Pemanfaatan energi kelautan, seperti tenaga angin dan ombak, untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi karbon.
 6. Pendidikan dan Pelatihan :
Peningkatan kesadaran Masyarakat tentang ekonomi biru dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut melalui program Pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pelestarian lingkungan laut dan pesisir, Peningkatan ketahanan pangan, Pengurangan emisi karbon. Dengan penerapan ekonomi biru yang tepat, Bolaang Mongondow dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2.1.4.4 Transformasi Digital.

Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi beroperasi, melayani pelanggan, dan menciptakan nilai. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang perubahan fundamental dalam cara berpikir, bekerja, dan berinteraksi dengan pelanggan dan mitra. Transformasi digital mencakup berbagai aspek, mulai dari otomatisasi proses bisnis, pengembangan produk dan layanan baru, hingga perubahan budaya organisasi.

Dalam proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua area bisnis, transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Hal ini telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow pada pelayanan perizinan berupa service point yang di butuhkan dalam perizinan berusaha, memberikan kemudahan kepada masyarakat serta meningkatkan investasi penanaman modal di Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu tranformasi digital juga dilakukan terhadap pencatatan sipil dan kependudukan. Sehingga transformasi digital dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi,





mengurangi biaya, menciptakan model bisnis baru, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dalam Upaya transformasi digital saat sejak tahun 2022 telah dilakukan tanda tangan elentronik dalam pemanfaatan layanan sertifikat elektronik.

Sesuai data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Badan Pusat Statistik Nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi Sulawesi Utara Tahun 2022 mencapai 5,87 dan meningkat Tahun 2023 mencapai 5,95 dengan kategori nilai IP-TIK sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan TIK di wilayah Sulawesi utara berada pada tingkat yang moderat, tidak terlalu maju namun juga tidak terlalu tertinggal. Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow maupun daerah Kabupaten kota lainnya di Sulut belum diperoleh Nilai dari IP TIK tersebut. Meskid emikian diharapkan kondisi tersebut cukup menggambarkan kondisi transformasi digital di wilayah Kabupaten Bolaang Mongodow.

Transformasi digital juga menghadirkan tantangan, seperti kebutuhan akan investasi yang signifikan, perubahan budaya organisasi, dan perlunya adaptasi terhadap teknologi baru, sehingga dibutuhkan perubahan yang mendasar dan holistik yang didorong oleh teknologi digital, yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang di era digital.

2.1.4.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.

Integrasi ekonomi domestik dan global mengacu pada proses penyatuan sistem ekonomi suatu negara dengan ekonomi global, melibatkan pengurangan hambatan perdagangan, investasi, dan mobilitas faktor produksi. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pasar, spesialisasi, dan inovasi.

Integrasi ekonomi domestik adalah proses menyatukan berbagai sektor dan wilayah ekonomi dalam suatu negara. Ini melibatkan penghapusan hambatan internal, seperti regulasi yang berlebihan, infrastruktur yang tidak memadai, dan disparitas regional, untuk menciptakan pasar domestik yang lebih terpadu dan efisien. Integrasi ekonomi global adalah proses menyatukan ekonomi nasional dengan ekonomi dunia melalui pengurangan hambatan perdagangan dan investasi, serta peningkatan mobilitas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.

Integrasi ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan ekonomi domestik dan global dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk potensi sektor unggulan, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong transformasi ekonomi.

Integrasi Ekonomi Domestik dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto dan Sektor Unggulan. Diketahui perkembangan PDRB Bolmong, khususnya sektor pertambangan dan penggalian, menunjukkan adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sektor ini menjadi basis ekonomi daerah dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui investasi dan peningkatan produktivitas.

Data perkembangan investasi di kabupaten Bolaang Mongondow pada 5 tahun terakhir ini memperlihatkan trend meningkat untuk Perusahaan





Dalam Negeri, dan begitu juga tren meningkat untuk perusahaan asing. Adapun perkembangan target dan realisasi investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut.

Tabel 2.89
Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Bolaang
Mongondow Periode 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rencana Investasi PMDN (Juta Rp)	7.919.651,88	8.149.886,28	8.775.436,44	9.085.103,17	9.224.287,27
2	Rencana Investasi PMA (US\$)	-	208.732,32	-	-	-
3	Rencana Investasi PMA (Juta Rp.)	4.000.213,98	4.006.505,58	4.027.526,06	3.710.245,48	4.497.449,48
4	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rp.)	6.791.571,90	7.312.863,70	8.259.384,70	8.385.715,70	8.817.261,32
5	Realisasi Investasi PMA (US\$)				-	-
6	Realisasi Investasi PMA (Juta Rp.)	3.338.754,65	3.356.270,07	3.372.950,44	4.088.590,44	4.447.025,58

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian realisasi investasi selama 5(lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020 - 2024, dapat dilihat bahwa peningkatan realisasi investasi pada tahun 2020 sangat rendah hal ini disebabkan karena pandemi covid 19 yang melanda Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan dan kompleks terhadap realisasi investasi, baik di Indonesia maupun secara global, pada awal pandemi tahun 2020 Indonesia mengalami perlambatan dan penurunan realisasi investasi. Pembatasan mobilitas dan kekhawatiran investor mengenai kondisi ekonomi di masa depan menyebabkan banyak pihak menunda atau bahkan membatalkan rencana investasinya. Baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan yang tajam pada periode ini. Masyarakat juga cenderung lebih berhati-hati dalam berbelanja dan berinvestasi. Tetapi mulai tahun 2021 sudah mulai meningkat walaupun belum pulih seperti sebelum pandemi covid 19. Pasca pandemi covid 19 yaitu mulai tahun 2022 sudah mulai masuk investor - investor baru, hal ini dapat dilihat dari data perusahaan - perusahaan baru yang melakukan pelaporan LKPM melalui OSS baik PMA maupun PMDN, kondisi ini menyebabkan peningkatan realisasi investasi pada tahun - tahun berikutnya.

Tabel 2.90
Banyaknya Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

JENIS PERUSAHAAN	JUMLAH PERUSAHAAN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perusahaan PMDN	37	52	252	38	16
Perusahaan PMA	20	5	1	8	8

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Selain itu Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Dimana Pemerintah daerah berupaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor unggulan, termasuk melalui pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan penerapan teknologi.

Dalam menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi domestik dibutuhkan Peningkatan Daya Saing melalui Upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor potensial lainnya juga dilakukan untuk meningkatkan daya saing Bolmong dalam konteks ekonomi domestic, mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk banyaknya jumlah usaha menurut kategori di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

Tabel 2.91
Banyaknya Usaha menurut Kategori di Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

No	Tahun	Mikro	Kecil	Menengah
1	2020	9237	985	9237
2	2021	9739	2321	9739
3	2022	1147	11.436	963
4	2023	1147	11.436	963
5	2024	1424	11.436	1147

Sumber: Dinas Koperasi Kab. Bolmong 2025

Selain itu Berdasarkan data BPS Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2025, Koperasi aktif di Kabupaten Bolaang Mongondow Hingga 2024 terus meningkat, namun jumlah ini sempat menurun di tahun 2021 dan 2022 jumlah koperasi aktif berjumlah 36 unit. Dan naik menjadi 49 di tahun 2023. Tahun 2024 jumlah koperasi mencapai 60 Koperasi. Perlu diketahui koperasi adalah perusahaan yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Bentuk badan hukum. Koperasi ini di keluarkan dan disahkan oleh Departemen Koperasi. Berikut adalah jumlah koperasi aktif yang ada di Bolaang Mongondow.



Grafik 2.16
Jumlah Koperasi Aktif di Kab. Bolaang Mongondow
Tahun 2020-2024



Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2024

Kecamatan Lolak memiliki jumlah koperasi aktif paling banyak yaitu 18 unit. Selanjutnya Kecamatan Bolaang memiliki 11 unit diikuti Kecamatan Lolayan dengan 8 unit koperasi. Sementara itu, Kecamatan Dumoga Barat, Dumoga Tengah, Dumoga dan Kecamatan Dumoga Tenggara tercatat tidak memiliki koperasi aktif. Berikut Tabel Koperasi Aktif di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024. Berikut Jumlah Koperasi menurut jenis Koperasi dan Kecamatan di kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

Tabel 2.92
Jumlah Koperasi menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2021-2024

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023	2024
1	DUMOGA BARAT	-	-	-	2
2	DOMUGA UTARA	4	4	1	4
3	DUMOGA TIMUR	1	1	4	6
4	DUMOGA TENGAH	-	-	-	-
5	DUMOGA TENGGARA	-	-	-	-
6	DUMOGA	2	2	2	1
7	LOLAYAN	3	3	7	8
8	PASSI BARAT	1	1	3	3
9	PASSI TIMUR	1	1	1	1
10	BILALANG	1	1	1	1
11	POIGAR	2	2	2	3
12	BOLAANG	8	8	9	11
13	BOLAANG TIMUR	1	1	2	-
14	LOLAK	9	9	15	18
15	SANGTOMBOLANG	3	3	2	2
BOLAANG MONGONDOW		36	36	49	60

Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2025



Peningkatan jumlah koperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak disertai dengan peningkatan jumlah anggota koperasi. Pada tahun 2020 hingga 2022 anggota koperasi sebanyak 2772 sementara di tahun 2023 anggota koperasi berkurang dan tinggal sebesar 1029 dan kembali bertambah meskipun belum signifikan yakni sejumlah 1120 orang di tahun 2024. seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anggota Koperasi	2772	2772	2772	1029	1120

Sumber: Dinas Koperasi Kab. Bolmong 2025

Selain Koperasi terdapat di kabupaten Bolaang Mongondow juga terdapat kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha kecil Menengah (UKM). Berikut data tentang UMKM dan UKM.

Tabel 2.94
Jumlah UMKM Perkecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	SANGTOMBOLANG	712
2	LOLAK	964
3	BOLAANG	1545
4	BOLAANG TIMUR	1302
5	POIGAR	957
6	PASSI BARAT	602
7	PASSI TIMUR	938
8	LOLAYAN	996
9	DUMOGA TIMUR	814
10	DUMOGA	1144
11	DOMUGA UTARA	415
12	DUMOGA TENGGARA	227
13	BILALANG	2
14	DUMOGA TENGAH	579
15	DUMOGA BARAT	1043
TOTAL		12240

Sumber: Dinas Koperasi Kab. Bolmong 2025

Sementara, Dalam Upaya Integrasi Ekonomi Global, Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi untuk mengeksport produk-produk unggulannya ke pasar domestik maupun global. Beberapa komoditas yang memiliki potensi ekspor antara lain kelapa, hasil pertanian, dan produk pertambangan serta upaya menarik investasi asing untuk mengembangkan sektor-sektor potensial



dan meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini juga didukung oleh Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai sektor ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta membuka akses pasar global dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Kedepan Bolmong perlu mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko fluktuasi harga komoditas. Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Selain itu perlu juga diperhatikan terkait Perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan, sehingga perlu adanya upaya adaptasi dan mitigasi.

Pemerintah daerah perlu mengikuti perkembangan teknologi dan mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Bolmong memiliki potensi besar untuk mencapai integrasi ekonomi domestik dan global yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2.1.4.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Pusat pertumbuhan ekonomi dapat ditemukan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, meskipun dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda. Perkotaan seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, dan perdagangan, sementara perdesaan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal. Keduanya memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional dan perlu dikembangkan secara sinergis. Pembangunan perdesaan perlu dikaitkan dengan perkotaan untuk memperlancar distribusi produk, memperluas pasar, dan meningkatkan aksesibilitas.

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi, dapat menghubungkan perdesaan dengan perkotaan, memudahkan akses ke pasar dan mengurangi biaya transportasi. Indikator yang digunakan dalam melihat atau memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi infrastruktur dan menjadi dasar untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur di masa depan adalah Indeks Infrastruktur sebagai berikut :

Tabel 2.95
Indeks Infrastruktur Kab. Bolaang Mongondow

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Indeks Infrastruktur Kab Bolaang Mongondow	65,75	65,91	67,42	60,18	60,71

Nilai indeks infrastruktur yang baik bervariasi tergantung pada konteks



dan metodologi penilaian yang digunakan. Namun, secara umum, skor yang baik untuk indeks infrastruktur berkisar antara 60-70 atau lebih, tergantung pada standar yang ditetapkan. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kualitas infrastruktur yang lebih baik.

A. Fasilitas wilayah / Infrastruktur.

Jalan merupakan prasarana untuk memperlancarkan kegiatan ekonomi. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar hubungan transportasi antar daerah terutama daerah pedesaan, daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil. Tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki sarana transportasi dengan status jalan negara dan jalan provinsi, masing-masing 225 dan 152 kilometer. Disamping itu terdapat jalan berstatus jalan kabupaten sepanjang 682,71 kilo meter. Dari seluruh jalan yang berada dalam kewenangan kabupaten, sekitar 49 persen dalam kondisi baik dan sisanya 51 persen terdiri dari jalan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat.

Panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan kabupaten bolaang mongondow tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mencapai 1.059,71 Kilometer. Kondisi ini meningkat jika dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai 886,21 Km.

Tabel 2.96

Panjang jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2024.

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Negara	-	225	225	225	225
Provinsi	-	122,88	152	152	152
Kabupaten/Kota	509,21	509,21	509,21	682,71	682,71
Jumlah Total	886,21	886,21	886,21	1.059,71	1.059,71

Sumber : Bolaang Mongondow Dalam Angka

Selanjutnya pada kondisi panjang jalan menurut jenis permukaan jalan dan kondisi jalan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat upaya untuk menambah jenis permukaan jalan yang mempengaruhi kondisi jalan saat ini. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.97
Panjang jalan menurut jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2024

URAIAN	STATUS JALAN												
	JALAN NASIONAL				JALAN PROVINSI				JALAN KABUPATEN				
	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	
I. JENIS PERMUKAAN													
a. Aspal	225,00	100,00	225,00	100,00	128,39	84,47	128,39	84,47	394,77	57,82	402,70	58,99	
b. Kerikil	-	-	-	-	5,65	3,72	5,65	3,72	280,29	41,06	272,36	39,89	
c. Tanah	-	-	-	-	17,96	11,82	17,96	11,82	2,52	0,37	2,52	0,37	
d. Beton	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	0,75	5,13	0,75	
JUMLAH	225,00	100,00	225,00	100,00	152,00	100,00	152,00	100,00	682,71	100,00	682,71	100,00	
II. KONDISI JALAN													
a. Baik	225,00	100,00	222,35	98,82	119,95	78,91	119,95	78,91	323,81	47,43	334,11	48,94	
b. Sedang	-	-	-	-	5,00	3,29	2,00	1,32	55,00	7,80	53,00	7,68	
c. Rusak Ringan	-	-	2,65	1,18	5,00	3,29	8,00	5,26	27,04	3,96	23,84	3,49	
d. Rusak Berat	-	-	-	-	22,05	14,51	22,05	14,51	278,06	40,73	270,96	39,69	
JUMLAH	225,00	100,00	225,00	100,00	152,00	100,00	152,00	100,00	682,71	100,00	682,71	100,00	

Sumber: Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bolaang Mongondow 2025

Untuk kondisi irigasi Sampai dengan tahun 2024, diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 75 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area 9.059 Ha, dimana 54,29% kondisi baik; 10,00% Sedang, 15,71% rusak ringan, dan rusak berat 20,00%.

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing suatu daerah, untuk itu pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengutamakan pembangunan infrastruktur dalam setiap rencana pembangunan daerah. Daya saing infrastruktur daerah ini dapat diukur melalui Indeks Daya Saing Infrastruktur yang terdiri dari tiga komponen yaitu jalan, Air Minum, dan Perumahan/Pemukiman. Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan hingga akhir tahun Rencana pembangunan Daerah (RPD) Indeks Daya Saing Infrastruktur dapat mencapai 70%.

Berikut data tentang panjang jalan kabupaten yang terdapat di kecamatan.



Tabel 2.98
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Panjang (KM)
1	Dumoga Barat	49.060
2	Dumoga Tengah	33.400
3	Dumoga Utara	51.340
4	Dumoga Tenggara	33.950
5	Dumoga Timur	57.770
6	Dumoga	37.440
7	Lolayan	93.410
8	Passi Barat	28.770
9	Passi Timur	26.440
10	Bilalang	32.385
11	Poigar	67.890
12	Bolaang	16.140
13	Bolaang Timur	25.950
14	Lolak	93.540
15	Sangtombolang	35.230
Bolaang Mongondow		682.715

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bolaang Mongondow 2025

Berdasarkan jumlah panjang jalan (tipe penanganan jalan kabupaten) yang ada dalam satu kecamatan, terlihat kecamatan Lolak memiliki jumlah terpanjang yaitu 93,540 kilometer

Keadaan jalan kabupaten di Bolaang Mongondow sampai tahun 2024 sangat bervariasi, berdasarkan jenis permukaan dan Kondisi jalan yang ada. Prosentase jenis jalan sebagian besar sudah merupakan jalan beraspal. Sedangkan kondisi jalan kabupaten cukup beragam dari kondisi rusak berat, rusak ringan, sedang hingga dalam kondisi baik, seperti dalam gambar di atas. Panjang jalan berdasarkan kondisinya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.99
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi jalan Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2024

No.	Kecamatan	Panjang (KM)	Kondisi Jalan			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Dumoga Barat	49.060	25,335	4.420	6.915	12,390
2	Dumoga Tengah	33.400	15.610	1.050	3.520	13.220
3	Dumoga Utara	51.340	17,625	9.580	7.590	16,545
4	Dumoga Tenggara	33.950	19.060	3.400	5.210	6.280
5	Dumoga Timur	57.770	18.503	5.580	3.100	30.587
6	Dumoga	37.440	19.548	2.300	2.700	12.892
7	Lolayan	93.410	47.740	11.030	7.730	26.910
8	Passi Barat	28.770	11,66	2.550	1,900	12,660
9	Passi Timur	26.440	6.054	1.716	8.890	9.780
10	Bilalang	32.385	13.368	1.327	6.200	11.490
11	Poigar	67.890	26.569	6.429	8.350	26.542
12	Bolaang	16.140	8.523	1.100	1.060	5.457
13	Bolaang Timur	25.950	13,519	2.080	0.500	9,851
14	Lolak	93.540	63,385	9.054	12,614	8.487
15	Sangtombolang	35.230	15.470	2.210	2.160	15.390
Bolaang Mongondow		682.715	313.812	321,969	63.826	78,439

Sumber : Pekerjaan Umum Kab Bolmong Tahun 2025

Di Kabupaten Bolaang Mongondow, baik wilayah perkotaan maupun perdesaan memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan fokus dan karakteristik yang berbeda. Perkotaan, seperti Lolak (ibu kota kabupaten), cenderung menjadi pusat kegiatan ekonomi formal, perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Sementara itu, wilayah perdesaan, yang meliputi banyak desa, berperan sebagai basis produksi pertanian dan perikanan, serta memiliki potensi wisata alam yang perlu dikembangkan.

B. Sarana dan Prasarana Transportasi

1. Terminal.

Untuk menunjang kelancaran transportasi baik antar kota maupun antar desa, maka keberadaan terminal sangat dibutuhkan dan penting keberadaannya. Sampai tahun 2023 ini Kabupaten Bolaang Mongondow baru memiliki 1 (satu) terminal tipe C yang berlokasi di Desa Doloduo Kec. Dumoga Barat dan 2 (dua) pelataran terminal yang terletak di Desa Lolak dan Inobonto. Sedangkan untuk terminal tipe A di Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini sudah beroperasi sejak desember tahun 2022 di Desa Dulangon Kecamatan Lolak. Lokasi Terminal Tipe A sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.14
Lokasi Terminal A dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow



Sumber: Dinas Perhubungan Kab. BolMong 2025

untuk terminal tipe A di Kabupaten Bolaang Mongondow yang terletak di Desa Dulangon Kecamatan Lolak. Sejak tahun 2022 telah diresmikan dan mulai beroperasi sambil tetap melakukan perampungan untuk pembangunan gedung dan fasilitas yang direalisasikan melalui anggaran APBN Kementerian Perhubungan. Pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Kegiatan Study Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Lingkungan Lokasi Terminal Type A Bolaang Mongondow. Adapun kondisi bangunan yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.100
Sarana dan Prasarana Terminal

No.	Nama Terminal	Lokasi	Kondisi	Ket.
1	Terminal Type C Doloduo	Doloduo	Baik	
2	Pelataran Terminal Lolak	Lolak	Kurang Baik	
3	Pelataran Terminal Inobonto	Inobonto	Kurang Baik	
4	Terminal Tipe A	Dulangon	Baik	

Sumber: Dinas Perhubungan Bolmong Tahun 2025

selain terminal Tipe A dan Tipe C, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga mempunyai UPTD Balai Pengujian kendaraan Bermotor. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) adalah salah satu fasilitas penunjang untuk melakukan Uji Kiur Kendaraan Bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang lokasinya terletak di Desa Dulangon Kecamatan Lolak. Balai PKB ini diresmikan dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Saat ini Balai PKB merupakan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang masuk dalam Tipe C sesuai dengan kondisi peralatan yang ada yaitu berjumlah 5 unit alat uji. Pada



Balai PKB juga terdapat sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Uji Kiur Kendaraan Bermotor diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer yang telah memiliki kualifikasi sebagai penguji, pembantu penguji, dan pengadministrasian Pengujian Kendaraan Bermotor.

Tabel 2.101
Data Kendaraan yang di Uji pada bulan Januari-Desember 2024

NO.	BULAN	JUMLAH KENDARAAN YANG DI UJI				JUMLAH KEND (Target 1.078 Kend)	JUMLAH BLUE -e
		BARU	BERKALA	JUMLAH NUM	JUMLAH NUK		
1.	JANUARI	14	29	1	-	44	44
2.	FEBRUARI	12	21	2	1	35	20
3.	MARET	8	22	1	1	31	25
4.	APRIL	7	21	3	0	31	28
5.	MEI	14	27	6	1	47	27
6.	JUNI	10	15	2	2	27	19
7.	JULI	8	24	5	7	37	22
8.	AGUSTUS	14	32	7	3	53	34
9.	SEPTEMBER	13	41	10	1	64	40
10.	OKTOBER	18	30	6	5	54	42
11.	NOPEMBER	6	19	0	3	25	20
12.	DESEMBER	7	22	3	5	32	22
	TOTAL	131	303	46	29	480	343
	PERSENTASE	44,53%					

Ket:

- BARU : Kendaraan Uji Berkala Pertama (Kendaraan Baru)
 BERKALA : Kendaraan uji berkala lanjutan masa berlaku
 (diuji setiap 6 bulan NUM : Numpang Uji Masuk
 NUK : Numpang Uji Keluar
 BLU-e : Bukti Lulus Uji Elektronik

Sumber: Dinas Perhubungan Bolmong Tahun 2025

2. Pelabuhan Laut.

Pelabuhan Labuan Uki merupakan satu-satunya fasilitas penunjang transportasi laut di Kabupaten Bolaang Mongondow yang lokasinya berada di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak. Saat ini Pelabuhan Labuan Uki baru bisa melayani kapal-kapal kecil, dan kapal-Kapal barang Ukuran Sedang. Saat ini pengembangan Pelabuhan Labuan Uki terus di kembangkan.



Tabel 2.102
Data Operasional Pelabuhan Labuan Uki Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan Labuan Uki Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH KAPAL	JUMLAH (GT)	BONGKAR / Ton, M3	MUAT / Ton, M3
1	JANUARI	101	116.971,00	69.319,52	129.737,52
2	FEBRUARI	94	124.100,00	54.318,00	130.069,00
3	MARET	144	135.324,00	61.400,00	91.550,00
4	APRIL	82	135.478,00	57.107,00	128.595,00
5	MAY	88	78.347,00	38.996,00	89.204,00
6	JUNI	106	17.728,00	64.518,65	91.660,00
7	JULI	142	140.990,00	130.94,00	1.312,45
8	AGUSTUS	109	117.222,73	42.902,02	157.315,60
9	SEPTEMBER	88	108.539,00	7.089,07	1.527,35
10	OKTOBER	118	89.369,83	65.169,00	123.664,00
11	NOVEMBER	125	111.529,00	45.594,00	129.060,00
12	DESEMBER	113	110.073,99	94.739,00	106.911,00
	TOTAL	1.318	1.299.122,55	676.429,70	1.113.042,92
	Rekapitulasi Bongkar Muat Tahun 2024			1.789.472,62	

Sumber: Dinas Perhubungan Bolmong Tahun 2025

3. Bandar Udara

Selama ini, prasarana transportasi (jalan dan pelabuhan) yang ada hanya mampu menjadikan Bolaang Mongondow sebagai wilayah lintasan, sehingga pemerintah kabupaten bolaang mongondow melalui pemerintah pusat membangun sarana transportasi udara dengan harapan mampu menempatkannya sebagai wilayah persinggahan bahkan wilayah tujuan dari berbagai kepentingan pembangunan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, bernilai ekonomi bahkan memiliki comparative advantage tinggi dibanding wilayah di sekitarnya, namun realitas tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan pemerataan pembangunan wilayah. Satu dari beberapa faktor penyebabnya adalah aksesibilitas dari/ke Bolaang Mongondow masih tergolong rendah. Sejak 2011 perencanaan bandar udara ini terus diusahakan diantaranya melalui penyusunan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow tahun rencana 2011-2031 telah menetapkan lokasi Bandar Udara di Desa Lalow Kecamatan Lolak. Melalui serangkaian konsultasi dengan para pihak, diskusi intens dan peninjauan lapangan, maka pada Bulan November 2013 Kabupaten Bolaang Mongondow telah ditetapkan sebagai lokasi bandar udara baru didalam konstelasi wilayah Sulawesi Utara. Dan tahun 2024 tepatnya di bulan desember Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan Bandar Udara Bolaang Mongondow sebagai bandar udara perintis yang melayani sejumlah rute penerbangan. Diantaranya





Bolmong- Manado, dan Bolmong- Gorontalo. Perlu diketahui, Pembangunan Bandar Udara Bolaang Mongondow dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga 2024 dengan menggunakan anggaran sebesar kurang lebih 418, 9 milyar rupiah.

4. Sarana dan prasarana perlengkapan jalan

Jaringan pelayanan jalan juga tidak terlepas kaitannya dengan perlengkapan fasilitas jaringan pelayanan jalan. Fasilitas jaringan pelayanan jalan ini meliputi rambu-rambu, marka jalan, pemberi isyarat lalu lintas dan fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas tersebut sangat berpengaruh dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam berlalulintas. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, fasilitas jaringan pelayanan jalan saat ini masih belum cukup untuk melayani dan mengatur lalu lintas, hal ini dapat ditinjau dari masih banyaknya kejadian lakalantas di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa target yang masih harus diperhatikan perencanaannya, berikut fasilitas jaringan prasarana jalan yang sudah ada maupun yang belum terealisasi dengan baik.

Tabel 2.103
Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan)

No.	Jenis Perlengkapan Jalan	Jumlah						Jumlah	Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Rambu-Rambu Jalan (unit)	25	-	-	-	-	-	451	
2	Rambu-Rambu RPPJ (unit)	6	9	-	-	-	-	33	
3	APILL (unit)	-	-	-	-	-	-	1	
4	Delineator (titik)	50	-	-	-	-	-	348	
5	Guardrail (buah)	-	-	-	-	-	-	3	
6	Paku Jalan (buah)	-	-	-	-	-	-	-	
7	Cermin Tikungan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	
8	Traffic Corn (set)	-	-	-	-	-	-	50	
9	Water Gate Barrier (unit)	-	-	-	-	-	-	50	
10	Halte	4	-	-	-	-	-	11	
	TOTAL	85	9	-	-	-	-	947	

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow 2025

5. Angkutan Umum

Angkutan umum transportasi darat yang ada di Bolaang Mongondow ada banyak jumlah dan berbagai macam jenis. Ini disebabkan karena luasnya wilayah Bolaang Mongondow yang mendapat pelayanan transportasi. Berikut data transportasi angkutan umum di Bolaang Mongondow.



Tabel 2.104

Data Kendaraan darat yang terdaftar di Kabupaten Bolaang Mongondow

NO.	JENIS KENDARAAN	TAHUN						TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mobil Penumpang Sedan-Pribadi	2	9	8	4	1	-	24
2.	Mobil Penumpang Sedan-Umum	-	-	-	-	-	-	-
3.	Mobil Penumpang Sedan-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-
4.	Mobil Penumpang Jeep- Pribadi	17	13	15	12	2	8	67
5.	Mobil Penumpang Jeep- Pribadi	-	-	-	-	-	-	-
6.	Mobil Penumpang Jeep- Pemerintah Daerah	3	6	3	-	2	-	14
7.	Mobil Penumpang Minibus-Pribadi	692	461	682	556	245	514	3.150
8.	Mobil Penumpang Minibus-Umum	-	1	-	-	-	-	1
9.	Mobil Penumpang Minibus-Pemerintah Daerah	14	16	15	1	4	2	52
10.	Mobil Bus Microbus-Pribadi	-	-	-	-	-	-	-
11.	Mobil Microbus-Umum	4	7	-	-	-	1	12
12.	Mobil Microbus-Pemerintah Daerah	2	-	1	-	-	-	3
13.	Mobil Bus-Bus-Pribadi	-	-	-	-	-	-	-
14.	Mobil Bus-Bus-Umum	-	-	-	-	-	-	-
15.	Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	7	-	-	-	-	-	7
16.	Mobil Barang/ Beban- Pick Up-Pribadi	283	229	428	319	122	187	1.568
17.	Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1	-	2	-	-	-	3
18.	Mobil Barang/ Beban- Pick Up-Pemerintah Daerah	8	2	5	2	-	2	19
19.	Mobil Barang/ Beban- Pick Up-Light Truck Pribadi	41	29	52	22	11	15	170
20.	Mobil Barang/ Beban- Pick Up-Light Truck Umum	-	-	-	-	-	-	-
21.	Mobil Barang/Beban- Pick Up-Light Truck Pemerintah Daerah	1	-	-	1	-	-	2





22.	Mobil Barang/ Beban- Truck- Pribadi	2	3	3	1	1	7	17
23.	Mobil Barang/Beban-Truck Umum	-	-	-	-	-	-	-
24.	Mobil Barang/ Beban- Truck- Pemerintah Daerah	1	1	-	-	-	-	2
25.	Mobil Barang/ Beban- Blind Van- Pribadi	3	1	1	2	-	-	7
26.	Mobil Barang/Beban- Blind Van-Umum	-	-	-	-	-	-	-
27.	Mobil Barang/ Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah	1	1	-	-	-	-	2
28.	Sepeda Motor Roda Dua Pribadi	5.809	4.121	6.864	5.230	1.981	5.154	29.159
29.	Sepeda Motor Roda Dua Umum	-	-	-	-	-	-	-
30.	Sepeda Motor Roda Dua Pemerintah Daerah	71	21	19	73	1	6	191
31.	Sepeda Motor Roda Tiga Pribadi	-	1	-	-	-	1	2
32.	Sepeda Motor Roda Tiga Umum	-	-	-	-	-	-	-
33.	Sepeda Motor Roda Tiga Pemerintah Daerah	-	-	-	-	3	3	6
34.	Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Pribadi	-	1	-	-	-	-	1
35.	Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Umum	-	-	-	-	-	-	-
36.	Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Pemerintah Daerah	-	3	3	-	-	2	8
37.	Mobil Roda Tiga Pribadi	-	-	-	-	-	-	-
38.	Mobil Roda Tiga Umum	-	-	-	-	-	-	-
39.	Mobil Roda Tiga Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	6.960	4.926	8.101	6.223	2.373	5.902	34.485

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. BolMong 2025

Pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kendaraan khusus dan sebagainya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh



pemerintah.

Pengaturan dan pengendalian tata ruang merupakan salah satu kewenangan dan tugas pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) dan di amandemen dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Subtansi Undang-Undang tersebut adalah memberikan kewenangan seluas- luasnya bagi daerah untuk menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di dalam daerahnya secara mandiri.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan upaya penyesuaian rencana sebelumnya sebagai konsekuensi dari hasil pemekaran wilayah Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo, kembali disesuaikan dengan adanya pemekaran Kabupaten yang menjadikan Bolaang Mongondow terpecah menjadi 4 Kabupaten dan 1 kota. Sehingga segala rencana dalam penataruangan kembali disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang ada. RTRW ini ditujukan untuk pengarah dan pengendalian pengembangan fisik, alokasi pemanfaatan ruang dan strategi pembangunan wilayah di masa datang, sehingga bersinergis dengan kegiatan budidaya, perlindungan lingkungan dan pemukiman serta efisiensi infrastruktur pendukung.

- Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.

Di dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow itu sendiri selain terdapat kawasan strategis Kabupaten Bolaang Mongondow, juga terdapat Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Utara. Untuk Kawasan Strategis Nasional tidak ada yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow

Sesuai RAPERDA RTRW Provinsi Sulawesi Utara, kawasan strategis Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

- 1) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan Militer Batalyon Artileri Medan di Lalow yang berada di Bolaang Mongondow.
- 2) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari :
 - a) Kawasan sentra produksi tanaman pangan padi Lolak - Sang Tombolang dikembangkan untuk industri pengolahan tanaman pangan padi yang berada di Bolaang Mongondow
 - b) Kawasan Kotamobagu dan sekitarnya dikembangkan untuk industri peralatan pertanian yang mendukung berlangsungnya fungsi strategis kawasan Lolak-Sang Tombolang sebagai lumbung beras Sulawesi Utara yang berada di Bolaang Mongondow.
 - c) Kawasan koridor trans PANTURA Sulawesi Utara Manado - Boroko (termasuk didalamnya kawasan pesisir Poigar, Bolaang Timur, Bolaang, Lolak dan Sang Tombolang) dikembangkan untuk titik-titik lokasi kegiatan rekreasi, pariwisata dan jasa yang berada di Kota Manado sampai dengan di Bolaang Mongondow dan Bolaang

Mongondow Utara.

- d) Kawasan Jalur-Jalur Alternatif dikembangkan untuk mendukung berfungsinya kelancaran layanan transportasi darat melalui jalan trans Sulawesi, Bitung-Manado-Boroko yang berada di Kota Bitung, Kota Manado dan di Bolaang Mongondow Utara, termasuk didalamnya Lolak di Bolaang Mongondow
 - e) Kawasan Agropolitan Dumoga yang dihubungkan melalui jalur lintas tengah / pegunungan yang dikembangkan untuk sentra-sentra produksi dan jaringan pemasaran serta infrastruktur fisik.
- a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari :
- a) Pengembangan kawasan Taman Nasional dan Cagar Alam sebagai daerah kunjungan wisata berskala internasional yaitu Cagar Alam Gunung Ambang dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
 - b) Pengendalian pertumbuhan penduduk pada lingkungan perdesaan atau perkotaan di sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Cagar Alam Gunung Ambang.
 - c) Pelestarian dan pengembangan seluruh DAS di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi Listrik dalam bentuk PLTA, PLT Mini Hidro dan PLT Mikro Hidro.
- b. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow
Kawasan strategis Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek ekonomi:
 - Kawasan jasa perdagangan; Lolak
 - Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan; Dumoga
 - Kawasan pengembangan hortikultura/ buah-buahan; Bolaang
 - Kawasan pengembangan hortikultura/sayuran Passi Timur
 - Kawasan perkebunan/kelapa Lolak, Bolaang, Bolaang Timur, Poigar dan Sang Tombolang
 - Kawasan pengembangan pesisir; pantai utara Kabupaten Bolaang Mongondow
 - Daerah Perlindungan Laut; Kawasan Pulau Tiga
 - Kawasan Minapolitan ;Bolaang - Lolak
 - Kawasan pengembangan perikanan darat; Dumoga, Lolayan, Lolak dan Bolaang
 - Kawasan pengembangan pariwisata terpadu; Koridor Pantai Utara
 - Kawasan pengembangan wisata alam dan petualangan; di TNBNW
 - Kawasan pengembangan wisata alam dan petualangan; di Gunung Ambang
 - 2) Kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan dan mitigasi bencana :
 - Konservasi alam pada Cagar Alam Gunung Ambang
 - Jalur Evakuasi Tsunami pada sepanjang pesisir pantai utara
 - Jalur Evakuasi Bencana Letusan Gunung Api Ambang
 - Kawasan mitigasi banjir Bolaang Mongondow
 - 3) Kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek sosial budaya:



- Kawasan pusat pemerintahan kabupaten Lolak
- Kawasan pengembangan pendidikan unggulan dan perguruan tinggi di Kawasan Perkotaan Lolak
- Kawasan Budaya Bolaang Mongondow.

Wilayah perdesaan di Bolaang Mongondow adalah lumbung pangan, dengan pertanian dan perikanan menjadi sektor ekonomi utama. Beras, sebagai hasil bumi utama, menjadi salah satu komoditas unggulan. Tentunya dalam pengembangan kawasan pedesaan perlu diperhatikan kondisi kawasan kumuh yang ada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kawasan Kumuh masih mengacu pada SK Bupati Bolaang Mongondow No. 115 Tahun 2021 tentang penetapan lokasi dan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.105
Lokasi Wilayah Kawasan Kumuh di
Kabupaten Bolaang Mongondow

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRASI			KEPENDUDUKAN	
			DUSUN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN
1	Lolak	18.06	3,4	Lolak	Lolak	611 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
2	Mongkoinit	18.06	1,2,3	Mongkoinit	Lolak	1.416 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
3	Motabang	5.18	5,6,7,8	Motabang	Lolak	1.555 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
4	Solog	4.53	1,2	Solog	Lolak	647 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
5	Ayong	18.90	1-5	Ayong	Sangtombolang	1.868 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
6	Maelang	10.65	1-5	Maelang	Sangtombolang	1.161 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
7	Pasir Putih	1.10	2	Pasir Putih	Sangtombolang	170 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
8	Inobonto II	18.65	1-5	Inobonto II	Bolaang	1.808 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
9	Inobonto	16.85	1-4	Inobonto	Bolaang	1.647 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
10	Inobonto I	32.18	1-10	Inobonto I	Bolaang	4.162 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
11	Solimandungan I	4.85	1,2	Solimandungan I	Bolaang	670 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
12	Bantik	11.62	1-6	Bantik	Bolaang Timur	1.127 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
13	Bolaang I	14.97	1-5	Bolaang I	Bolaang Timur	1.047 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
14	Tadoy	8.21	1,4,6,8	Tadoy	Bolaang Timur	1.716 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
15	Dumoga I	15.82	1-3	Dumoga I	Dumoga	987 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
16	Pusian	10.08	2,3	Pusian	Dumoga	624 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
17	Pusian Barat	7.24	1	Pusian Barat	Dumoga	147 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
18	Pusian Selatan	5.00	2,3	Pusian Selatan	Dumoga	535 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
19	Toruakat	10.02	3,4,5	Toruakat	Dumoga	1.414 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
20	Dumoga 4	15.01	1-3	Dumoga 4	Dumoga Timur	1.192 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
21	Dumoga 3	15.35	1-3	Dumoga 3	Dumoga Timur	1.238 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
22	Dumoga	9.85	1-4	Dumoga	Dumoga Timur	1.385 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
23	Dumoga II	1.02	3	Dumoga II	Dumoga Timur	389 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
24	Mogoyungung	3.24	1,3,6	Mogoyungung	Dumoga Timur	607 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
25	Mogoyungung II	1.65	1,4	Mogoyungung II	Dumoga Timur	796 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
26	Mogoyungung I	1.24	3,4	Mogoyungung I	Dumoga Timur	428 Jiwa	<150 Jiwa/Ha





27	Kosio	0.85	1,2,4	Kosio	Dumoga Tengah	755 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
28	Kosio Timur	15.02	1,2,4	Kosio Timur	Dumoga Tengah	830 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
29	Konarom Utara	10.41	1-3	Konarom Utara	Dumoga Tenggara	640 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
30	Konarom	15.21	1-3	Konarom	Dumoga Tenggara	1.007 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
31	Tapadaka Utara	15.17	1-2	Tapadaka Utara	Dumoga Tenggara	1.249 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
32	Tapadaka I	2.25	1	Tapadaka I	Dumoga Tenggara	628 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
33	Mopuya selatan 1	14.35	1-4	Mopuya selatan 1	Dumoga Utara	1.070 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
34	Mopuya selatan 2	22.48	1-4	Mopuya selatan 2	Dumoga Utara	590 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
35	Mopuya Selatan	20.72	1-6	Mopuya Selatan	Dumoga Utara	2.048 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
36	Mopuya Utara 1	31.48	1-4	Mopuya Utara 1	Dumoga Utara	968 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
37	Mopuya Utara 2	28.01	1-4	Mopuya Utara 2	Dumoga Utara	780 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
38	Mopuya Utara	33.48	1-4	Mopuya Utara	Dumoga Utara	1.153 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
39	Toraut	3.18	4,5	Toraut	Dumoga Barat	702 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
40	Mariri 1	9.32	1-4	Mariri 1	Poigar	817 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
41	Mariri 2	12.70	1-5	Mariri 2	Poigar	792 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
42	Mariri Baru	3.26	5,6	Mariri Baru	Poigar	400 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
43	Mariri Lama	8.67	1-3	Mariri Lama	Poigar	701 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
44	Nonapan 1	10.06	1-7	Nonapan 1	Poigar	1.097 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
45	Nonapan 2	4.65	1,2,4	Nonapan 2	Poigar	738 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
46	Nonapan Baru	12.27	1-3	Nonapan Baru	Poigar	676 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
47	Nonapan	5.79	1-3	Nonapan	Poigar	593 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
48	Tiberias	18.97	1-5	Tiberias	Poigar	1.570 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
49	Abak	4.56	1-3	Abak	Lolayan	1.040 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
50	Mopusi	20.65	1-7	Mopusi	Lolayan	2.708 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
51	Tanoyan Selatan	15.19	1-7	Tanoyan Selatan	Lolayan	2.385 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
52	Tanoyan Utara	15.35	1-6	Tanoyan Utara	Lolayan	2.693 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
53	Tapaaog	10.76	1-4	Tapaaog	Lolayan	1.235 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
54	Mopait	1.46	2	Mopait	Lolayan	266 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
55	Muntoi Induk	2.26	5	Muntoi Induk	Passi Barat	336 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
56	Poyuyanan	1.65	1	Poyuyanan	Passi Barat	358 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
57	Imandi	49.62	1-12	Imandi	Dumoga Timur	4.661 Jiwa	<150 Jiwa/Ha
58	Tonom	14.30	1-6	Tonom	Dumoga Timur	1.617 Jiwa	<150 Jiwa/Ha

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2025

Perubahan Surat Keputusan tentang Penetapan Kawasan Kumuh dapat dilakukan melalui revisi Surat Keputusan per lima tahun serta luasan kawasan kumuh yang ditangani oleh kabupaten sesuai target telah dituntaskan. Akan



tetapi sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 sejumlah kawasan kumuh belum seluruhnya di tuntaskan sehingga masih menggunakan SK tahun 2021.

Kawasan kumuh yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2023 sebesar 71,77 Ha. Data ini sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Dari data luasan penanganan kawasan pemukiman kumuh, yang telah ditangani oleh pemerintah kabupaten bolaang mongondow sebesar 71,77 Ha dengan persentase 71,05 dengan luasan pembagi sebesar 101,01. Sementara untuk penanganan kawasan kumuh lainnya masih dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga secara keseluruhan penanganan kawasan kumuh di kabupaten bolaang mongondow masih belum maksimal.

Berdasarkan data di atas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow setiap tahunnya mengutamakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni sebagai usaha dalam mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.106

Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	jumlah
1	RTLH (APBD)	125	298	270	0	35	1752
2	BSPS (APBN)	155	360	321	109	205	2612
	Kabupaten Bolmong	280	658	591	109	240	5911

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas Pada Tahun 2020 Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki atau yang masuk anggaran APBN dan APBD berjumlah 280 Unit. Untuk Tahun 2022 yang teranggarkan di APBN sebanyak 360 unit dan yang teranggarkan di APBD 298 unit. Kemudian untuk Tahun 2023 jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki berjumlah 109 Unit hingga tahun 2024 sebanyak 240 yang diperbaiki melalui anggaran APBN dan APBD. Secara keseluruhan rumah tidak layak huni yang diperbaiki mencapai 5911 baik oleh anggaran APBN maupun APBD.

Perlu diketahui Kabupaten Bolaang mongondow terdiri dari 15 kecamatan dan 200 desa serta 2 kelurahan. Dalam perkembangan desa tersebut hingga tahun 2024 sudah ada 41 desa di Bolaang Mongondow yang dikategorikan mandiri oleh kementerian desa, sehingga hal ini diharapkan mampu membangun sektor sektor penting didalam masyarakat.





Tabel 2.107
Persentase Indeks Desa tahun 2020-2024

KATEGORI	2020	2021	2022	2023	2024	IDM (%)
MANDIRI	0	0	1	11	41	20,5
MAJU	34	45	66	109	119	59,5
BERKEMBANG	149	145	127	74	37	18,5
TERTINGGAL	16	9	6	6	3	1,5
SANGAT TERTINGGAL	1	1	0	0	0	0
TOTAL DESA	200	200	200	200	200	100%

Dalam upaya menumbuhkan pusat pertumbuhan perekonomian dengan berbagai potensi daerah juga di butuhkan berbagai pelatihan dan pendidikan yang dapat membantu masyarakat perdesaan mengembangkan keterampilan untuk bekerja di sektor industri dan jasa, baik di perdesaan maupun perkotaan. Termasuk

Pengembangan desa wisata dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan, meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, dan memperkenalkan kekayaan budaya dan alam perdesaan.

Dengan mengembangkan sinergi antara perkotaan dan perdesaan, serta mengatasi tantangan yang ada, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

2.1.4.7 Stabilitas Ekonomi Makro.

Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi di mana hubungan ekonomi utama dalam suatu negara berada dalam keseimbangan, seperti antara permintaan dan output, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inflasi terkendali, dan tingkat pengangguran yang rendah. Stabilitas ekonomi makro tercapai ketika hubungan-hubungan utama dalam perekonomian berjalan seimbang. Ciri ciri stabilitas ekonomi makro terjadi dengan melihat factor dibawah ini :

- a. **Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan:** Perekonomian tumbuh secara stabil dari waktu ke waktu, tanpa fluktuasi yang tajam.

Stabilitas ekonomi makro di Bolaang Mongondow, seperti daerah lain, mengacu pada kemampuan perekonomian untuk mempertahankan kondisi yang stabil dan seimbang, dengan inflasi terkendali, kesempatan kerja yang memadai, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Bolaang Mongondow, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif.

Kondisi Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2021 melalui upaya pemulihan ekonomi terlihat dengan pertumbuhan sebesar 3,87 persen dan terus merangkak naik pada tahun 2022 dengan



peningkatan mencapai 5,35 persen. Namun di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami sedikit perlambatan dengan Tingkat pertumbuhan sebesar 5,18 persen dan terus bertumbuh pada tahun 2024 sebesar 5,33 atau bertambah sebesar 0,15 persen.

Pertumbuhan paling tinggi adalah untuk sektor Jasa Lainnya sebesar 14,33 persen, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,97 persen serta sektor Administrasi pemerintahan pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 8,83. Sedangkan sektor terendah pada kategori Industri Pengolahan sebesar -2,55 dan diikuti sektor Pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mencapai -0,18 persen. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang tersedia. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam bidang investasi, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

- b. Inflasi Terkendali: Tingkat inflasi berada pada level yang moderat dan terkendali, tidak terlalu tinggi yang dapat mengurangi daya beli masyarakat.

Perkembangan inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow masih mengacu pada inflasi Kota Kotamobagu yang merupakan daerah terdekat yang secara otomatis dapat mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Kotamobagu sebesar 1,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,49. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,93 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,92 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,25 persen; kelompok transportasi sebesar 1,95 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,76 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,76 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Kota Kotamobagu bulan Maret 2025 sebesar 2,98 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Kotamobagu bulan Maret 2025 sebesar 1,64 persen

Pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Kotamobagu sebesar 2,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,39. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Kota Kotamobagu bulan April 2025 sebesar 0,81 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Kotamobagu bulan April 2025 sebesar 2,47 persen.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di kabupaten Bolaang Mongondow pada Bulan Januari s/d Maret (Triwulan I) Tahun 2025 adalah :

- a. Terjadinya kelangkaan bahan pokok seperti bawang merah, bawang putih dikarenakan bawang merah dan bawang putih diambil dari daerah luar daerah.

- b. Pada bahan pokok seperti Cabe baik apda cabe merah dan keriting, terjadi penurunan pasokan yang disebabkan oleh produksi yang sedikit akibat cuaca dengan intensitas hujan tinggi yang menyebabkan penyakit busuk batang.
 - c. Terjadi kenaikan harga pakan ternak sehingga menyebabkan harga telur naik
 - d. Naiknya harga bahan pokok seperti beras bawang merah bawang putih, daging ayam dan daging sapi akibat cuaca yang tidak menentu.
- Olehnya dalam rangka pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan rekomendasi kebijakan melalui dinas terkait untuk melaksanakan Survey Harga Bahan Pokok dan barang penting lainnya yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pengawasan distribusi dan harga bahan pokok dan pengawasan distribusi harga bahan LPG 3 Kg dan barang bersubsidi lainnya, memantau dan menjaga ketersediaan stok pangan serta melaksanakan kegiatan pangana murah di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- c. Tingkat Pengangguran Rendah: Tingkat pengangguran dijaga pada level yang rendah, menunjukkan bahwa ekonomi mampu menyediakan lapangan pekerjaan.
- Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 terus mengalami penurunan sebesar 4,48 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,61 persen. Meskipun jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja meningkat hingga mencapai 197.353 jiwa dan diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja sebesar 134.652 jiwa akan tetapi persentase tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis pada karakteristik wilayah untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata. Dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dibutuhkan intervensi melalui kebijakan fiskal (pengelolaan anggaran) dan kebijakan moneter (pengendalian inflasi). Dengan menjaga stabilitas ekonomi makro, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, yang merupakan ukuran perbandingan total Penerimaan Pajak Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah maka diketahui gambaran tentang seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perekonomian daerah tersebut. Berikut tabel Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow.



Tabel 2.108
Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow 2021-2024.

Uraian	Pajak Daerah	PDRB (Triliun Rupiah)	%
2021	37.677.056.408	8.970.000.000.000,18	0,42%
2022	38.773.927.955	9.776.000.000.000,24	0,40%
2023	48.618.898.979	10.539.000.000.000,42	0,46%
2024	41.777.573.317	11.515.000.000.000,68	0,36%

Sumber : Bolmong Dalam Angka 2025, LRA Bolmong 2025, Bappeda (Data diolah).

Perlu diperhatikan bahwa terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah yaitu PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk. Hasil pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah. Selanjutnya PAD menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung APBD (khususnya Pendapatan Daerah).

Pentingnya Stabilitas Ekonomi Makro akan mempengaruhi

- Kepastian Usaha:** Stabilitas ekonomi makro menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan investasi dan perencanaan bisnis.
- Kesejahteraan Masyarakat:** Stabilitas ekonomi makro menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.
- Kepercayaan Investor:** Stabilitas ekonomi makro meningkatkan kepercayaan investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di daerah tersebut.

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum.

2.1.5.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merujuk pada sistem aturan dan pengelolaan yang tidak hanya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan zaman. Ini berarti regulasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, serta mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks regulasi dan tata kelola, integritas berarti memastikan bahwa aturan dibuat dan diterapkan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya kabupaten Bolaang Mongondow terus berupaya untuk menegakkan integritas salah satunya melalui sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi, sistem yang dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Sistem ini merupakan penyempurnaan dari SPIP



sebelumnya dan melibatkan penilaian maturitas SPIP yang terintegrasi dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Tabel 2.109
Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Kab. Bolaang mongondow

Tahun Nilai/Kategori	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Nilai	76,22	72,44	67,51	70,73
Kategori	Waspada	Rentan	Rentan	Rentan

Sumber : Inspektorat Kab Bolaang Mongondow 2025.

Secara keseluruhan, SPIP Terintegrasi merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mewujudkan birokrasi yang lebih baik.

Tabel 2.110
Data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Kab. Bolaang Mongondow

Tahun Nilai/Kategori	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Nilai	74,48	82,77	78,35	71,64
Kategori	Waspada	Terjaga	Terjaga	Rentan

Jika melihat tabel diatas nilai MCSP menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 rentan terhadap terjadinya korupsi sehingga dalam upaya pencegahan perlu langkah-langkah maksimal terhadap delapan (8) area utama yang dianggap rawan terhadap korupsi yakni Perencanaan, penganggaran, pengadaan Barang dan jasa, pelayanan Publik, pengawasan APIP, Manajemen ASN, pengelolaan Barang milik Daerah serta Optimalisasi Pajak Daerah.

Dalam mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Adaptif berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi. Regulasi yang adaptif harus mampu mengantisipasi dan merespons tantangan baru, serta mendorong inovasi dan perkembangan berkelanjutan.

Transformasi tata kelola merujuk pada upaya untuk mengubah sistem pemerintahan dan pengelolaan menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan penggunaan teknologi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan partisipasi publik.





Salah satu bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan adalah dengan meningkatkan penyelenggaraan pertanggungjawaban pada laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pada Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, pencapaian opini Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami kemajuan, dimana sejak tahun 2020 penilaian opini Pemerintah Kabupaten Bolmong untuk kali pertama berhasil mendapatkan opini (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian dan di tahun 2021, 2022 2023 DAN 2024 pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow berhasil mempertahankan Opini WTP yang ke empat kalinya. Seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.111
Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.
Bolmong Tahun 2020-2023

PENILAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Bolmong 2025

Selain mempertahankan opini dari BPK, pemerintah Kabupaten Bolmong juga terus meningkatkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, dimana Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8679/OTDA tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023 angka 3 huruf a. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Kemendagri melaksanakan evaluasi setiap tahun secara rutin dengan menggunakan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota setiap tahunnya. Berikut perolehan Nilai LPPD Kabupaten Bolaang Mogondow.





Tabel 2.112

**Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2024**

Keterangan	2021	2022	2023	2024
NILAI LPPD	2,65	3,052	3,0561	Belum di rilis

Sumber: Bagian Pemerintahan 2024

Selain LPPD, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan yang dievaluasi kedalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.113

**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2019-2024**

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	58,42 (CC)	62,72 (B)	63,84 (B)	64,56 (B)	65,35 (B)

Sumber: Bagian Organisasi setda tahun 2025

Untuk Peningkatan Nilai Kepatuhan Berdasarkan Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun standar pelayanan diatur dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pada dasarnya penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan bahkan dengan melibatkan masyarakat. Terdapat beberapa komponen standar pelayanan yang meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian,





biaya/tarif, produk pelayanan, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Selain standar pelayanan, penyelenggara pelayanan juga perlu menyusun maklumat pelayanan sebagai pemenuhan kewajiban dan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Pada akhirnya, standar pelayanan ini menjadi fokus dalam pengawasan pelayanan publik yang notabene dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Adapun kegiatan tersebut selanjutnya disebut dengan Survei Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik. Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau diperoleh dari rentang nilai 78-100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 54,00-77,99, Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat pusat maupun Daerah. Berikut nilai standar kepatuhan pelayanan publik yang diperoleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114
Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten
Bolaang Mongondow

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	zona kuning (57,76)	zona merah (53,32)	zona hijau (95,05)	zona hijau (95,05)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemkab Bolmong satu-satunya daerah di Sulut yang meraih predikat "Sangat Baik", dengan capaian Indeks 3,53 di tahun 2023. Untuk capaian indeks predikat Sangat Baik bagi Pemkab Bolmong dinilai dari suksesnya Pemkab Bolmong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan instansi daerah pada tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024 turun dengan angka 2,73, hal ini diakibatkan oleh adanya regulasi yang kadaluarsa berdasarkan audit oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia sehingga perlu diperbaiki ditahun 2025.



Tabel 2.115
Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Bolmong Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai	Keterangan
1	2020	0	Tidak Ada penilaian karena Covid 19
2	2021	2,03	Cukup
3	2022	2,74	Baik
4	2023	3,53	Sangat Baik
5	2024	2,73	Baik

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatik Bolmong 2025

Dalam dunia yang terus berubah, regulasi yang kaku dan tidak responsif dapat menjadi penghambat kemajuan. Regulasi yang adaptif memungkinkan pemerintah untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan efektif, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya membangun regulasi yang responsif dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai dengan sasaran road map reformasi birokrasi terkhusus meningkatkan kualitas reformasi hukum pada pemerintah, Kabupaten Bolaang mongondow melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM memberikan hasil penilaian atas indeks reformasi hukum sejak tahun 2023 dan 2024 dengan kategori AA (Istimewa).

2.1.5.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang tangguh dan Demokrasi Substansial.

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan tiga pilar penting yang saling terkait dalam membangun negara yang kuat dan sejahtera. Keadilan hukum menjadi dasar bagi tegaknya keamanan nasional dan demokrasi. Keamanan nasional yang kuat memberikan ruang bagi demokrasi untuk berkembang. Demokrasi substansial, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas keamanan.

Ketiga pilar ini saling terkait dan saling mendukung. Hukum berkeadilan menjadi fondasi bagi keamanan nasional dan demokrasi substansial. Keamanan nasional yang tangguh menciptakan ruang bagi demokrasi untuk berkembang. Demokrasi substansial, pada gilirannya, membutuhkan kepastian hukum dan keamanan untuk dapat berfungsi secara efektif.

Penerapan ketiga pilar ini di Kotamobagu (dan daerah lain di Indonesia) memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan, keamanan wilayah terjaga, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ditingkatkan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.





Dengan memperkuat ketiga pilar ini, Bolaang Mongondow dan Indonesia secara keseluruhan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan ketiga pilar diatas pemerintah bersama didalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, serta menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sebagai media komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah untuk bertukar pikiran dan mencari solusi atas permasalahan yang ada diwilayah.

Perlu diketahui Ketertiban Umum, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh dua organisasi perangkat daerah yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Polisi Pamong Pradja dan Pemadam Kebakaran.

Dalam menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat, maka pemerintah melakukan berbagai operasi, maupun penanganan dalam mengendalikan situasi yang terjadi. Diatara operasi tersebut diataranya operasi terhadap Penyakit Masyarakat (Pekat). Penyakit masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat dan hukum yang berlaku.

Salah satu tugas dari Polisi Pamong Pradja adalah penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Berikut adalah jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019-2024.

Tabel 2.116

Jumlah Perda dan Perbub yang diterbitkan Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perda	5	11	5	6	13	9
2	Jumlah Perbub	52	51	50	33	23	34

Sumber: Bagian hukum dan Ham Kab. Bolmong 2025

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) tidak secara eksplisit diukur dengan satu angka persentase tunggal. Namun, penegakan Perda merupakan salah satu indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Beberapa aspek yang terkait dengan penegakan Perda, seperti jumlah pelanggaran, tindakan penegakan hukum yang dilakukan, dan efektivitas penanganan pelanggaran, dapat menjadi indikator tidak langsung dari keberhasilan penegakan Perda. Hingga saat ini upaya penegakan perda terus dilakukan ketika dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga dari satuan polisi pamong praja termasuk melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disampaikan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kabupaten Bolaang Mongondow





Tahun 2024, urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat seluruh perda yang telah ditetapkan turut menjadi bagian penting untuk dikawal dan ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu terkait Indeks Keamanan Dan Ketertiban, berdasarkan data yang dihimpun oleh Polres Bolaang Mongondow sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 364 kasus kriminal terjadi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan asumsi jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 257.378 jiwa, maka perhitungan **Indeks Keamanan dan Ketertiban (IKK)** dilakukan dengan rumus:

$$IKK = (1 - (\text{Jumlah Kasus} / \text{Total Penduduk})) \times 100.$$

Diperoleh hasil:

$$IKK = (1 - (364 / 257.378)) \times 100 = 99.85$$

Sehingga, Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah sebesar 99.85, yang dikategorikan sebagai: ***SANGAT AMAN***. Interpretasi terhadap nilai tersebut yakni :

- Skor 90 - 100 : Sangat Aman
- Skor 75 - 89.9 : Aman
- Skor 60 - 74.9 : Waspada
- Skor 40 - 59.9 : Tidak Aman
- Skor < 40 : Sangat Tidak Aman

2.1.5.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan" adalah frasa yang menggambarkan upaya Indonesia untuk memperkuat posisi dan pengaruhnya di kawasan melalui diplomasi dan pertahanan yang disegani. Hal ini mencakup membangun hubungan baik dengan negara lain, serta memiliki kekuatan militer yang mampu menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Pun halnya dengan daerah Kabupaten/ kota sebagai wilayah yang terintegrasi kedalam negara kesatuan republik indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar kawasan untuk daerah kabupaten dapat diartikan sebagai upaya memperkuat daya tangkal dan pengaruh daerah di tingkat regional melalui pendekatan diplomasi dan pertahanan. Ini mencakup membangun hubungan baik dengan daerah lain, meningkatkan keamanan wilayah, serta memanfaatkan potensi daerah untuk kepentingan bersama. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas dan kemandirian daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Upaya untuk mencapai ketangguhan ini dilakukan melalui :

1. Diplomasi.

Pada intinya wilayah kabupaten terus melakukan Peningkatan Hubungan Antar Daerah dengan Membangun komunikasi yang baik dan kerjasama yang erat dengan kabupaten/kota lain, provinsi tetangga, melalui forum-forum kerjasama regional, pertukaran budaya, atau proyek-pembangunan bersama. Selain itu berpartisipasi Aktif dalam Forum Regional yang relevan dengan kepentingan daerah sebagai wadah untuk menyuarakan

kepentingan daerah dan membangun aliansi strategis. Hal lainnya dalam diplomasi adalah melakukan Promosi Potensi Daerah dengan Memperkenalkan potensi daerah, baik sumber daya alam, produk unggulan, maupun potensi wisata, kepada daerah lain dan dunia internasional. Hal ini dapat menarik investasi, wisatawan, dan kerjasama ekonomi.

2. Pertahanan.

Sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, kabupaten Bolaang Mongondow terus memperkuat sistem keamanan wilayah, termasuk peningkatan kapasitas aparat keamanan, serta kerjasama dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Kesiapsiagaan Bencana juga terus di tingkatkan sebagai bagian dari kemampuan daerah dalam menghadapi bencana alam, baik melalui pelatihan, penyediaan sarana prasarana, maupun kerjasama dengan pihak lain. Hal lainnya adalah dengan memperkuat ketahanan masyarakat, termasuk ketahanan pangan, energi, dan ekonomi. Ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi lokal.

3. Penguatan Daya Gantar Kawasan.

Pemerintah Bolmong juga terus membangun citra positif dimata Masyarakat luas baik melalui promosi potensi daerah, prestasi yang diraih maupun berpartisipasi aktif dalam kegiatan regional, memperbaiki dan membangun infrastruktur yang mendukung diplomasi dan pertahanan seperti bandara, memiliki Pelabuhan, memperbaiki jalan dan jaringan komunikasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia didaerah termasuk kemampuan berbahasa asing, pemahaman isu-isu regional serta kemampuan diplomasi lainnya.

Penerapan konsep ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan fasilitasi. Dengan ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gantar kawasan, daerah dapat menjadi kekuatan yang diperhitungkan di tingkat regional, berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran bangsa.

Salah satu indikator dalam melihat Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya gantar Kawasan adalah melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada tahun 2024 skor IDSD Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 3,21 berada di bawah pemerintah provinsi sulut yang mencapai skor 3,53 dan nasional dengan skor 3,43. Berikut gambar peroleh skor IDSD Seluruh kabupaten Kota se Sulawesi Utara.

Gambar 2.15.
Skor IDSD tahun 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA



NAMA KABUPATEN	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR			EKOSISTEM INOVASI			SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4.18	2.97	3.47	3.99	3.76	3.91	2.57	3.03	2.76	4.35	3.06	3.11	3.43
PROV. SULAWESI UTARA	4.06	2.80	3.85	4.00	3.95	4.05	3.36	3.49	2.86	4.23	2.89	2.81	3.53
RATA-RATA KABUPATEN	4.23	3.32	4.16	3.87	3.80	3.87	2.98	3.38	2.97	3.76	4.00	1.53	3.41
BOLAANG MONGGONDOW	4.21	2.87	3.81	3.89	3.76	3.44	2.16	2.45	2.46	3.90	4.42	0.36	3.21
MINAHASA	2.96	3.51	4.36	3.91	3.91	3.78	1.57	1.91	2.36	4.24	3.62	2.88	3.09
KEPULAUAN SANGHE	4.36	3.00	4.38	3.20	3.82	4.20	2.91	2.76	2.48	3.84	4.15	0.85	3.44
KEPULAUAN TALAUD	4.21	2.05	2.45	2.45	3.63	4.10	2.85	2.63	2.46	3.35	3.95	1.04	3.20
MINAHASA SELATAN	4.34	3.36	4.43	3.88	3.81	4.07	2.22	3.41	1.64	3.99	3.88	1.40	3.37
MINAHASA UTARA	4.07	2.40	4.63	4.19	3.92	3.93	2.19	3.88	1.87	4.14	3.98	2.08	3.50
BOLAANG MONGGONDOW UTARA	4.20	2.99	3.17	3.81	3.92	3.70	1.76	4.10	2.47	3.38	4.10	0.67	3.14
KEP. BIAU TAGULANDAM BIAU	4.51	3.42	3.99	3.42	3.89	4.19	3.72	2.91	1.25	3.38	3.20	0.55	3.21
MINAHASA TENGGARA	4.17	2.76	4.20	3.89	3.83	4.21	2.55	3.12	0.96	3.72	3.06	1.42	3.30
BOLAANG MONGGONDOW SELATAN	3.97	2.85	3.23	3.61	3.33	3.83	2.68	2.63	1.23	3.27	3.81	0.43	2.97
BOLAANG MONGGONDOW TIMUR	4.36	2.31	4.04	3.48	3.63	3.46	1.74	2.97	0.87	3.42	3.55	0.77	2.96
MANADO	4.24	4.00	4.80	3.88	3.96	3.90	5.00	4.00	4.18	4.58	4.04	3.52	4.28
BITUNG	4.18	3.37	4.66	3.85	3.89	3.93	2.46	3.67	2.23	4.23	4.34	1.40	3.48
TOMOHON	4.19	4.00	4.18	3.52	3.88	3.83	3.35	3.96	2.62	3.84	4.71	2.07	3.72
KOTAMOBAGU	4.44	3.36	4.96	3.69	3.87	3.72	4.87	4.84	2.38	3.93	3.97	2.23	3.79

Sumber : BRIN Tahun 2025.

2.1.5.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan setiap pemerintah daerah adalah hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang diukur melalui indikator-indikator kinerja tertentu. Indikator ini mencerminkan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta keberhasilan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, digunakan indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (seperti Kementerian Dalam Negeri) dan juga dapat dikembangkan oleh daerah itu sendiri. Indikator ini berupa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk setiap urusan, digunakan untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kinerja urusan pemerintahan daerah diukur melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan dengan indikator yang telah ditetapkan. Data ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta digunakan untuk penyusunan LPPD. LPPD menjadi dasar untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Peningkatan kinerja urusan pemerintahan daerah

penting untuk; Mewujudkan good governance dan akuntabilitas, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mencapai tujuan pembangunan daerah, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pengukuran dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, diharapkan pemerintah daerah dapat terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunannya. Untuk capaian IKK dapat disampaikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.117
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab Bolmong Tahun 2020-2024**

Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	89,66	80,15	73,16	73,14	108,58
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	96,28	103,67	92,76	95,14	87,70
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,07	89,99	76,21	78,12	63,96
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	27,64	2,35	28,56
Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,58	0,08	0,87	1,03	0,77
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	68,42	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,99	83,70	90,08	86,70	95,64
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	94,90	99,91	85,35	73,35	77,81





Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,08	90,21	88,48	76,82	81,66
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	65,83	79,16	98,66	89,29
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	33,46	80,06	82,21	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	15,64	61,76	82,24	44,31	65,34
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	80,42	98,49	98,52	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	74,39	77,67	81,32
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	71,27	91,20	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	62,71	96,67	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	69,84
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	73,56	89,93	53,97





Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100,00	16,67	16,67	16,67	16,67
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	50,34	60,78	68,13	69,05	70,94
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	69,15	69,74	71,15	68,57	68,63
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	55,43	56,95	59,00	56,67	56,97
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	66,07	71,03	72,13	55,31	56,51
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	1,60	3,02	11,69	16,38
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	0	81,82	100



Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	0	100	0	0
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	62,26	63,84	68,31	71,05	94,26
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4,44	3,20	3,51	3,16	0,14
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	34,09	34,09	100	100
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	84,62	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang %	16.010	235.832	100	78,76	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang %	570	61.640	0,12	0,11	0
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang %	3.215	0	100	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	87,50	80	100	100	96,30
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	61,25	34	69	23	21,19



Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pergemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti (Indikator SPM)	%	83,87	72,73	100	100	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	0	18,18	9,09	0
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	14,39	14,44	16,38	15,77	10,03
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	141.476,67	1.550.977.789,82	290,71	291,14	182.723.504.647,35
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	65,79	66,67	83,82	91,24	91,89
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Amar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	44,90	27,64	38,40	78,75	90,57
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,12	0,11	0,08	0,06	0,07
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,17	0,18	79,47	18,18	100



Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	29,06	38,95	12,39	18,00	17,82
Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	9	357,14	93,66	103,01	100
Pertanian	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	66,96	100	70,49	51,83
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka peranaman modal	%	100	100	100	100	100
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	12,29	12,29	0	0	0
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	0	0	0	0
	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100
Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	84,04	71,96	72,55	74,21	71,85
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	71,07	10,82	4,93	24,65	6,32





Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	48,28	51,72	52,38	44,62	79,31
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	%	98,73	93,25	90,28	91,09	87,07
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	6,96	30,49	42,59	47,87	61,58
	Kepemilikan akta kelahiran	%	90,15	90,12	92,43	96,21	98,10
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	0	16,67	16,67	14,89	4,26
Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	72,88	88,14	100	85,71	50
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,60	3,2	3,15	14,86	57,53
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,26	2,43	1,75	1,90	0,03
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	81,27	77,25	56,70	63,97	71,82
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,11	14,13	26,15	16,46	8,27
Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	633,33	0,64	0,645	0,645	70
	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,26	0,26	0,00013	0,00013	0,01
Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	56,25	58,33	75	74,47	61,70



Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	62,96	70,37	70,37	74,07	66,67
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	87,99	90,64	74,43	71,77	87,59
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	26,23	31,25	100	100	18,64
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	7,46	2,42	95,40	95,40	0,95
Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1,98	5,24	9,03	7,24	6,33
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	4,43	6,87	6,94	7,00	2,18
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,27	4,09	4,38	4,40	0,30
	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	43	43	108	211	3
Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	50	75	0	0	0





Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Kebudayaan	Terlestariannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	0
Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	0	44,53	54,2	58,63	59,39
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	0	7,95	7,521	41,63	23,58
Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	0	12,12	58,21	60,435	61,02
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	0	8,3	67	66,67	50,37
Urusan Pilihan							
Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	11.114,68	11096,6	66,99	96,21	90,54
Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	0	0	465,22	7,69
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	0,49	101,26	6,88	1,12	5,53
	Tingkat hunian akomodasi	%	26,34	2639,24	12,78	13,26	0,27
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,003	0,36	0,37	0,38	3,92
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,001	0,27	0,26	0,22	1,62



Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Hektar	563,52	563,52	608,40	493,79	513,70
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	0	0	0	-100	0
Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	%	0	100	100	100	0
Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	14,60	21,40	31,39	47,53	60,72
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	62,18	58,49	41,97	32,04	31,16
	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan অন্য (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	67,25	99,45	58,12	13,61	16,85
Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	3,73	5,51	5,01	5,53	55,68
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	70	7	0	0
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	62,14	100	60
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	0	0	0





Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	0	100	100	100	0
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	80	5	125	125	100
Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
Fungsi Perunjang Urusan Pemerintahan							
Perencanaan dari Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	77,82	15,43	2,48	1,58	1,43
	Rasio PAD	%	7,74	67,36	5,58	6,41	6,11
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	2	2	3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	3	3
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,46	61,65	62,20	58,31	64,84
	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100,00	19,44	53,55	45,01	90,09



Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	23,41	57,56	21,14	28,07	16,23
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%		64,50	4,49	15,91	-34,17
Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	26,60	26,53	62,83	63,45	63,04
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,41	9,63	20,25	19,69	21,60
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	68,07	24,25	32,35	23,19
Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,95	6,68	3,13	6,48	1,07
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100,00	3,71	36,70	19,30	5,83
	Manajemen Aset	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	0,04	6,72	7,26	9,13	7,17
Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	96,39	94,59	98,97	99,24	99,31

Urusan	IKK Outcome	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100

2.1.6. Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonomi pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan dana disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang





ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai dasar pelaksanaan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal :

1. Bidang Pendidikan
 - Pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - Pendidikan dasar
 - Pendidikan kesetaraan
2. Bidang Kesehatan
 - Pelayanan kesehatan ibu hamil
 - Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - Pelayanan kesehatan balita
 - Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
 - Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
 - Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
 - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota
5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
 - Pelayanan informasi rawan bencana
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Bidang Sosial
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti





- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2.1.7 Kerjasama Daerah

Kerjasama Antar Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan salah satu strategi Pembangunan daerah. Kerjasama Antar Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow, seperti juga di daerah lain di Indonesia merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat Pembangunan, meningkatkan pelayanan public, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Kerjasama ini dapat bersifat antar kabupaten di wilayah Sulawesi Utara, antar Provinsi, maupun dengan pihak swasta dan luar negeri.

Bentuk Kerjasama Antar Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi: Kerjasama Lintas Kabupaten/ Kota di Bolaang Mongondow Raya (BMR) dan Kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Bolaang Mongondow mencakup beberapa kabupaten/ Kota yakni :

1. Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kota Kotamobagu
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
6. Kabupaten Minahasa Selatan

Kerjasama ini meliputi berbagai bidang, seperti :

1. Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan
 - Pengembangan sektor pertanian dan perikanan; Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi besar dibidang pertanian, Perkebunan dan perikanan. Kerjasama dengan daerah tetangga dapat memperkuat rantai pasok dan memperluas pasar hasil-hasil produksi lokal, Seperti distribusi beras dan komoditas pertanian dan pengembangan agroindustry dengan memiliki fasilitas pengolahan hasil pertanian.
 - Pembangunan Kawasan Ekonomi; seperti kerjasama dalam pembangunan pasar induk regional dan kawasan industry bersama antar kabupaten di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
2. Kerjasama Infrastruktur
 - Peningkatan konektivitas antar wilayah; seperti perbaikan dan Pembangunan jalan penghubung antar kabupaten (contoh : akses ke Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur), pembangunan Bandara Lolak.
 - Pengelolaan Sumber Daya Air; Termasuk bendungan atau irigasi yang digunakan secara lintas daerah.
3. Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Kesehatan



- Fasilitas layanan Bersama; RSUD atau Puskesmas yang bisa melayani warga dari beberapa kabupaten
 - Pertukaran tenaga pengajar dan tenaga medis; Untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah-daerah yang masih kekurangan SDM
 - Kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui MoU (Memorandum of Understanding).
4. Kerjasama Lingkungan dan Tata Ruang
 - Pelestarian hutan, daerah aliran Sungai (DAS) yang melintasi beberapa wilayah kabupaten dan pertambangan.
 - Penanganan bencana Bersama, misalnya koordinasi dalam menghadapi banjir, longsor atau gempa.
 5. Kerjasama Budaya dan Pariwisata
 - Promosi pariwisata regional Bolaang Mongondow Raya; Pengembangan kawasan wisata yang saling terhubung seperti danau Mooat dan Pantai Salongo. Termasuk Kerjasama dalam festival budaya yang merupakan paket wisata terpadu antar kabupaten.
 - Pelestarian budaya lokal; seperti adat dan Bahasa Mongondow yang tersebar di beberapa kabupaten.
 6. Kerjasama Ekonomi dan Investasi
 - Mendorong Investor melalui sinergi lintas daerah (contoh: Kawasan pertambangan dan Perkebunan sawit)
 - Pengembangan UMKM dan Koperasi antar Kabupaten
 7. Kerjasama dengan Provinsi Sulawesi Utara
 - Mendukung program Strategis provinsi seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan pertanian,
 - Integrasi data kependudukan dan pelayanan public berbasis digital.

2.1.8. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. APBN digunakan untuk proyek strategis nasional dan infrastruktur prioritas, sementara APBD provinsi fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Seringkali, terjadi kolaborasi antara APBN dan APBD untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih besar. Dalam pola pembiayaan APBN terdapat proyek strategis nasional berupa pembiayaan proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan tol, bendungan, bandara dan pelabuhan yang memiliki dampak luas bagi perekonomian nasional.

Pada pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah di bangun sejumlah proyek yakni :

1. Bendungan Lolak yang berperan penting dalam menyediakan air untuk





- irigasi pertanian dan juga potensi pembangkit listrik tenaga air. Bendungan ini diharapkan mampu menyediakan kapasitas air hingga kurang lebih 12.400.000 M3 dengan pelayanan kurang lebih 2.500 Ha.
2. Bandar Udara Lolak. Pembangunan Bandar Udara Bolaang Mongondow dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga 2024 dengan menggunakan anggaran sebesar kurang lebih 418,9 milyar rupiah.
 3. Jalan trans sulawesi yang melalui wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang di biyai APN dan APBD provinsi terdapat pembangunan jalan dan jembatan sesuai Instruksi Presiden 11 thn 2025 Tahun 2025 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Dearah untuk mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Selain itu pembangunan melalui pembiayaan APBD Provinsi Sulawesi Utara yakni Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sauk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.1.9. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Daerah.

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pelayanan daerah. Mereka berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyediakan barang serta jasa publik yang vital bagi masyarakat. BUMD seringkali beroperasi di sektor-sektor yang esensial bagi masyarakat, seperti penyediaan air bersih (PDAM). Dalam penyelenggaraan pelayanan di daerah Kabupaten Bolaang Mogondow terdapat PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Bolaang Mongondow yang Bertanggung jawab atas penyediaan air bersih bagi masyarakat. Selain PDAM juga terdapat Perusahaan Daerah Gadasera. Perusahaan Daerah (PD) Gadasera adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sebelumnya tidak aktif, namun kini sudah diaktifkan kembali. Pemerintah daerah menaruh harapan besar pada PD Gadasera untuk menjadi penggerak ekonomi lokal khususnya yang bergerak di usaha perkebunan.

Selanjutnya Badan Usaha Milik Daerah yang mendukung kinerja pelayanan daerah yakni BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang sekarang ini dikenal dengan Bank Sulut-Go yang bergerak di sektor keuangan dan perbankan, memfasilitasi akses permodalan bagi masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Diharapkan BUMD dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal dengan menyediakan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja.

Meskipun memiliki potensi besar, BUMD juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan dari sektor swasta, perlunya peningkatan tata kelola yang baik, dan tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Untuk itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui berbagai upaya, termasuk pemberian dukungan modal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan kinerja yang optimal, BUMD dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas di daerah.





2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2025-2029 merupakan tahapan pertama dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2025-2045. RPJMD 2025-2029 tersebut sesuai tematik RPJPD 2025-2029 merupakan penguatan fondasi transformasi dalam rangkaian tahapan kedua percepatan dan tahap ketiga ekspansi global untuk pencapaian Indonesia Maju dan Berkelanjutan di mana Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai penopang bersama daerah lainnya.

Penguatan fondasi transformasi memerlukan topangan pembiayaan yang memadai. Oleh sebab itu maka optimalisasi keuangan daerah tetap memperhatikan kondisi dan situasi masa lalu terutama lima tahun terakhir dan juga semangat baru berdasarkan proses penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045. Penyusunan dokumen RPJPD tersebut melahirkan harapan baru sekaligus diharapkan paradigma baru dalam model perencanaan kedepan, Indonesia yang akan semakin setara dengan negara-negara maju menjadi kekuatan semangat kebersamaan antar daerah dan wilayah saling menopang pencapaiannya.

Optimisme mendasar adalah semua pihak di seluruh penjuru NKRI semakin yakin terhadap fondasi konstitusi NKRI berdasarkan Pancasila yang telah melanggengkan keutuhan dan kesejahteraan negara beserta daerah-daerah selama ini dan diharapkan pada Indonesia Emas semuanya terus berkomitmen untuk kebaikan negara kita.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk seluruh stakeholder. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun dasar hukum pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66).;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);





5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, akan diketahui informasi penting seperti rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah; belanja daerah; dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan target keuangan daerah. Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktifitas.

Perkembangan keuangan daerah secara menyeluruh dan menurut komponen-komponennya dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dapat diikuti pada tabel berikut.





Tabel 2.118
Realisasi APBD Tahun 2020-2024
Kabupaten Bolaang Mongondow

URAIAN	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024	Rata-Rata 2020-2024
PENDAPATAN DAERAH	990,789,586,372	1,017,395,579,518.41	1,064,053,609,385.01	1,090,269,243,242.91	1,060,004,317,566,16	1.58
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65,627,494,286	66,480,517,984.41	59,384,735,438	69,847,019,829.91	64,931,917,295,16	-1.95
Pajak Daerah	39,644,115,102	37,677,056,408.00	36,773,927,955.00	48,618,898,979.00	41,777,573,317.00	0.19
Retribusi Daerah	10,479,205,024	8,281,435,845	11,826,431,327.00	12,504,563,525.00	14,046,047,915.00	10.93
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,151,063,508	2,438,756,081.00	1,965,588,173.94	2,882,571,278.10	3,878,205,042.00	6.21
Lain-lain PAD yang Sah	13,362,109,652	12,003,268,850.41	6,818,787,982.07	5,040,986,047.01	4,430,091,021,16	-33.12
PENDAPATAN TRANSFER	885,666,021,090	907,391,083,960	989,552,170,427	1,011,692,757,515	986,867,418,179.00	2.68
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	687,144,139,352	860,508,284,094.00	943,533,107,020.00	968,023,534,518.00	775,346,643,297.00	8.15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	176,503,084,000	0.00	0.00	0	169,446,159,000.00	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	21,568,797,746.00	46,883,601,866.00	44,019,063,407.00	43,669,222,997.00	42,074,615,882.00	19.87
Bantuan Keuangan	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39,496,064,988	49,513,175,566	15,116,703,520	8,729,465,898	8,204,982,092,00	-31.95
Pendapatan Hibah	39,496,064,988	17,032,059,966.00	4,474,632,741.00	342,325,200.00	0	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	32,481,115,600.00	5,642,070,779.00	8,387,140,698.00	8,204,982,092,00	
BELANJA DAERAH	790,670,837,121.00	986,799,078,438.00	1,031,824,125,387.00	1,099,621,571,516.00		8.8
BELANJA OPERASI	656,724,422,166.00	632,084,269,846.00	668,348,451,167.00	709,078,331,784.00	789,445,131,071,75	5.20
Belanja Pegawai	370,539,162,787.00	376,109,514,022.00	393,035,024,674.00	409,574,045,733.00	467,491,412,190.00	6.90
Belanja Barang dan Jasa	279,724,782,969	232,293,929,276.00	248,797,036,758.00	273,338,916,141.00	249,081,172,368,75	-2.75
Belanja Subsidi	0			211,500,000.00	-	
Belanja Hibah	4,179,377,350	21,818,980,518.00	17,814,259,850.00	25,050,344,460.00	72,062,010,763.00	86.76
Belanja Bantuan Sosial	261,100,000	1,781,845,230.00	8,702,129,885.00	895,525,450.00	10,527,750.00	-54.69
BELANJA MODAL	120,205,610,001.00	130,815,114,355.00	149,012,960,494.00	165,619,436,669.00	84,316,043,086,00	-11.38
Belanja Modal Tanah	0	346,440,000.00	0.00	0	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,598,365,479.00	32,640,869,667.00	39,590,112,604.00	41,255,703,219.00	15,409,856,633.00	-29.53





URAIAN	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024	Rata-Rata 2020-2024
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,876,716,979.00	29,163,858,590.00	51,149,042,945.00	69,553,872,247.00	36,065,291,398.00	9.02
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47,396,147,289.00	68,588,701,848.00	56,271,054,945.00	51,822,986,987.00	29,905,538,053.00	-15.47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	334,380,254.00	75,244,250.00	750,000.00	2,771,954,216.00	2,738,332,000.00	-42.31
Belanja Modal Aset Lainnya	0.00		0.00	215,000,000.00	197,025,000.00	
BELANJA TIDAK TERDUGA	13,740,005,014.00	2,861,809,188.00	4,828,989,830.00	9,293,016,063.00	1,501,050,900.00	-38.19
Belanja Tidak Terduga	13,740,005,014.00	2,861,809,188.00	4,828,989,830.00	9,293,016,063.00	1,501,050,900.00	-38.19
BELANJA TRANSFER	223,963,967,692.00	221,117,885,049.00	209,633,723,896.00	215,630,787,000.00	231,084,028,347.31	0.02
Belanja Bagi Hasil Pajak daerah	3,765,215,292.00	6,234,283,599.00	4,218,944,999.00	5,155,919,000.00	5,790,020,356.31	30.30
Belanja Bantuan Keuangan	220,198,752,400.00	214,883,601,450.00	205,414,778,897.00	210,474,788,000.00	225,294,007,991.00	-0.82
Surplus/Defisit	200,119,543,251.00	30,506,501,080.41	32,229,483,998.01	(9,352,328,273.09)	(46,341,935,838.90)	
PEMBIAYAAN DAERAH	74,818,090,909.00	46,512,346,268.00	62,011,450,190.72	92,933,552,911.73	83,580,667,558.69	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74,818,090,909.00	46,512,346,268.00	71,611,450,190.72	92,933,552,911.73	83,580,667,558.69	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74,810,236,213.00	46,512,346,268.00	71,611,450,190.72	92,933,552,911.73	83,581,224,638.64	
Koreksi SILPA	7,854,696.00	0.00	0.00	0	0	
Pencairan Dana Cadangan	0	0.00	0.00	0	0	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4,500,000,000.00	5,424,000,000.00	9,600,000,000.00	0.00	0	
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0	0	0	
Penyertaan Modal Daerah	4,500,000,000.00	5,424,000,000.00	9,600,000,000.00	0	0	
Pengembalian Dana Hibah Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	
Pembiayaan Netto	70,318,090,909	41,088,346,268.00	62,011,450,190.72	92,933,552,911.73	83,580,667,558.69	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	46,473,666,268.00	71,594,847,348.41	94,240,934,188.73	83,581,224,638.64	37,238,731,719.79	

Sumber: BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025



2.2.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Perkembangan kinerja pendapatan daerah Selang 5 tahun terakhir dari 2020 sampai dengan 2024 memperlihatkan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata/tahun sebesar dibawah 2 persen per tahun. Kontribusi terbesar pada pendapatan daerah berasal dari Pendapapatan Transfer, yang diikuti PAD sisanya dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan transfer sendiri ada yang dari pemerintah pusat dengan kontribusi terbesar dan dari pemerintah provinsi Adapun perkembangan masing-masing komponen pendapatan daerah dapat dijelaskan bahwa PAD selang lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan minus; Pendapatan transfer 2,68 %/ tahun dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan.

A. Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan PAD sejak lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun rata-rata -,95 %/tahun bertumbuh. Jika diamati komponennya dapat dikemukakan bahwa Pajak Daerah yang mendominasi kontribusi ternyata bertumbuh rata-rata 0,19 %/tahun. Retribusi pada 2024 memberikan kontribusi kedua dengan pertumbuhan yang mengesankan sebesar 10,93 %/tahun. Adapun kedua komponen PAD lainnya pada 2024 jumlahnya hampir sama hanya dibawah 3 milyar Rupiah.

Tabel 2.119
Perkembangan Pajak Daerah dan Komponennya 2020-2024
Kabupaten Bolaang Mongondow

PAJAK DAERAH	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
Pajak Hotel	9.285.000,00	31.430.000,00	69.284.058,00	62.783.493,00	57.426.072,00
Pajak Restoran	429.246.915,00	668.849.303,00	997.942.782,00	906.326.123,00	761.666.863,00
Pajak Hiburan	0	0	6.900.000,00	12.000.000,00	6.900.000,00
Pajak Reklame	1.061.185.503,00	1.085.645.576,00	1.545.034.998,00	1.814.396.731,00	2.377.627.038,00
Pajak Penerangan Jalan	7.245.888.330,00	7.555.002.443,00	8.674.295.464,00	9.394.841.439,00	10.602.145.105,00
Pajak Parkir	0	0			0
Pajak Air Tanah	0	0			0
Pajak Sarung Walea	0	0	31.000.000,00	13.000.000,00	38.500.000,00
Pajak Mineral bukan Logam	22.689.861.255,00	22.607.861.905,00	22.954.896.644,00	27.457.065.900,00	23.436.164.745,00
PBB-P2	3.712.604.852,00	3.623.922.369,00	3.800.846.780,00	3.999.692.632,00	3.980.066.271,00
BPITTD	4.496.040.247,00	674.644.812,00	493.027.220,00	4.968.792.761,00	508.357.222,00
JUMLAH	39.644.115.102,00	37.677.866.408,00	38.773.927.955,00	48.618.898.979,00	41.777.673.317,00

Sumber: BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

Tabel 2.120
Perkembangan Retribusi Daerah dan Komponennya 2020-2024
Kabupaten Bolaang Mongondow

RETRIBUSI	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
Retribusi jasa umum	9.664.665.911,00	7.924.206.145,00	8.136.032.000,00	13.738.542.000,00	12.948.499.913,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	9.414.993.911,00	7.607.742.840,00	7.833.032.000,00	13.483.542.000	12.718.523.413,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	51.930.000,00	48.356.000,00	50.000.000,00	50.000.000	90.326.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	77.875.000,00	96.772.300,00	100.000.000,00	100.000.000	0
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	0	0	0	0	0
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	105.079.000	150.482.000,00	133.000.000,00	95.000.000	150.650.500,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	14.788.000	18.843.000,00	20.000.000,00	10.000.000	
Retribusi jasa usaha	177.401.500,00	213545000	210000000	213591045	365.592.101,00
Retribusi Pemaluan Kekayaan Daerah - LRA				3.591.045	110.009.600,00
Retribusi Terminal - LRA	31.670.000,00	29.531.000,00	30.000.000,00	30.000.000	
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	134.031.500,00	162.179.000,00	150.000.000,00	150.000.000	193.832.501,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	0	0	0	21.650.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0	0	0	0	0
Retribusi Penyebrangan Air - LRA	0	0	0	0	0
Retribusi Tempat Penampungan - LRA	0	0	0	0	0
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	11.700.000,00	21.835.000,00	30.000.000,00	30.000.000	40.010.000,00
Retribusi Pertalian Tertentu	628.138.413,00	143.884.700,00	6557525	39208850	1.512.045.901,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	628.138.413,00	143.884.700,00	6.557.525,00	39.208.850	680.095.915,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	0	0	0	0	0
Retribusi Izin Trayek - LRA	0	0	0	0	0
Retribusi Perpanjangan Izin Mensekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	0	0	0	0	0
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	0	0	0	0



RETRIBUSI	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0	0	0	0	831.849.986,00
JUMLAH	10.470.205.824,00	8.281.435.845,00	8.352.589.525,00	13.991.341.895,00	14.846.047.915,00

Sumber: BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

Tabel 2.121
Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow

	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.151.063.505,00	2.438.756.881,00	1.965.588.173,94	2.882.571.278,10	3.878.205.042,00
JUMLAH	2.151.063.505,00	2.438.756.881,00	1.965.588.173,94	2.882.571.278,10	3.878.205.042,00

Sumber: BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

B. Pendapatan Transfer

Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Bolaang Mongondow selang lima tahun terakhir dinominasi kontribusinya dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi jauh lebih kecil. Adapun pendapatan transfer dari pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lainnya yang dalam perkembangannya dapat diikuti pada Tabel 2.157.





Tabel 2.122
Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024
Kabupaten Bolaang Mongondow

Transfer Pemerintah Pusat	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
DRH	25,914,245,793.00	69,949,000,336.00	84,366,613,960.00	44,240,811,973.00	62,941,773,000.00
Bagi Hasil Pajak	10,756,187,603.00	17,783,639,861.00	21,048,347,547.00	13,951,347,666.00	12,668,866.000
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	15,158,058,190.00	52,185,360,455.00	63,318,266,413.00	30,279,464,317.00	50,272,907.000
BMU	518,152,776,000.00	511,050,953,000.00	507,368,871,479.00	534,329,126,000.00	446,309,467,000.00
DAK	143,077,117,568.00	118,826,112,758.00	187,101,950,861.00	221,574,686,545.00	136,759,999,234.00
DD	14,940,590,000.00	0	5,194,702,000.00	0	
Dana Desa	181,562,493,800.00	160,682,218,000.00	149,500,968,600.00	152,994,785,000.00	156,556,803,000.00
Inentif Pajak	0.00	0.00	0.00	14,914,122,000.00	12,889,356,000.00
Dana Penyesuaian					
JUMLAH	863,647,223,152.00	860,508,284,094.00	943,533,107,020.00	968,023,534,518.00	944,792,802,297.00

Sumber: BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

C. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga penting diketahui perkembangannya. Selang 2020 sampai dengan 2024 ternyata perkembangannya berfluktuasi.

Tabel 2.123
Perkembangan Lain-Lain PAD yang Sah Daerah Tahun 2020-2024
Kabupaten Bolaang Mongondow

Lain-Lain PAD yang SAH	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0.00	750,753,000.00	55,886,400.00	45,000,000.00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	36,379,180.00	3,000,000.00	103,350,001.00	0
Jasa Giro	2,744,145,258.00	2,070,944,226.00	2,837,094,891.00	2,567,532,799.25	1,743,692,913.00
Pendapatan Bunga	786,246,569.00	764,082,184.00	5,917,808.00	136,892,865.00	120,067,861.00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1,431,231,230.00	1,431,256,274.41	2,840,428,402.09	1,176,664,422.00	1,251,012,729.67
Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	0	0	0	0	0
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3,610,206.00	131,697,376.00	221,410,770.00	1,197,897,285.81	629,656,889.49

Lain-Lain PAD yang Sah	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	0	1.296.307,00	88.379.210,75	371.180,00
Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0	0	0	0	0
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Pengembalian	827.319.630,00	124.466.801,00	358.886.804,00	515.583.064,00	637.269.468,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0	0	0	0	0
Pendapatan RLUD	0	0	0	0	0
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	58.001.716,00	0	0	0	0
Pendapatan JKN FKTP	7.511.655.225,00	7.444.443.800,00			
JUNTAH	13.362.109.862,00	12.003.288.801,00	8.316.787.982,06	5.840.986.047,81	4.430.091.021,16

Sumber: BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

2.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah secara keseluruhan Dapat diikuti bahwa pada 2020 keseluruhan belanja masih 790,67 milyar Rupiah dan meningkat dengan rata-rata 8,8 %/tahun menjadi 1.108,22 milyar Rupiah pada 2024..

Setiap komponen belanja tersebut dapat didalami lagi perkembangannya menurut jenisnya secara berturut-turut berikut ini:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi meningkat dari 656,72 milyar Rupiah pada 2020 menjadi 789,445 Milyar Rupiah pada 2024; di mana pernah terjadi penurunan pada 2021.

Tabel 2.124
Perkembangan Belanja Pegawai Daerah dan Komponen-Komponennya 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow

Belanja Pegawai	LRA 2020	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
Belanja Gaji dan Tunjangan	306.135.546.238,00	255.571.658.650,00	267.738.635.868,00	277.937.862.540,00	327.902.308.534,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	47.669.007.661,00	43.355.615.900,00	50.358.406.800,00	58.944.111.185,00	85.525.051.133,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	0	56.523.412.388,00	49.221.899.844,00	57.122.939.388,00	58.844.474.647,00
Lainnya ASN	0	0	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0	9.960.611.024,00	10.704.154.867,00	11.392.321.572,00	11.302.390.904,00



Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		165,648,460.00	72,633,295.00	21,452,048.00	0
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta	2,829,996,000.00	471,564,000.00	440,928,000.00	330,552,000.00	317,616,000.00
KDH/WKDH	0	0	0	0	0
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	792,466,945.00	0	0	0	0
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	39,739,000.00	0	0	0	0
Belanja Tunjangan Khusus Guru	990,580,200.00	0	0	0	0
Belanja Tunjangan Revisi	185,000,000.00	0	0	0	0
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	409,667,400.00				
Belanja Iuran Jaminan Kematian	1,229,002,202.00				
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	10,274,157,141.00				
Belanja Pegawai BOS	0.00	4,109,002,400.00	5,318,365,000.00	3,824,807,000.00	3,595,570,972.00
Jumlah	570,559,162,787.00	376,109,514,822.00	393,035,024,876.00	430,574,045,733.00	467,491,412,190.00

Sumber: BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

B. Belanja Modal

Perkembangan belanja modal beserta jenisnya selang 2020 sampai dengan 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam perkembangannya mengalami fluktuasi terutama terjadi penurunan tajam pada 2024 yang mencapai 84,318 milyar rupiah. Pada 2020 Belanja Modal sekitar 120,21 milyar Rupiah dan terus meningkat sampai 2023 sebesar 165,62 milyar Rupiah. Ada 3 komponen belanja yang mendominasi Belanja Modal yakni: Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; Belanja Modal Gedung dan bangunan; dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

C. Belanja Tidak Terduga

Perkembangan Belanja Tak Terduga selang 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi yang sulit diperkirakan. Misalnya pada tahun 2020 sebesar 13,74 milyar Rupiah kemudian 2021 hanya sebesar 2,86 milyar Rupiah; demikian juga seterusnya. Pada tahun 2020 realisasi yang ditunjukkan berkaitan penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi covid 19 yang melanda dunia, nasional, regional dan daerah Sulawesi Utara; di Manado relative besar dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi.

D. Belanja Transfer

Keberadaan Belanja Transfer di Kabupaten Bolaang Mongondow secara keseluruhan terjadi pertumbuhan yang landai yakni hanya 0,02 %/tahun di mana untuk Belanja Bagi Hasil meningkat signifikan dengan rata-rata 10,30 %/tahun. Adapun Belanja Bantuan Keuangan malahan pertumbuhan rata-rata -0,82%/tahun selang 5 tahun terakhir.

Perkembangan Surplus/Defisit terjadi silih berganti sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 terlihat surplus, sedangkan 2023 dan 2024 terjadi defisit.





2.2.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Perkembangan pembiayaan daerah dapat diikuti dari sisi penerimaan bersumber dari SILPA tahun lalu dan Pinjaman daerah, sedangkan Pengeluaran Pinjaman terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman. Penerimaan pembiayaan mengalami perkembangan yang fluktuatif dan sepanjang tahun 2020-2024 terdapat SILPA yang memberikan konsekuensi menyisakan SILPA Tahun sebelumnya. Pada 2020-2022 sempat dilakukan penyertaan modal.

2.2.4. Neraca Daerah

Neraca Daerah, atau Neraca Pemerintah Daerah, adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini menunjukkan aset (harta), kewajiban (utang), dan ekuitas (kekayaan bersih) daerah pada akhir periode tertentu. Neraca Kabupaten Bolaang Mongondow dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.125
Neraca Audited Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
ASET LANCAR	71.411.553.125,54	112.740.507.755,42	139.179.268.440,19	125.681.307.155,08	78.486.536.198,31
INVESTASI JANGKA PANJANG	47.188.138.956,13	37.839.988.730,00	47.748.195.514,00	47.586.542.868,00	49.783.447.752,00
ASET TETAP	1.295.221.170.422,84	1.347.534.289.978,67	1.464.381.144.811,93	1.573.378.034.403,28	1.392.571.441.234,96
ASET LAINNYA	380.520.358.322,93	284.463.807.073,97	292.936.340.276,97	213.767.677.240,26	176.460.793.032,25
JUMLAH ASET	1.694.341.220.527,43	1.782.378.593.538,06	1.944.224.949.043,09	1.960.413.961.666,62	1.897.263.718.217,52
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.862.342.303,00	9.076.393.970,38	6.440.255.631,09	5.526.333.155,00	3.683.539.905,22
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	3.862.342.303,00	9.076.393.970,38	6.440.255.631,09	5.526.333.155,00	3.683.539.905,22
JUMLAH EKUITAS	1.690.478.878.224,43	1.773.302.199.567,68	1.937.784.693.412,00	1.954.887.228.511,62	1.893.580.178.312,30
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.694.341.220.527,43	1.782.378.593.538,06	1.944.224.949.043,09	1.960.413.961.666,62	1.897.263.718.217,52

Sumber: BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025



Tabel 2.126
Neraca Semester I Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Uraian	Realisasi Per Semester I
(1)	(2)	(3)
1	ASET	2.020.033.634.117,77
	A. Aset Lancar	194.360.945.548,56
	B. Investasi Jangka Panjang	49.745.447.752,00
	C. Aset Tetap	1.599.466.947.784,96
	D. Aset Lainnya	176.460.293.032,25
	JUMLAH ASET	2.020.033.634.117,77
2	KEWAJIBAN	3.683.539.905,22
	A. Kewajiban Jangka Pendek	3.683.539.905,22
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.683.539.905,22
3	EKUITAS	2.016.350.094.212,55
	Ekuitas	2.016.350.094.212,55
	JUMLAH EKUITAS	2.016.350.094.212,55
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.020.033.634.117,77

Sumber: BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

2.2.5. Target Proyeksi Keuangan Daerah

Pembahasan target proyeksi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh tantangan dan peluang serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah. Neraca daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara bertahap, sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah. Penyusunan neraca awal pemerintah daerah biasanya dilakukan secara sentralisasi oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah. Proyeksi keuangan daerah adalah perkiraan atau rencana mengenai pendapatan dan belanja daerah untuk periode waktu tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Proyeksi ini penting untuk perencanaan anggaran, memastikan ketersediaan dana, dan pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintah daerah. Proyeksi pendapatan daerah mencakup perkiraan dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (transfer dari pemerintah pusat), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Proyeksi belanja daerah mencakup belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga, dan Proyeksi pembiayaan mencakup perkiraan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi dan Target keuangan daerah lima tahun kedepan telah mempertimbangkan keadaan yang harus diperhitungkan yakni:

- Proyeksi pendapatan untuk PAD sekitar kenaikan 6 % pertahun yang telah didahului dengan penambahan perkiraan opsen PKB dan BBN-KB pada 2025 sebagaimana diberlakukan regulasi baru Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah. Perhitungan Opsen pada 2025 untuk PKB dan BBN-KB sekitar 21 milyar Rupiah.

- Proyeksi pendapatan transfer maksimal kenaikan 3 %/tahun mengingat kecenderungan selama 5 tahun terakhir serta program budget negara.
- Memperhatikan mandatoris belanja sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD belanja pegawai non tunjangan guru harus maksimal 30 % dan belanja infrastruktur harus minimal 40 %.
- Memperhitungkan dana Cadangan Pemilu untuk dicairkan pada 2029.
- Memperhitungkan penyertaan modal sepanjang lima tahun kedepan.

Tabel 2.127
Proyeksi/ Target APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Uraian	2025
PENDAPATAN DAERAH	1.138.212.923.427,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.484.912.239,00
Pajak Daerah	49.610.937.239,00
Retribusi Daerah	18.473.975.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.800.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	2.600.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.484.912.239,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.055.069.211.188,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.020.278.674.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.789.537.188,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	34.789.537.188,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.055.069.211.188,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.658.800.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.658.800.000,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.658.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.138.212.923.427,00
BELANJA DAERAH	1.177.274.869.201,00
BELANJA OPERASI	830.347.895.819,20
Belanja Pegawai	561.193.502.823,90
Belanja Barang dan Jasa	253.317.989.045,30
Belanja Hibah	15.618.357.500,00
Belanja Bantuan Sosial	218.046.450,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	830.347.895.819,20
BELANJA MODAL	107.424.638.457,80
Belanja Modal Tanah	25.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.652.417.204,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.113.508.577,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.806.229.676,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	825.283.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	107.424.638.457,80
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	236.502.334.924,00
Belanja Bagi Hasil	6.808.491.224,00
Belanja Bantuan Keuangan	229.693.843.700,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	236.502.334.924,00
JUMLAH BELANJA	1.177.274.869.201,00
SURPLUS/DEFISIT	(39.061.945.774,00)



PEMBIAYAAN DAERAH	39.061.945.774,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.061.945.774,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.061.945.774,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.061.945.774,00
PEMBIAYAAN NETTO	39.061.945.774,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Bolaang Mongondow (Data Diolah) Tahun 2025

Tabel 2.128

Proyeksi/ Target APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2026-2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH	1.089.668.753.191	1.126.210.977.890	1.166.217.533.855,21	1.210.321.626.766,09	1.259.435.955.629,71
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.159.157.851	82.946.094.690	91.240.704.159	102.645.792.179	118.042.661.055
Pajak Daerah	63.000.000.000,00	66.780.000.000,00	70.786.800.000,00	75.034.008.000,00	79.536.048.480,00
Retribusi Daerah	16.818.328.880,00	17.827.428.612,80	18.897.074.329,57	20.030.898.789,34	21.232.752.716,70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.968.000.000,00	3.146.080.000,00	3.334.844.800,00	3.534.935.488,00	3.747.031.617,28
Lain-lain PAD yang Sah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.002.509.595.340,00	1.033.264.883.200,20	1.064.976.829.696,21	1.097.675.834.587,09	1.131.393.294.624,71
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	968.509.595.340,00	997.564.883.200,20	1.027.491.829.696,21	1.058.316.584.587,09	1.090.066.082.124,71
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.000.000.000,00	35.700.000.000,00	37.485.000.000,00	39.359.250.000,00	41.327.212.500,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
BELANJA DAERAH	1.088.295.924.220,00	1.124.018.391.813,00	1.160.995.548.825,77	1.199.275.676.864,43	1.238.909.127.438,69
BELANJA OPERASI	632.727.317.339,00	564.427.701.439,74	536.678.917.271,97	553.422.636.965,03	570.722.918.655,29
Belanja Pegawai	413.552.451.203,60	393.406.437.134,55	383.128.531.112,51	395.760.973.365,26	408.840.012.054,77
Belanja Barang dan Jasa	186.298.636.215,09	145.368.074.659,41	130.517.828.235,54	134.012.414.059,80	137.600.470.610,44
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	21.917.486.613,54	17.102.126.430,52	15.355.038.615,95	15.766.166.359,98	16.188.290.660,05
Belanja Bantuan Sosial	10.958.743.306,77	8.551.063.215,26	7.677.519.307,97	7.883.083.179,99	8.094.145.330,03
BELANJA MODAL	213.242.439.113,00	307.691.839.236,78	362.452.611.514,64	373.615.091.310,02	385.148.612.436,86
Belanja Modal Tanah	4.264.848.782,26	6.153.836.784,74	7.249.052.230,29	7.472.301.826,20	7.702.972.248,74

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,324,243,911.30	30,769,183,923.68	36,245,261,151.46	37,361,509,131.00	38,514,861,243.69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53,310,609,778.25	76,922,959,809.20	90,613,152,878.66	93,403,772,827.50	96,287,153,109.21
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127,945,463,467.80	184,615,103,542.07	217,471,566,908.79	224,169,054,786.01	231,089,167,462.11
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,264,848,782.26	6,153,836,784.74	7,249,052,230.29	7,472,301,826.20	7,702,972,248.74
Belanja Modal Aset Lainnya	2,132,424,391.33	3,076,918,392.37	3,624,526,115.15	3,736,150,913.10	3,851,486,124.37
BELANJA TIDAK TERDUGA	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
BELANJA TRANSFER	235,326,167,768.00	244,898,851,136.48	254,864,020,039.17	265,237,948,589.39	276,037,596,346.55
Belanja Bagi Hasil	7,981,832,888.00	8,460,742,861.28	8,968,387,432.96	9,506,490,678.93	10,076,880,119.67
Belanja Bantuan Keuangan	227,344,334,880.00	236,438,108,275.20	245,895,632,606.21	255,731,457,910.46	265,960,716,226.88
Surplus/Defisit	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					28,000,000,000.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
Pencairan Dana Cadangan PEMILU					28,000,000,000.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Dana Cadangan Pemilu	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	
Pembiayaan Netto					
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkeajaan	-	-	-	-	-

Rasio Mandatoris UU No 1 2022	2025	2026	2027	2028	2029
Rasio Belanja Pegawai non-	0,35	0,33	0,30	0,30	0,30
Rasio Belanja Modal	0,25	0,35	0,40	0,40	0,40

Sumber: Badan Keuangan Daerah Bolaang Mongondow (Data Diolah) Tahun 2025

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis Global

Permasalahan dan isu strategis global mencakup isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, hak asasi manusia (HAM), demokrasi dan kebebasan berpendapat, migrasi dan pengungsi, kemiskinan dan ketidaksetaraan, stabilitas keamanan dan konflik, serta pengelolaan ekonomi dan perdagangan internasional. Isu-isu ini saling





terkait dan memerlukan perhatian serta solusi dari komunitas internasional untuk menjaga perdamaian, kesejahteraan, dan keberlanjutan planet ini.

1. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.
Perubahan iklim mengancam produksi pangan, menyebabkan kenaikan permukaan air laut, serta meningkatkan risiko bencana alam.
2. Hak Asasi Manusia (HAM)
Ruanglingkup HAM dalam isu global melihat pada isu gender seta kekerasan dan diskriminasi.
3. Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat.
Perlindungan Kebebasan sering menjadi sorotan dunia internasional dalam konteks politik dan hak-hak warga negara.
4. Migrasi dan Pengungsi
Terkait Dampak Sosial dan Politik merupakan Masalah pengungsi dan migrasi menjadi isu global yang memerlukan penanganan dan solidaritas internasional
5. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan
Ketidaksetaraan Global berupa Isu kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di berbagai belahan dunia masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan global.

Beberapa resiko global jangka menengah yang berperan penting sebagai fondasi awal mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu : cuaca ekstrim, perubahan kritikal terhadap ekosistem, Biodiversity loss dan gangguan ekosistem, krisis sumberdaya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak buruk teknologi AI. Involuntary migration, cyber insecurity, polarisasi sosial dan polusi.

Isu strategis pembangunan jangka menengah :

1. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia.
2. Sinkronisasi kebijakan makro dan sectoral
3. Penerapan standar sustainability yang tinggi di level Global.
4. Transisi energi untuk mendorong pemerataan.
5. Aging population negara maju.

2.3.2 Permasalahan dan Isu Strategis Nasional.

Kinerja paruh waktu RPJMN Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa perlu upaya strategis pada kinerja yang cenderung stagnan dan menurun, diantaranya :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.





Kinerja pembangunan yang perlu ditingkatkan berdasarkan persepsi masyarakat adalah :

- a. Penurunan kemiskinan, bansos, subsidi, sistem pelayanan terpadu.
- b. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
- c. Kesejahteraan di desa, daerah tertinggal, transmigrasi dan terluar.
- d. Kemudahan akses pangan.
- e. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan.
- f. Perlindungan anak dan perempuan.
- g. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar.
- h. Efisiensi pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan.
- i. Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- j. Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim.
- k. Penguatan sistem anti korupsi dan penegakan hukum.
- l. Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pelayanan publik.

Pemetaan faktor pendukung pencapaian pembangunan sesuai evaluasi kinerja pembangunan daerah yang masih sangat kurang adalah:

- Dimensi fisik dan struktur ekonomi terutama pada realisasi dan pertumbuhan PMA serta PMDN.
- Dimensi Sosio Demografi terutama pada produktivitas tenaga kerja.
- Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola terutama pada rasio kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian visi Presiden terpilih periode 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung semangat kolaboratif seluruh komponen bangsa untuk memperkuat transformasi pembangunan menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional yang menjadi agenda utama pembangunan lima tahunan dan sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Adapun kedelapan Prioritas Nasional tersebut Adalah :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan





7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sejalan dengan arah tersebut, pemerintah menetapkan isu strategis nasional sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas:

Masih rendahnya kualitas SDM tercermin dari capaian pendidikan yang tertinggal dan kebutuhan tenaga kerja yang belum sesuai dengan lapangan kerja

Peningkatan Ekonomi:

Adanya tantangan rendahnya produktivitas, perlunya diversifikasi ekonomi, dan kebutuhan penguatan UMKM serta kemandirian ekonomi

Pengentasan Kemiskinan:

Tantangan belum tuntasnya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Meskipun terjadi perbaikan dalam indikator sosial nasional, kemiskinan dan ketimpangan tetap menjadi tantangan. Target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0,5% menuntut intervensi daerah yang lebih terarah dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.

Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan serta ketahanan pangan energi dan air:

Krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, menjadi isu serius yang perlu penanganan khusus, termasuk pengelolaan sampah. Perlu mengembangkan strategi pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan, termasuk inovasi dalam pertanian, energi alternatif, dan pengelolaan air terpadu.

Peningkatan Infrastruktur:

Perlu optimalisasi infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi untuk mendukung konektivitas dan pemerataan ekonomi.

Tata Kelola dan Layanan Publik:

Perlu penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik menuju good government. Daerah dituntut untuk meningkatkan integritas birokrasi, mempercepat reformasi pelayanan publik, serta mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Geopolitik dan Geoekonomi:

Mengelola risiko dan dampak perubahan geopolitik global terhadap tatanan dan kehidupan di Indonesia.

2.3.3 Permasalahan dan Isu Strategis Regional Sulawesi

Isu Strategis kewilayahan khususnya untuk wilayah Sulawesi :

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
2. Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja diantaranya disebabkan karena mismatch antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.
3. Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang angka kemiskinan.





4. Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur antar daerah.
5. Masih rendahnya akses dan mutu bidang pendidikan dan kesehatan karena sarana dan prasarana yang belum memadai.
6. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam.

Isu Strategis Provinsi Sulawesi Utara.

Isu strategis pembangunan Sulawesi Utara Lima Tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
2. Peningkatan Kualitas SDM.
3. Pembangunan sektor kebudayaan yang masih rendah.
4. Optimalisasi kinerja sektor pariwisata yang belum optimal.
5. Peningkatan kinerja industri pengolahan yang juga belum optimal.
6. Peningkatan realisasi investasi.
7. Peningkatan nilai komoditas unggulan daerah.
8. Peningkatan konektivitas.
9. Pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar.
10. Menjaga ketahanan pangan, energi, dan air.
11. Tata kelola pemerintahan.
12. Transparansi dan akuntabilitas kinerja.

2.3.4. Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow

Secara umum isue kabupaten Bolaang Mongondow sama dengan isue nasional, tetapi ada hal-hal spesifik sesuai dengan kondisi daerah seperti :

- Pembangunan SMK yang sesuai dengan potensi SDA lokal serta pembangunan perguruan tinggi negeri vokasi
- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik tingkat SD & SMP serta penyebarannya yang merata
- Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat berdasarkan wawasan kebangsaan dan tingkat toleransi antar penduduk di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terutama di wilayah Dumoga Bersatu.
- Pembangunan/rehabilitasi kembali artefak2 sejarah swapraja Bolaang Mongondow dan perbanyak literasi swapraja Bolaang Mongondow sebagai identitas daerah untuk penguatan kebudayaan nasional
- Mewujudkan Provinsi Bolaang Mongondow Raya

Hal tersebut diatas diharapkan bisa terwujud seiring dengan upaya pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan Pembangunan daerah. Adapun isu strategis Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi, pelayanan dasar serta konektivitas wilayah
3. Lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta ketahanan pangan energi dan air
4. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dan peningkatan ekonomi
5. Tata kelola Pemerintahan dan transformasi pelayanan public





6. Masyarakat yang harmonis toleran dan berbudaya.

2.3.5. Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow

Tabel 2.129
Permasalahan Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Permasalahan	TPB
1.	Belum terpenuhinya standar pelayanan kesehatan dan penataan distribusi SDM Kesehatan belum sesuai standar.	TPB 3
2.	Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah	TPB 4
3.	Masih rendahnya pengembangan kebudayaan daerah, terutama situs-situs sejarah	TPB 16
4.	Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK dalam keberlanjutan pembangunan	TPB 11
5.	Perlunya penguatan struktur ekonomi di sisi sektor industri dan pariwisata	TPB 9
6.	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ekonomi hijau masih perlu dioptimalkan	TPB 11 dan TPB 13
7.	Peningkatan kualitas ketenagakerjaan terutama di masa digitalisasi	TPB 8
8.	Belum optimalnya peran koperasi, UMKM, kewirausahaan dan ekonomi kreatif	TPB 8
9.	Masih kurangnya investasi yang ramah lingkungan	TPB 11
10.	Cukup tinggi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	TPB 1 dan TPB 10
11.	Belum meratanya infrastruktur ekonomi, penunjang sosial dan digital	TPB 9
12.	Belum efektifnya tata kelola pemerintahan	TPB 16
13.	Ketegasan pembangunan sesuai kepatuhan tata ruang masih kurang	TPB 11
14.	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan menopang pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah.	TPB 16 dan TPB 17

Tabel 2.130
Isu Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Isu Strategis	TPB
I.	Aspek Transformasi Sosial	Pilar Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta kesetaraan gender. Penguatan jaminan sosial terintegrasi 	
II.	Aspek Transformasi Ekonomi	Pilar Ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> Iklm investasi kondusif dan pariwisata berkelanjutan. 	



	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pertanian, perikanan dan industri pengolahan. • Pemerataan infrastruktur ekonomi, sosial dan digital • Penguatan pembangunan dan kesesuaian tata ruang. • Pemberdayaan koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif 	
III	Aspek Transformasi Tata Kelola	Pilar Hukum dan Tata Kelola
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah • Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak. 	
IV	Aspek Supremasi Hukum & Stabilitas Daerah	Pilar Hukum dan Tata Kelola
	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi yang fleksibel, produktif dan adaptif 	
V	Aspek Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi	Pilar Lingkungan Hidup
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran kebudayaan dan kearifan lokal. • Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat • Penguatan <i>green economy</i> dan resiliensi perubahan iklim dan bencana alam • Ketahanan energi air dan energi terbarukan • Pola pembangunan dan kesesuaian tata ruang 	

2.3.6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2025-2029

Proses Penjaringan dan identifikasi isu strategis lingkungan hidup merupakan langkah awal dalam merumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebagai bagian dari proses ini, pelaksanaan konsultasi publik penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dilaksanakan pada 15 Mei 2025 di Aula Rumah Makan Arsila Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, akademisi, yayasan nir laba, dan lembaga swadaya masyarakat adan lain-lain. Setelah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tim penyusun KLHS RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow bersama Tenaga Ahli melakukan pertemuan pembahasan sinkronisasi muatan kebijakan rencana program yang berpengaruh pada lingkungan hidup di Universitas Samratulangi Manado, dalam forum





ini, peserta memberikan masukan dan membahas berbagai isu yang telah di jaring dan di bagi dalam 4 aspek isu strategis yaitu:

1. Aspek Lingkungan
 - Permasalahan sampah, air limbah dan sanitasi
 - Kegiatan pertambangan
 - Tingginya perambahan hutan
 - Daya dukung air bersih dan pangan
 - Perubahan iklim (anomali cuaca)
 - Alih fungsi lahan
2. Aspek Sosial
 - Jumlah Rumah Tangga yang miskin
 - Stunting
 - Pengangguran, Terbatasnya lapangan kerja
 - Masalah sosial Miras, judi dan gangguan kamtibmas
3. Aspek Ekonomi
 - Rendahnya produktivitas Komiditi unggulan daerah
 - Masih rendahnya daya saing UMKM dan IKM
 - Rendahnya produktivitas tanaman pangan.
 - Keberlanjutan ekonomi lokal
4. Aspek Kelembagaan, Hukum dan Tata Kelola
 - Masalah kepemilikan lahan
 - Rendahnya peran serta masyarakat
 - Kesadaran hukum
 - Kurangnya inovasi pelayanan pulik
 - Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
 - Lemahnya pelaksanaan peneraapan perda

Tabel 2.131
Perumusan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	REGIONAL	NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Luas daerah kabupaten bolaang mongondow yang luas wilayah 4.083,94 KM2 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.</p> <p>2. Sektor transportasi adanya Bandara Udara Perintis dan Terminal Tipe A di Kabupaten Bolaang Mongondow</p> <p>3. Potensi perikanan dan kolautan,</p>	<p>1. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang layak</p> <p>2. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.</p> <p>3. Belum optimalnya peningkatan SDM cerdas, sehat, dan produktif</p> <p>4. Adanya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi</p> <p>5. Belum optimalnya</p>	<p>1. Aspek Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan sampah, air limbah dan sanitasi - Kegiatan pertambangan - Tingginya perambahan hutan - Daya dukung air bersih dan pangan - Perubahan iklim (anomali cuaca) - Alih fungsi lahan <p>2. Aspek Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Ramah Tangga yang miskin - Stunting - Pengangguran, 	<p>1.Sustainable Development Goals (SDGs)</p> <p>2. Ancaman krisis ekonomi global</p> <p>3.Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)</p> <p>4. Tantangan Blue Economy (Ekonomi Biru Berkelanjutan)</p> <p>5. Inovasi Teknologi dan Kecerdasan Buatan</p>	<p>1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja</p> <p>2. Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja diantaranya</p>	<p>1. Sumber Daya Manusia Berkualitas.</p> <p>2. Peningkatan ekonomi</p> <p>3. Pengentasan kemiskinan</p> <p>4. Lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta ketahanan pangan, energi dan air</p> <p>5. Peningkatan infrastruktur</p> <p>6. Tata kelola dan Layanan Publik</p> <p>7. Geopolitik dan geoekonomi</p>	<p>1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p> <p>2. Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi, pelayanan dasar serta konektivitas wilayah</p> <p>3. Lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta ketahanan pangan energi dan air</p> <p>4. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dan peningkatan ekonomi</p> <p>5. Tata kelola Pemerintahan dan transformasi pelayanan public</p> <p>6. Masyarakat yang harmonis toleran dan berbudaya.</p>

<p>dengan panjang garis pantai ±121 Km tersebar meliputi 5 Kecamatan dari Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Lolak Dan Kecamatan Sangtombolang</p> <p>4. Potensi pertanian dan perkebunan, dengan 3.643 hektar dan lahan seluas 36.825 hektar, dengan di dukung oleh jaringan irigasi terstruktur yang airnya bersumber dari Bendungan Toraut, Bendungan Kosingolan di wilayah Dumoga Raya dan Waduk Bendungan Lolak serta sumber</p>	<p>penyediaan infrastruktur pembangunan yang berkualitas</p>	<p>Terbatasnya lapangan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masalah sosial Miras, judi dan gangguan kamtibmas <p>3. Aspek Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya produktivitas Komiditi unggulan daerah - Masih rendahnya daya saing UMKM dan IKM - Rendahnya produktivitas tanaman pango - Keberlanjutan ekonomi lokal <p>4. Aspek Kelembagaan, Hukum dan Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masalah kepemilikan lahan - Rendahnya peran serta masyarakat - Kesadaran hukum - Kurangnya inovasi pelayanan publik 		<p>disebabkan karena mismatch antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.</p> <p>3. Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang angka kemiskinan.</p> <p>4. Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur antar daerah.</p> <p>5. Masih rendahnya akses</p>		
--	--	---	--	---	--	--

<p>pengairan lain.</p> <p>5. Potensi energi terbarukan, seperti energi laut atau biomassa dari limbah pertanian dan peternakan.</p> <p>6. Adanya nilai kearifan lokal yang tumbuh dimasyarakat Bolaang Mongondow sebagai nasehat leluhur untuk untuk selalu menjaga persatuan "Mototomplaan, Mototabian, Bo Mototanoban"</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan aset daerah - Lemahnya pelaksanaan peneraapan perda 		<p>dan mutu bidang pendidikan dan kesehatan karena sarana dan prasarana yang belum memadai.</p> <p>6. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam,</p>		
--	--	---	--	--	--	--



BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2024 sehingga sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN 2025-2029, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) selanjutnya diintegrasikan dengan visi misi Presiden.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan Pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. **Asta Cita** memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

8 (delapan) Prioritas Nasional ditunjukkan melalui infografis sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1

- Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Prioritas Nasional 2

- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Prioritas Nasional 3

- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Prioritas Nasional 4

- Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Prioritas Nasional 5

- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Prioritas Nasional 6

- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Prioritas Nasional 7

- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Prioritas Nasional 8

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dalam rangka mendukung pencapaian visi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta Cita menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah, harus selaras dengan prioritas nasional tersebut. Dengan demikian, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi upaya kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu **"Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"** dilakukan melalui 8 Misi yang terdiri atas :

1. Mencegah dan Memberantas KKN serta Narkoba.
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang adil, stabilitas nasional yang kondusif, dan generasi bangsa yang berintegritas serta tangguh secara moral;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Misi ini fokus membentuk sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan berkarakter kuat melalui peningkatan kualitas layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat kompetensi tenaga profesional, serta mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu menghadapi tantangan masa depan secara mandiri dan berdaya saing tinggi
3. Membangun Perekonomian Daerah.
Misi ini bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam, kewirausahaan lokal dan konektivitas antar wilayah. Selain itu, misi ini mendorong transisi menuju ekonomi hijau dengan penerapan teknologi ramah lingkungan, penguatan ekonomi digital dan UMKM, serta menjaga stabilitas ekonomi guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah.
4. Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional.
Misi ini mendorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan ramah lingkungan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, efisiensi ekonomi dan inovasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi rendah karbon.
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Energi dan Air Secara Merata dan Berkelanjutan.
Misi ini menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam yang terjangkau dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan inovasi teknologi, transisi energi terbarukan, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat guna menghadapi tantangan perubahan iklim, menjaga ketahanan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan.
6. Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Nyaman Dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Yang Berkearifan Lokal.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan harmoni dan ketertiban sosial melalui penguatan keamanan wilayah, khususnya di daerah perbatasan, dengan pendekatan terpadu yang mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta pelestarian budaya lokal guna menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik secara berkelanjutan

7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Misi ini mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui profesionalisme ASN, penerapan *e-government*, serta peningkatan pelayanan publik. Selain itu, reformasi birokrasi ini juga bertujuan mendorong sinergitas antar pemerintah daerah guna mempercepat pencapaian target pembangunan secara terintegrasi di semua tingkatan pemerintahan.

8. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Transparan.

Misi bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara optimal, melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini, dengan menganalisa permasalahan dan peluang serta tantangan yang akan dihadapi dalam 5 Tahun mendatang. Visi utamanya adalah **BOLMONG JUARA** yang merupakan akronim dari **BOLAANG MONGONDOW MAJU DAN SEJAHTERA**. Dibalik kata "BOLMONG JUARA" tersimpan semua niatan dan semangat agar siapa saja yang sering mengucapkannya dan meneriakkannya, maka akan tertanam dalam alam bawah sadar sehingga menjadi energi baru sebagai daya dorong untuk menjadi "juara" sebagai ruh dan etos kerja. Visi "BOLMONG JUARA" adalah membangun Kabupaten Bolaang Mongondow yang Maju dan Sejahtera, dengan tiga pilar pembangunan yaitu inovasi, kolaborasi dan desentralisasi.

Visi Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera mengandung makna sebagai berikut:

Maju = menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow yang berdaya saing tinggi, unggul, modern, tangguh, inovatif, kreatif, adaptif dan berkeadilan, di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selain itu, membangun Masyarakat Bolaang Mongondow yang Maju adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi meliputi bidang "kesehatan, bidang pendidikan dan sarana

prasarana pemerintahan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

Sejahtera = menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow yang Sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar meliputi sandang, pangan dan papan, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merumuskan lima misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Mengembangkan sumber daya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik yang inklusif

2. Misi Kedua

Meningkatkan Infrastruktur Daerah Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan.

3. Misi Ketiga

Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efesien, Bersih dan Transparan.

4. Misi Keempat

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Membangun Perekonomian yang Kreatif, Inovatif Berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal.

5. Misi Kelima

Menjadikan Kehidupan Masyarakat lebih Harmonis dan Toleran

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perwujudan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

3.2.1. Tujuan

Dengan mengacu pada Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan Tahun 2025-



2029, maka terdapat 5 tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya SDM yang cerdas, sehat, dan berkarakter
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, berdimensi kewilayahan serta ramah lingkungan;
3. Terwujudnya pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
5. Terwujudnya stabilitas politik, pemerintahan, sosial, budaya yang toleran serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.

3.2.2. Sasaran

Kelima tujuan tersebut, kemudian dirumuskan sepuluh sasaran pembangunan daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD, sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
4. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup,
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan
6. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
7. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan
8. Menurunnya angka kemiskinan
9. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan inovatif
10. Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, toleran, terkendali, tertib dan maju

Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan dalam Tabel Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN		
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)		
BOLAANG MONGONDOW MAJU DAN SEJAHTERA Misi I. Mengembangkan sumber daya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik yang inklusif	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,8	72,4	73,4	74	74,4	74,9			
			Skor Literasi/Numerasi SD, SMP (Angka)	78,70	78,90	79,10	79,30	79,50	80,00			
			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Dibawah 15 Tahun (Angka)	8,48	8,58	8,68	8,78	9,00	9,10			
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,65	11,75	11,85	11,95	12,05	12,15			
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Literasi Digital (Angka)	74,00	74,50	75,00	75,50	75,90	75,90			
			Usia Harapan Hidup (DHH) ((tahun))	71,20	72,10	73,00	73,90	74,80	74,80			
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	18,80	16,00	14,50	12,00	10,00	10,00			
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) [(%)]	98	98	98	99	100	100			
			Misi II. Meningkatkan Infrastruktur Daerah Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, berdimensi	Indeks Infrastruktur (Angka)	69,00	70,00	70,50	71,00	71,40	71,90	
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap							
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap	80,45	84,11	89,88	94,30	97,60	97,60				



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENJANG DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	kewilayahan serta ramah lingkungan	Infrastruktur berkualitas	Minum Perpipaan ((%))							
			Indeks Konektivitas (%)	66.63	68.20	70.28	71.60	73.25	73.25	
			Indeks Resiko Bencana (IRB) (Angka)	129.00	129.00	128.00	128.00	127.00	127.00	
		Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	58	61.25	64.50	67.75	70	70	
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	95.47	95.49	95.50	95.52	95.54	95.54	
			Persentase Tutupan Lahan (Persentase)	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	
			Rumah Tangga dengan Akses-Sanitasi Aman ((%))	40	45	50	55	60	60	
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)	36.00	37.67	39.34	40.01	42.68	42.68	
Misi III. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih Dan Transparan	Terwujudnya pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	72.00	72.5	73.2	74.00	75.00	76.30	
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4.31	4.33	4.36	4.40	4.45	4.51	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	38.50	42.50	46.50	50.50	54.50	55.00	
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,73	2,74	2,75	2,76	2,78	2,79		



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Monitoring Center for Prevention (MCP-KPK) (Angka)	80	83	86	90	93	95	
			Nilai Sakip (Angka)	8	8	8	8	8	88	
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan ()	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Maturitas SPHP Terintegrasi (Angka)	3,085	3,095	3,2	3,25	3,3	3,3	
Misi IV. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Memhangun Perekonomian Yang Kreatif, Dan Inovatif Berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7-6,0	6,0 - 7,1	6,3- 6,7	6,7 - 7,1	6,9-7,5	7,6 - 8,00	
		Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	40,49	41,11	43,81	42,50	43,00	43,20	
		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp juta))	44,76	48,50	50,05	52,34	54,50	56,00		
		Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	3,85	3,88	3,91	3,94	3,97	3,97		
	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	84,04	84,06	84,08	84,10	84,12	84,14		
	Menurunnya angka kemiskinan		Tingkat Kemiskinan ((%))	7,0 - 6,6	6,8 - 6,4	6,5 - 6,1	6,0 - 5,6	5,5 - 5,1	5,0 - 4,6	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,49	4,49 - 4,09	4,29 - 3,89	4,10 - 3,70	3,90 - 3,50	3,80 - 3,40	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	35	40	45	50	55	55	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) [Nilai]	0.317	0.311	0.307	0.304	0.300	0.300	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan inovatif	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3.24	3.27	3.30	3.34	3.37	3.39	
			Persentase Desa Mandiri (%)	28	40	50	60	67.5	75	
Misi V. Menjadikan Kehidupan Masyarakat Lebih Harmonis dan Toleran	Terwujudnya stabilitas politik, pemerintahan, sosial, budaya, toleran serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) [(%)]	84.10	84.10	84.10	84.10	84.10	84.10	
		Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, toleran, terkendali, tertib dan maju	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga* [(%)]	61.03	62	62.30	62.70	63	63.30	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) [(%)]	53.3	53.9	54.3	54.9	55.3	55.3	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	89.12	89.72	90.3	90.9	91.5	91.5	
			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.88	0.84	0.80	0.76	0.72	0.72	
			Capaian Administrasi Kependudukan dan Sipil (%)	74,85	77,41	80,42	85,43	88,44	90,80	

3.3. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.3.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan hal yang penting sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu- isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi

konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT. Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3.1
Analisis SWOT

INTERNAL	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola Kepemimpinan yang Visioner; 2. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan produsen produk-produk primer di Provinsi Sulawesi Utara, yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya Beras, Palawija dan hasil perikanan; 3. Kekayaan sumberdaya alam dan potensi wisata yang beragam; 4. Posisi Strategis jalur trans Sulawesi , Bitung – Manado-Bolmong -gorontalo; 5. Heterogenitas budaya masyarakat; 6. Dukungan Politik Mayoritas; 7. Kekuatan Birokrasi yang solid; 8. Meningkatkan peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Tambah Produk-Produk Pertanian Rendah; 2. Kualitas SDM yang Masih Rendah 3. Pembangunan yang Masih Belum Merata 4. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran 5. Masih Lemahnya Infrastruktur 6. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah 7. Belum efektif dan efisiennya bisnis proses birokrasi pelayanan publik 8. Lemahnya koordinasi lintas sektor aparatur 9. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah 10. Belum optimalnya ketersediaan sanitasi dan air bersih 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Belum optimalnya layanan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. 13. Belum optimalnya layanan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 14. Terlambatnya akses pelayanan sosial dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 15. Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata 16. Rendahnya kemampuan dan kapasitas pelaku usaha 17. Belum terbangunnya optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan 18. Masih rendahnya keberpihakan pembangunan terhadap anak

A



		<p>11. Belum optimalnya penerapan manajemen moderen berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan</p>	
--	--	---	--



EKSTERNAL

OPPORTUNITY (PELUANG)	THREAT (ANCAMAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi; 2. Banyaknya program prioritas pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah-daerah potensial yang berorientasi pada hasil; 3. Adanya Bandar udara, Pelabuhan laut, Terminal Bus Tipe A, Kawasan Industri Mongondow dan Waduk lolak 4. Tingginya arus Manusia, Barang, dan Arus Modal antara Bitung, Manado, Bolaang Mongondow Raya dan Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi, balita stunting dan gizi buruk; 2. Struktur pelaku usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas ; 3. Jaringan kemitraan pariwisata yang masih kurang dan belum terintegrasi di regional Bolaang Mongondow Raya; 4. Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB; 5. Belum kuatnya karakter dan fondasi perekonomian perdesaan; 6. Keterbukaan dan Transpransi Informasi Publik; 7. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; 8. Investasi belum mampu menjawab kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat; 9. Kuatnya Pengaruh Kekuatan Ekonomi Pasar Global dan Persaingan Ekonomi.

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Bolaang Mongondow. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang "membumi" dan benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

Gambar 3.2
Kuadran Strategi Metode SWOT



KETERANGAN:

- S - O : Menggunakan kekuatan (S=Strenght) untuk meraih peluang (O=Opportunity)
- W - O : Menekan kelemahan (W=Weakness) untuk meraih peluang (O=Opportunity)
- S - T : Menggunakan kekuatan (S=Strenght) untuk mengatasi tantangan (T=Threat)
- W - T : Menekan kelemahan (W=Weakness) untuk mengatasi tantangan (T=Threat)

Strategi S-O ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategi). Strategi ini memberikan penekanan pada metode Pemerintah Daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Kekuatan dominan yang dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kepemimpinan visioner dan birokrasi yang solid yang menjadi kekuatan untuk melakukan inovasi dalam pembangunan serta pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah dalam segala aktivitas pemerintahan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Oleh sebab itu strategi yang di tetapkan adalah **Mengembangkan sistem Pemerintahan yang integratif dan Inovatif serta melakukan Reformasi Birokrasi di semua level Pemerintahan;**

Inovasi harus dimaknai, tidak cukup hanya dipikirkan, tetapi dilakukan bahkan dilombakan. Inovasi baru benar-benar akan menjadi inovasi yang baik jika dikembangkan, disebarluaskan, dan dibiasakan menjadi tradisi dalam organisasi. Inovasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban melainkan kebutuhan bagi setiap instansi dan setiap orang. Inovasi dalam artian sebuah inisiatif perubahan yang mengandung unsur kebaruan (novelty), membawa dampak positif bagi organisasi, mampu mengurangi masalah yang dihadapi dan tidak melanggar tata nilai atau aturan tertentu. Institusionalisasi Inovasi diarahkan pada seluruh pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi, baik pemerintah, swasta dan masyarakat guna mengangkat nama Bolaang Mongondow dalam konstalasi regional Sulawesi Utara, Nasional dan bahkan Internasional.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pemerintah Daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Reformasi Birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi Birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah dengan memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini

adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Melalui strategi **Mengembangkan sistem Pemerintahan yang integratif dan Inovatif serta melakukan Reformasi Birokrasi di semua level Pemerintahan.** diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Strategi S-O

A	Sasaran		Meningkatnya tata kelola pemerintahan
	Indikator	1	Indeks Pelayanan Publik (angka)
		2	Indeks Inovasi Daerah (angka 0-100)
		3	Indeks Reformasi Hukum (skor 0-100)
		4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (angka 0-5)
		5	Indeks Efisiensi Pencegahan Korupsi (angka 0-5)
		6	Nilai SAKIP
		7	Opini BPK

Dalam mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut, maka dengan strategi 'Mengembangkan sistem Pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam Proses Bisnis di semua level Pemerintahan' maka implementasinya yaitu penerapan Manajemen pembangunan modern dimana Manajemen pembangunan merupakan suatu sistem pembangunan yang dimulai dari sistem pengelolaan data dan informasi pendukung kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian pembangunan, sistem evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan. Manajemen pembangunan modern menambahkan sistem teknologi informatika sebagai sarana mempermudah operasi sistem pembangunan. Dimana sistem manajemen informasi tersebut terintegrasi dalam command center yang di tunjang oleh single emergency number /call centre guna mempercepat pelayanan kepada warga Bolaang Mongondow, utamanya terkait masalah kedaruratan dan juga layanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai mobilization strategy, dimana dengan

menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Berdasarkan identifikasi faktor diatas, Kabupaten Bolaang Mongondow masih memiliki banyak tantangan/ancaman pembangunan. Sementara kekuatan utama yang dimiliki yaitu Pola Kepemimpinan yang Visioner, Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan produsen produk-produk primer di Provinsi Sulawesi Utara yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya beras, palawija dan hasil perikanan, Kekayaan sumberdaya alam dan potensi wisata yang beragam; dan Posisi Strategis jalur trans Sulawesi, Bitung – Manado-Bolmong - Provinsi Gorontalo. Pada Kondisi dibutuhkan strategi yang mampu merespon kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat, yang berorientasi pada kinerja hasil pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah **'Mengembangkan program kewirausahaan, bantuan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), serta peningkatan kapasitas sektor-sektor unggulan daerah'** Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu pertumbuhan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, terdistribusi di berbagai wilayah dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan kini adalah model pembangunan eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian; sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang.

Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang

bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Melalui strategi 'Mengembangkan program kewirausahaan, bantuan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), serta peningkatan kapasitas sektor-sektor unggulan daerah', diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

Tabel 3.3

Sasaran dan Indikator Strategi S-T

A	Sasaran		Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
	Indikator	1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)
		2	PDRB Per Kapita (Rp juta)
		3	Indeks Ketahanan Pangan (angka)
B	Sasaran		Menurunnya angka kemiskinan
	Indikator	1	Tingkat kemiskinan (%)
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan (%)
		4	Indeks Gini
C	Sasaran		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan inovatif
	Indikator	1	Indeks Daya Saing Daerah (angka 0-100)
		2	Persentase Desa Mandiri (%)

Program diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal, dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam).

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat melalui UMKM. Investasi pemerintah dan swasta di Bolaang Mongondow, peningkatan surplus perdagangan daerah, serta pembangunan infrastruktur merupakan pilar meningkatkan makro ekonomi Bolaang Mongondow. Namun demikian, upaya ini dapat melebarkan kesenjangan kepada masyarakat menengah kebawah yang mengandalkan unit usaha ditingkat mikro, kecil dan menengah yang notabene masyarakat sebagai pelaku ekonomi sesungguhnya. Oleh karenanya perlu afirmasi yang seimbang kepada seluruh pelaku ekonomi. UMKM didesain sebagai sabuk pengaman perekonomian arus bawah, untuk menjadi pilar

pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menciptakan integrated farming (Sistem pertanian yang mengintegrasikan beberapa sektor (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan) yang dikelola secara terpadu dan berorientasi ekologis, sehingga diperoleh peningkatan nilai ekonomi, tingkat efisiensi dan produktifitas yang tinggi) dalam wadah ekonomi kreatif, yang mampu mengintegrasikan pertanian dan UMKM. Termasuk didalamnya pengembangan wirausaha baru, standarisasi, sertifikasi, pengendalian, pengawasan produk dan peningkatan akses permodalan, merupakan bentuk nyata dari strategi ini.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat investment dan yang bersifat divestment. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Bolaang Mongondow bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa competitive atau memiliki daya saing. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah **Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas, serta program-program bantuan sosial.**

Kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow 10 - 20 tahun ke depan ditentukan oleh generasi muda saat ini, saat ini generasi muda adalah generasi pemangku utama menuju Bolaang Mongondow Hebat. Kalau kita melihat generasi saat ini tumbuh dengan begitu saja tidak terasa mereka sudah besar, bahkan anggaran pendidikan begitu besar kurang lebih 20% APBD diperuntukan untuk pendidikan, tetapi kita bisa melihat kondisi daerah saat ini secara keseluruhan perkembangan kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow secara ekonomi pertumbuhan tidak signifikan pengangguran masih cukup tinggi.

Kenapa itu bisa terjadi Itu bisa terjadi karena daerah kita tidak punya blueprint (Cetak biru) yang jelas Perencanaan jangka panjang tidak dijalankan dengan baik karena adanya kepentingan-kepentingan politik yang kadang tidak mempertimbangkan proses yang sedang berlangsung. Pola pendidikan yang hanya mengandalkan kurikulum yang sudah dibakukan kadang tidak sampai kepada substansi pendidikan itu sendiri, sehingga wajar kalau kemudian para pendidik atau guru bagaikan robot yang hanya mendidik berdasarkan kurikulum semata, tetapi nilai nilai dari pendidikan itu sendiri tidak sampai kepada siswa. Nilai-nilai pendidikan yang dapat membentuk karakter mereka , nilai-nilai pendidikan yang dapat menciptakan lingkungan baik untuk pendidikan, dapat membuat anak didik menjadi survive menjalan hidup, punya tanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri, punya kepedulian atau kepekaan positif terhadap lingkungan, terhadap orang tua dan tanggung jawab terhadap Tuhannya.

Oleh sebab itu membangun Generasi Hebat perlu penguatan pendidikan karakter sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter . Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa,



olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Melalui strategi **Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas, serta program-program bantuan sosial**; diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

Tabel 3.4
Sasaran dan Indikator Strategi W-O

A	Sasaran		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak sekolah
	Indikator	1	Skor Literasi/Numerasi SD, SMP (skor 0-100)
		2	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
		3	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)
		4	Indeks Literasi Digital (skor 0-100)
B	Sasaran		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Indikator	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		2	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (angka)
		3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%)
		4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam Membangun Generasi Juara antara lain, pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu daerah dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program- program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Terakhir, adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat



terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Membangun Generasi Juara melalui jaminan layanan dasar di bidang Kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Termasuk pemerintah daerah memegang peranan penting dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat mulai dari sebelum lahir hingga lanjut usia.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai damage control, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Strategi yang ditetapkan dalam kondisi ini diantaranya **Membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan raya, sistem irigasi, air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat.**

Percepatan pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah dan penurunan kesenjangan (disparitas), serta infrastruktur strategis penunjang perekonomian. Mengingat cakupan wilayah Bolaang Mongondow yang cukup luas, penetapan prioritas dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi penting. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Melalui strategi "**Membangun dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat.**" diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sasaran dan Indikator Strategi W-T

A	Sasaran		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
	Indikator	1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
		2	Indeks Risiko Bencana (angka)
B	Sasaran		Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Indikator	1	Indeks Kualitas Air (%)
		2	Indeks Kualitas Udara (angka mutlak)
		3	Indeks Tutupan Lahan (%)
		4	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)
		5	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)
		6	Indeks Ekonomi Hijau (skor 0-100)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Oleh sebab itu, Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (civil society).

Tabel 3.6

Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
TEMA PEMBANGUNAN				
<p>Memantapkan fondasi pembangunan menuju Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera <i>Prioritas Pembangunan 2026</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM; 2. Peningkatan layanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, kualitas layanan kepesertaan perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kualitas SDM; 3. Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar 	<p>Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar berkualitas <i>Prioritas Pembangunan 2027</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun perekonomian daerah berbasis inklusi, inovasi, serta keberlanjutan , tanggap bencana dan perubahan iklim berketahanan energi air dan pangan; 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan inklusif, berintegritas bebas KKN dan Narkoba, Pendidikan berkualitas serta Kesehatan dan budaya berkelanjutan ; 	<p>Mengerakkan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan inovasi <i>Prioritas Pembangunan 2028</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan inovasi layanan publik, ekonomi inklusif, inovatif dan SDM berdaya saing berkarakter; 2. Penguatan tata kelola berintegritas, efektif efisien bersih dan transparan serta kolaboratif guna mewujudkan pemerintahan bersih dan masyarakat aman; 	<p>Meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat <i>Prioritas Pembangunan 2029</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat daya saing daerah melalui inovasi, tata kelola unggul, SDM berkarakter, serta ekonomi hijau disegala bidang sesuai potensi daerah melalui tata kelola berintegritas dan inovatif ; 2. Meningkatkan kualitas SDM unggul dan berkarakter melalui tata kelola pemerintahan dinamis, pendidikan inklusif, serta penguatan 	<p>Bolaang Mongondow Maju, Mandiri dan Sejahtera <i>Prioritas Pembangunan 2030</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih, berintegritas, melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan bebas korupsi serta pemberdayaan masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas SDM berdaya saing melalui tata kelola pendidikan, pelayanan dasar kesehatan, layanan kepesertaan perlindungan jaminan Kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan





<p>berwawasan lingkungan, transformasi digital disemua bidang serta Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, dan UMKM;</p> <p>4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;</p> <p>5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal;</p> <p>6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;</p> <p>7. Peningkatan Ekonomi, Investasi Daerah dan pemberdayaan Masyarakat desa.</p>	<p>3. Mengembangkan daya saing daerah melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas, tata kelola inovatif, SDM unggul, dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan berbasis kearifan lokal;</p> <p>4. Memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air melalui inovasi tata kelola, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa, serta pemanfaatan teknologi yang keberlanjutan;</p> <p>5. Membangun kehidupan masyarakat aman, tertib, dan nyaman melalui tata kelola berintegritas, penguatan budaya lokal, dan pelayanan publik yang berkualitas;</p> <p>6. Menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan kinerja,</p>	<p>3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul melalui pendidikan inklusif, kesehatan terpadu, tata kelola dinamis, serta budaya berkarakter;</p> <p>4. Membangun perekonomian daerah inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah melalui tata kelola, inovasi desa dan UMKM oleh SDM unggul;</p> <p>5. Memperkuat daya saing daerah melalui inovasi, tata kelola unggul, SDM berkarakter, serta ekonomi hijau disegala bidang sesuai potensi daerah;</p> <p>6. Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang</p>	<p>budaya, kesehatan, dan inovasi daerah;</p> <p>3. Meningkatkan ekonomi daerah berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovasi desa, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal</p> <p>4. Mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan melalui tata kelola inovatif, pemberdayaan desa, serta penguatan SDM berdaya saing;</p> <p>5. Meningkatkan kerukunan beragama serta Masyarakat berbudaya tertib, aman, dan nyaman melalui penguatan budaya lokal, tata kelola berintegritas, serta pemberdayaan masyarakat berbasis nilai kearifan lokal;</p>	<p>yang adaptif dan profesional;</p> <p>3. Adanya Transformasi ekonomi daerah inklusif pemberdayaan Masyarakat desa dan UMKM melalui tata kelola unggul, inovasi desa, kemitraan strategis, dan pemberdayaan SDM berbasis kearifan lokal;</p> <p>4. Terwujudnya daya saing daerah berkelanjutan melalui inovasi, tata kelola unggul, SDM berkarakter, serta ekonomi hijau disegala bidang sesuai potensi daerah melalui tata kelola berintegritas dan inovatif</p> <p>5. Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air secara merata dan berkelanjutan melalui tata kelola daerah berintegritas, berkelanjutan, berbasis riset, inovasi dan kearifan lokal;</p> <p>6. Percepatan transformasi kehidupan masyarakat</p>
---	--	---	---	---





	<p>pengawasan berbasis risiko, digitalisasi layanan, serta optimalisasi belanja dan pendapatan daerah.</p>	<p>merata, berkelanjutan, berbasis riset, inovasi dan kearifan lokal;</p> <p>7. Mewujudkan kerukunan beragama serta Masyarakat berbudaya berkarakter, tertib, aman, dan toleran melalui pelestarian budaya lokal, penguatan integritas, dan pemberdayaan kolaboratif berbasis kearifan lokal;</p> <p>8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas, transparan, dan responsif berbasis teknologi, riset, kolaborasi, serta penguatan peran masyarakat dan hukum;</p>	<p>6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas, transparan, akuntabel, bebas KKN dan narkoba, responsif, berdaya saing, dan inklusif melalui pelayanan publik prima serta inovasi pembangunan berkelanjutan;</p> <p>7. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui inovasi fiskal, regulasi adaptif, serta perencanaan dan pengawasan berbasis kinerja</p>	<p>rukun beragama berbudaya, tertib, aman, dan nyaman melalui penguatan budaya lokal, tata kelola berintegritas, serta pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal;</p> <p>7. Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, partisipatif, dan transparan guna mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing;</p> <p>8. Percepatan transformasi sistem keuangan daerah akuntabel dan transparan untuk tata kelola pemerintahan berintegritas, pembangunan berkinerja tinggi, ekonomi inklusif, dan SDM unggul</p>
--	--	---	---	--



3.3.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025- 2029 adalah kerangka kerja lima tahunan yang dijabarkan menjadi perencanaan tahun-an guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 2029 dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025 2045., Selanjutnya arah kebijakan periode pertama RPJMD 2025-2029 sebagai berikut:

Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Penguatan Pondasi

1. Mempersiapkan seluruh persyaratan, administrasi dan lahan untuk pembangunan perguruan tinggi
2. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan
3. Pemenuhan kualitas kebutuhan dasar pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan
4. Pemenuhan kualitas perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
5. Meningkatkan daya saing Masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan teknologi
6. Pemenuhan kebutuhan iptek berbasis riset, inovasi dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah
7. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur
8. Penguatan penerapan ekonomi hijau disegala bidang sesuai dengan potensi daerah
9. Pemenuhan transformasi digital disemua bidang
10. Pemenuhan integrasi ekonomi bolmong, nasional dan global
11. Penguatan Bolaang Mongondow dengan pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah, inklusif dan berkelanjutan
12. Pemenuhan regulasi yang adaptif, taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif
13. Perwujudan demokrasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang katalisti, professional, dan dinamis mengedepankan prinsip good governance and clean government.
14. Penyediaan kelembagaan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
15. Kemudahan pelayanan perijinan di seluruh tingkatan.
16. Membangun jejaring kerjasama antara pemerintah dengan stakeholders lainnya yang dapat memperkuat posisi Masyarakat.
17. Pemenuhan hukum berkeadilan, stabilitas daerah dan demokrasi substansional
18. Pengembangan jaringan kerjasama ekonomi di semua bidang yang terintegrasi dengan perekonomian nasional dan global
19. Revitalisasi UMKM
20. Pemenuhan stabilitas ekonomi daerah untuk mengurangi angka pengangguran serta penurunan angka kemiskinan
21. Pengembangan Balai Latihan Kerja bagi penyiapan tenaga kerja siap pakai.

22. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan Masyarakat.
23. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.
24. Pengembangan suasana hidup toleransi beragama.
25. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan
26. Pemenuhan lingkungan hidup yang berkualitas
27. Mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
28. Pemenuhan ketahanan energi, air dan pangan
29. Pemenuhan Bolaang Mongondow yang memiliki resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

3.3.3. Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

1. Wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan peningkatan kualitas SDM, melalui Pendidikan Vokasi, Iptek Berbasis Riset dan Inovasi
2. Pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan
3. Peningkatan kualitas layanan kepesertaan perlindungan Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan
4. Penerapan ekonomi hijau di segala bidang sesuai dengan potensi daerah
5. Transformasi digital di semua bidang
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa dan UMKM
7. Regulasi yang adaptif, taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif
8. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
9. Kerukunan beragama serta masyarakat yang berbudaya
10. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender
11. Peningkatan Infrastruktur pelayanan dasar berkualitas
12. Lingkungan hidup yang berkualitas
13. Ketahanan energi, air dan pangan
14. Bolaang Mongondow yang tanggap bencana dan perubahan iklim



Tabel 3.7
Program Prioritas RPJMD

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
VISI BOLAANG MONGONDOW MAJU DAN SEJAHTERA						
Misi 1. Mengembangkan sumber daya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik yang inklusif	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
				Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Dibawah 15 Tahun (Angka)		
				Skor Literasi/Numerasi SD, SMP (Angka)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Indeks Literasi Digital (Angka)		
				Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
					Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
				Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
				Meningkatnya Kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Anak Usia 15-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Terlestarkannya Bahasa dan Sastra daerah!	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian (%)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
				Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)		
				Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka kematian ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Odayadayan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				"Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar" (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/ Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Misi II. Meningkatkan Infrastruktur Daerah Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, berdimensi kewilayahan serta ramah lingkungan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (point) Indeks Infrastruktur (Angka)		
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		
				Indeks Resiko Bencana (IRB) (Angka)		
				Indeks Konektivitas (%)		
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyakuran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Drangeni (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang ()	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan ()	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesainya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipkat yang Ditakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun (Km)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupatenkota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
		Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))		
				Indeks Kualitas Air (Indeks)		
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)		
				Persentase Tutupan Lahan (Persentase)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Efektifitas Kajian Lingkungan untuk memiligi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Terib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa kasus tindak pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Tatalaksana Energi Baru Terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penanma Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT ()	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
				Bauran Energi Terbarukan (%)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (point)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Angka)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Misi III, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih Dan Transparan	Terwujudnya pemerintahan yang cepit tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
				Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (Angka)		
				Monitoring Center for Prevention (MCP-KPK) (Angka)		
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
				Nilai Sakip (Angka)		
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan ()		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
				Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
	Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase gangguan Trambus yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Perda dan Perkada yang diagakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.06 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan ()	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Maturnas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ()	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis ()	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	



VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi ()	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan ()	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil ketibangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti ()	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti ()	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RWDusun Yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RWDusun Yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif (Lembaga)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Desa Yang diselenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terafiliasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa kasus tindak pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN		5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya terobos pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Meningkatnya Upaya Interefikasi dan Ekstentikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Persentase layanan berbasis elektronik di lingkup pemerintah daerah yang terkelola	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Persentase jumlah berita dan informasi Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			persentase capaian tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah kabupaten kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Tegalnya Pemanuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemanuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.08 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kemelangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
Misi IV Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Membangun Perekonomian Yang Kreatif, Dan Inovatif Berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))		
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
				Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Peningkatan luas lahan perkebunan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (t)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (t)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
Peningkatan Produksi Hortikultura (t)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			MENINGKATNYA JANGKAUAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang ()	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan ()	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan integritas	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian ()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan ()	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan atas Peraturan Perundang-Undangan Berlaku di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota (Angka)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian ()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian ()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang di Bina (Angka)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Kelentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri ()	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Tatakelola Energi Baru Terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT ()	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
				Bauran Energi Terbarukan (%)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, dan tertib secara administratif	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya terlibat naga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Terkenalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
		Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menyidi LP20 (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Peningkatan luas lahan perkebunan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (t)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (t)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (t)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pemangenan-Bencana Pertanian (t)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian ()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian ()	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) ()	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Skor Pole Pangan Harapan (Nilai)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, dan tertib secara administratif	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pole Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Menurunnya angka kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Tingkat Kemiskinan ((%))		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))		
				Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Nilai)		
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang ()	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan ()	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
/01/	/02/	/03/	/04/	/05/	/06/	/07/
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Pantu Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pencegahan dan Peranganan Tindak Kekerasan, eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan pertakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.06.01 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA PERKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dan kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (Angka)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggeran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	



VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Tajamnya Pemanuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemanuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan inovatif		Persentase Desa Mandiri (%)		
				Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian Terib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Efektifitas kerja sama Desa	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa (Desa)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			MENINGKATNYA JANGKAUAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Petaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	Persentase Petaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.25.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Dibankan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			MENINGKATNYA PERKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Menurunya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			OPD meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat Hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			presentase capaian terleb administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah kabupaten kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Misi V. Menjadikan Kehidupan Masyarakat Lebih Harmonis dan Toleran	Terwujudnya stabilitas politik, pemerintahan, sosial, budaya yang toleran serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	dan tertib administrasi kependudukan	Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, toleran, terkendali, tertib dan maju		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga* ((%)) Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) Capaian Administrasi Kependudukan dan Capii (%) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%)) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
			Menekan laju pertumbuhan penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Meningkatnya etika dan budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan pencatatan Sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%) Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) Persentase kepemilikan identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	



VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang di selesaikan (%)	5.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA PERANN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Diestankan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
			Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Sumber daya manusia dan Lembaga sejarah	Persentase Wawasan Budaya yang Dilestarkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Sumber daya manusia dan Lembaga sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	

Tabel 3.8.
Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

VISI	NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	
BOLAANG MONGONDOW MAJU DAN SEJAHTERA	1	Mengembangkan sumber daya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik yang inklusif	a. Mempersiapkan seluruh persyaratan, administrasi dan lahan untuk pembangunan perguruan tinggi.	
			b. Pemenuhan kualitas kebutuhan dasar pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan.	
			c. Pemenuhan kualitas perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.	
			d. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM bidang Kesehatan.	
			MISI	ARAH KEBIJAKAN
	2	Meningkatkan Infrastruktur Daerah Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan	a. Meningkatkan daya saing Masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan teknologi.	
			b. Pemenuhan kebutuhan iptek berbasis riset, inovasi dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	
			c. Pemenuhan transformasi digital disemua bidang.	
			d. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.	
			e. Pemenuhan lingkungan hidup yang berkualitas	
f. Mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup				

			g. Pemenuhan ketahanan energi, air dan pangan
			h. Pemenuhan Bolaang Mongondow yang memiliki resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
VISI		MISI	ARAH KEBIJAKAN
BOLAANG MONGONDOW MAJU DAN SEJAHTERA	3	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih Dan Transparan	a. Perwujudan demokrasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang katalisti, professional, dan dinamis mengedepankan prinsip good governance and clean government.
			b. Pemenuhan regulasi yang adaptif, taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.
			c. Penyediaan kelembagaan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
			d. Kemudahan pelayanan perijinan di seluruh tingkatan.
			e. Membangun jejaring kerjasama antara pemerintah dengan stakeholders lainnya yang dapat memperkuat posisi Masyarakat.
		MISI	ARAH KEBIJAKAN
	4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Dengan Membangun Perekonomian Yang Kreatif, Dan Inovatif Berbasis Sumberdaya Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal	a. Pengembangan jaringan kerjasama ekonomi di semua bidang yang terintegrasi dengan perekonomian nasional dan global
			b. Penguatan penerapan ekonomi hijau disegala bidang sesuai dengan potensi daerah
			c. Penguatan Bolaang Mongondow dengan pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah, inklusif dan berkelanjutan.



		d.	Pengembangan Balai Latihan Kerja bagi penyiapan tenaga kerja siap pakai.
		j.	Pemenuhan stabilitas ekonomi daerah untuk mengurangi angka pengangguran serta penurunan angka kemiskinan
		k.	Menurunkan angka kemiskinan;
		l.	Revitalisasi UMKM
	MISI	ARAH KEBIJAKAN	
5	Menjadikan Kehidupan Masyarakat lebih Harmonis dan Toleran	a.	Pengembangan suasana hidup toleransi beragama.
		b.	Pemenuhan hukum berkeadilan, stabilitas daerah dan demokrasi substansional.
		c.	Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan Masyarakat.
		d.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.
		e.	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. Rencana Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, pemerintah daerah menetapkan kebijakan umum sebagai pedoman dalam perumusan program pembangunan. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi dan permasalahan daerah, aspirasi masyarakat, serta arah kebijakan nasional.

Dalam Perumusan kebijakan umum dan program Pembangunan daerah dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran yang menjadi rujukan dalam penyusunan program Pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki empat belas program prioritas yang disusun berdasarkan 5 Misi pembangunan daerah kemudian dijabarkan kedalam program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan nomenklatur perundangan yang berlaku, ketiga belas program prioritas tersebut adalah :

1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan peningkatan kualitas SDM, melalui Pendidikan Vokasi, Iptek Berbasis Riset dan Inovasi
2. Pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan
3. Peningkatan Kualitas Layanan kepesertaan perlindungan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. Penerapan ekonomi hijau di segala bidang sesuai dengan potensi daerah
5. Transformasi digital di semua bidang
6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan UMKM
7. Regulasi yang adaptif, taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif
8. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
9. Kerukunan beragama serta Masyarakat yang berbudaya
10. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender
11. Peningkatan Infrastruktur pelayanan dasar berkualitas
12. Lingkungan hidup yang berkualitas
13. Ketahanan energi, air dan pangan
14. Bolaang Mongondow yang tanggap bencana dan perubahan iklim

Ke-14 program unggulan tersebut kemudian dijabarkan kedalam program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan nomenklatur perundangan yang berlaku, sebagaimana tabel 4.1 berikut

**Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PERANGSUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					319.782.765.444,00		326.520.000.000,00		342.505.000.000,00		347.790.000.000,00		347.990.000.000,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					227.895.000.000,00		233.800.000.000,00		239.855.000.000,00		244.810.000.000,00		244.810.000.000,00	
MENYINGKATKAN PERJUANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	227.895.000.000,00	100	233.800.000.000,00	100	239.855.000.000,00	100	244.810.000.000,00	100	244.810.000.000,00	Disas/Disak yang menangan Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					86.269.765.444,00		90.000.000.000,00		106.200.000.000,00		106.990.000.000,00		100.000.000.000,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 15-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (KPS) (Persentase)	8,38	100	100	86.269.765.444,00	100	90.000.000.000,00	100	100.000.000.000,00	100	100.000.000.000,00	100	100.000.000.000,00	Disas/Disak yang menangan Bidang Pendidikan
	Persentase anak usia 4-18 tahun yang sedang disekolahkan yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (KPS) (Persentase)	74	100	100		100		100		100		100		Disas/Disak yang menangan Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					226.000.000,00		340.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00	



**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KARIPATEN SELAMAT WONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menigunanya Kualitas layanan pendidikan	Persentase Siswa Pendidikan yang Menamatkan Kurikulum Mutakhir Lulusan (Persentase)	1	100	100	229.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00	100	270.000.000,00	100	290.000.000,00	Dinas/Sektor yang menanganai Bidang Pendidikan
1.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.800.000.000,00		1.850.000.000,00		1.900.000.000,00		1.950.000.000,00		2.000.000.000,00	
Mengikutiya mutu dan layanan pendidikan	Indeks Peningkatan Guru (Rata-rata)	100	100	100	1.800.000.000,00	100	1.850.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.950.000.000,00	100	2.000.000.000,00	Dinas/Sektor yang menanganai Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Sektor yang menanganai Bidang Pendidikan
1.01.05. PROGRAM PENDIDIKAN PERENCANAAN PENDIDIKAN					20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	
Menigunanya kualitas dan layanan pendidikan	Persentase Utusan Izin Sekolah Pendidikan yang Diterbitkan Diapretna (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Sektor yang menanganai Bidang Pendidikan
1.01.06. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					570.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00	
Terlaksananya Bahasan dan Sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	0	0	50	570.000.000,00	60	600.000.000,00	70	650.000.000,00	80	700.000.000,00	80	800.000.000,00	Dinas/Sektor yang menanganai Bidang Pendidikan



**RAJPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROJALANG MONGKODOW TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Perentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar menggunakan bahasa lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) sebagai media komunikasi (%)	0	0	70		80		90		90		90			Diras/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUGAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBERSIHAN					212.180.685.791,00		218.475.281.543,00		324.872.951.347,00		211.702.800.879,00		238.878.558.047,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					121.536.974.944,00		125.306.568.850,00		129.218.497.467,00		123.378.954.461,00		137.494.424.945,00		
Meningkatnya Perundang-uran Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Perentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	95	100	100	75.905.482.880,00	100	79.446.682.725,00	100	80.015.595.982,00	100	81.615.987.912,00	100	83.248.225.070,00		Diras/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Perundang-uran Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Perentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	44.828.482.054,00	100	46.859.905.167,00	100	49.202.501.475,00	100	51.653.048.549,00	100	54.348.188.878,00		Diras/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					79.612.297.144,00		82.003.395.470,00		84.234.851.293,00		86.540.568.358,00		88.923.585.778,00		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	74,83	74,21	73,39	15.744.187.144,00	72,98	19.712.695.470,00	72,36	20.596.541.293,00	71,90	21.733.468.309,00	71,70	22.820.141.778,00		Diras/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROY ANGG MONGONDOW TAHUN 2024 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Angka Harapan Ber (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,08	3,71	3,45	81.068.210.000,00	3,18	82.290.500.000,00	2,92	83.536.510.000,00	2,85	84.807.100.000,00	2,85	86.103.242.000,00	Diras/Badan yang menangan Bidang Kesehatan
	Pembelian Dasar/ Kebutuhan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	0,99	2,40		4,95		7,4		9,9		12,4	Diras/Badan yang menangan Bidang Kesehatan	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	65,27	100	100		100		100		100		100	Diras/Badan yang menangan Bidang Kesehatan	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	65	70	72		75		80		85		90	Diras/Badan yang menangan Bidang Kesehatan	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	65,71	65,71	60,48		95,24		95,24		100		100	Diras/Badan yang menangan Bidang Kesehatan	
	Persentase tingkat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	60	65	70		75		80		85		90	Diras/Badan yang menangan Bidang Kesehatan	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan berakreditasi pertama (%)	14,29	14,29	14,29		14,29		38,10		38,10		38,10	Diras/Badan yang menangan Bidang Kesehatan	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbaikan kesehatan sesuai standar* (%)	70	75	80		85		90		95		95	Diras/Badan yang menangan Bidang Kesehatan	
	Cakupan pemenuhan kasus TB (%)	69,84	72,5	78,4		80,2		84,1		87,5		87,5	Diras/Badan yang menangan Bidang Kesehatan	



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJ LANG MINGGONDOW TAHUN 2024 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					9.598.229.900,00		9.911.196.178,00		10.235.267.467,00		10.573.341.290,00		10.923.616.326,00	
Meningkatnya kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	50	55	60	5.599.576.400,00	65	5.712.808.000,00	70	5.825.852.000,00	75	5.944.400.000,00	80	6.063.288.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Angka)	56	58	62		64		68		70		76	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase Publikasi dengan TORAK sesuai standar (%)	33,33	33,33	38,89		44,44		55,56		66,67		77,76	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	"Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar" (%)	50	50	100		100		100		100		100	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	50	55	60	3.098.893.500,00	65	4.158.596.178,00	70	4.408.515.667,00	75	4.628.941.260,00	80	4.860.328.326,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					634.310.600,00		648.995.000,00		669.905.000,00		673.150.000,00		686.613.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	70	75	80	634.310.600,00	85	648.995.000,00	90	669.905.000,00	95	673.150.000,00	95	686.613.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kesehatan





**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJALANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2025		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase pemeliharaan dan pemenuhan kriteria SPH-RT sesuai standar (%)	70	72,5	75		80		85		90		90		90	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kesehatan
	Persentase rumah layak huni yang memenuhi standar kesehatan (%)	70	72,5	75		80		85		90		90		90	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kesehatan
	Persentase apoteker dan farmasi yang memiliki sertifikasi kompetensi profesional (%)	70	72,5	75		80		85		90		90		90	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					599.673.200,00		611.055.000,00		624.300.000,00		636.766.000,00		650.500.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberkayakan (%)	70	75	80	599.673.200,00	85	611.055.000,00	90	624.300.000,00	95	636.766.000,00	95	650.500.000,00		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAAN BUMBU					252.776.720.000,00		261.496.720.000,00		266.376.720.000,00		271.896.720.000,00		278.176.720.000,00		

Handwritten signature

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGGAH DAERAH
KABUPATEN BOJANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01 - PROGRAM PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					29.370.000.000,00		29.700.000.000,00		29.070.000.000,00		29.070.000.000,00		29.570.000.000,00	
Meningkatnya Peringkat Urutan Pemerintahan Daerah KabupatenKota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	29.370.000.000,00	100	29.700.000.000,00	100	29.070.000.000,00	100	29.070.000.000,00	100	29.570.000.000,00	Diras/ Badan yang merangkap Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					9.991.720.000,00		9.991.720.000,00		9.991.720.000,00		9.991.720.000,00		9.991.720.000,00	
Meningkatnya Pefektifitasan Masyarakat Terhadap Sampah dan Meningkatkan Akuisisi Masyarakat Terhadap Ngas	Rasio luas daerah Ngas kewenangan KabupatenKota yang dibayar dan pangsang Ngas (%)	65,02	70	75	9.991.720.000,00	85	9.991.720.000,00	85	9.991.720.000,00	90	9.991.720.000,00	85	9.991.720.000,00	Diras/ Badan yang merangkap Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang
	Panjang dan Jumlah Pekerjaan Pengendalian Sampah dan Pengolahan Pasir yang dibangun (Km)	1800	1000	1000		1000		1000		1000		1000		Diras/ Badan yang merangkap Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00	

A

**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROH KANG MOMBONG TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Memperbaiki Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyediaan Air Minum Dapur Lintas Kabupaten/Kota (M)	68.63	70.00	72.50	20.000.000.000,00	75.00	20.000.000.000,00	77.50	20.000.000.000,00	80.00	20.000.000.000,00	82.50	20.000.000.000,00	Diras/ Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.0304 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERGAMPANGAN REGIONAL					14.050.000.000,00		14.050.000.000,00		14.050.000.000,00		14.050.000.000,00		14.050.000.000,00	
Memperbaiki Layanan Pemasangan Regional	Peningkatan Sempai yang Akses di TPA/TPST Regional (M)	0	0	10	14.050.000.000,00	20	14.050.000.000,00	30	14.050.000.000,00	40	14.050.000.000,00	50	14.050.000.000,00	Diras/ Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.0305 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.930.000.000,00		9.930.000.000,00		9.740.000.000,00		9.930.000.000,00		9.840.000.000,00	
Memperbaiki Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan Peningkatan Rata-rata yang Menerima Hutan dengan Akses Sanksi ke Limbah Domestik Layak dan Aman (Peningkatan)	47.01	48.30	49.50	9.930.000.000,00	50.80	9.930.000.000,00	52.00	9.740.000.000,00	54.00	9.930.000.000,00	56.00	9.840.000.000,00	Diras/ Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.0306 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					18.900.000.000,00		18.200.000.000,00		18.950.000.000,00		18.200.000.000,00		18.700.000.000,00	
Memperbaiki Kualitas Saluran Drainase Perkotaan	Peningkatan Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Peningkatan)	58.67	60.00	62.50	18.900.000.000,00	63.00	18.200.000.000,00	67.50	18.950.000.000,00	70.00	18.200.000.000,00	72.50	18.700.000.000,00	Diras/ Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang

**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SOLO SAANG MENDONGKOW TAHUN 2025 - 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.07 - PROGRAM PENDEMBANGAN PERUMAHAN					15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan	Persentase Cakupan Infrastruktur Perumahan dengan Fasilitas Sakti (%)	0	0	10	15.000.000.000,00	20	15.000.000.000,00	30	15.000.000.000,00	40	15.000.000.000,00	50	15.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Sakti (Persentase)	0	0	10	10.000.000.000,00	20	10.000.000.000,00	30	10.000.000.000,00	40	10.000.000.000,00	50	10.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Perataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0	10	10.000.000.000,00	20	10.000.000.000,00	30	10.000.000.000,00	40	10.000.000.000,00	50	10.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGARAAN JALAN					50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kenyamanan Jalan Kabupaten/Kota (%)	68,51	69,00	70,00	50.000.000.000,00	70,50	50.000.000.000,00	71,00	50.000.000.000,00	71,40	50.000.000.000,00	71,80	50.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENDEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya Kompleksi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	10	5.000.000.000,00	20	5.000.000.000,00	30	5.000.000.000,00	40	5.000.000.000,00	50	5.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG					9.625.000.000,00		9.625.000.000,00		9.625.000.000,00		9.625.000.000,00		9.625.000.000,00	

Handwritten signature

**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KARIPATEN RIYA AJANG MONGKONDOW TAHUN 2024 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemukiman Ruang	Persentase Penyelidikan Kasus, Pelaksanaan Pemertanaran Ruang di Daerah Provinsi (%)	75,00	77,50	80,00	9.625.000.000,00	82,50	9.625.000.000,00	85,00	9.625.000.000,00	87,50	9.625.000.000,00	90,00	9.625.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang
1.04 - URUSAN PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					29.374.500.000,00		29.850.000.000,00		30.180.000.000,00		30.281.900.000,00		30.479.900.000,00	
1.04.01 - PROGRAM PENYANGKUTAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.750.000.000,00		8.180.000.000,00		8.180.000.000,00		8.340.000.000,00		8.350.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Urutan Pemertanaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemertanaran Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	100	100	7.750.000.000,00	100	8.180.000.000,00	100	8.180.000.000,00	100	8.340.000.000,00	100	8.350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENYANGKUTAN PERUMAHAN					1.780.000.000,00		1.780.000.000,00		1.780.000.000,00		1.780.000.000,00		1.780.000.000,00	
Tepatnya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terdampak akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	1.110.000.000,00	100	1.110.000.000,00	100	1.110.000.000,00	100	1.110.000.000,00	100	1.110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tepatnya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terdampak akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Akibat Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Pemertanaran Rumah yang Layak Huni (Persentase)	100	100	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					6.800.000.000,00		6.800.000.000,00		6.800.000.000,00		6.800.000.000,00		6.800.000.000,00	



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOY LANG MOMODONDOW TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh (DK) ke yang Dibangun (Persentase)	84,35	70,20	77,76	8.900.000.000,00	84,77	8.600.000.000,00	90,45	8.600.000.000,00	95,35	8.600.000.000,00	100	8.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					8.125.000.000,00		8.125.000.000,00		8.125.000.000,00		8.125.000.000,00		8.125.000.000,00	
Peningkatan jumlah berkemahenggo perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Peningkatan Jumlah Berkemahenggo Perumahan Kumuh Yang Terbangun (%)	19,05	39,05	59,36	5.125.000.000,00	75,41	5.125.000.000,00	85,10	5.125.000.000,00	97,15	5.125.000.000,00	100	5.125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					8.125.000.000,00		8.250.000.000,00		8.420.000.000,00		8.550.000.000,00		8.625.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	36,20	36,73	30,99	8.125.000.000,00	63,24	8.250.000.000,00	75,49	8.420.000.000,00	87,75	8.550.000.000,00	100	8.625.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					14.500.000,00		15.600.000,00		15.800.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00	

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOY LANG MOMODOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya efisiensi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan surat atau perencanaan perjanjian, serta dan atau untuk PSU yang mempunyai anggaran	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah serta Perencanaan Persewaan, Sewa dan Usaha Umum PSU (Perumahan)	30	42,88	50	14.500.000,00	50	15.600.000,00	50	16.800.000,00	50	16.500.000,00	50	16.500.000,00	50	Dinas Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Perkotaan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM, SERTA PERLINDUNGAN WADATRAJAT					25.473.830.000,00		25.028.300.000,00		26.952.500.000,00		28.816.570.000,00		28.625.400.000,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA					16.748.500.000,00		17.223.500.000,00		17.362.500.000,00		21.009.500.000,00		17.775.000.000,00		
MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (U)	80,95	95	95	10.352.500.000,00	87	10.396.300.000,00	98	10.554.500.000,00	95	13.700.500.000,00	100	10.621.500.000,00		Dinas Badan yang menangani Bidang Keterangan Dan Kelembagaan Dan Kependidikan Serta Perlindungan Masyarakat
MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (U)	70	70	24	6.396.000.000,00	23	6.824.300.000,00	21	6.808.500.000,00	21	7.309.000.000,00	15	6.854.000.000,00		Dinas Badan yang menangani Bidang Keterangan Dan Kelembagaan Dan Kependidikan Serta Perlindungan Masyarakat

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEgara WONOREJO TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIDAK UMUM					1.125.000.000,00		1.150.000.000,00		1.175.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertidakan umum	Persentase pengujian Triambur yang dapat dibersihkan (%)	70	75	80	1.125.000.000,00	85	1.150.000.000,00	90	1.175.000.000,00	95	1.200.000.000,00	100	1.250.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Ketertidakan Dan Ketertidakan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.475.000.000,00		4.502.500.000,00		6.120.000.000,00		4.605.570.000,00		4.250.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pengurangan dan pencegahan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rantai Bencana (Persentase)	65	100	100	2.825.000.000,00	100	2.802.500.000,00	100	3.810.000.000,00	100	2.245.570.000,00	100	2.330.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Ketertidakan Dan Ketertidakan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat terjadi bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	50	100	100	700.000.000,00	100	300.000.000,00	100	700.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Ketertidakan Dan Ketertidakan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat terjadi bencana	Persentase penanganan tanggap bencana awal (%)	100	100	100	1.950.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.610.000.000,00	100	1.960.000.000,00	100	1.520.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Ketertidakan Dan Ketertidakan Umum Serta Perlindungan Masyarakat

A

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.125.000.000,00		2.150.000.000,00		2.175.000.000,00		2.200.000.000,00		2.250.000.000,00	
Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	70	75 - 80	80	2.125.000.000,00	80	2.150.000.000,00	80	2.175.000.000,00	95	2.200.000.000,00	100	2.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebencanaan Dan Keamanan Umum Serta Pertolongan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.408.837.335,00		4.942.400.000,00		4.254.900.000,00		5.024.900.000,00		5.182.000.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGOTA					3.008.837.335,00		3.542.500.000,00		3.357.000.000,00		3.417.000.000,00		3.432.000.000,00	
MENINGKATKAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGOTA	Persentase Capaian Tercapai Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	80	80-85	80-80	3.008.837.335,00	80-75	3.542.500.000,00	90	3.357.000.000,00	90-80	3.417.000.000,00	90-50	3.432.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBENDAYAAN SOSIAL					225.000.000,00		235.100.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		275.000.000,00	
Meningkatkan Pembendayaan Sosial	Persentase Penerima Sosial/Terjaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	0	0	50-75	225.000.000,00	50-00	235.100.000,00	60-50	250.000.000,00	70-90	260.000.000,00	70-50	275.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROL LANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyediaan Pekerja Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Rantai Rehabilitasi Sosial bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik (PFKIS) Lainnya di luar HUKUMAS dan NATZA (Persentase)	0	0	70		75		80		85		90		Dinas/ Badan yang menanggapi Bidang Sosial
	Penyediaan Pekerja Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana Provinsi pada Masa Tanggapan Darurat dan Pasca Bencana Sosial Mandiri (Persentase)	0	0	80		85		90		95		95		Dinas/ Badan yang menanggapi Bidang Sosial
	Penyediaan SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kuantitasnya dalam pelayanan sosial (%)	50	55	80		85		70		75		80		Dinas/ Badan yang menanggapi Bidang Sosial
	Penyediaan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kuantitasnya dalam pelayanan sosial (%)	10	0	10		20		30		35		40		Dinas/ Badan yang menanggapi Bidang Sosial
LOKASI - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					195.000.000,00		195.000.000,00		207.000.000,00		217.000.000,00		235.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesehatan sosial	Persentase (%) anak belajar yang memenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	105.000.000,00	100	195.000.000,00	100	207.000.000,00	100	217.000.000,00	100	235.000.000,00	Disa/Badan yang menangan Bidang Sosial
	Persentase (%) anak usia belajar yang memenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Disa/Badan yang menangan Bidang Sosial
	Persentase (%) pendengian pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Disa/Badan yang menangan Bidang Sosial
	Persentase (%) penyandang disabilitas belajar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Disa/Badan yang menangan Bidang Sosial
1.05.35. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					675.000.000,00		675.000.000,00		725.000.000,00		800.000.000,00		880.000.000,00	



**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO MINGGONDOW TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perimbangan dan Jamban Sosial	Persentase Pemenuhan Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persepsi)	40	60-25	60-50	675.000.000,00	80-75	675.000.000,00	90	725.000.000,00	90-25	600.000.000,00	90-50	660.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemenuhan Manfaat yang Meningkatkan Kesadaran Ekonomi (Persepsi)	50	62	55		60		65		70		75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Jumlah yang melaksanakan pengisian dan penilaian data diri rumah (%)	30	28	40		45		50		55		60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (Angka)	45	70	75		80		85		90		90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang terdampak dari konstitusi (%)	0	0	5		10		15		20		25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
1.01.01- PROGRAM PENANGANAN BENCANA					295.000.000,00		295.000.000,00		315.000.000,00		330.000.000,00		380.000.000,00	
Meningkatnya Perimbangan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggapan Darurat Bencana (Persepsi)	100	100	100	295.000.000,00	100	295.000.000,00	100	310.000.000,00	100	330.000.000,00	100	380.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.01- URUSAN PERANGKAT DAERAH BIDANG TENAGA KERJA					8.797.942.195,00		4.797.913.313,00		4.797.913.313,00		4.797.913.313,00		4.797.913.313,00	



**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJOLANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01 - PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					7.512.952.195,00		3.522.913.313,00		3.522.913.313,00		3.522.913.313,00		3.522.913.313,00	
MENINGKATNYA PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Capaian Terb. Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	7.512.952.195,00	100	3.522.913.313,00	100	3.522.913.313,00	100	3.522.913.313,00	100	3.522.913.313,00	Disas/Badan yang menanganai Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
TERKELOMPOKANYA INFORMASI TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/kota yang mempunyai rencana tenaga kerja (%)	0	35	40	35.000.000,00	50	35.000.000,00	55	35.000.000,00	60	35.000.000,00	65	35.000.000,00	Disas/Badan yang menanganai Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00	
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor pertanian yang mendapat produktivitasnya (%)	30	45	45	690.000.000,00	50	690.000.000,00	55	690.000.000,00	60	690.000.000,00	65	690.000.000,00	Disas/Badan yang menanganai Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Pemerintah)	20	30	30	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	30	200.000.000,00	Disas/Badan yang menanganai Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATKAN PERKOTAAN INDONESIA YANG TERLINDUNG	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perilaku kerja sehat pekerja dan dialog sosial (Dreng)	530	700	700	350.000.000,00	800	350.000.000,00	800	350.000.000,00	800	350.000.000,00	800	350.000.000,00	Diraiflabet yang merangan Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERLENGKAPAN PERLENGKAPAN PERLENGKAPAN DAERAH				4.960.034.047,00		5.091.034.048,00		5.126.034.047,00		5.176.040.471,00		5.106.040.361,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					3.202.534.047,00		3.212.534.047,00		3.223.534.047,00		3.233.840.471,00		3.253.840.471,00	
Meningkatnya Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Peningkatan Capaian Tingkat Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	80	85	85	3.202.534.047,00	85	3.212.534.047,00	85	3.223.534.047,00	85	3.233.840.471,00	85	3.253.840.471,00	Diraiflabet yang merangan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pembangunan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					470.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Papan Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Realisasi Gender (ARG) (Peningkatan)	80	85	85	470.000.000,00	85	500.000.000,00	85	500.000.000,00	85	500.000.000,00	85	500.000.000,00	Diraiflabet yang merangan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pembangunan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					347.500.000,00		387.500.000,00		377.500.000,00		417.500.000,00		417.500.000,00	



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJJAANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunya Korban Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPTD yang Mendapatkan Layanan Legalitas Komprehensif (%)	85	95	95	347.500.000,00	95	357.500.000,00	95	377.500.000,00	95	417.500.000,00	95	417.500.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pembertayaan Perempuan Dan Peleindungan Anak
1.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					420.000.000,00		440.000.000,00		445.000.000,00		445.000.000,00		395.000.000,00	
Pembalasan Keluarga (PUSKAW) yang Berespondi Gender dan Hak Anak sesuai Standar	Pembalasan Keluarga (PUSKAW) yang Berespondi Gender dan Hak Anak sesuai (Indak)	85	95	95	470.000.000,00	95	440.000.000,00	95	445.000.000,00	95	445.000.000,00	95	395.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pembertayaan Perempuan Dan Peleindungan Anak
1.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan atau Pengukuran (Pemeriksaan)	85	95	95	35.000.000,00	95	35.000.000,00	95	35.000.000,00	95	35.000.000,00	95	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pembertayaan Perempuan Dan Peleindungan Anak
1.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIA)					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tertayunya Pemanutan Hak Semua Anak sesuai Komprehensif	Indak Pemanutan Hak Anak (PIA) (Indak)	85	85	85	150.000.000,00	85	150.000.000,00	85	150.000.000,00	85	150.000.000,00	85	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pembertayaan Perempuan Dan Peleindungan Anak
1.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					335.000.000,00		355.000.000,00		365.000.000,00		395.000.000,00		355.000.000,00	

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Percepatan dan Penguatan Tindak Keras, disiplin, Penindakan, Pekaanan dan pelaksanaan serta tingkat angka pelanggaran	Persentase Anak Memeluk Perilaku Baik Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	80	85	85	335.000.000,00	85	355.000.000,00	85	325.000.000,00	85	385.000.000,00	85	355.000.040,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
1.08 - URUSAN PERSHANTARAAN BIDANG PADJARAN					5.961.000.000,00		7.428.800.000,00		7.962.500.000,00		7.869.560.000,00		8.389.250.000,00	
1.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNGOTA					2.948.000.000,00		3.218.000.000,00		3.250.500.000,00		3.354.500.000,00		3.602.500.000,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota	Persentase Capaian Tumbuh Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	88	100	100	2.948.000.000,00	100	3.218.000.000,00	100	3.250.500.000,00	100	3.354.500.000,00	100	3.602.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pagar
	Skor Pola Pangan Harapan (PHS)	90,9	91	91,3		91,5		91,5		91,7		91,8	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	
1.08.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					610.000.000,00		660.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		810.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Galangan Pangan (Persentase)	23	100	100	610.000.000,00	100	660.000.000,00	100	710.000.000,00	100	710.000.000,00	100	810.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
1.08.03 - PROGRAM PEMBERKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.918.000.000,00		3.050.500.000,00		3.198.150.000,00		3.320.050.000,00		3.471.750.000,00	





**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Diversifikasi dan Keberagaman Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (NPH)	90,9	91	91,3	2.918.000.000,00	91,5	3.055.900.000,00	91,6	3.198.150.000,00	91,7	3.320.050.000,00	91,8	3.471.750.000,00	DirasBada yang merangai Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PEMBANGUNAN KEPAWAMAN PANGAN					205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Keawaman Pangan	Persentase Daerah Pindah Rataan Pangan (N)	3	10	8	205.000.000,00	8	205.000.000,00	4	205.000.000,00	4	205.000.000,00	4	205.000.000,00	DirasBada yang merangai Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PEMBANGUNAN KEAMANAN PANGAN					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Penguasaan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Sejahtera yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	DirasBada yang merangai Bidang Pangan
1.10 - URUSAN PERSERTAAN BIDANG PERTANAHAN					810.000.000,00		810.000.000,00		810.000.000,00		810.000.000,00		810.000.000,00	
1.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAERAH					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah sengketa	Persentase Tuntasnya Kasus Tanah Sengketa Selain Berencana yang Dituliskan melalui Media (Persentase)	0	0	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	DirasBada yang merangai Bidang Pertanahan
1.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SAKURAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya penyelesaian pertanahan dan sertifikasi tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Pokokan dan Sertifikat Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	0	50	480.000.000,00	50	480.000.000,00	50	480.000.000,00	50	480.000.000,00	50	480.000.000,00	50	480.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSUDAN DAN TANAH ABSENTEE					110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap lahan objek reforma agraria (TORA)	Terjadinya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang Didistribusikan yang Bersifat dan Tanah Kelebihan Maksud dan Tanah Absentee (Persentase)	0	0	50	110.000.000,00	50	110.000.000,00	50	110.000.000,00	50	110.000.000,00	50	110.000.000,00	50	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH UJAYA					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya akses lahan ujay	Persentase Tanah Ujay yang Didistribusikan (Persentase)	0	0	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan lahan kosong	Persentase Tanah Kosong yang Didistribusikan (Persentase)	0	0	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENATAAN TANAH					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya ketertarikan dan kepatuhan hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Lahan Kosong yang Didistribusikan (Persentase)	0	0	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO MINGGUAN TAHUN 2025 - 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH LINGKUNGAN HIDUP					16.625.000.000,00		17.260.000.000,00		14.385.000.010,00		14.810.000.000,00		15.935.000.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.160.000.000,00		6.730.000.000,00		3.950.000.010,00		4.155.000.000,00		6.170.000.000,00	
Meningkatnya Peran dan Peran Serta Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	85	85	95	8.160.000.000,00	95	6.730.000.000,00	95	3.950.000.010,00	97	4.155.000.000,00	100	6.170.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					700.000.000,00		750.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		850.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Mekanisme Lingkungan untuk mitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Mekanisme Lingkungan Hidup yang Dibantu/terpenuhi (Persentase)	25	25	25	700.000.000,00	25	750.000.000,00	25	550.000.000,00	25	650.000.000,00	25	850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMERAWATAN DAN KATAK/ KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					920.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00	
Meningkatnya Pemantauan dan / atau Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Aqhd)	71,97	71,96	72,00	920.000.000,00	72,00	930.000.000,00	72,00	930.000.000,00	72,00	930.000.000,00	72,00	930.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEAMUKURAGAMAN HAYATI (KEHATI)					670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Konservasi alam Hayati	Persentase RTH (Persentase)	1,7	1,7	2,4	670.000.000,00	3,1	670.000.000,00	3,8	670.000.000,00	3,8	670.000.000,00	3,8	670.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KARIPATEN RIJAU AANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BBB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH-BB)					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Perangan Sifat Berbahaya dan Beracun (BB) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbab-BB)	Persentase Limbah BB yang Terakumulasi (Persentase)	34,4	34,4	60,3	600.000.000,00	60,3	600.000.000,00	66,2	600.000.000,00	66,2	600.000.000,00	66,2	600.000.000,00	Diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PERAWAKAN TERHADAP ZON LINGKUNGAN DAN ZON PERILINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					2.375.000.000,00		2.485.000.000,00		2.495.000.000,00		2.505.000.000,00		2.115.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan warga dan/atau kepala terhadap peraturan lingkungan yang diterbitkan	Ketepatan anggaran pada usaha dan/atau kegiatan terhadap zon lingkungan, di PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	58	58	63	375.000.000,00	63	385.000.000,00	63	385.000.000,00	63	405.000.000,00	63	415.000.000,00	Diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya Pembiayaan dan pengawasan terhadap zon lingkungan dan di PPLH	Ketepatan anggaran pada usaha dan/atau kegiatan terhadap zon lingkungan, di PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	58	58	68	2.000.000.000,00	68	2.100.000.000,00	68	2.100.000.000,00	68	2.100.000.000,00	68	2.300.000.000,00	Diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup



**RAJPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN ANAM MANGKONGW TAHUN 2024 - 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07 - PROGRAM PENGADUAN KEBERAGAMAN MASYARAKAT RUKUM ADIK (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Dilibatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Perujuk Lingkungan Hidup yang Dilibatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					-		-		-		-		-	
Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya persentase sergata keaja tidak piana	Persentase Penyediaan SeragataKasat Tidak Piana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	Dinas/Bagian yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENDELUARAN PERISAMPANAN					3.750.000.000,00		3.750.000.000,00		3.750.000.000,00		3.750.000.000,00		3.750.000.000,00	
Meningkatnya Teta Ketaa Persempaan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (ppm)	27	28	30	3.750.000.000,00	30	3.750.000.000,00	30	3.750.000.000,00	30	3.750.000.000,00	30	3.750.000.000,00	Dinas/Bagian yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BERKUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUHAN DAN PERKOTAAN SIPIL					8.773.500.000,00		9.387.000.000,00		10.072.000.000,00		11.817.500.000,00		12.578.000.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PERULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					8.093.500.000,00		8.417.000.000,00		8.877.000.000,00		9.217.500.000,00		9.621.000.000,00	
Persentase Capaian Tetaa Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah KabupatenKota					8.093.500.000,00		8.417.000.000,00		8.877.000.000,00		9.217.500.000,00		9.621.000.000,00	Dinas/Bagian yang menangani Bidang Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
2.12.02 - PROGRAM PENDEFTAMAN PENDUDUH					600.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		550.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendefatan Pendudu	Persentase Kepuasan-pertima Kependudukan Digital (KD) (%)	0,11	5	15	500.000.000,00	25	550.000.000,00	30	600.000.000,00	40	650.000.000,00	50	700.000.000,00	Dinas/Bagian yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Daerah Kabupaten Kota
	Persentase Kepuasan Kota-pertima Anak (Persentase)	64,38	70	75		80		90		95		100		Dinas/Bagian yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Daerah Kabupaten Kota



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROL AANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan pencatatan Sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melahirkan (%)	100	100	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang Melahirkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanganai Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang Melahirkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanganai Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Putusnikah yang diterbitkan bagi yang Melahirkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanganai Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					280.000.000,00		340.000.000,00		395.000.000,00		450.000.000,00		455.000.000,00	
Meningkatnya Pemeliharaan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimerahkan (Persentase)	60,50	65	70	280.000.000,00	75	340.000.000,00	80	395.000.000,00	90	450.000.000,00	100	455.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00	
Terbaiknya Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	0	80	85	500.000.000,00	90	550.000.000,00	95	600.000.000,00	95	650.000.000,00	100	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



**RAJPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN ANANG MANGKONGW TAHUN 2024 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BERKANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DESA					10.400.000.000,00		8.380.000.000,00		10.287.000.000,00		10.308.000.000,00		10.643.000.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.904.000.000,00		3.678.500.000,00		3.790.500.000,00		3.772.000.000,00		4.016.500.000,00	
penyediaan capaian serta administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	80	85	90	3.004.000.000,00	90	3.678.500.000,00	95	3.790.500.000,00	95	3.772.000.000,00	95	4.016.500.000,00	Daerah/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.12.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					402.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		702.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	75	76	78	402.000.000,00	78	500.000.000,00	80	600.000.000,00	80	700.000.000,00	85	702.000.000,00	Daerah/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN PERLU BANGUN DESA					141.000.000,00		141.000.000,00		141.000.000,00		141.000.000,00		141.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas kerja sarana Desa	Jumlah Desa yang Menghimpun Pengembangan Kerja Sama Desa (Desa)	100	110	120	141.000.000,00	120	141.000.000,00	160	141.000.000,00	170	141.000.000,00	180	141.000.000,00	Daerah/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.820.000.000,00		4.940.000.000,00		5.020.000.000,00		5.020.000.000,00		5.090.000.000,00	



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 - 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkahi kualitas layanan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Bertanah Digital (Desa)	190	190	170	4.920.000.000,00	175	4.940.000.000,00	180	5.020.000.000,00	190	5.020.000.000,00	190	5.050.000.000,00	DesaBakti yang menanganai Bidang Pemerintahan Masyarakat Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					733.500.000,00		733.500.000,00		733.500.000,00		733.500.000,00		733.500.000,00	
OPD yang aktifnya kepada lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dan pembangunan	Persentase Fasilitas Pembinaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Pembinaan)	70	75	78	733.500.000,00	80	733.500.000,00	83	733.500.000,00	85	733.500.000,00	88	733.500.000,00	DesaBakti yang menanganai Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					8.325.994.292,00		8.182.332.392,00		8.983.832.392,00		8.883.832.392,00		11.644.282.392,00	
2.14.01 - PROGRAM PERALUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.775.961.292,00		3.550.809.392,00		3.430.809.392,00		3.530.809.392,00		5.489.709.392,00	
Peningkatan Capaian Tercapainya Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	3.775.961.292,00	100	3.550.809.392,00	100	3.430.809.392,00	100	3.330.809.392,00	100	5.489.709.392,00	DesaBakti yang menanganai Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN ANANG MANGKENDOW TAHUN 2025 - 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUK					301.700.000,00		301.200.000,00		301.200.000,00		301.200.000,00		301.200.000,00	
Menyikan taji pertumbuhan penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per Wanita)	52,7	42,0	42,0	301.700.000,00	42,8	301.200.000,00	42,5	301.200.000,00	42,5	301.200.000,00	42,5	301.200.000,00	Dis/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran spesifik usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	47,4	44,5	42,5		43		38,1		38,1		34,2		Dis/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERTAMBAH (KB)					3.681.123.000,00		3.681.123.000,00		3.682.623.000,00		3.682.623.000,00		3.684.123.000,00	
Mengukuhkan Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Bertambah (KB)	Persentase jumlah kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPH (%))	66,1	69,3	69,4	3.681.123.000,00	69,8	3.681.123.000,00	69,7	3.682.623.000,00	69,8	3.682.623.000,00	67,0	3.684.123.000,00	Dis/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,7	12,4	12,0		11,8		11,3		11,0		10,7		Dis/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGUKUTAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.569.200.000,00		1.569.200.000,00		1.569.200.000,00		1.569.200.000,00		1.569.200.000,00	



**RAJPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Kelembagaan Keluarga (Persentase)	100	100	100	1.569.200.000,00	100	1.569.200.000,00	100	1.569.200.000,00	100	1.569.200.000,00	100	1.569.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Pertumbuhan Keluarga Berencana
2.15.00 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH					21.483.242.185,00		24.175.422.177,00		24.183.433.621,00		29.509.601.093,00		28.530.989.972,00	
2.15.01 - PROGRAM PEMALUANG (RUJUK) PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO					9.754.811.593,00		11.288.863.365,00		10.218.313.201,00		10.473.242.971,00		10.749.506.077,00	
Meningkatnya Peringkat Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertinggi Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	9.754.811.593,00	100	11.288.863.365,00	100	10.218.313.201,00	100	10.473.242.971,00	100	10.749.506.077,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pembangunan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					11.728.430.182,00		12.886.756.872,00		13.967.120.420,00		16.338.618.122,00		17.830.829.596,00	
Meningkatnya Kualitas layanan transportasi jalan	Rasio kredibilitas kabupaten/kota (%)	22,92	25,08	27,24	11.728.430.182,00	29,40	12.886.756.872,00	31,96	13.967.120.420,00	33,72	16.338.618.122,00	35,66	17.830.829.596,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pembangunan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang terdapat terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	10	35	50		65		79		91		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pembangunan

**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROL AANG MONGINTYOW TAHUN 2024 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					12.713.600.000,00		13.127.250.000,00		13.725.750.000,00		13.273.750.000,00		14.032.700.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					4.900.000.000,00		5.164.250.000,00		5.266.750.000,00		4.990.750.000,00		5.170.750.000,00	
Meningkatnya Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Taktis Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	4.900.000.000,00	100	5.164.250.000,00	100	5.266.750.000,00	100	4.990.750.000,00	100	5.170.750.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.500.000.000,00		4.850.000.000,00		4.850.000.000,00		5.000.000.000,00		5.250.000.000,00	
Peningkatan jumlah berita dan informasi Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/kota (%)	61	62	63	4.500.000.000,00	63	4.850.000.000,00	64	4.850.000.000,00	64	5.000.000.000,00	65	5.250.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.913.000.000,00		3.913.000.000,00		3.913.000.000,00		3.913.000.000,00		3.913.000.000,00	
Persentase layanan berbasis elektronik di tingkat pemerintah daerah yang terakuis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	2,73	2,90	3,50	3.913.000.000,00	3,75	3.913.000.000,00	4,00	3.913.000.000,00	4,25	3.913.000.000,00	4,30	3.913.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika



**RAHPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJALANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KEOL, DAN MENENGAH					8.111.858.214,00		8.057.730.214,00		8.445.987.894,00		8.267.434.936,00		3.984.342.928,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGARA					6.020.271.214,00		3.284.730.214,00		3.586.987.894,00		3.097.494.936,00		856.342.928,00	
Meningkatnya Pemungutan Pajak Pendapatan Daerah Kabupaten Kota	Peningkatan Capaian Tarif Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	6.020.271.214,00	100	3.284.730.214,00	100	3.586.987.894,00	100	3.097.494.936,00	100	856.342.928,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM BAYARAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Peningkatan Kepuasan yang Berkaitan dengan Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	89	89	89	100.000.000,00	79	100.000.000,00	89	100.000.000,00	84	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	49	59	69	100.000.000,00	79	200.000.000,00	89	200.000.000,00	99	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PERLAKUAN KESEHATAN KOP/USP KOPERASI					33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Koperasi	Peningkatan Kinerja Pelayanan Koperasi yang Berkaitan dengan (Persentase)	49	59	69	33.000.000,00	79	33.000.000,00	89	33.000.000,00	99	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00	



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas SDM Partisipator	Persentase Koperasi yang Didukung Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	40	59	69	500.000.000,00	79	500.000.000,00	89	600.000.000,00	99	600.000.000,00	100	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.36 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Beroperasi (Persentase)	40	59	69	20.000.000,00	79	30.000.000,00	89	40.000.000,00	99	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.37 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA BESIK (UMKM)					28.534.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	4	6	6	28.534.000,00	7	600.000.000,00	8	600.000.000,00	9	700.000.000,00	10	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.38 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.310.000.000,00		1.310.000.000,00		1.310.000.000,00		1.310.000.000,00		1.320.000.000,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	4	5	6	1.310.000.000,00	7	1.310.000.000,00	8	1.310.000.000,00	9	1.310.000.000,00	10	1.320.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMBINAAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.180.000.000,00		1.880.000.000,00		6.180.000.000,00		6.180.000.000,00		6.180.000.000,00	
2.18.31 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/BOTA					4.860.000.000,00		4.730.000.000,00		4.910.000.000,00		4.860.000.000,00		4.880.000.000,00	
Meningkatnya Penunjang usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	95	95	95	4.860.000.000,00	95	4.730.000.000,00	95	4.910.000.000,00	95	4.860.000.000,00	95	4.880.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pemerintahan Modal



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PEANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Daerah Kabupaten Kita (%)														
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KUM PENANAMAN MODAL					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Wentainya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Investasi Target Investasi (Persentase)	10	10	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perencanaan Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Wentainya lingkungan promosi penanaman modal	Persentase Peringkat Investasi yang Berinvestasi (Persentase)	90	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perencanaan Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Wentainya Pelayanan Usaha berbasis MSME	Persentase Peta Usaha yang Mampukan dan Sesuai Ketersediaan (Persentase)	90	95	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perencanaan Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tertundahnya Pelaksanaan Perencanaan Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Didapat Peta Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	90	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perencanaan Modal

**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.00 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENYAMBANG MODAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Pemeliharaan dan Informasi Penjualan Modal	Persentase Pemeliharaan Data dan Informasi Penjualan Modal (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
1.15 - URUSAN PENYAMBANGAN BANGUNAN KEPERLUAN DAN DAIRAGRA					7.782.183.838,00		7.783.071.753,00		7.783.071.753,00		7.783.071.753,00		7.783.071.753,00	
1.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA					5.432.183.838,00		5.433.071.753,00		5.433.071.753,00		5.433.071.753,00		5.433.071.753,00	
Meningkatnya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	5.432.183.838,00	100	5.433.071.753,00	100	5.433.071.753,00	100	5.433.071.753,00	100	5.433.071.753,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
1.15.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERLUAN					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya daya saing keperluan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	50	62,5	67,5	500.000.000,00	60	500.000.000,00	62,5	500.000.000,00	67,5	500.000.000,00	70	500.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Indeks Adaya Keunggulan Daerah (IDAK)	3,80	3,85	3,88		3,91		3,94		3,97		3,97	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	





**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGUT KECLIAHUAN					1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
Meningkatnya Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila	Persentase Abdi yang Masuk Pancasila (Persentase)	50	55	60	1.600.000.000,00	65	1.600.000.000,00	70	1.600.000.000,00	75	1.600.000.000,00	80	1.600.000.000,00	Disas/Sebid yang merancang Bidang Kependidikan Dan Olahraga
1.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAWATAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepedulian (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Disas/Sebid yang merancang Bidang Kependidikan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMBERANTARAN BIDANG STATISTIK					185.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00	
2.20.01 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					185.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00	
Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,23	2,4	2,5	185.000.000,00	2,5	170.000.000,00	2,65	180.000.000,00	2,75	185.000.000,00	2,8	190.000.000,00	Disas/Sebid yang merancang Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMBERANTARAN BIDANG PERSEKUTUAN					185.000.000,00		200.000.000,00		205.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					185.000.000,00		200.000.000,00		205.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00	

A

RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Kelembagaan Penguasaan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kelembagaan Koamanan Siber dan Sertifikasi Pemerintah Daerah (%)	1,5	1,6	1,7	185.000.000,00	1,8	200.000.000,00	1,9	215.000.000,00	2	230.000.000,00	2,1	245.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
1.22 - URUSAN PEMERINTAHAN SIKLIK KEBUDAYAAN					2.196.900.000,00		2.324.000.000,00		2.442.000.000,00		2.434.900.000,00		2.552.500.000,00	
1.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					765.900.000,00		813.000.000,00		848.000.000,00		883.000.000,00		925.000.000,00	
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	65	70	75	765.900.000,00	80	813.000.000,00	85	848.000.000,00	88	883.000.000,00	90	925.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
1.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					17.900.000,00		19.000.000,00		20.200.000,00		20.900.000,00		22.500.000,00	
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Didukung dan Dikembangkan (Persentase)	0	30	50	17.900.000,00	65	19.000.000,00	70	20.200.000,00	75	20.900.000,00	80	22.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
1.22.04 - PROGRAM PENYARAF SEJARAH					55.000.000,00		70.000.000,00		82.000.000,00		95.000.000,00		107.000.000,00	
Sumber daya manusia dan Lembaga sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tripulan Sejarah Lokal (Persentase)	0	30	30	55.000.000,00	40	70.000.000,00	50	82.000.000,00	60	95.000.000,00	70	107.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan



**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CADAR BUDAYA					1.001.000.000,00		1.070.000.000,00		1.118.000.000,00		1.148.000.000,00		1.190.000.000,00	
Sumber daya manusia dan lembaga terkait	Persentase Mutasi yang Diastikan (Persentase)	30	30	35	1.001.000.000,00	40	1.070.000.000,00	45	1.118.000.000,00	50	1.148.000.000,00	55	1.190.000.000,00	Orangkader yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					240.000.000,00		360.000.000,00		275.000.000,00		288.000.000,00		308.000.000,00	
Meningkatnya Tala Kaca Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	0	240.000.000,00	0	360.000.000,00	0	275.000.000,00	0	288.000.000,00	0	308.000.000,00	Orangkader yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPERUSAHAAN					3.118.543.406,00		3.123.543.406,00		3.129.543.406,00		3.132.043.406,00		3.134.543.406,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.621.043.406,00		2.625.043.406,00		2.631.543.406,00		2.634.543.406,00		2.636.543.406,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	70	75	80	2.621.043.406,00	85	2.625.043.406,00	90	2.631.543.406,00	90	2.634.543.406,00	95	2.636.543.406,00	Orangkader yang menangani Bidang Perencanaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					497.500.000,00		497.500.000,00		497.500.000,00		497.500.000,00		498.000.000,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional	Nilai tingkat kegunaan membaca masyarakat (%)	2,51	5	10	497.500.000,00	15	497.500.000,00	20	497.500.000,00	25	497.500.000,00	30	498.000.000,00	Orangkader yang menangani Bidang Perencanaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARIFAN					85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KRSP					85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	



**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KOLONGKOROW TAHUN 2025 - 2029**

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Anasir Dinamika dan Stabilitas	Tingkat Keterwakilan Anasir (Perwakilan)	61,01	65	70	85.000.000,00	75	85.000.000,00	80	85.000.000,00	85	85.000.000,00	90	85.000.000,00	Diras-Badan yang menanggapi Bidang Keagamaan
1.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEJALANTAN DAN PERKAWAN					10.118.988.616,00		10.128.388.616,00		8.213.388.616,00		8.268.388.616,00		8.224.388.616,00	
1.25.01 - PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.388.088.616,00		4.698.088.616,00		4.438.088.616,00		4.438.088.616,00		4.094.388.616,00	
Meningkatnya Perwujudan Unsur Penunjang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terbit Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	4.098.088.616,00	100	4.698.088.616,00	100	4.438.088.616,00	100	4.438.088.616,00	100	4.094.388.616,00	Diras-Badan yang menanggapi Bidang Kelembagaan dan Perhubungan
1.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKAWAN TANGKAP					3.530.000.000,00		3.530.000.000,00		2.280.000.000,00		2.280.000.000,00		2.280.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3695	3665	4314	3.330.000.000,00	4674	3.530.000.000,00	5033	2.280.000.000,00	5393	2.280.000.000,00	5752	2.280.000.000,00	Diras-Badan yang menanggapi Bidang Kelautan dan Perikanan
1.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKAWAN BUDIDAYA					1.290.000.000,00		1.130.000.000,00		1.230.000.000,00		1.280.000.000,00		1.280.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	304,89	300	325	1.290.000.000,00	380	1.130.000.000,00	450	1.230.000.000,00	560	1.280.000.000,00	650	1.280.000.000,00	Diras-Badan yang menanggapi Bidang Kelautan dan Perikanan

A

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					300.000.000,00		350.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelebaran atau Perubahan atau Pembinaan Perikanan-Udangan Berkaitan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Reservoir, Perairan Air Lainnya yang Dapat Dikelola dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelebaran/pelebaran yang diberikan sehubungan Kabupaten/Kota di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Reservoir, Perairan Air Lainnya yang Dapat Dikelola dalam Kabupaten/Kota (Angka)	-	-	5	300.000.000,00	6	350.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	6	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Kelautan dan Perikanan
1.25.06 - PROGRAM PENJALANAN DAN PEMERANAN HADIL PERIKANAN					461.800.000,00		462.300.000,00		467.500.000,00		470.500.000,00		470.500.000,00	
Meningkatnya Penjualan dan Pemeranan Hasil Perikanan	Jumlah Pelebaran/Utaka Pengelolaan dan Pemeranan yang di Bina (Angka)	-	-	30	461.800.000,00	30	462.300.000,00	30	467.500.000,00	30	470.500.000,00	30	470.500.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Kelautan dan Perikanan
1.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN					24.252.752.928,00		24.974.425.776,00		25.190.474.709,00		27.145.339.094,00		26.954.732.805,00	
1.25.01 - PROGRAM PENJALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA					4.092.752.928,00		4.404.425.776,00		4.410.474.709,00		5.175.339.094,00		5.556.732.805,00	
MENINGKATNYA PENJALAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATENNOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	4.092.752.928,00	100	4.404.425.776,00	100	4.410.474.709,00	100	5.175.339.094,00	100	5.556.732.805,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perikanan



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.26.17 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA					10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		11.000.000.000,00		10.800.000.000,00	
MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA	Persentase Peningkatan Rujukan Wisatawan (Persentase)	108,71	110,71	112,71	10.000.000.000,00	112,80	10.000.000.000,00	113,75	10.000.000.000,00	113,80	11.000.000.000,00	115,50	10.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pariwisata
1.26.18 - PROGRAM PEMASARAN PARAWISATA					4.250.000.000,00		4.600.000.000,00		4.900.000.000,00		5.000.000.000,00		4.625.000.000,00	
MENINGKATNYA JANGKALAN PEMASARAN PARAWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	30	30	4.250.000.000,00	35	4.600.000.000,00	40	4.900.000.000,00	45	5.000.000.000,00	50	4.625.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pariwisata
1.26.19 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KERAJARAN INTELEKTUAL					4.920.000.000,00		4.970.000.000,00		4.970.000.000,00		4.970.000.000,00		4.920.000.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kelengkapan Hak Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	15	20	4.920.000.000,00	25	4.970.000.000,00	30	4.970.000.000,00	35	4.970.000.000,00	40	4.920.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pariwisata
1.26.20 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Terampil (Persentase)	0	0,10	0,11	1.000.000.000,00	0,12	1.000.000.000,00	0,13	1.000.000.000,00	0,14	1.000.000.000,00	0,15	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Pariwisata
1.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					48.152.750.406,00		48.588.087.406,00		50.343.375.406,00		51.833.887.406,00		51.320.345.406,00	

**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROL AANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROL AANG					22.852.938.406,00		21.885.488.406,00		21.898.038.406,00		21.938.838.406,00		21.670.638.406,00		
Meningkatnya Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	80	100	100	3.487.938.408,00	100	5.447.938.406,00	100	3.447.938.406,00	100	3.447.938.406,00	100	3.347.938.406,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	
Meningkatnya Indeks Kefasilitas pemerintahan daerah yang akurat, efektif, dan tertib secara administratif	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	18.385.000.000,00	100	18.417.550.000,00	100	18.450.100.000,00	100	18.488.500.000,00	100	18.522.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	
3.07.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOMBANGAN SARANA PERTANIAN					7.088.365.000,00		7.483.534.000,00		7.864.360.000,00		8.248.845.000,00		8.533.340.000,00		
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produk Tanaman Pangan (Persentase)	7	7	7	4.038.365.000,00	15	4.483.534.000,00	20	4.884.360.000,00	25	5.248.845.000,00	30	5.533.340.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
	Peningkatan Produk Hortikultura (Persentase)	5	5	5		10		15		20		25		30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produk Komoditas Perikanan (Persentase)	7	7	7		15		20		25		30		35	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produk Komoditas Perikanan (%)	1,06	1,06	2,0	3.000.000.000,00	3,5	3.000.000.000,00	5,0	3.000.000.000,00	6,5	3.000.000.000,00	8,0	3.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.07.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					14.800.000.000,00		11.400.000.000,00		15.400.000.000,00		15.400.000.000,00		15.400.000.000,00		



**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya distribusi dan kualitas pelayanan pertanian	Cakupan Lahan Pertanian yang Ditelepon Melalui (P2) (Ha)	0	0	14523	10.500.000.000,00	14523	10.400.000.000,00	14523	10.400.000.000,00	14523	10.400.000.000,00	14523	10.400.000.000,00	14523	10.400.000.000,00	Disa/Badan yang menanganai Bidang Pertanian
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Pasaran Pertanian	Peningkatan luas lahan perkebunan (Ha)	1,07	1,87	2	4.100.000.000,00	4	5.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00	10	5.000.000.000,00	10	5.000.000.000,00	Disa/Badan yang menanganai Bidang Pertanian
1.27.04 - PROGRAM PENDEKALAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERANER					33.000.000,00		41.000.000,00		47.800.000,00		53.500.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00	
Meningkatnya Peningkatan kesadaran hewan dan kesehatan masyarakat peternak	Tingkat Pengetahuan Penyakit Hewan Melalui Strategi (PHM) (Dikumen)	100	100	100	35.000.000,00	100	41.000.000,00	100	47.500.000,00	100	53.000.000,00	100	58.000.000,00	100	58.000.000,00	Disa/Badan yang menanganai Bidang Pertanian
1.27.05 - PROGRAM PENDEKALAN DAN PENUNGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					3.675.450.000,00		3.698.075.000,00		3.723.877.000,00		3.748.924.000,00		3.777.267.000,00		3.777.267.000,00	
Meningkatnya Peningkatan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan Rencana Pertanian (Persentase)	0,52	0,64	0,76	500.000.000,00	0,91	500.000.000,00	1,06	500.000.000,00	1,21	500.000.000,00	1,36	500.000.000,00	1,50	500.000.000,00	Disa/Badan yang menanganai Bidang Pertanian
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Peningkatan Rencana Pertanian (Persentase)	10	15	25	3.175.450.000,00	40	3.198.075.000,00	55	3.223.877.000,00	67	3.248.924.000,00	75	3.277.267.000,00	85	3.277.267.000,00	Disa/Badan yang menanganai Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Dampak Pembelian Rata Terhadap Pertanian (Persentase)	0	0	30		35		40		45		50		Disa/Badan yang menanganai Bidang Pertanian		
1.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					901.000.000,00		1.070.000.000,00		1.310.000.000,00		1.645.000.000,00		1.880.000.000,00		1.880.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Stabag Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	90	90	90	901.000.000,00	90	1.070.000.000,00	90	1.310.000.000,00	95	1.645.000.000,00	95	1.880.000.000,00	95	1.880.000.000,00	Disa/Badan yang menanganai Bidang Pertanian



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PEKANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
3.20.00 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN														
Meningkatkan Tabungas Energi Baru Terbarukan	Sesuai Energi Terbarukan (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (J/ri)	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERCHANGSAAN					11.900.000.000,00	11.800.000.000,00	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	
3.30.01 - PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMOTA					6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	
MENINGKATKANYA PERJALANAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENMOTA	Pembinaan Capaian Terleb Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	95	95	95	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
Meningkatkan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Pembinaan Isi Utama Pendaftaran yang Efektif (Pembinaan)	0,019	0,019	0,019	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Perdagangan

**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJALANG MOMBONGOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4.100.000.000,00		4.100.000.000,00		4.100.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan integral	Persentase Lantai Perdagangan yang Ciri-tingkatkan Kualitasnya (Persentase)	8	8	8	4.100.000.000,00	8	4.100.000.000,00	8	4.100.000.000,00	8	2.600.000.000,00	8	2.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perdagangan
1.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya ketahanan distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perdagangan
1.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya nilai usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Miliar)	0	0	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perdagangan
1.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya keterbacaan harga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0	0	0,005	250.000.000,00	0,005	250.000.000,00	0,005	250.000.000,00	0,005	250.000.000,00	0,005	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perdagangan
1.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGARA					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	

A

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEgara MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengunaan dan pemerataan produk dalam negeri	Persentase Produk Lokal yang Didistribusikan/Diakibatkan (Persentase)	0	0	0,028	500.000.000,00	0,028	500.000.000,00	0,028	500.000.000,00	0,028	500.000.000,00	0,028	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
1.31 - URUSAN PERENCANAAN BIDANG PERENCANAAN					5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		5.400.000.000,00	
1.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0	0	5	5.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00	5	5.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
1.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN UTM USAHA INDUSTRI					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Personel Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase UTM Usaha Industri yang Dilatihkan (Persentase)	15	15	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
1.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini (%)	52	20	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
1.32 - URUSAN PERENCANAAN BIDANG TRANSMIGRASI					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
1.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	



**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJOLANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATKAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	0	10	15	150.000.000,00	20	150.000.000,00	25	150.000.000,00	30	150.000.000,00	35	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Transmigrasi
3.32.33 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					-		-		-		-		-	
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lulu Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	10	10	-	15	-	15	-	20	-	25	-	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Transmigrasi
3.32.34 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					-		-		-		-		-	
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lulu Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	10	15	-	20	-	20	-	25	-	30	-	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Transmigrasi
KOT. BERSERIKAT DAERAH					60.312.772.957,00		60.649.427.110,00		60.439.026.741,00		60.499.026.741,00		60.664.026.741,00	
4.01.31 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA					50.490.705.279,00		50.661.105.708,00		50.490.705.279,00		50.490.705.279,00		50.490.705.279,00	

A

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGGAH DAERAH
KABUPATEN BOJANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya peranng urusan pemerintah daerah kabupatenkota	Petunjuk Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	45.690.306.046,00	100	45.690.306.045,00	100	45.690.306.046,00	100	45.690.306.046,00	100	45.690.306.046,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya peranng urusan pemerintah daerah kabupatenkota					1.235.645.712,00		1.235.645.712,00		1.235.645.712,00		1.235.645.712,00		1.235.645.712,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya peranng urusan pemerintah daerah kabupatenkota	Petunjuk Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	3.564.753.521,00	100	3.564.753.521,00	100	3.564.753.521,00	100	3.564.753.521,00	100	3.564.753.521,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.11.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAMAN RAKYAT					6.369.368.424,00		6.435.819.208,00		6.495.819.208,00		6.556.819.208,00		6.620.819.208,00	
Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Persebau)	100	100	100	6.369.368.424,00	100	6.435.819.208,00	100	6.495.819.208,00	100	6.556.819.208,00	100	6.620.819.208,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.11.03 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN					3.452.502.254,00		3.452.502.254,00		3.452.502.254,00		3.452.502.254,00		3.452.502.254,00	
Meningkatnya kualitas objek pengkaji/pengkaji dan dit. pembangunan	Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Perspectaan Perencanaan dan	75	75	75	2.351.251.127,00	80	2.351.251.127,00	90	2.351.251.127,00	95	2.351.251.127,00	95	2.351.251.127,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah





**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan (Pembesaran)													
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pembangunan				401.252.339,00		401.252.339,00		401.262.339,00		401.262.339,00		401.252.339,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pembangunan				699.999.769,00		699.999.769,00		699.999.769,00		699.999.769,00		699.999.769,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					36.771.396.287,00		37.541.336.287,00		38.484.186.287,00		37.541.396.287,00		36.221.396.287,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO					21.815.102.387,00		20.585.102.387,00		20.585.102.387,00		20.585.102.387,00		20.585.102.387,00	
	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	377	374	377	21.815.102.387,00	374	20.585.102.387,00	377	20.585.102.387,00	368	20.585.102.387,00	368	20.585.102.387,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					16.956.233.900,00		16.956.233.900,00		14.903.963.900,00		16.956.233.900,00		17.636.233.900,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kerja Peserta Paralel DPRD	60	60	70	16.956.233.900,00	80	16.956.233.900,00	85	14.903.963.900,00	90	16.956.233.900,00	85	17.636.233.900,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.378.000.000,00		6.470.000.000,00		6.500.000.000,00		6.600.000.000,00		6.700.000.000,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO					6.328.000.000,00		6.370.000.000,00		6.000.000.000,00		6.100.000.000,00		6.200.000.000,00	



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Respon dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow	Peningkatan Capaian Tumbuh Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	80	80	80	5.928.000.000,00	80	5.970.000.000,00	80	6.000.000.000,00	80	6.100.000.000,00	80	6.200.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					950.000.000,00		950.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Keefektifan RPJMD dengan RPO (Papanisasi)	80	85	85	950.000.000,00	85	950.000.000,00	87	1.000.000.000,00	88	1.000.000.000,00	89	1.000.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Perencanaan
	Peningkatan Keefektifan RPJMD dengan Rencana PO (Papanisasi)	80	85	85		88		87		88		89		Diras/Badan yang menanganai Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan dan infrastruktur dan kewilayahan	Peningkatan Keefektifan RPMD dengan RPO pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Papanisasi)	84	85	86	500.000.000,00	87	500.000.000,00	88	500.000.000,00	89	500.000.000,00	90	500.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Peningkatan Keefektifan RPMD dengan RPO pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Papanisasi)	75	75	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Perencanaan



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KARIPATEN ROL JANG MINGGONDOW TAJEM 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perencanaan dan SDA	Indeks Akasi Kualitatif Daerah (IAKD)	3,80	3,85	3,88	500.000.000,00	3,91	500.000.000,00	3,94	500.000.000,00	3,97	500.000.000,00	3,97	500.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keakuratan RKPJ dengan Rencana PD pada Bidang Perencanaan dan SDA (Persentase)	94	95	96		97		98		99		99		Disas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
S.02 - KEHATI-HATI					275.381.000.000,00		275.235.000.000,00		275.557.000.000,00		275.881.000.000,00		275.912.000.000,00	
S.02.01 - PROGRAM PERLUKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NADOKA					28.300.000.000,00		28.322.000.000,00		28.485.000.000,00		28.490.000.000,00		28.665.000.000,00	
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	28.300.000.000,00	100	28.322.000.000,00	100	28.485.000.000,00	100	28.490.000.000,00	100	28.665.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
S.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					243.440.850.000,00		243.265.650.000,00		243.377.800.000,00		243.622.690.000,00		243.522.900.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	1.425.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.275.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.300.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Gaji yang Diakibatkan	35,94	40,25	30	1.793.250.000,00	30	1.793.250.000,00	30	1.980.000.000,00	30	1.900.000.000,00	30	2.000.000.000,00	Disas/Badan yang menangani Bidang Keuangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks IKD (Persentase)													
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	42,78	21,83	40		40		40		40		40		Diras/Badan yang menanganai Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Rajat Pelayanan Dasar (Persentase)	92,50	93,50	94	240.222.600.000,00	95,50	240.222.600.000,00	96	240.222.600.000,00	96,90	240.222.600.000,00	96,50	240.222.600.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Keuangan
	Persentase Penyerapan SLPA (Persentase)	3,79	2,15	1,23		1,61		2,04		2,53		3,10		Diras/Badan yang menanganai Bidang Keuangan
S.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.875.200.000,00		1.875.200.000,00		1.900.000.000,00		2.000.000.000,00		2.050.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Pembaruan Nilai Aset Tetap (Persentase)	1,20	4,30	4,39	1.875.200.000,00	4,44	1.875.200.000,00	4,58	1.900.000.000,00	4,67	2.000.000.000,00	4,78	2.050.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Keuangan
S.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.775.000.000,00		1.775.000.000,00		1.775.000.000,00		1.775.000.000,00		1.775.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembaruan dan pengawasan pengisian pendapatan pendapatan (Persentase)	2,1	2,39	2,44	200.000.000,00	2,5	200.000.000,00	2,56	200.000.000,00	2,62	200.000.000,00	2,69	200.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Keuangan
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	45,12	45,12	75	150.000.000,00	60	150.000.000,00	65	150.000.000,00	90	150.000.000,00	95	150.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Keuangan
Meningkatnya Upaya Efektivitas dan Efisiensi Pengaport	Persentase PAD terdapat Pembiayaan Daerah (Persentase)	6,17	6,45	6,55	1.425.000.000,00	6,72	1.425.200.000,00	7,29	1.425.900.000,00	7,53	1.425.300.000,00	8,24	1.425.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Keuangan



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
S.03 - KEPEGAWAIAN					8.848.320.000,00		8.180.000.000,00		8.085.000.000,00		8.285.500.000,00		7.829.250.000,00	
S.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO					4.799.820.000,00		4.608.000.000,00		4.526.500.000,00		4.613.500.000,00		4.415.750.000,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro	Peningkatan Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro	100	100	100	4.799.820.000,00	100	4.608.000.000,00	100	4.526.500.000,00	100	4.613.500.000,00	100	4.415.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
S.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.848.500.000,00		3.572.000.000,00		3.528.500.000,00		3.642.000.000,00		3.512.500.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	50	55	60	1.346.500.000,00	65	1.000.000.000,00	70	1.061.500.000,00	75	1.124.000.000,00	80	1.126.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Realisasi Kinerja ASN	Peningkatan Pegawai dengan SNP Demais Sek (Persentase)	60	90	95	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Peningkatan Kompetensi ASN	Peningkatan ASN yang Dilengkapi Kompetensinya (Persentase)	10	50	70	1.565.000.000,00	72	1.710.000.000,00	78	1.590.000.000,00	74	1.645.000.000,00	74	1.566.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Tata Kelola Peningkatan Kapasitas ASN					665.000.000,00		577.000.000,00		622.000.000,00		643.000.000,00		590.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
S.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					836.900.000,00		446.500.000,00		448.500.000,00		468.000.000,00		475.000.000,00	
S.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					536.500.000,00		448.500.000,00		449.500.000,00		468.000.000,00		475.000.000,00	



RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KARIPATEN ROL AANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Anala Kebutuhan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Persentase ADv yang menunjukkan pengembang kompetensi dasar manajerial dan logiserial (%)	215	150	150	210.000.000,00	225	175.000.000,00	175	157.500.000,00	175	185.000.000,00	175	185.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi dasar, keterampilan manajerial dan logiserial	Persentase ADv yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi teknis (Porsentase)	20	20	20	75.500.000,00	20	61.000.000,00	20	70.000.000,00	20	65.000.000,00	20	70.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ADv yang menunjukkan pengembang kompetensi dasar manajerial dan logiserial (%)	215	150	150		225		175		175		175		Diras/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ADv yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi (Porsentase)	10	10	10	150.000.000,00	25	125.000.000,00	25	122.000.000,00	30	138.000.000,00	30	130.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Peningkatan Tugas Belajar, serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dibiayakan (Porsentase)	10	150	75	100.000.000,00	75	85.000.000,00	75	100.000.000,00	75	80.000.000,00	75	90.000.000,00	Diras/Badan yang menanganai Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
ES - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
1.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROY LANG MOGONDOW TAHUN 2025 - 2028**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya hasil yang tercapai sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Terintegrasi dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	1	1	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Penelitian Dan Pengembangan	
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)	30	30	35	500.000.000,00	35	500.000.000,00	40	500.000.000,00	40	500.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Penelitian Dan Pengembangan
S 05.01 - PROGRAM Riset Dan Inovasi Daerah					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)	60	60	65	500.000.000,00	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	60	500.000.000,00	60	500.000.000,00	60	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Penelitian Dan Pengembangan
S 05 - INSPEKTORAT DAERAH					18.008.334.878,00		17.380.334.878,00		17.380.334.878,00		17.380.334.878,00		17.380.334.878,00		17.380.334.878,00	
S 05.01 - PROGRAM PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					13.058.334.878,00		13.480.334.878,00		12.930.334.878,00		12.000.334.878,00		12.930.334.878,00		12.930.334.878,00	
MENINGKATNYA PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Capaian Tesis Administrasi Penyelesaian Urusan Pemohonan Daerah Kabupaten Kota (%)	92	94	95	13.058.334.878,00	96	13.480.334.878,00	97	12.930.334.878,00	99	12.000.334.878,00	99	12.930.334.878,00	99	12.930.334.878,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Inspektorat Daerah
S 05.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00	
Menurunnya tingkat penyelesaian atau penertangan, baik yang berupa anggaran maupun proses dan kewenangan	Tingkat Realisasi Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N. 1 (Persentase)	75,95	77,50	78	4.000.000.000,00	78	4.000.000.000,00	80	4.000.000.000,00	80	4.000.000.000,00	80	4.000.000.000,00	80	4.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Inspektorat Daerah

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan akses	Melakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) (Nilai)	3	3,2	3,4	450.000.000,00	3,8	450.000.000,00	3,8	450.000.000,00	3,8	450.000.000,00	3,8	450.000.000,00	Dasar/Sasaran yang menyangkut Bidang Inspektorat Daerah
	Peningkatan aporal Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai)	3	3,2	3,4		3,4		3,5		3,8		3,8		Dasar/Sasaran yang menyangkut Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					41.873.343.594,00		41.953.816.082,00		44.950.587.809,00		48.286.711.845,00		48.805.377.870,00	
7.01.01 - PROGRAM PERLUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					40.014.966.105,00		40.029.823.342,00		42.056.744.542,00		44.185.282.928,00		46.440.830.788,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota	Perentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	2.246.500.000,00	100	2.446.500.000,00	100	2.650.500.000,00	100	2.700.500.000,00	100	2.750.000.000,00	Dasar/Sasaran yang menyangkut Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota	Perentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	2.500.000.000,00	100	2.510.000.000,00	100	2.520.000.000,00	100	2.530.000.000,00	100	2.540.000.000,00	Dasar/Sasaran yang menyangkut Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota	Perentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	84	100	100	2.452.573.773,00	100	2.688.596.559,00	100	3.152.415.832,00	100	3.546.876.192,00	100	4.215.473.751,00	Dasar/Sasaran yang menyangkut Bidang Kecamatan



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN RSI AANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Peringkat Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	98,07	100	100	1.707.301.421,00	100	1.807.301.421,00	100	1.907.301.421,00	100	2.007.301.421,00	100	2.107.301.421,00	Disas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
Meningkatnya Peringkat Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	98,00	98,10	98,15	1.798.106.693,00	98,20	1.957.272.593,00	98,30	2.140.345.491,00	99	2.358.620.673,00	99	2.586.336.534,00	Disas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
Meningkatnya Peringkat Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	95,22	100	100	2.419.994.692,00	100	2.554.084.692,00	100	2.670.354.692,00	100	2.794.164.692,00	100	2.926.484.692,00	Disas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
Meningkatnya Peringkat Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	95,75	99	100	3.506.770.568,00	100	3.635.770.568,00	100	3.765.270.568,00	100	3.901.270.568,00	100	4.035.270.568,00	Disas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PERINGKAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	93,17	95	95	3.871.279.363,00	96	4.076.814.752,00	97	4.467.454.227,00	98	4.867.795.032,00	100	5.306.894.629,00	Disas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PERINGKAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	88,00	85	70	2.327.424.210,00	75	2.453.458.579,00	80	2.607.454.553,00	85	2.842.358.179,00	90	3.076.577.462,00	Disas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJ LANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATKAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	85,81	100	100	1.545.867.845,00	100	1.851.866.798,00	100	1.732.007.648,00	100	1.750.345.679,00	100	1.850.845.679,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	4,3	4,35	4,45	2.400.000.000,00	4,55	2.480.000.000,00	4,65	2.505.000.000,00	4,65	2.550.000.000,00	4,65	2.600.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	85,03	88,13	88,15	3.373.141.612,00	88,25	3.473.141.612,00	88,30	3.573.141.612,00	89	3.673.141.612,00	89	3.773.141.612,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	2.500.000.000,00	100	2.510.000.000,00	100	2.520.000.000,00	100	2.530.000.000,00	100	2.540.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	3.889.567.000,00	100	1.987.223.670,00	100	2.180.768.000,00	100	2.398.898.880,00	100	2.566.756.440,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan



**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO MINGGUAN TAHUN 2025 - 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATKAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/WOTA	Persentase Capaian Terbit Administrasi Penyelenggaraan Urutan Pemakaian Daerah Kabupaten/Kota (%)	85	85	95	3.474.598.325,00	97	3.647.800.000,00	100	3.681.500.000,00	100	3.735.500.000,00	100	3.789.250.000,00	Dinas/Bagian yang menangani Bidang Keperencanaan
T.01.EE - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.534.917.876,00		1.572.914.143,00		1.610.410.410,00		1.654.902.945,00		1.722.899.212,00	
Meningkatnya Pembedaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	80	87	90	21.000.000,00	80	22.000.000,00	95	22.500.000,00	97	23.000.000,00	99	24.000.000,00	Dinas/Bagian yang menangani Bidang Keperencanaan
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RW/Desa Yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan (%)	88,00	85	70	619.917.876,00	75	850.914.143,00	80	887.910.410,00	95	961.902.945,00	90	998.899.212,00	Dinas/Bagian yang menangani Bidang Keperencanaan
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RW/Desa Yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan (%)	75	80	85	700.000.000,00	90	700.000.000,00	95	700.000.000,00	98	700.000.000,00	100	700.000.000,00	Dinas/Bagian yang menangani Bidang Keperencanaan
T.01.EE - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					323.489.613,00		351.070.587,00		380.493.157,00		410.515.672,00		441.845.070,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dibenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan (%)	100	100	100	18.500.000,00	100	20.350.000,00	100	22.388.000,00	100	24.623.500,00	100	27.085.890,00	Dinas/Bagian yang menangani Bidang Keperencanaan

**RAMPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROL JAANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Memptkatnya Pembinaan dan Penguatan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa Yang diukungkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintah (%)	100	100	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	18.000.000,00	100	19.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	Disa/Sa/da yang merangin Bidang Kecamatan
Memptkatnya jembahan dan penguatan pemerintah desa	Pemerintah Desa Yang diukungkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintah (%)	100	100	100	20.500.000,00	100	22.500.000,00	100	27.500.000,00	100	30.000.000,00	100	31.000.000,00	100	31.000.000,00	Disa/Sa/da yang merangin Bidang Kecamatan
Memptkatnya Pembinaan dan Penguatan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa Yang diukungkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintah (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	41.000.000,00	100	42.000.000,00	100	43.000.000,00	100	44.000.000,00	100	44.000.000,00	Disa/Sa/da yang merangin Bidang Kecamatan
Memptkatnya Pembinaan dan Penguatan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa Yang diukungkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintah (%)	100	100	100	18.138.244,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Disa/Sa/da yang merangin Bidang Kecamatan
Memptkatnya Pembinaan dan Penguatan Pemerintah Desa	Pemerintah Pembinaan dan Penguatan Desa Yang Tertinggal (%)	88,03	88,10	88,16	11.523.270,00	88,25	12.875.567,00	88,30	13.948.157,00	89	15.337.472,00	90	16.871.220,00	90	16.871.220,00	Disa/Sa/da yang merangin Bidang Kecamatan
Memptkatnya Pembinaan dan Penguatan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa Yang diukungkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintah (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	41.000.000,00	100	42.000.000,00	100	43.000.000,00	100	44.000.000,00	100	44.000.000,00	Disa/Sa/da yang merangin Bidang Kecamatan



**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KARIPATEN BOJ JAANG MONGGONDOW TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Pembiayaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	88,03	86	70	10.000.000,00	75	20.000.000,00	80	25.000.000,00	85	30.000.000,00	90	35.000.000,00	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Desa Yang Disanggarkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	11.500.000,00	100	12.000.000,00	100	12.500.000,00	100	13.500.000,00	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Pembiayaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	86	70	75	25.000.000,00	80	30.000.000,00	85	30.000.000,00	85	40.000.000,00	90	45.000.000,00	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Desa Disanggarkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (%)	100	100	100	42.035.099,00	100	45.445.000,00	100	54.000.000,00	100	55.455.000,00	100	56.755.000,00	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Jumlah BPD yang Mengimplementasikan Mulyawati Desa dan Mulyawati Pembinaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Lembaga	77,20	76,50	80,15	20.800.000,00	85,60	20.600.000,00	90,00	20.600.000,00	85,00	20.600.000,00	85,00	20.600.000,00	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembiayaan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Pembiayaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitasi (%)	88,03	86,10	86,15	28.605.300,00	86,25	30.000.000,00	88,30	31.000.000,00	89	32.000.000,00	90	33.000.000,00	Dinas/Eselon yang menangani Bidang Kecamatan

**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGABDIAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Berkegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan (%)	100	100	100	17.964.700,00	100	18.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	Diras/Sadar yang merangai Bidang Kapasitas
5.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.832.500.000,00		10.425.500.000,00		10.731.500.000,00		11.263.500.000,00		11.601.500.000,00	
5.01.01 - PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO					5.232.500.000,00		5.461.500.000,00		5.181.500.000,00		5.178.500.000,00		5.201.500.000,00	
Meningkatnya dukungan untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (%)	100	100	100	5.232.500.000,00	100	5.461.500.000,00	100	5.181.500.000,00	100	5.178.500.000,00	100	5.201.500.000,00	Diras/Sadar yang merangai Bidang Keahlian Bangsa Dan Politik
5.01.02 - PROGRAM PENDUKUNG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KERANGKAAN					2.000.000.000,00		2.250.000.000,00		2.500.000.000,00		2.750.000.000,00		3.000.000.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Capaian Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	2.000.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.750.000.000,00	100	3.000.000.000,00	Diras/Sadar yang merangai Bidang Keahlian Bangsa Dan Politik
5.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA BERTA BUDAYA POLITIK					1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya etika dan budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik Para Kader Partai Politik (%)	100	100	100	1.250.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.350.000.000,00	100	1.350.000.000,00	Dimas/Badan yang menangani Bidang Keutuhan Bangsa Dan Politik
ES.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAMBAHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					200.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	Dimas/Badan yang menangani Bidang Keutuhan Bangsa Dan Politik
ES.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya keharmonisan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kualitas Peningkatan Penguasaan Teknologi, Fasilitas Kesehatan Umum Beragama dan Ponghajat, Ketersediaan Di Daerah Yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	125.000.000,00	100	150.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	Dimas/Badan yang menangani Bidang Keutuhan Bangsa Dan Politik
ES.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGGAMAN KONFLIK SOSIAL					1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		1.350.000.000,00		1.400.000.000,00	

A

**RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya peran serta warga masyarakat	Persentase konflik sosial yang di selesaikan (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.350.000.000,00	100	1.400.000.000,00	Dinas/Gadon yang menangani Bidang Kesehatan Bangsa Dan Perempuan
TOTAL KESELURUHAN					1.484.854.926.213,00		1.420.118.190.000,00		1.515.254.981.020,00		1.542.091.392.810,00		1.553.810.995.438,00	

Sumber : SIPD RI RPJMD 2025

4.2. Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial budaya.

Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik.

Berikut dapat kami sampaikan Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan atau pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh Masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari indikator kinerja utama dan Indikator kinerja daerah tertuang sebagaimana tabel 4.2 dan tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1	Skor Literasi/Numerasi SD, SMP	Angka	78.70	78,9	79,1	79,3	79,5	80	
2	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Dibawah 15 Tahun	Angka	8.48	8,58	8,68	8,78	9	9,1	
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.65	11,75	11,85	11,95	12,05	12,15	
4	Indeks Literasi Digital	Angka	74.00	74,5	75	75,5	75,9	75,9	
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	71.20	72,1	73	73,9	74,8	74,8	
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	18.80	16	14,5	12	10	10	
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98	98	98	99	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	80,45	84,11	89,88	94,3	97,6	97,6	
9	Indeks Konektivitas	%	66,63	68,2	70,28	71,6	73,25	73,25	
10	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Angka	129,00	129	128	128	127	127	
11	Indeks Kualitas Air	Indeks	58	61,25	64,5	67,75	70	70	
12	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,47	95,49	95,5	95,52	95,54	95,54	
13	Persentase Tutupan Lahan	Persentase	61,40	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	40	45	50	55	60	60	
15	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	36,00	37,67	39,34	40,01	42,68	42,68	
16	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,31	4,33	4,36	4,4	4,45	4,51	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
17	Indeks Inovasi Daerah	Angka	38,50	42,5	46,5	50,5	54,5	55	
18	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,00	98	98	98	98	98	
19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,73	3,5	3,75	4	4,25	4,3	
20	Monitoring Center for Prevention (MCP-KPK)	Angka	80	83	86	90	93	95	
21	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Angka	3,085	3,095	3,2	3,25	3,3	3,3	
22	Nilai Sakip	Angka	B	B	B	B	B	BB	
23	Opini BPK Atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
24	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	40,49	41,11	41,81	42,5	43	43,2	
25	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,85	3,88	3,91	3,94	3,97	3,97	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
26	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	44,76	48,5	50,05	52,34	54,5	56	
27	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	84,02	84,06	84,08	84,1	84,12	84,14	
28	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,0 - 6,2	6,8 - 5,8	6,5 - 5,5	6 - 5,1	5,5 - 4,62	5 - 4,24	
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,29	4,09	3,9	3,75	3,6	3,5	
30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	35	40	45	50	55	55	
31	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,317	0,311	0,307	0,304	0,3	0,3	
32	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,24	3,27	3,3	3,34	3,37	3,39	
33	Persentase Desa Mandiri	%	28	40	50	60	67,5	75	
34	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	61,03	62	62,3	62,7	63	63,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
35	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	53,3	53,9	54,3	54,9	55,3	55,3	
36	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,12	89,72	90,3	90,9	91,5	91,5	
37	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,88	0,84	0,8	0,76	0,72	0,72	
38	Capaian Administrasi Kependudukan dan Sipil	%	74,85	77,41	80,42	85,43	88,44	90,80	

Berikut dapat disampaikan tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan Indikator Kinerja Utama diatas :

Tabel 4.3
Penentuan Target Keberhasilan Tujuan dan Sasaran melalui IKU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (angka 0 - 100)	71,40	71,80	72,40	73,40	74,00	74,40	74,90
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan	Skor Literasi/Numerasi SD, SMP (skor 0-100)	78,50	78,70	78,90	79,10	79,30	79,50	79,50
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di bawah 15 tahun (tahun)	8,38	8,48	8,58	8,68	8,78	8,88	8,88
		Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,63	11,65	11,75	11,85	11,95	12,05	12,15
		Indeks Literasi Digital (skor 0-100)	74,00	74,00	74,50	75,00	75,50	75,90	75,90
	Meningkatnya derajat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,31	71,20	72,10	73,00	73,90	74,80	74,80



	kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	19,30	18,80	16,00	14,50	12,00	10,00	10,00
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	96,57	98,00	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, berdimensi kewilayahan serta ramah lingkungan		Indeks Infrastruktur (%)	68	69	70	70,5	71	71,4	71,8
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,21	74,22	74,23	74,24	74,24	74,25	74,25
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	80,45	80,45	84,11	89,88	94,30	97,60	97,60
		Indeks Konektivitas.	65,83	66,63	68,2	70,28	71,60	73,25	73,25
		Indeks Risiko Bencana (angka)	130	129	129	128	128	127	127
	Terwujudnya Kualitas	Indeks Kualitas Air (%)	55	58	61,25	64,5	67,75	70	70

	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (angka mutlak)	95,43	95,47	95,49	95,50	95,52	95,54	95,54
		Persentase Tutupan Lahan (%)	61,40	61,40	61,40	61,40	61,40	61,40	61,40
		Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	38	40	45	50	55	60	60
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (skor 0-100)	36	36	37,67	39,34	40,01	42,68	42,68
Terwujudnya pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	71,58	72,00	72,50	73,20	74,00	75,00	76,30
		Indeks Pelayanan Publik (angka)	4,30	4,31	4,33	4,36	4,40	4,45	4,51
		Indeks Inovasi Daerah (angka 0-100)	34,50	38,50	42,50	46,50	50,50	54,50	55,00
		Indeks Reformasi Hukum (skor 0-100)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (angka 0-5)	2,73	2,73	3,50	3,75	4,00	4,25	4,30
		Monitoring Center for Prevention (MCP-KPK)	71,64	80	83	86	90	93	95
		Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi.	70,73	75,00	77,00	78,00	80,00	82,00	82,00
		Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	BB
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi		5,33	5,7-6,0	6,0 - 7,1	6,3- 6,7	6,7 – 7,1	6,9-7,5	7,6 - 8,00
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	40,49	40,49	41,11	41,81	42,5	43,00	43,2

	Indeks Akses Keuangan Daerah	3,80	3,85	3,88	3,91	3,94	3,97	3,97
	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	44,76	44,76	48,5	50,05	52,34	54,5	56
Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	84,02	84,04	84,06	84,08	84,10	84,12	84,14
Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	7,74	7,0 - 6,6	6,8 - 6,4	6,5 - 6,1	6,0 - 5,6	5,5 - 5,1	5,0 - 4,6
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,49	4,49 - 4,09	4,29 - 3,89	4,10 - 3,70	3,90 - 3,50	3,80 - 3,40	4,49 - 4,09
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan (%)	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%

		Indeks Gini	0,317	0,317	0,311	0,307	0,304	0,3	0,3
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan inovatif	Indeks Daya Saing Daerah (angka 0-100)	3,21	3,24	3,27	3,3	3,34	3,37	3,43
		Persentase Desa Mandiri (%)	20,5	28	40	50	60	67,5	75
Terwujudnya stabilitas politik, pemerintahan, sosial, budaya, toleran serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (nilai 0-100)	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10
	Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, toleran, terkendali, tertib dan maju	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (%)	70,29	70,29	71,29	73,29	74,29	75,2	75,2
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (%)	53,3	53,3	53,9	54,3	54,9	55,3	55,3
		Indeks Pembangunan Gender (skor 0-100)	89,12	89,12	89,72	90,3	90,9	91,5	91,5

		Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,92	0,88	0,84	0,80	0,76	0,72	0,72
		Capaian Administrasi kependudukan dan capil (%)	68,5	74,85	77,41	80,42	85,43	88,44	90,80

4.3. Indikator Kinerja Daerah.

Selain Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, juga ditetapkan suatu indikator pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan kinerja. Yaitu Indikator Kinerja Daerah berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	84,04	84,04	84,06	84,08	84,1	84,12	84,14	
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	55	58	61,25	64,5	67,75	70	70	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Sempit Minum Perpipaan	(%)	60,45	80,45	84,11	88,86	94,3	97,6	97,6	
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,43	95,47	95,49	95,5	95,52	95,54	95,54	
5	Persentase Tutupan Lahan	Persentase	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	
6	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Angka	120	120	120	120	120	120	120	
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,82	0,88	0,94	0,9	0,78	0,72	0,72	
8	Capaian Administrasi Kependudukan dan Sipil	%	74,95	75,4	77,41	80,42	81,43	83,44	80,8	
9	Rumah Tangga dengan Akses Sempit Aman	(%)	38	40	45	50	55	60	60	
10	Indeks Penyelenggaraan Transbumihmas Sub Urusan Bencana	Nilai	0	0	20	17	32	17	34	
11	INDEKS KETAHANAN PANGAN	Angka	84,02	84,04	84,06	84,08	84,1	84,12	84,14	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,21	74,22	74,23	7,24	74,24	7,425	74,25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Utas Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	70,31	71,2	72,1	73	73,9	74,8	74,8	
2	Seor Literasi/Numerasi SD, SMP	Angka	78,56	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	80	
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,74	7	6,6	6,5	6	5,5	5	
4	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga ¹⁾	(%)	61,03	61,03	62	62,3	62,7	63	63,3	
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	55,3	63,3	63,9	64,3	64,5	65,3	65,3	
6	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Dibawah 15 Tahun	Angka	8,36	8,48	8,55	8,68	8,76	8	9,1	
7	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp. Juta)	44,78	44,78	48,3	50,05	52,94	54,5	58	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,48	4,29	4,09	3,9	3,75	3,6	3,5	
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	66,12	69,12	66,72	69,3	69,5	69,5	69,3	
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	30	35	40	45	50	55	66	
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	19,3	18,8	18	14,5	12	10	10	
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,63	11,65	11,75	11,85	11,95	12,05	12,10	
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	96,57	98	98	98	99	100	100	
14	Indeks Literasi Digital	Angka	74	74	74,5	75	75,5	75,9	75,9	
15	Kesimpangan Pencerapalan (Gini Ratio)	Nilai	0,317	0,317	0,311	0,307	0,304	0,3	0,3	
16	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	0,56	0,58	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	30	30	30	35	40	45	50	
18	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	70	70	75	80	85	90	95	
19	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	774	7	6,8	6,5	6	5,1	5	
20	Urae harapan hidup	Tahun	70,31	71,2	72,1	73	73,9	74,8	74,8	
21	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	73,72	80,07	83,1	84,77	86,1	87,75	88,31	
22	Urae harapan hidup	Tahun	70,31	71,2	72,1	73	73,6	74,8	74,8	
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	80	82,5	85	87,5	90	95	97,5	
24	Skor Literasi/Numerasi	Skor	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,5	
25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,51	0,53	0,56	0,60	0,67	0,675	0,68	
26	Indeks Partisipasi Olahraga		85	70	75	80	85	90	95	
27	Indeks Tertid Administrasi Pemerintahan	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
28	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
29	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	%	19,3	18,8	18	14,5	13	10	10	
30	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,2	8,3	6,4	8,5	8,6	8,7	8,8	
31	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	(%)	96,57	98	98	98	99	100	100	
32	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	77,26	79,1	78,2	78,3	78,38	78,4	78,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
33	TFR (Angka Kematian Total)	Jawa	2,17	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	
34	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut standar KB Modern	%	90,3	91,4	92,5	93,7	94,8	96	96	
35	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	50	55	60	65	70	75	80	
36	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	0	30	40	50	50	60	65	
37	INDEKS INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM	Angka	69	69	70	70,5	71	71,4	71,8	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	40,49	40,49	41,11	41,81	42,5	43	43,2	
2	Persentase Desa Mandiri	%	20,5	26	40	50	60	67,5	75	
3	Indeks Inovasi Daerah	Angka	34,5	38,5	42,5	46,5	50,5	54,5	58	
4	Indeks Konektivitas	%	65,83	66,65	68,2	70,28	71,8	73,25	73,25	
5	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,8	3,85	3,88	3,91	3,94	3,97	3,97	
6	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	36	36	37,67	38,34	40,01	42,68	42,68	
7	Nilai Bekip	Angka	8	8	8	8	8	8	8	
8	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		0,75	0,80	1	1	1	1	1	
9	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		75	75	77	79	80	83	90	
10	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	4	5	6	7	8	9	10	
11	Nilai Tukar Padi (NTP)	Angka	40,49	40,49	41,11	41,81	42,5	43	43,2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Indeks konektivitas kabupaten/kota	%	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	
13	Indeks Gede Membangun (IGM)		20	21	22	23	24	25	26	
14	Open BPK Atas Laporan Keuangan		100	Wejor Tanpa Pengecualan						
15	Indeks Profesionalitas ASN		50	55	60	65	70	75	80	
16	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105	105	107	107	108	109	108	
17	Persentase peringatan investasi di kabupaten/kota	%	2,33	5	8	9	5	5	5	
18	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		50	55	60	65	70	75	80	
19	Nilai Tukar Pemandu daya Perikanan (NTP)		107	108	109	109	110	111	111	
20	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data : one data KKP)	Ton	3.900	4.255	4.639	5.024	5.483	5.943	6.302	
21	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	12,56	12,56	12,6	12,62	12,64	12,66	12,68	
22	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	75,368	76,752	78,132	79.9004	75,5604	79,7992	82,6234	
23	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	6,94	6,96	6,98	6,99	7	7,01	7,02	
24	Persentase Peringatan Pendapatan Asli Daerah	%	10	10	9	7,5	10	12,5	15	
25	Persentase Nilai Aset Yang Tidak Bermasalah	%	81,14	83	85	87	90	95	97	
26	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
27	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan Perikanan	%	12	12	10	17	20	22	25	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	Indeks Inovasi Daerah	%	34,5	38,5	42,5	46,5	50,5	54,5	58	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3	4,31	4,33	4,35	4,4	4,45	4,51	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,21	3,24	3,27	3,3	3,34	3,37	3,39	
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98	98	98	98	98	98	98	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,73	2,74	2,75	2,76	2,78	2,79	2,79	
5	Monitoring Center for Prevention (MCP- KPK)	Angka	71,64	80	83	86	90	93	96	
6	Opini BPK Atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
7	Nilai Maturlitas SRIP Terintegrasi	Angka	3,08	3,09	3,095	3,2	3,25	3,3	3,3	
8	Indeks SPRE (Terkait Keamanan)	Angka	0,96	0,8	1	1,2	1,4	1,5	1,8	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77	79,1	80,5	82,1	83,6	84,5	85,1	
10	Indeks kejujuran masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Angka	87,37	88	90	94	96	98	100	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	77	79,1	80,5	82,1	83,6	84,5	85,1	
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72	72	72,5	73,2	74	75	76,3	
13	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,23	2,4	2,5	2,5	2,65	2,75	2,8	
14	Meningkatkan Tata Kelola Anasir	%	61	70	75	80	85	90	90	
15	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan	Angka	70	71	72	73	74	75	76	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Capaian Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	70	71	72	73	74	75	76	
17	Capaian Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	71	78,1	80,5	82,1	83,6	84,5	85,1	
18	Capaian Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	86,00	88,1	88,15	88,25	88,3	89	90	
19	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,3	4,31	4,33	4,35	4,4	4,45	4,51	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai Keamanan SMP	Nilai	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,5	
5	Nilai Kebencanaan SD	Nilai	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,5	
6	Nilai Kebencanaan SMP	Nilai	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,5	
7	Nilai Inovativitas SD	Nilai	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,5	
8	Nilai Inovativitas SMP	Nilai	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,5	
9	Nilai Keamanan SD	Nilai	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,5	
10	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	8,38	8,48	8,58	8,68	8,78	8,88	8,88	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	8,35	8,48	8,58	8,68	8,78	8,88	8,98	
12	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	8,38	8,45	8,55	8,65	8,75	8,85	8,95	
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	39,55	42,88	45,49	48,12	50,75	53,01	55,28	
14	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	8,38	8,48	8,58	8,68	8,78	8,88	8,98	
15	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	23,07	26,03	28	29,99	31,95	34,91	37,86	
16	Persentase Capaian Tertentu Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diorbaru	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
18	Indeks Peminatan Guru	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	1	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	0	0	90	80	70	60	50	
21	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mencapai muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekstrakurikuler kesenian	%	0	0	70	80	90	90	90	
23	Persentase Anak Usia 15-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persentase	8,38	8,48	8,58	8,68	8,78	8,88	8,98	
24	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	74	74	74,5	75	75,5	76,5	76,9	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	70	75	80	85	90	95	98	
2	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diordayakan	Persentase	70	75	80	85	90	95	96	
3	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	50	55	60	65	70	75	80	
4	Angka kematian ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	74,03	74,21	73,58	72,98	72,38	71,9	71,75	
5	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas scoring mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	60,63	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	98,59	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	81,31	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,5	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,16	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	67,34	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan perinatal	%	75,52	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	66,84	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan scoring kesehatan sesuai standar	%	66,74	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	61,09	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	72,41	100	100	100	100	100	100	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		60	65	70	75	80	85	90	
2	Persentase Cakupan Infrastruktur Pemukiman dalam Kondisi Baik	Persentase	0	0	10	20	30	40	50	
3	Persentase Peringatan Sampah yang Diakota di TPA/TPST Regional		0	0	10	20	30	40	50	
4	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Persentase	75	77,5	80	82,5	85	87,5	90	
5	Persentase Peringatan Kapasitas yang Terlayu melalui Penyulutan Air Minum Curih Liris Kabupaten/Kota	Persentase	60,63	70	72,5	75	77,5	80	82,5	
6	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	56,97	60	62,5	65	67,5	70	72,5	
7	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	0	0	10	20	30	40	50	
8	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	0	0	10	20	30	40	50	
9	Tingkat Keamanan Jalan Kabupaten/Kota	%	66,61	69	70	70,5	71	71,4	71,8	
10	Persentase Peringatan Rumah Tongga yang Memenuhi Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	47,01	48,3	49,5	50,8	52	54	56	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Piasasana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	38,2	38,73	50,99	63,24	75,48	87,73	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Pasaran, Serana dan Utilitas Umum (RSU)	Persentase	30	42,86	50	50	50	50	50	
3	Persentase Warga Negara yang Terbawa Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Perbaikan Rumah yang Layak Huni	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Lupa Kelelahan Kumuh 10-12 Ha yang Ditangani	Persentase	60,35	70,2	77,76	84,77	90,45	95,85	100	
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pencegahan Tumbuh Bekam langnya Permukiman Kumuh Yang Terbangun	%	19,03	39,05	58,59	76,41	93,1	97,15	100	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	70	75	80	85	90	95	100	
2	Persentase Perda dan Perhada yang ditagalkan	%	70	75	80	85	90	95	100	
3	Persentase gangguan Tradidum yang dapat diatasi	%	70	75	80	85	90	95	100	
4	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	64	60	2	2	4	2	2	
5	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	65	100	100	100	100	100	100	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Partisipasi Rehabilitasi Sosial	Persentase	0	0	50,75	60	60,5	70	70,5	
2	Persentase Korban Bencana Alam Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	80	80,25	80,5	80,75	90	90,25	90,5	
4	Persentase (%) anak terantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Partisipasi Rehabilitasi Sosial bagi Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya di luar HIKWAD dan KAPZA	Persentase	0	0	70	75	80	85	90	
6	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	50	52	55	60	65	70	75	
7	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolan dan penataan data yang makin	%	30	35	40	45	50	55	60	
8	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Staf/tenaga Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persentase	0	0	80	85	90	95	95	
9	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Angka	65	70	75	80	85	90	95	
10	Persentase SOM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	50	55	60	65	70	75	80	
11	Persentase (%) lanjut usia terantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradual dari kemiskinan	%	0	5	10	15	20	25		
14	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	10	20	30	35	40			
15	Persentase (%) penyandang disabilitas lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AD	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	30	45	45	60	65	80	85	
2	Persentase Tenaga Kerja yang Dempatkan di Dalam Negeri	Persentase	20	20	25	25	25	25	30	
3	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	600	700	750	800	800	800	900	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,49	4,26	4,09	3,8	3,75	3,6	3,5	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	85	85	85	85	85	85	85	
2	Tingkat Pemantauan Diri Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	85	85	95	95	95	95	95	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	85	95	95	95	95	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	85	85	85	85	85	85	85	
5	Pembelajaran Keluarga (Puslaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak, Sesuai	Indeks	85	90	90	90	90	90	90	
6	Indeks Pemanulan Hak Anak (IPHA)	Indeks	85	85	85	85	85	85	85	
AJ	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan)	%	110	100	100	100	100	100	100	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	0	0	50	50	50	50	50	
2	Persentase Tanah Kritis yang Dikelola	Persentase	0	0	50	50	50	50	50	
3	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Dipecahkan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Miskamun dan Tanah Absentee	Persentase	0	0	50	50	50	50	50	
4	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	0	0	50	50	50	50	50	
5	Persentase Tanah Ulayat yang Diletakkan	Persentase	0	0	50	50	50	50	50	
6	Persentase Terselenggaranya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dikelola melalui Mediasi	Persentase	0	0	50	50	50	50	50	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	71,87	71,96	72	72	72	72	72	
2	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tidak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Limbah B3 yang Terkontrol	Persentase	34,4	34,4	60,0	60,3	66,2	66,7	66,2	66,2	
5	Persentase RTH	Persentase	1,7	1,7	2,4	3,1	3,8	3,8	3,8	3,8	
6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	25	25	25	28	28	25	25	25	
7	Persentase MHA yang Dilengkapi Kapasitasnya	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Dilengkapi Kompetensinya	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	100	
9	Ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUJ LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	58	58	63	63	63	63	63	63	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL										
1	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	0	80	85	90	95	95	95	100	
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	0,11	5	15	25	30	40	50	50	
3	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	60,5	65	70	75	80	80	80	100	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	64,36	70	75	85	90	95	95	100	
6	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase Aka Perencanaan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	70	75	78	80	83	85	88	
2	Persentase Fasilitas Perataan Desa	Persentase	75	78	78	78	80	80	83	
3	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengambilan Kerja Sama Desa	Desa	100	110	120	130	160	170	180	
4	Jumlah Desa yang Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	150	160	170	175	180	190	190	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	86,1	86,3	86,4	86,5	86,7	86,8	87	
2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	12,7	12,6	12,6	12,6	12,6	12,5	12,5	
3	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	47,4	44,5	42,5	4,3	38,1	38,1	34,2	
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,7	12,4	12	11,8	11,3	11	10,7	
AD	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	18	38	60	85	79	91	100	
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,72	2,9	3,5	3,75	4	4,25	4,3	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Bantul	%	81	82	83	83	84	84	85	
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1.	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	40	50	50	70	80	95	100	
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	10	10	5	5	5	5	5	
2.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	90	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sosial Ketersuaian	Persentase	90	95	95	95	95	95	95	
4.	Persentase Penyelesaian Pemaksimalan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	95	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepedulian	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	50	55	60	65	70	75	80	
3.	Rasio Wawancara Pemuda	Persentase	50	52,5	57,5	60	62,5	67,5	70	
AT	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAAN									
1.	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AU	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Wawasan Budaya yang Dialestarkan	Persentase	20	30	35	40	45	50	55	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tujuan Sejarah Lokal	Persentase	0	20	30	40	50	60	70	
AV	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	2,81	5	10	15	20	25	30	
AW	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIFAN									
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	61,01	65	70	75	80	85	90	
AX	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah pelaku usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota di Wilayah Sungai, Darau, Weduk, Rawu, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Angka	-	-	5	5	5	5	5	
2	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang di Bina	Angka	-	-	30	30	30	30	30	
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.585	3.955	4.314	4.674	5.033	5.393	5.752	
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	304,89	300	325	350	450	550	650	
AY	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	45,13	45,2	46,14	46,5	50,13	55,2	60,17	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	65	70	75	80	85	85	90	
3	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	0	20	30	35	40	45	50	
5	Persentase Pertumbuhan Kurungan Wisatawan	Persentase	106,71	110,71	112,71	112,8	113,75	113,0	116,5	
6	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Terakreditasi	Persentase	0	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	
7	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Keahlian Intelektual	Persentase	0	15	20	25	30	35	40	
AZ	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Persentase Perenganan Rencana Pertanian		15	15	35	40	55	67	73	
2	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)		100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0	0	14.523	14.523	14.523	14.523	14.523	
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		7	7	7	15	20	25	30	
5	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	90	100	100	100	100	100	100	
6	Peningkatan luas lahan perkebunan	%	1,97	1,97	2	4	5	8	13	
7	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	90	90	90	90	90	95	95	
8	Persentase Perenganan Rencana Pertanian		0,52	0,54	0,76	0,91	1,06	1,21	1,26	
9	Peningkatan Produksi Kersodas Perkebunan	%	1,06	1,06	2	3,5	5	6,5	8	
10	Persentase Perenganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		0	0	30	30	40	45	50	
11	Peningkatan Produksi Hortikultura		5	5	5	10	15	20	25	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Peningkatan Produksi Komoditas Perumahan		7	7	7	15	20	25	30	
BA 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
1	Bauran Energi Terbarukan	(%)	0	0	0	0	0	0	0	
2	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
BB 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
1	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi Dilaksanakan	Persentase	0	0	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	
2	Nilai Ekspor Barang	Nilai	0	0	1	1	1	1	1	
3	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	
4	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	8	8	8	8	8	8	8	
5	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
BC 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri		0	0	5	5	5	5	5	
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diberikan		15	15	15	15	15	15	15	
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	52	20	20	20	20	20	20	
BD 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan		0	10	15	20	25	30	30	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkesuburg	Persentase	0	10	15	20	20	25	30	
BE 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		75	75	75	80	90	90	95	
BF 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		90	90	70	80	85	90	95	
BG 5.01 - PERENCANAAN										
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	90	95	95	96	97	98	99	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	94	95	96	97	98	99	99	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemasintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	75	75	75	75	75	75	75	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	90	95	95	96	97	98	99	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	94	95	96	97	98	99	99	
BH 5.02 - KEUANGAN										
1	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	45,12	45,12	75	80	85	90	95	
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	1,2	4,3	4,39	4,48	4,58	4,67	4,76	
3	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	38,34	40,28	50	50	30	30	30	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase PAD tertutup Penerimaan Daerah	Persentase	6,17	6,46	6,55	6,7	7,2	7,53	8,24	
6	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Utuhan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	92,5	93,5	94	95,5	96	96,3	96,5	
7	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	2,1	2,36	2,44	2,5	2,56	2,52	2,69	
8	Persentase Perencanaan SLPA	Persentase	3,79	2,15	1,23	1,61	2,04	2,53	3,1	
9	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	42,75	21,83	40	40	40	40	40	
BI	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	85	90	95	100	100	100	100	
2	Persentase ASN yang Dilengkapi Kompetensinya	Persentase	70	90	70	72	74	74	74	
3	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Format	Persentase	80	80	80	75	75	70	70	
BJ	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		70	150	75	75	75	75	75	
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		20	20	20	20	20	20	20	
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	60	61	62	63	64	65	70	
4	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	%	215	150	150	225	175	175	175	
BK	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Terafiliasi dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	1	1	1	2	2	2	2	
BL	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Meluruskan Saluran Pengendalian Intern Pemerintah (SRIP)	Nilai	3	3,2	3,4	3,6	3,8	3,8	3,8	
2	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	75,50	77,5	78	78	80	80	80	
3	Peningkatan aparat Pengawasan Intern pemerintahan (AIP)	Nilai	3	3,2	3,4	3,6	3,8	3,8	3,8	
BM	7.01 - KECAMATAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	77	79,1	80,5	82,1	83,6	84,5	85,1	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	77	79,1	80,5	82,1	83,6	84,5	85,1	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77	79,1	80,5	82,1	83,6	84,5	85,1	
4	Capaian Nilai SARIP Kecamatan	Angka	70	71	72	73	74	75	76	
5	Capaian Nilai SARIP Kecamatan	Angka	68	69	70	71	72	73	74	
6	Nilai Evaluasi SARIP Kecamatan	Angka	70	71	72	73	74	75	76	
7	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	95,75	99	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	86,07	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	94	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	%	85,22	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitas	%	88,03	88,1	88,15	88,25	88,3	88	90	
21	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Mulyawarah Desa dan Mulyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Lembaga	77,2	78,5	80,15	81,8	83	85	90	
22	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitas	%	85	70	73	80	83	85	90	
23	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terfasilitas	%	88,03	85	70	75	80	85	90	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase RW/Dusun Yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan	%	75	80	85	90	95	98	100	
26	Persentase RW/Dusun Yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan	%	88,00	88	90	95	98	99	100	
27	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Persentase Desa Yang dielenggarakan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	
30	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terealisasi	%	88,00	88,1	88,15	88,25	88,3	88	90	
31	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa Yang Terealisasi	%	88	87	90	93	95	97	99	
32	NILAI RATA RATA CAPAIAN OPNI BPK, NILAI SAMKIP LPPD INDEKS PELAYANAN PUBLIK	Angka	83	76,28	88,15	88,25	88,3	88	90	
BN	B.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase konflik sosial yang di selesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalehgunaan Narkoba, Fasilitas Kemurnan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
BO										
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	70,29	70,29	71,29	73,29	74,29	75,29	75,29	

4.4. Indikator Makro.

Indikator makro adalah data dan informasi statistik yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara luas. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan pendapatan per kapita. Indikator makro juga penting bagi investor dan pelaku pasar modal untuk mengambil keputusan investasi. Dalam pelaksanaannya indikator makro diselaraskan antara target indikator makro pembangunan daerah tahun 2025-2029 antara provinsi dan kabupaten kota sesuai arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029.

Agenda ini dilaksanakan oleh Bappeda provinsi Sulawesi Utara melalui Rapat Koordinasi penetapan dan penyelarasan target indikator makro pembangunan daerah tahun 2025-2029 provinsi dan kabupaten Kota di Sulawesi Utara. Berikut Indikator makro Yang diselaraskan, kemudian dituangkan kedalam berita acara kesepakatan.

Tabel 4.5.
Penyelarasan Indikator Makro Provinsi Sulut dan Kabupaten Bolaang Mongondow

	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
BOLAANG MONGONDOW	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,33	5,7 - 6,0	6,0 - 7,1	6,3- 6,7	6,7 – 7,1	6,9-7,5	7,6 - 8,00
SULAWESI UTARA		5,39	6,0-7,0	6,3-7,3	6,7-7,7	7,1-8,1	7,5-8,5	7,8-8,8
BOLAANG MONGONDOW	INDEKS GINI	0,317	0,315	0,311	0,307	0,304	0,3	0,28
SULAWESI UTARA			0,339-0,352	0,338-0,351	0,337-0,350	0,336-0,349	0,336-0,348	0,335-0,348
BOLAANG MONGONDOW	TINGKAT KEMISKINAN	7,74	7,0 - 6,6	6,8 – 6,4	6,5 – 6,1	6,0 - 5,6	5,5 - 5,1	5,0 - 4,6
SULAWESI UTARA		6,7	5,59-6,19	5,07-5,82	4,62-5,42	4,22-5,02	3,82-4,62	3,68-4,24
BOLAANG MONGONDOW	TINGKAT PENGAGGURAN TERBUKA	4,49	4,49 – 4,09	4,29 – 3,89	4,10 – 3,70	3,90 – 3,50	3,80 – 3,40	3,70 – 3,30
SULAWESI UTARA		5,85	4,86-5,53	4,86-5,53	4,71-5,50	4,56-5,47	4,41-5,44	4,26-5,41



	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
BOLAANG MONGONDOW	INDEKS MODAL MANUSIA	71,4	71,8	72,4	73,4	74	74,4	74,9
SULAWESI UTARA		0,52	0,53	0,535	0,54	0,55	0,56	
BOLAANG MONGONDOW	PDRB PERKAPITA	44,76	44,76	48,5	50,05	52,34	54,5	56
SULAWESI UTARA		70,87-71,30	70,90-71,43	87,67-92,52	104,46-113,73	121,25 – 134,94	138,04 – 156,15	
BOLAANG MONGONDOW	KONTRIBUSI PDRB	6,12	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
SULAWESI UTARA		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
BOLAANG MONGONDOW	PENURUNAN INTENSITAS GAS RUMAH KACA	14,66	14,66	15,95	17,2	18,5	21,34	21,34
SULAWESI UTARA		54,9	56,93	58,96	60,99	63,02	65,05	
BOLAANG MONGONDOW	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	74,21	74,21	74,22	74,23	74,24	74,25	74,25
SULAWESI UTARA		78,71	78,88	79,05	79,22	79,39	80,29	

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

5.1. Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2025-2029, maka dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas sampai dengan akhir periode RPJMD, serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan baru yang muncul pada pemerintahan Kepala Daerah yang baru. Untuk target tahun pertama masa pembangunan yang telah tercapai pada periode sebelumnya, maka TAPD perlu merumuskan kembali serta menetapkan besaran target baru yang akan dicapai pada masa transisi dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, dokumen RKPD masa transisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD periode selanjutnya

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi OPD dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-OPD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bappelitbangda selaku ketua tim penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 berwenang dan bertanggungjawab dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow dan berkoordinasi dengan tim penyusun, kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, masyarakat dan pemangku kepentingan agar berpartisipasi secara aktif memberi masukan, saran dan perbaikan pada setiap tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 yaitu mulai dari persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan RPJMD;

3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2025-2029 serta masa transisi tahun 2030;
4. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mongondow berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
5. Pemerintah Kabupaten Mongondow wajib menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Mongondow Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Bolaang Mongondow;
6. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mongondow Bolaang Mongondow wajib menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mongondow;
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mongondow wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis OPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
7. Dalam hal pelaksanaan RPJMD tersebut, apabila target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka perlu dirumuskan kembali besaran target kinerja baru dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
8. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. Kepala perangkat daerah melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing perangkat daerah;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow menghimpun, menganalisis dan menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi landasan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya

9. RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025- 2029 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terdapat perkembangan yang berpengaruh terhadap target, kebutuhan penganggaran dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan R-APBD setiap tahunnya;
 - b. Terdapat pertimbangan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gnagguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan perangkat daerah, dan perubahan kebijakan nasional; dan
 - d. Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah
10. Apabila terjadi perkembangan berbagai hal di luar kendali Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan di perkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah di tetapkan dapat di tinjau kembali dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta hasilnya di konsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dalam proses pelaksanaannya.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai salah satu kesatuan perencanaan pembangunan yang secara terpadu, sinergi dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional selama (lima) tahun mendatang.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YUSRA ALHASYRI